

RPJMD



Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014

RPJMD

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



Bappeda Kabupaten Bandung



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program bupati yang tertuang dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas pembangunan serta dilandasi dengan kebijakan keuangan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 282 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 8 ayat (1) huruf a – b Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi terhadap proses perumusan dan/atau substansi selama pelaksanaan RPJMD menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010;
- c. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu 2(dua) tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2010 – 2015 telah mengalami perkembangan sesuai dengan adanya regulasi pemerintah maupun tingkat pencapaian indikator makro yang melampaui dan/atau tidak terlampaui dari proyeksi yang telah ditetapkan setiap tahunnya, mempengaruhi substansi RPJMD yang ada terutama dalam hal kebijakan rencana pembangunan, indikator kinerja, capaian kinerja RPJMD, penetapan proyeksi indikator kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa

Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ditambah 1 ayat, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan;
 - (2) RPJM Daerah Tahun 2010-2015 berikut perubahannya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat perencanaan pembangunan tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 yang sudah berjalan, tahun 2014 sedang berjalan, dan tahun 2015 yang akan datang;
2. Ketentuan pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJM Daerah berikut perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian penting Peraturan Daerah ini;
 - (2) RPJM Daerah berikut perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, dan program SKPD sebagai bentuk penjabaran visi, misi dan program Bupati;
 - (3) RPJM Daerah beserta perubahannya merupakan penjabaran dan pedoman bagi penyusunan RKPDP setiap tahun;
 - (4) --tetap--
3. Ketentuan pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) --tetap--
 - (2) --tetap--
 - (3) Tata cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Diantara Pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A.

- (1) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, terdapat substansi RPJMD yang perlu dan/atau disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi;
- (2) Perkembangan yang terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1), sangat dipengaruhi oleh berbagai perubahan/penyesuaian regulasi dan basis data yang ditetapkan oleh pemerintah, serta pencapaian indikator makro yang melampaui target yang diproyeksikan;
- (3) Perubahan atau penyesuaian terhadap regulasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang turut mengatur perencanaan pembangunan di daerah meliputi :
 - a. Standar pelayanan minimal;
 - b. Percepatan tujuan pembangunan milenium; dan/atau
 - c. Adanya peningkatan kemampuan keuangan yang bersumber dari dana transfer;
- (4) Penyesuaian terhadap basis data yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain adalah program perlindungan sosial yang turut mempengaruhi terjadinya perubahan penghitungan proyeksi capaian kinerja setiap tahun rencana;
- (5) Penyesuaian terhadap pencapaian indikator makro pembangunan maupun sektoral sebagaimana dimaksud ayat (2), turut mempengaruhi dalam perubahan atau penyesuaian nomenklatur indikator kinerja, sasaran dan program beserta indikator kinerja serta kemudahan dalam pengukuran keberhasilan.
- (6) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5), maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

5.

Bab IV dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal, 20 Januari 2014



Diundangkan di Soreang
pada tanggal, 20 Januari 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (06/2014)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJMD.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-10
1.5.1 Maksud	I-10
1.5.2 Tujuan	I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis.....	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-9
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-15
2.1.4. Demografis.....	II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-25
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-32
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-34
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-37
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-37
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-96
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-105
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-105
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-106
2.4.3 Iklim Berinvestasi.....	II-111
2.4.4 Sumber Daya Manusia	II-119

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Daerah.....	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2. Neraca Daerah	III-7
3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-12
3.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-14
3.1.5. Analisis Pembiayaan.....	III-15

3.2	Kerangka Pendanaan Tahun 2008-2012	III-18
3.2.1.	Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama	III-18
3.2.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	III-20

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1	Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.2	Urusan Kesehatan.....	IV-2
4.1.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV-2
4.1.4	Urusan Perumahan	IV-3
4.1.5	Urusan Penataan Ruang.....	IV-3
4.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-3
4.1.7	Urusan Perhubungan	IV-3
4.1.8	Urusan Lingkungan Hidup	IV-4
4.1.9	Urusan Pertanahan	IV-4
4.1.10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	IV-4
4.1.11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV-4
4.1.12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-4
4.1.13	Urusan Sosial.....	IV-4
4.1.14	Urusan Ketenagakerjaan	IV-5
4.1.15	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	IV-5
4.1.16	Urusan Penanaman Modal	IV-5
4.1.17	Urusan Kebudayaan.....	IV-6
4.1.18	Urusan Pemuda dan Olahraga.....	IV-6
4.1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.....	IV-6
4.1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..	IV-6
4.1.21	Urusan Ketahanan Pangan.....	IV-7
4.1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	IV-8
4.1.23	Urusan Statistik	IV-8
4.1.24	Urusan Kearsipan	IV-8
4.1.25	Urusan Komunikasi dan Indormatika.....	IV-8
4.1.26	Urusan Perpustakaan.....	IV-9
4.1.27	Urusan Pertanian	IV-9
4.1.28	Urusan Kehutanan.....	IV-9
4.1.29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	IV-9
4.1.30	Urusan Pariwisata	IV-9
4.1.31	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV-9

4.1.32	Urusan Perdagangan	IV-10
4.1.33	Urusan Perindustrian	IV-10
4.1.34	Urusan Ketransmigrasian	IV-10
4.2	Isu Strategis	IV-10

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-8

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A.	Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi	VII-1
B.	Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda	VII-7
C.	Misi 3 : Menetapkan Pembangunan Perdesaan	VII-17
D.	Misi 4 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	VII-20
E.	Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang Wilayah	VII-21
F.	Misi 6 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing	VII-25
G.	Misi 7 : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan	VII-31

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN

8.1	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.....	VIII-1
8.2	Rencana Program Urusan Setiap SKPD	VIII-2

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2012.....	II-1
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Bandung Tahun 2011....	II-8
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Eksisting Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2011	II-9
Tabel 2.4	Sebaran Komoditi Produk Tanaman Pangan Per Kecamatan Tahun 2012	II-10
Tabel 2.5	Kawasan/Sentra Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung.....	II-12
Tabel 2.6	Kawasan/Sentra Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung.....	II-13
Tabel 2.7	Sebaran Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2012.....	II-17
Tabel 2.8	Mobilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011.....	II-20
Tabel 2.9	Mortalitas dan Vertilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011	II-21
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia Tahun 2011	II-22
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2011	II-22
Tabel 2.12	Capaian Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-24
Tabel 2.13	Capaian Angka Kematian Bayi Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-24
Tabel 2.14	Capaian Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-25
Tabel 2.15	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung	II-27
Tabel 2.16	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung	II-28
Tabel 2.17	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bandung.....	II-29
Tabel 2.18	Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung per Tahun 2008-2012	II-30
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-31
Tabel 2.20	Pendapatan Perkapita Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-31

Tabel 2.21	Indikator Makro Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-32
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Bandung	II-33
Tabel 2.23	Angka Melek Hurup tahun 2008 s/d 2012	II-33
Tabel 2.24	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-34
Tabel 2.25	Perkembangan Seni, budaya dan olah raga Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012	II-35
Tabel 2.26	Jumlah Atlit Berprestasi Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012....	II-35
Tabel 2.27	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan yang di Lestarikan Kabupaten Bandung 2008-2012	II-37
Tabel 2.28	Jumlah Keragaman Budaya yang dilestariakan Kabupaten Bandung 2008-2012	II-37
Tabel 2.29	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-38
Tabel 2.30	Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten BandungTahun 2008- 2012	II-39
Tabel 2.31	Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-40
Tabel 2.32	Rasio Guru Per Kelas Rata-rata Terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-40
Tabel 2.33	Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-42
Tabel 2.34	Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-42
Tabel 2.35	Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2012	II-43
Tabel 2.36	Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-43
Tabel 2.37	Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-44
Tabel 2.38	Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-45
Tabel 2.39	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-46
Tabel 2.40	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-47
Tabel 2.41	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-48

Tabel 2.42	Jumlah Dokter di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-48
Tabel 2.43	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-49
Tabel 2.44	Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-49
Tabel 2.45	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-50
Tabel 2.46	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d. 2012	II-51
Tabel 2.47	Proporsi Jumlah Jembatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d. 2012	II-51
Tabel 2.48	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-52
Tabel 2.49	Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Bandung	II-54
Tabel 2.50	Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2012	II-54
Tabel 2.51	Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-55
Tabel 2.52	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.....	II-56
Tabel 2.53	Daya Tampung Pemakaman di Kabupaten Bandung Tahun 2009-2012	II-57
Tabel 2.54	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-58
Tabel 2.55	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-59
Tabel 2.56	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-60
Tabel 2.57	Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-61
Tabel 2.58	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-62
Tabel 2.59	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalulintas di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-63
Tabel 2.60	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-63
Tabel 2.61	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-64
Tabel 2.62	Rasio Pencemaran Status Mutu Air Pada Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-65

Tabel 2.63	Presentase Penaatan Ketentuan Teknis dan Administrasi Usaha/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	II-66
Tabel 2.64	Pengujian Air dan Udara	II-67
Tabel 2.65	Prosentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (% PI-SKT)	II-68
Tabel 2.66	Perolehan Nilai Program Adipura Tahun 2006-2010.....	II-71
Tabel 2.67	Persentase Volume Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-72
Tabel 2.68	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung	II-72
Tabel 2.69	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bandung Tahun 2012.....	II-73
Tabel 2.70	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012	II-73
Tabel 2.71	Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2011(Jiwa)	II-74
Tabel 2.72	Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-75
Tabel 2.73	Rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-75
Tabel 2.74	Persentase PMKS yang tertangani terhadap total PMKS di Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2012	II-76
Tabel 2.75	Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Bandung Tahun 2012	II-76
Tabel 2.76	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-77
Tabel 2.77	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Bandung Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2008 s.d. 2012	II-78
Tabel 2.78	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012.....	II-79
Tabel 2.79	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-80
Tabel 2.80	Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-80
Tabel 2.81	Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-81
Tabel 2.82	Jumlah Omzet Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-81
Tabel 2.83	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.....	II-82

Tabel 2.84	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-82
Tabel 2.85	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-83
Tabel 2.86	Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bandung Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2012	II-84
Tabel 2.87	Rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-84
Tabel 2.88	Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-85
Tabel 2.89	Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-85
Tabel 2.90	Persentase Rumah Tangga (RT) Miskindi Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-86
Tabel 2.91	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-87
Tabel 2.92	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-87
Tabel 2.93	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-88
Tabel 2.94	Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-89
Tabel 2.95	Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-89
Tabel 2.96	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-90
Tabel 2.97	Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012 ...	II-91
Tabel 2.98	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-91
Tabel 2.99	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d.2010 dan 2011	II-92
Tabel 2.100	Pengelola Arsip Terpadu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-92
Tabel 2.101	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi Dan Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-93
Tabel 2.102	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-94
Tabel 2.103	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-95

Tabel 2.104	Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-95
Tabel 2.105	Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008s.d. 2012.....	II-96
Tabel 2.106	Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010.....	II-97
Tabel 2.107	Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-98
Tabel 2.108	Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-99
Tabel 2.109	Jenis-jenis Potensi Energi Non Fosil Tahun 2008-2012	II-100
Tabel 2.110	Rasio Elektrifikasi Tahun 2008-2012	II-100
Tabel 2.111	Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bandung.....	II-100
Tabel 2.112	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-102
Tabel 2.113	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bandung.....	II-103
Tabel 2.114	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-103
Tabel 2.115	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010.....	II-104
Tabel 2.116	Transmigrasi menurut JenisKabupaten Bandung Tahun 2012	II-104
Tabel 2.117	Angka Konsumsi Rata-rata RT per Kapita Sebulan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012 (Rupiah).....	II-105
Tabel 2.118	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2011	II-106
Tabel 2.119	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Bandung Tahun 2011	II-108
Tabel 2.120	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-108
Tabel 2.121	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-109
Tabel 2.122	Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-110
Tabel 2.123	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Bandung	II-110
Tabel 2.124	Angka Kriminalitas di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012.....	II-111
Tabel 2.125	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2012.....	II-112

Tabel 2.126	Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012	II-112
Tabel 2.127	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Bandung	II-113
Tabel 2.128	Ketersediaan Perda di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.....	II-113
Tabel 2.129	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012	II-119
Tabel 2.130	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012.....	II-123
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 s/d Tahun 2012 Kabupaten Bandung	III-5
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	III-8
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2008-2012.....	III-9
Tabel 3.4	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2008-2012Kabupaten Bandung ...	III-10
Tabel 3.5	Proporasi Belanja Daerah.....	III-14
Tabel 3.6.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-15
Tabel 3.7	Defisit Riil AnggaranKabupaten Bandung	III-16
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil AnggaranKabupaten Bandung.....	III-16
Tabel 3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	III-17
Tabel 3.10	Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2008 s/d Tahun 2012.....	III-19
Tabel 3.11	Proyeksi Pendapatan Daerah	III-26
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III-27
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-28
Tabel 4.1	Keterkaitan Hubungan Isu Strategis	IV-12
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten BandungTahun 2010-2015.....	V-2
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten BandungTahun 2010-2015.....	V-9
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Misi	V-10

Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015	VI-2
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	VII-1
Tabel 7.2	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.....	VII-7
Tabel 7.3	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	VII-17
Tabel 7.4	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	VII-20
Tabel 7.5	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	VII-22
Tabel 7.6	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	VII-26
Tabel 7.7	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	VII-31
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, Berdasarkan Misi.....	VIII-3
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2011 – 2015	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase Pembagian Luas Wilayah Kabupaten Bandung.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bandung.....	II-3
Gambar 2.3	Peta Curah Hujan.....	II-6
Gambar 2.4	Peta Penggunaan Lahan.....	II-7
Gambar 2.5	Persentase Penggunaan Lahan Eksisting Di Kabupaten Bandung Tahun 2011.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Kerawanan Bencana Kabupaten.....	II-16
Gambar 2.7	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung.....	II-19
Gambar 2.8	Mobilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011.....	II-20
Gambar 2.9	Mortalitas dan Fertilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011.....	II-21
Gambar 2.10	Grafik AHH dan AKB Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012	II-24
Gambar 2.11	Grafik Capaian PDRB Berdasarkan Harga Konstan.....	II-26
Gambar 2.12	Grafik Capaian PDRB Berdasarkan Harga Konstan.....	II-26
Gambar 2.13	Grafik Laju Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.....	II-30
Gambar 2.14	Diagram Luas Penambangan Tanpa Izin dengan Luas Penertiban.....	II-101
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012.....	III-2
Gambar 3.2	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012.....	III-3
Gambar 3.3	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2012.....	III-3
Gambar 3.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.....	III-4



1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan zaman untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, agar menyelaraskan pula pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan efektifitas dan

efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, agar Pemerintah Kabupaten Bandung dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan global. RPJMD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).

Dalam pelaksanaannya, hasil rencana pembangunan tahunan (RKPD) yang tidak sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, baik yang melampaui maupun yang tidak melampaui target dapat dilakukan perubahan. Hal ini termaktub dalam pasal 282 ayat 1 huruf (a-b) Permendagri nomor 54 tahun 2010, bahwa RPJMD dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan RPJMD dan substansi yang terkandung dalam RPJMD tidak sesuai ketentuan Permendagri. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat sasaran dan indikator Kinerja yang telah ditetapkan masih terjadi perbedaan, dalam rencana tahunannya. Hal ini mengakibatkan pengukuran capaian kinerja menjadi sulit dilakukan.

RPJMD sebagai satu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian, serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dengan demikian RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang *good governance* dan *clean government*.

1.2 Dasar Hukum Perubahan RPJMD

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 maupun perubahannya, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat 6

c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takniliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015
38. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang partisipasi dan keterbukaan informasi publik.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 disusun berdasarkan capaian hasil pembangunan tahun 2006-2010 dan rencana capaian Program tahun 2011-2015. Keterkaitan hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Bandung

dengan dokumen perencanaan lainnya, diamanatkan oleh Permendagri No 54 Tahun 2010, pasal 54 ayat 2 bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten / kota disusun dengan memuat tentang visi, misi dan program bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih; berpedoman kepada RPJPD kabupaten/kota dan, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

RPJMD Kabupaten Bandung sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan melalui peraturan presiden dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Jawa Barat serta rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dengan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang --pembangunan sesuai kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Sedangkan memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain disekitarnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 maupun perubahannya, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang penyusunan RPJM, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,

dan aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik melalui gambaran Kinerja Keuangan serta Kebijakan Pengelolaan Keuangan maupun Kerangka Pendanaan di masa lalu.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat deskripsi mengenai analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bagian ini menggambarkan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah di setiap Bidang Pembangunan daerah baik secara internal maupun eksternal. Analisis profil daerah diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan di setiap Bidang Pembangunan daerah sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Bidang Pembangunan daerah.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memberikan memberikan gambaran kejelasan arah, fokus, dan perspektif visi dan misi Pembangunan Daerah dan kemudahannya untuk diterjemahkan ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah. Disini dapat dilihat sejauh mana visi dan misi yang ada memenuhi kaidah-kaidah perumusan visi, misi dan sasaran yang akan dituju.

- Sistematis daftar isi dokumen rencana yang runtun mengikuti proses dan alur pemikiran strategis
- Rumusan visi Daerah yang SMART (*specific, measurable, achievable, reliable, timebound*)
- Rumusan dan rincian misi pembangunan daerah yang cukup jelas dan terarah
- Rumusan agenda program pembangunan yang jelas dan terarah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan, dapat menggambarkan dan menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Di samping itu, disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada Bab ini dijelaskan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Pada bab ini memuat tentang Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional, arahkan kebijakan provinsi dan rencana

pembangunan jangka panjang daerah yang seterusnya menjadi pedoman di dalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan di atas, Perubahan RPJMD ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 adalah:

1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pememerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.



2.1 Aspek Geografis dan Demografis

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, dan luas wilayah berdasarkan batas administrasi pemerintah Kabupaten Bandung.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

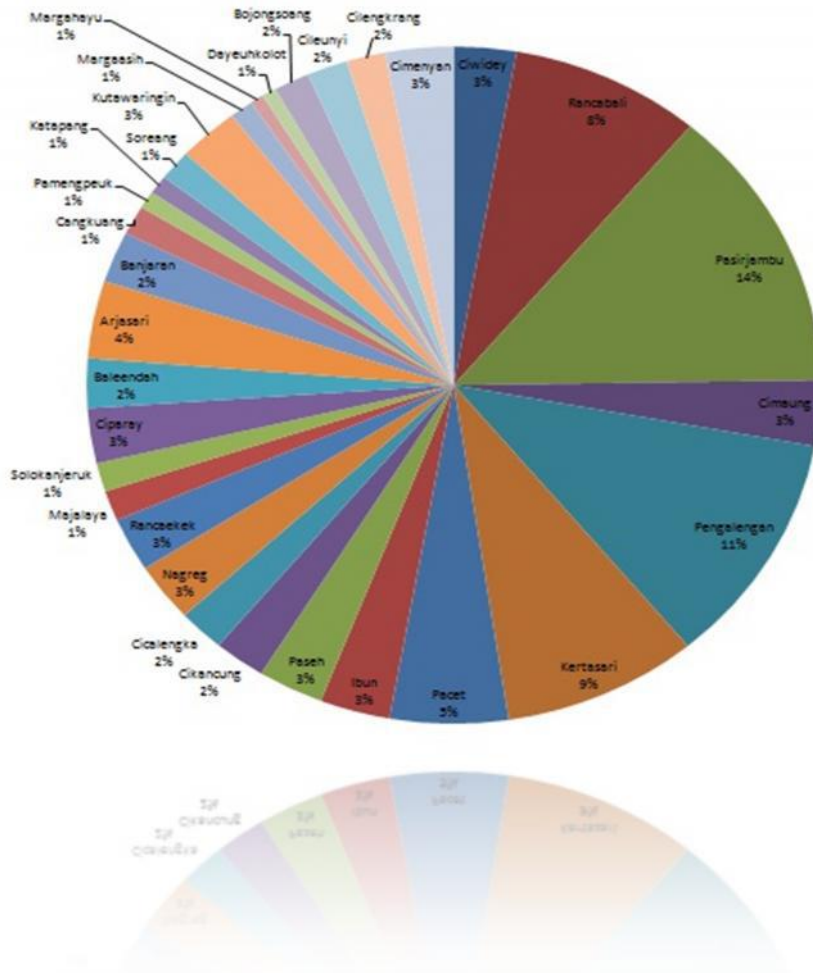
Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 Ha. Hingga tahun 2012, secara administratif Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 desa (sebelumnya 267 desa) dan 10 kelurahan (sebelumnya 9 kelurahan). Luas wilayah terbesar berada pada Kecamatan Pasirjambu dengan luas sebesar 23.957,64 Ha, sedangkan luas wilayah tersempit atau paling kecil adalah kecamatan Margahayu dengan luas sebesar 1.054,33 Ha Adapun untuk lebih jelas mengenai luas wilayah pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Ciwidey	4.846,92	17	Baleendah	4.155,54
2	Rancabali	14.837,00	18	Arjasari	6.497,79
3	Pasirjambu	23.957,64	19	Banjaran	4.291,79
4	Cimaung	5.500,02	20	Cangkuang	2.461,06
5	Pengalengan	19.540,93	21	Pamengpeuk	1.462,32
6	Kertasari	15.207,36	22	Katapang	1.572,46
7	Pacet	9.193,96	23	Soreang	2.550,68
8	Ibun	5.456,51	24	Kutawaringin	4.730,26
9	Paseh	5.102,90	25	Margaasih	1.834,49
10	Cikancung	4.013,63	26	Margahayu	1.054,33
11	Cicalengka	3.599,23	27	Dayeuhkolot	1.102,91
12	Nagreg	4.930,29	28	Bojongsoang	2.781,22
13	Rancaekek	4.524,83	29	Cileunyi	3.157,51
14	Majalaya	2.536,46	30	Cilengkrang	3.011,94
15	Solokanjeruk	2.400,66	31	Cimenyang	5.308,33
16	Ciparay	4.617,57	TOTAL		176.238,67

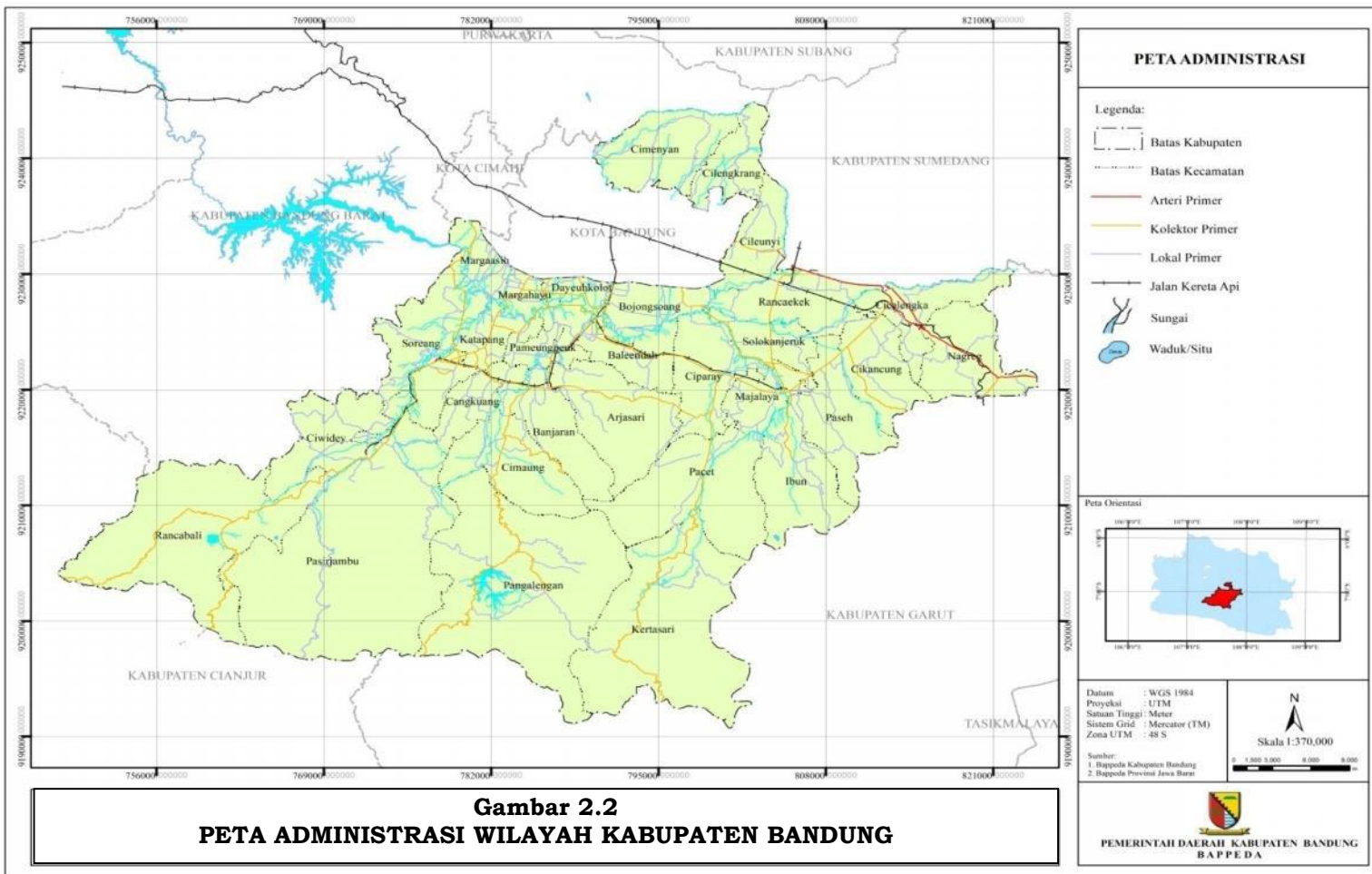
Sumber : BPS, Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012

Gambar 2.1
Persentase Pembagian Luas Wilayah Kabupaten Bandung



Dari gambar 2.1 Pembagian administrasi dan luas wilayah Kabupaten Bandung dapat terlihat bahwa Kabupaten Bandung yang terbagi ke dalam 31 Kecamatan memiliki proporsi luas wilayah yang berbeda dimana Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Pasir Jambu yakni memiliki luas wilayah 14% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung



**Gambar 2.2
 PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG**

Secara administratif, Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 Kecamatan memiliki batas wilayah sebagai Berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi
- e. Bagian Tengah : Kota Bandung dan Kota Cimahi

2. Letak Geografis

Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi, secara geografis letaknya berada pada 6°49' – 7°18' Lintang Selatan dan diantara 107°14' – 107°56' Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah:

- a) Sebelah utara : Gunung Bukittunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban parahu dengan tinggi 2.076 m (wilayah Kabupaten Bandung Barat) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta.
- b) Sebelah selatan : Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

3. Hidrologi

Dampak dari kondisi geografis Kabupaten Bandung membuat potensi hidrologi Kabupaten Bandung berupa sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.

Salahsatu potensi air permukaan yang cukup besar terdapat pada sungai Citarum yang merupakan sungai utama di wilayah kabupaten Bandung. Ketersediaan air sungai Citarum memiliki debit rata-rata 174 m³/detik sepanjang tahun. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengembangkan sektor pertanian, sektor industri dan sektor-sektor lain yang membutuhkan ketersediaan air. Keberadaan sungai Citarum telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Bandung, serta telah dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan masyarakat diantaranya sebagai sumber air, pengairan, transportasi dan lain-lain.

4. Klimatologi

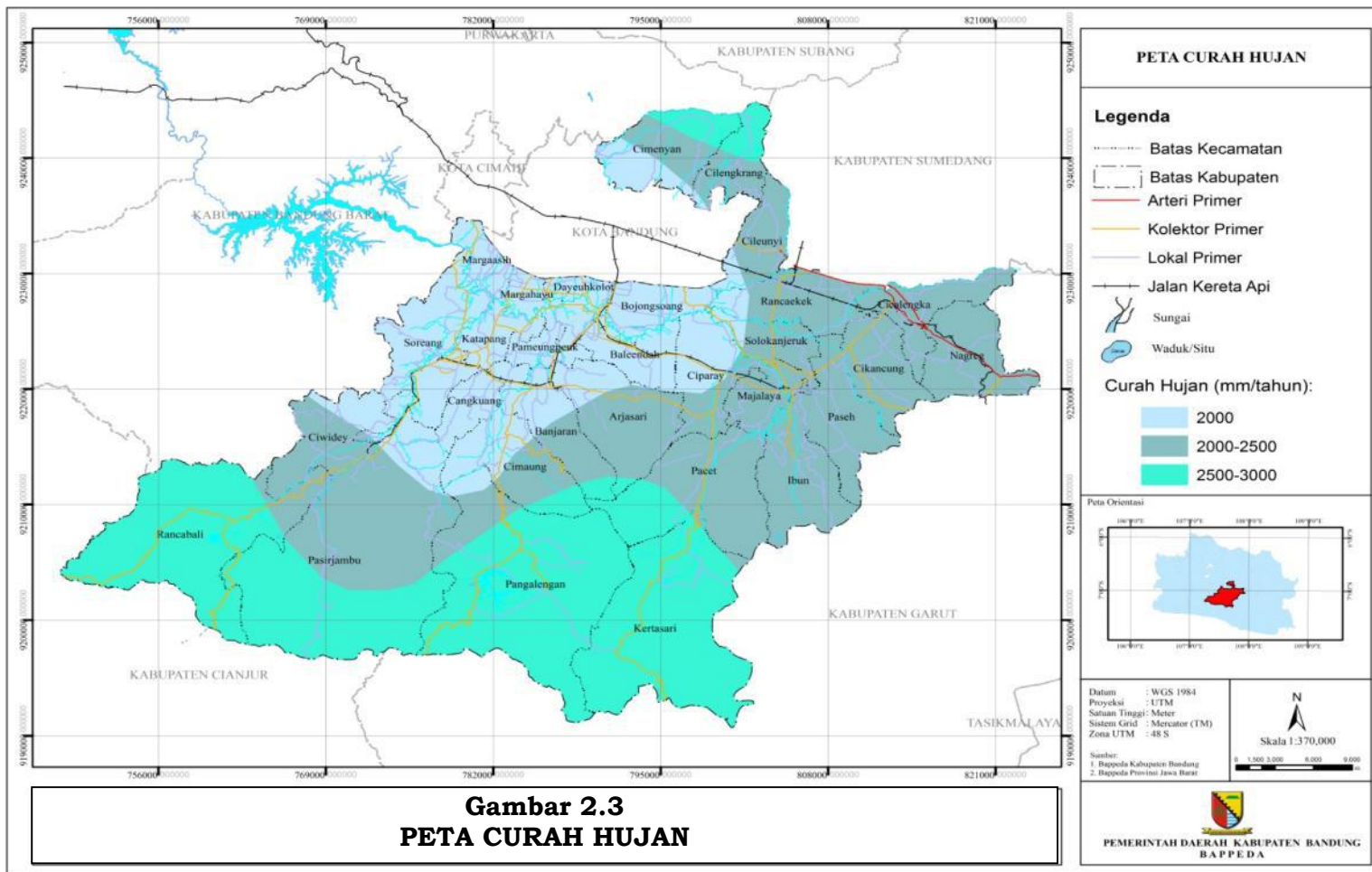
Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun.

Kondisi curah hujan rata-rata di Kabupaten Bandung jika dihitung luas lahan yang ada maka potensi volume air yang turun di wilayah Kabupaten Bandung dapat mencapai 2,643 – 7,05 milyar meter kubik per tahun. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di berbagai wilayah.

Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

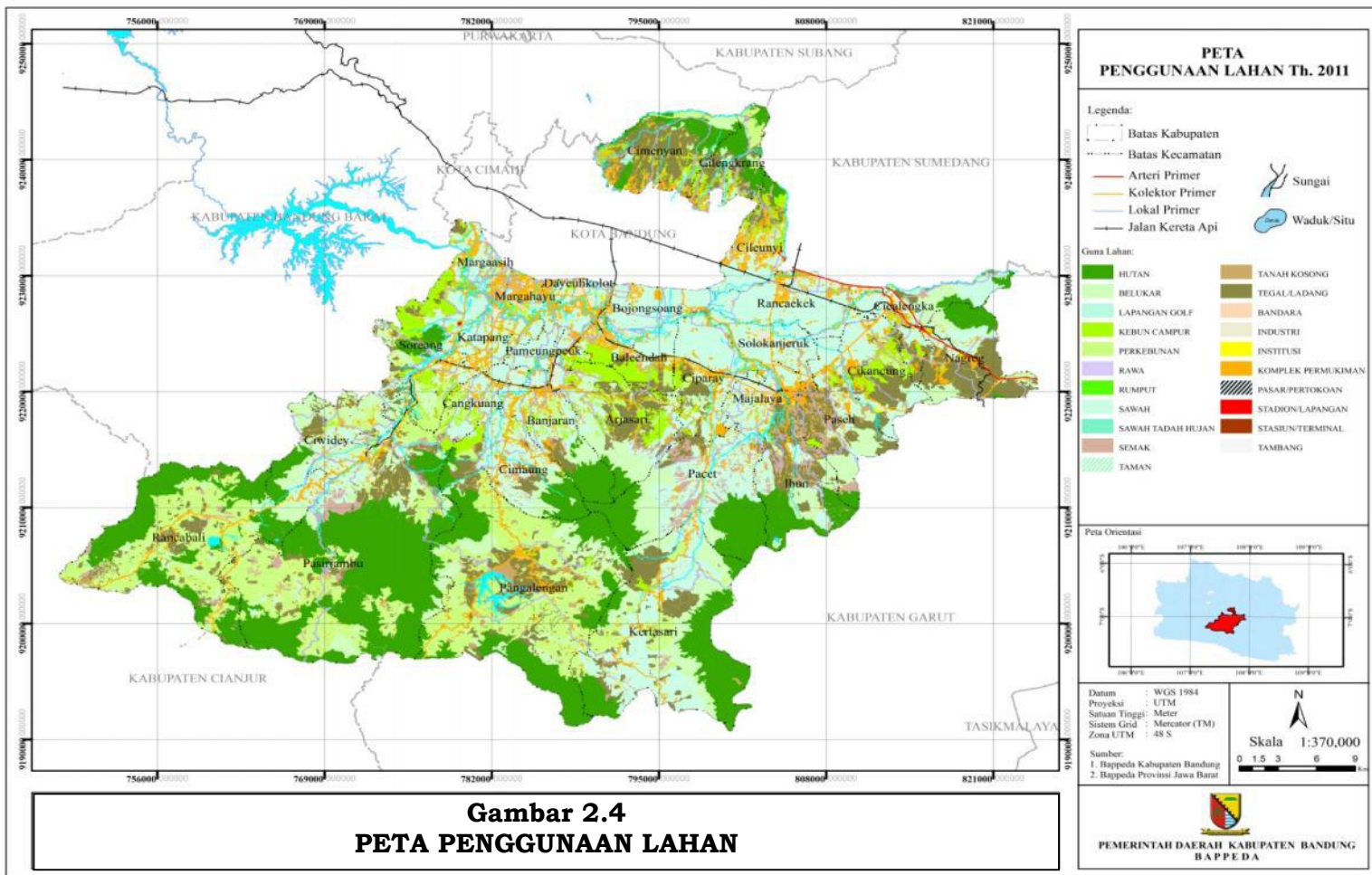
5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian, Non Pertanian dan Lainnya. Penggunaan lahan di kawasan lindung meliputi Belukar, Danau/Waduk, Hutan, Rawa, Semak dan Sungai. Sedangkan kawasan Budidaya Pertanian meliputi kebun campur, perkebunan, sawah, ladang dan tegal. Besaran penggunaan lahan setiap lahan di sajikan dalam gambar berikut ini:



**Gambar 2.3
 PETA CURAH HUJAN**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

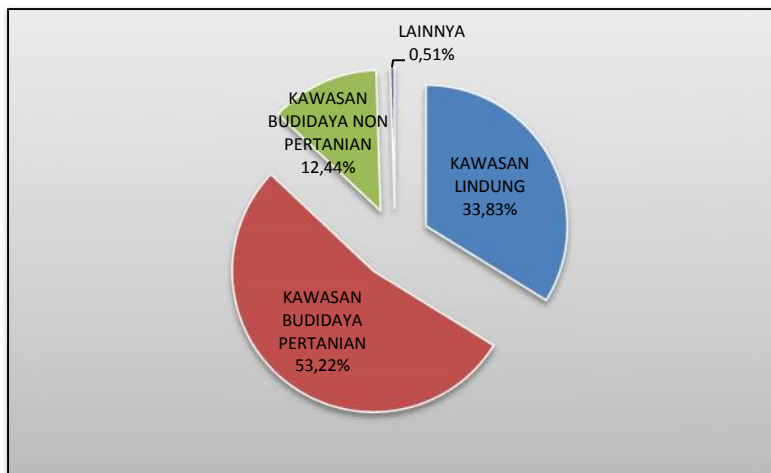


Tabel 2.2
Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Bandung Tahun 2011

NO	URAIAN PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	(%)
A	KAWASAN LINDUNG	59.620,61	3,83
1	BELUKAR	17.694,40	10,04
2	DANAU/WADUK	357,38	0,20
3	HUTAN	37.291,00	21,16
4	RAWA	12,74	0,01
5	SEMAK	3.821,57	2,17
6	SUNGAI	443,51	0,25
B	KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN	93.797,73	53,22
1	KEBUN CAMPUR	8.170,97	4,64
2	PERKEBUNAN/KEBUN	25.709,88	14,59
3	SAWAH	37.851,73	21,48
4	SAWAH TADAH HUJAN	10,96	0,01
5	TEGAL/LADANG	22.054,19	12,51
C	KAWASAN BUDIDAYA NON PERTANIAN	21.928,32	12,44
1	BANDARA/JALAN/JALAN KA/STASIUN/TERMINAL	3.664,72	2,08
2	INDUSTRI/TAMBANG	1.446,32	0,82
3	INSTITUSI/KANTOR	339,62	0,19
4	LAPANGAN GOLF/STADION/LAPANGAN/TAMAN	167,50	0,10
5	PERUMAHAN/KOMPLEK PERMUKIMAN /PASAR/PERTOKOAN	16.310,17	9,25
D	LAINNYA	892,00	0,51
	TOTAL	176.238,67	100,00

Sumber : Hasil Olahan Citra Satelit Tahun 2011, Bappeda

Gambar 2.5.
PERSENTASE PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011



Secara proporsi penggunaan lahan di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh kawasan budidaya pertanian 53,22%, kawasan lindung 33,83%, kawasan budidaya non pertanian 12,44% dan lainnya 0,51%. Kondisi ini menunjukkan

bahwa sebagian besar wilayah kabupaten Bandung masih merupakan kawasan ruang terbuka, sehingga berpotensi untuk menyerap air larian (*run off*) dari curah hujan yang mencapai 1.500 – 4.000 mm per tahun. Dari luas lahan terbuka yang ada baik di kawasan lindung, maupun kawasan budidaya semestinya dapat diserapkan ke dalam tanah sebesar 0,793 – 2,115 milyar meter kubik per tahun. Penggunaan lahan eksisting menurut kecamatan tahun 2011, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Eksisting Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung
Tahun 2011

NO	KECAMATAN	LINDUNG	BUDIDAYA PERTANIAN	BUDIDAYA NON PERTANIAN	LAINNYA	JUMLAH	%
1	Ciwidey	2.352,55	1.953,96	539,61	0,80	4.846,92	2,75
2	Rancabali	6.926,09	7.117,07	789,01	4,83	14.837,00	8,42
3	Pasirjambu	14.377,17	8.506,67	1.044,34	29,47	23.957,64	13,59
4	Cimaung	1.968,00	2.926,47	604,49	1,07	5.500,02	3,12
5	Pangalengan	7.381,45	10.393,80	1.413,68	352,00	19.540,93	11,09
6	Kertasari	6.802,06	7.661,73	709,01	34,56	15.207,36	8,63
7	Pacet	5.123,47	3.569,45	493,41	7,64	9.193,96	5,22
8	Ibun	2.927,02	2.068,31	449,81	11,38	5.456,51	3,10
9	Paseh	1.613,15	2.705,66	718,54	65,56	5.102,90	2,90
10	Cikancung	135,34	3.204,51	662,74	11,04	4.013,63	2,28
11	Cicalengka	848,08	2.210,40	537,09	3,67	3.599,23	2,04
12	Nagreg	1.220,21	3.111,44	594,76	3,88	4.930,29	2,80
13	Rancaekek	37,28	3.517,98	952,66	16,92	4.524,83	2,57
14	Majalaya	16,44	1.604,59	914,49	0,94	2.536,46	1,44
15	Solokanjeruk	49,79	1.854,67	495,78	0,42	2.400,66	1,36
16	Ciparay	228,30	3.522,35	865,38	1,54	4.617,57	2,62
17	Baleendah	105,64	2.833,98	1.156,05	59,87	4.155,54	2,36
18	Arjasari	1.732,63	3.987,11	733,86	44,20	6.497,79	3,69
19	Banjaran	1.459,04	2.047,21	771,98	13,57	4.291,79	2,44
20	Cangkuang	81,33	2.004,26	365,23	10,25	2.461,06	1,40
21	Pameungpeuk	16,64	1.079,65	364,97	1,07	1.462,32	0,83
22	Katapang	24,69	1.040,07	500,94	6,77	1.572,46	0,89
24	Kutawaringin	1.058,61	3.047,78	590,08	33,78	4.730,26	2,68
25	Margaasih	32,54	1.036,06	736,57	29,32	1.834,49	1,04
26	Margahayu	39,07	219,15	744,25	51,87	1.054,33	0,60
27	Dayeuhkolot	42,70	341,89	715,68	2,64	1.102,91	0,63
28	Bojongsong	64,41	2.179,65	535,38	1,79	2.781,22	1,58
29	Cileunyi	227,15	1.908,28	1.014,52	7,55	3.157,51	1,79
30	Cilengkrang	1.007,43	1.591,85	397,92	14,75	3.011,94	1,71
31	Soreang	325,08	1.616,91	596,64	12,06	2.550,68	1,45
31	Cimencyan	1.397,27	2.934,82	919,44	56,80	5.308,33	3,01
	Total	59.620,61	93.797,73	21.928,32	892,00	176.238,67	100,00

Sumber : Hasil Olahan Citra Satelit Tahun 2011, Bappeda

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Bandung memiliki banyak komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

Diantara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak

hanya di tingkat kabupaten tetapi sampai ke tingkat propinsi dan nasional. Komoditi-komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung. Khususnya komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditinya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya berada di Kabupaten Bandung, dan juga dapat dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi yang sama yang dihasilkan daerah lain.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung diantaranya dari sektor pertanian yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya industri peralatan pertanian dan industri kerajinan wayang golek. Komoditi-komoditi tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat propinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional.

1. Pertanian

Pertanian telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan pada besarnya potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Sektor Pertanian sebagai salahsatu *core bussiness* dan *leading sector* di samping industri manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi.

Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Bandung dan JABODETABEK dengan penduduk berdaya beli cukup baik, sehingga sangat berpeluang untuk memposisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Luas tanam padi yang mencapai 78.791 ha tahun 2012, telah menghasilkan produksi padi sebanyak 504.385 ton dengan produktivitas rata-rata per ha sebesar 6,39 ton. Sementara produk tanaman pangan lainnya seperti ubi kayu, ubi jalar dan jagung memberikan kontribusi yang cukup besar.

Tabel 2.4
Sebaran Komoditi Produk Tanaman Pangan PerKecamatanTahun 2012

No	Kecamatan	Komoditi Tanaman Pangan				
		Padi		Palawija		
		Padi Sawah	Padi Gogo	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Ciwidey	18.826	81	276	2.590	1.914
2	Rancabali	5.521	762	395	2.149	1.540
3	Pasirjambu	19.696	462	96	587	462
4	Cimaung	19.269	621	290	819	583
5	Pangalengan	5.753	94	502	1.338	469
6	Kertasari	2.070	187	289	1.015	661
7	Pacet	20.437	919	354	1.833	1.788
8	Ibun	15.546	86	250	1.620	1.132
9	Paseh	30.480	929	397	3.055	625
10	Cikancung	10.571	3.954	1.574	21.057	865
11	Cicalengka	14.796	1.229	1.180	6.568	2.226
12	Nagreg	8.270	3.678	2.001	27.784	815
13	Rancaek	26.527	-	7	135	101

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Komoditi Tanaman Pangan				
		Padi		Palawija		
		Padi Sawah	Padi Gogo	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
14	Majalaya	22.344	-	23	176	286
15	Solokanjeruk	20.514	-	15	233	43
16	Ciparay	42.825	248	415	1.749	130
17	Baleendah	17.596	561	212	7.524	1.835
18	Arjasari	21.985	4.265	1.357	11.659	4.292
19	Banjaran	19.501	507	329	2.656	4.066
20	Cangkuang	24.605	820	273	2.990	73
21	Pameungpeuk	14.010	-	30	282	-
22	Katapang	11.042	-	30	213	28
23	Soreang	19.852	365	375	1.944	-
24	Kutawaringin	22.549	1.628	-	-	-
25	Margaasih	8.388	117	170	684	176
26	Margahayu	826	-	25	384	219
27	Dayeuhkolot	1.870	-	-	96	-
28	Bojongsoang	14.281	329	109	574	115
29	Cileunyi	13.388	50	704	4.827	331
30	Cilengkrang	4.313	263	153	1.952	247
31	Ciminyan	4.226	353	1.270	11.284	1.020
	Total	481.877	22.508	13.101	119.778	26.044

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, tahun 2012

Produksi padi yang mencapai 504.385 ton, masih mampu memberikan kontribusi penyediaan pangan bagi wilayah lain di Jawa Barat dan sekitar Jabodetabek.

2. Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan potensi perikanan, pengembangan sektor ini diarahkan di Kecamatan Ibum, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang. Sementara untuk pengembangan dan intensifikasi perikanan, difokuskan di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Arjasari, Cikancung, Ibum, Pacet, Paseh dan Cimaung. Untuk produksi ikan pada kondisi kolam air deras (sungai dll) di fokuskan di kecamatan Soreang, Majalaya, Cimaung, dan Ibum.

Tabel 2.5
Kawasan/Sentra Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung

No	KECAMATAN	Kolam Air Tenang (Ton)								Kolam Air Deras (Ton)		Mina Padi (Ton)		Perairan Umum (Ton)
		Pendederan		Pembesaran						Mas	Nila	Mas	Nila	Aneka Ikan
		Mas	Nila	Mas	Nila	Lele (balistik)	Lele	Gurame	Ank Ikan					
1	Ciwidey	14,57	13,04	29,57	30,43	3,47	28,28	0,00	5,39	0,00	0,00	8,91	11,54	0,62
2	Rancabali	5,75	5,15	11,68	12,02	0,00	11,17	0,00	2,13	0,00	0,00	1,69	2,22	19,53
3	Pasirjambu	10,93	9,79	22,20	22,84	45,57	21,23	3,74	4,05	0,00	0,00	10,83	14,27	0
4	Cimaung	13,31	11,92	27,03	27,82	3,47	25,85	2,86	4,79	40,51	28,58	47,74	62,93	1,40
5	Pangalengan	9,19	8,23	18,66	19,20	0,00	17,84	0,00	3,40	0,00	0,00	3,59	4,73	49,73
6	Kertasari	2,57	2,30	5,22	5,37	0,00	4,99	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
7	Pacet	124,52	60,60	21,97	83,69	43,78	93,86	16,68	17,89	21,65	15,16	145,20	191,00	1,55
8	Ibun	118,02	57,44	20,83	79,32	0,41	88,97	1,80	16,96	30,31	21,23	46,41	61,07	2,22
9	Paseh	101,34	41,96	17,88	76,93	20,53	76,39	0,00	14,56	0,00	0,00	101,92	133,83	0,31
10	Cikancung	8,46	7,58	17,18	17,68	12,00	16,43	0,00	3,13	0,00	0,00	15,73	20,73	0
11	Cicalengka	7,74	6,93	15,71	16,16	11,05	15,02	0,00	2,86	0,00	0,00	8,23	10,85	0,31
12	Nagrek	5,45	4,90	11,07	11,44	26,27	9,89	0,00	2,01	0,00	0,00	4,62	6,09	0,31
13	Rancaekek	7,06	6,33	14,34	14,76	17,37	13,72	0,00	2,58	0,00	0,00	11,86	15,63	2,18
14	Majalaya	132,32	64,40	25,97	88,93	36,93	99,74	17,73	19,01	44,01	31,17	239,40	315,92	0
15	Solokanjeruk	6,21	5,56	12,61	12,97	3,47	12,06	0,00	2,30	0,00	0,00	44,25	57,77	0,62
16	Ciparay	139,70	67,99	24,65	93,89	31,63	105,31	19,16	20,07	0,00	0,00	171,81	226,43	0
17	Baleendah	15,52	13,90	31,51	32,43	22,11	30,13	0,00	5,77	0,00	0,00	36,77	48,28	2,33
18	Arjasari	5,81	5,20	11,80	12,14	9,47	11,29	0,00	2,15	0,00	0,00	1,27	1,68	0
19	Banjaran	38,51	22,12	30,33	45,69	14,21	44,11	7,22	8,41	22,08	15,50	24,96	32,91	1,68
20	Cangkuang	10,91	9,76	22,14	22,78	6,32	21,17	0,00	4,04	25,57	17,99	17,04	22,36	0
21	Pameungpeuk	7,69	6,89	15,61	16,07	0,46	14,93	2,63	2,79	0,00	0,00	34,27	45,17	0,31
22	Katapang	5,33	4,77	10,82	11,13	0,46	10,35	0,00	1,87	0,00	0,00	15,89	20,94	0,62
23	Soreang	19,34	17,32	39,27	40,41	0,39	37,55	6,20	7,16	67,17	47,68	29,25	38,36	0,47
24	Kutawaringin	10,23	9,54	20,76	21,36	23,37	19,85	0,00	3,79	0,00	0,00	21,22	27,97	16,00
25	Margaasih	3,03	2,71	6,15	6,33	0,00	5,88	0,00	1,12	0,00	0,00	1,53	2,02	1,55
26	Margahayu	25,99	23,27	52,76	54,30	0,00	50,46	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27	Dayeuhkolot	25,13	22,50	51,02	52,50	0,81	48,79	0,00	9,25	0,00	0,00	7,10	9,26	0,34
28	Bojongsoang	876,83	288,73	97,72	673,71	15,39	626,10	0,00	119,35	0,00	0,00	5,28	6,95	1,33
29	Cileunyi	16,47	14,75	33,44	34,41	18,06	31,98	3,54	5,99	0,00	0,00	12,86	16,95	1,01
30	Cilengkrang	3,53	3,16	7,17	7,38	7,58	6,86	0,00	1,29	0,00	0,00	7,13	9,34	0
31	Cimencyan	3,18	2,85	6,46	6,65	7,89	6,18	0,00	0,86	0,00	0,00	2,13	2,81	0
	Jumlah	1.774,63	821,57	733,52	1.650,73	382,47	1.606,36	81,56	302,99	251,30	177,30	1.078,87	1.420,02	116,87

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2012

Sementara untuk potensi peternakan, dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Kawasan/Sentra Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Komoditas Unggulan (ekor)				
		Sapi Perah	Sapi Potong	Domba & Kambing	Ayam Ras Pedaging	Itik
1	Ciwidey	1.140	60	10.975	221.602	3.028
2	Rancabali	710	176	9.401	0	2.394
3	Pasirjambu	4.577	34	10.176	107.321	5.510
4	Cimaung	12	425	8.971	470.693	6.784
5	Pangalengan	14.999	304	11.199	0	0
6	Kertasari	4.568	75	8.992	10.029	169
7	Pacet	50	1.531	26.943	147.907	11.630
8	Ibun	3	408	26.778	93.463	27.945
9	Paseh	19	155	28.089	129.045	34.626
10	Cikancung	59	12.363	5.751	286.195	7.132
11	Cicalengka	269	195	11.315	28.649	29.286
12	Nagreg	4	170	10.581	65.302	13.984
13	Rancaekek	0	107	13.310	18.775	29.938
14	Majalaya	3	184	9.126	22.711	22.954
15	Solokanjeruk	7	207	15.858	37.498	23.563
16	Ciparay	9	94	12.118	27.369	27.003
17	Baleendah	59	342	26.847	20.040	31.362
18	Arjasari	1.387	70	12.197	168.884	3.492
19	Banjaran	4	138	8.159	150.422	13.485
20	Cangkuang	152	114	3.980	52.858	4.142
21	Pameungpeuk	0	208	5.743	94.238	6.892
22	Katapang	3	294	9.949	7.271	10.189
23	Soreang	1	191	19.326	54.104	10.515
24	Kutawaringin	8	161	14.925	55.500	775
25	Margaasih	0	356	12.479	13.587	7.008
26	Margahayu	0	139	4.222	0	0
27	Dayeuhkolot	3	148	1.086	12.996	16.340
28	Bojongsoang	3	66	5.356	27.625	23.459
29	Cileunyi	575	49	6.484	67.565	15.203
30	Cilengkrang	2.395	1.215	9.197	26.898	710
31	Cimencyan	918	2.570	12.056	24.844	219
KAB.BANDUNG		31.937	22.549	371.590	2.443.390	389.739

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2012

Pada tahun 2012, produk daging yang diperoleh dari aktifitas peternakan di Kabupaten Bandung relatif menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini, terjadi hampir di semua wilayah di tanah air, sehingga memicu harga jual daging yang terus meningkat. Secara geografi, Kabupaten Bandung masih memiliki peluang yang besar untuk terus mengembangkan peternakan karena ditunjang oleh ketersediaan lahan tegal/ladang yang cukup luas sebagai penyedia pakan ternak.

3. Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut:

- Kawasan Pariwisata Alam, meliputi : Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung

- Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibum), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang).
- Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi : Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi).
 - Kawasan Pariwisata Agro, meliputi :
 1. Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh;
 2. Agrowisata Teh : Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu);
 3. Agrowisata Sayuran : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan;
 4. Agrowisata Herbal : Kecamatan Rancabali, Kecamatan pasirjambu, Kecamatan Ciwidey.
 - Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi : Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pengalengan).
 - Kawasan Desa Wisata : 10 Desa Wisata

NO	NAMA DESA	JENIS WISATA	PRODUK UNGGULAN
1	Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali.	Agroekowisata	Aneka Makanan Olahan Strobery, Handycraft, Pertanian dan Perkebunan
2	Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu.	Agroekowisata	Aneka Makanan Olahan Strobery, Handycraft, Seni Budaya, Perkebunan, Peternakan, Perikanan & Pertanian
3	Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Handycraft, Pertanian, Wisata Edukasi, Homestay, dan Seni Budaya
4	Desa Lebakmuncang kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Handycraft, Kelinci, Pertanian dan Perikanan
5	Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan	Agroekowisata dan Budaya	Handycraft, Homestay, Kuliner, Pertanian, Peternakan, Seni Budaya, Arung Jeram
6	Desa / Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah	Seni Budaya	Handycraft, Seni Budaya, Pertanian, Perkebunan, Seni Lukis dan Kuliner Tradisional
7	Desa Ciburial kecamatan Cimenyan	Agroekowisata	Handycraft, Seni – Budaya, Peternakan

NO	NAMA DESA	JENIS WISATA	PRODUK UNGGULAN
8	Kampung Ciborelang, Desa Cinunuk kecamatan Cileunyi	Kampung Seni dan Wisata	Seni Budaya, Kuliner Tradisional dan Handycraft
9	Desa Laksana, kecamatan Ibum	Agroekowisata	Kawah Kamojang, Budaya dan Kuliner Tradisional, Peternakan, Pertanian & Perkebunan
10	Desa Rawabogo, kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Seni Budaya, Handycraft, Kuliner Tradisional, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan

4. Potensi Kawasan

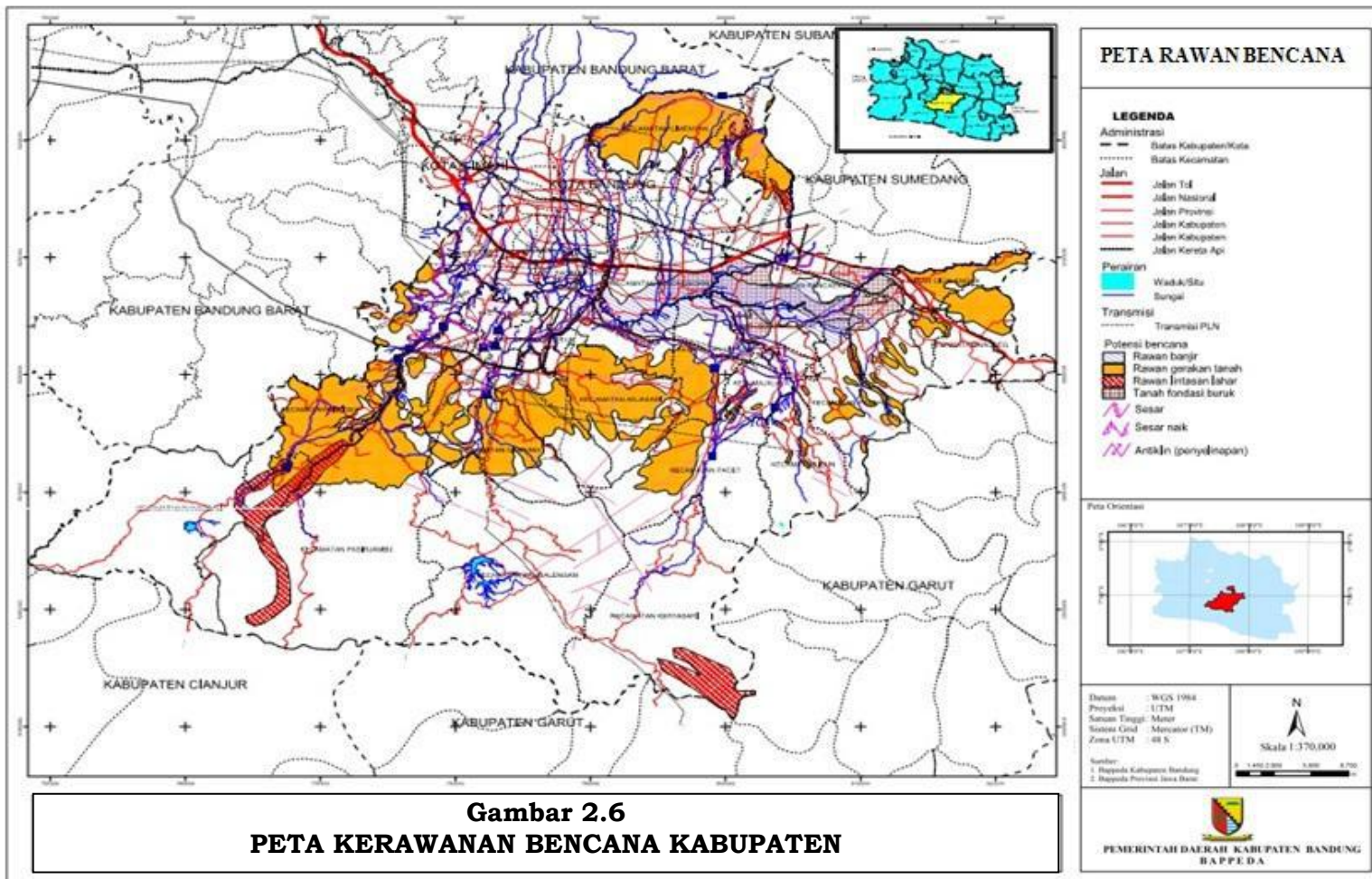
Dikaitkan dengan fungsi strategis, struktur dan pola ruang, kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah :

1. Kawasan Kota Baru Tegalluar;
2. Kawasan Industri Margaasih;
3. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat.

Kawasan Kota Baru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ± 3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan waduk/danau buatan dan kawasan rekreasi. Kawasan Industri Margaasih merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450 ha untuk pengembangan kawasan industri non-polutif. Sementara Pengembangan Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat diarahkan menjadi kawasan strategis dengan luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti stadion (*sport centre*) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan luas ± 610 ha terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Morfologi wilayahnya terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Bandung rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana longsor, bencana erosi dan gempa bumi.



Gambar 2.6
PETA KERAWANAN BENCANA KABUPATEN

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian) menyebabkan sering terjadinya pergerakan tanah (longsor), erosi dan sedimentasi serta bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung. Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman juga menyebabkan terganggunya system jaringan irigasi dan drainase. Dampak perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung adalah timbulnya genangan dan kejadian banjir di beberapa titik terutama wilayah permukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan Kopo. Di beberapa wilayah terutama daerah perkotaan di Kabupaten Bandung, saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. Sementara untuk penanganan limpasan air ke badan jalan, telah diupayakan pembangunan saluran drainase di 14 ruas jalan sepanjang 6.494,56 m, yang selanjutnya perlu perhatian terkait pemeliharaan saluran tersebut agar limpasan air ke badan jalan dapat diminimalkan.

Kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait dengan fungsi resapan air, menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Kondisi lainnya diantaranya semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam menjaga lingkungan (terutama terkait dengan pengelolaan sampah).

2.1.4. Demografis

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan.

1. Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 3.290.437 Jiwa dengan luas administratif Kabupaten Bandung sebesar 176.238,54 Ha maka kepadatan Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 18,7 sedangkan untuk sebaran penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2011 dari 31 Kecamatan yang ada Kecamatan yang memiliki kepadatan paling tinggi di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 adalah Kecamatan Margahayu yakni sebesar 116,6 Jiwa/Ha dengan jumlah penduduk 122.907 jiwa dan luas wilayah sebesar 1.054,33 Ha. sedangkan Kecamatan yang memiliki Kepadatan terkecil atau terendah berada pada Kecamatan Rancabali dengan tingkat kepadatan sebesar 3,3 Jiwa/Ha, dari 48.587 jiwa penduduk dan luas wilayah sebesar 14.837,00 Ha.

Tabel 2.7
Sebaran Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2012

No	Kecamatan	Sebaran Penduduk		
		Jumlah Peduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (jiwa/Ha)
1	Ciwidey	74.772	4.846,92	15,43
2	Rancabali	48.731	14.837,00	3,28
3	Pasirjambu	81.858	23.957,64	3,42
4	Cimaung	75.749	5.500,02	13,77
5	Pengalengan	142.317	19.540,93	7,28

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

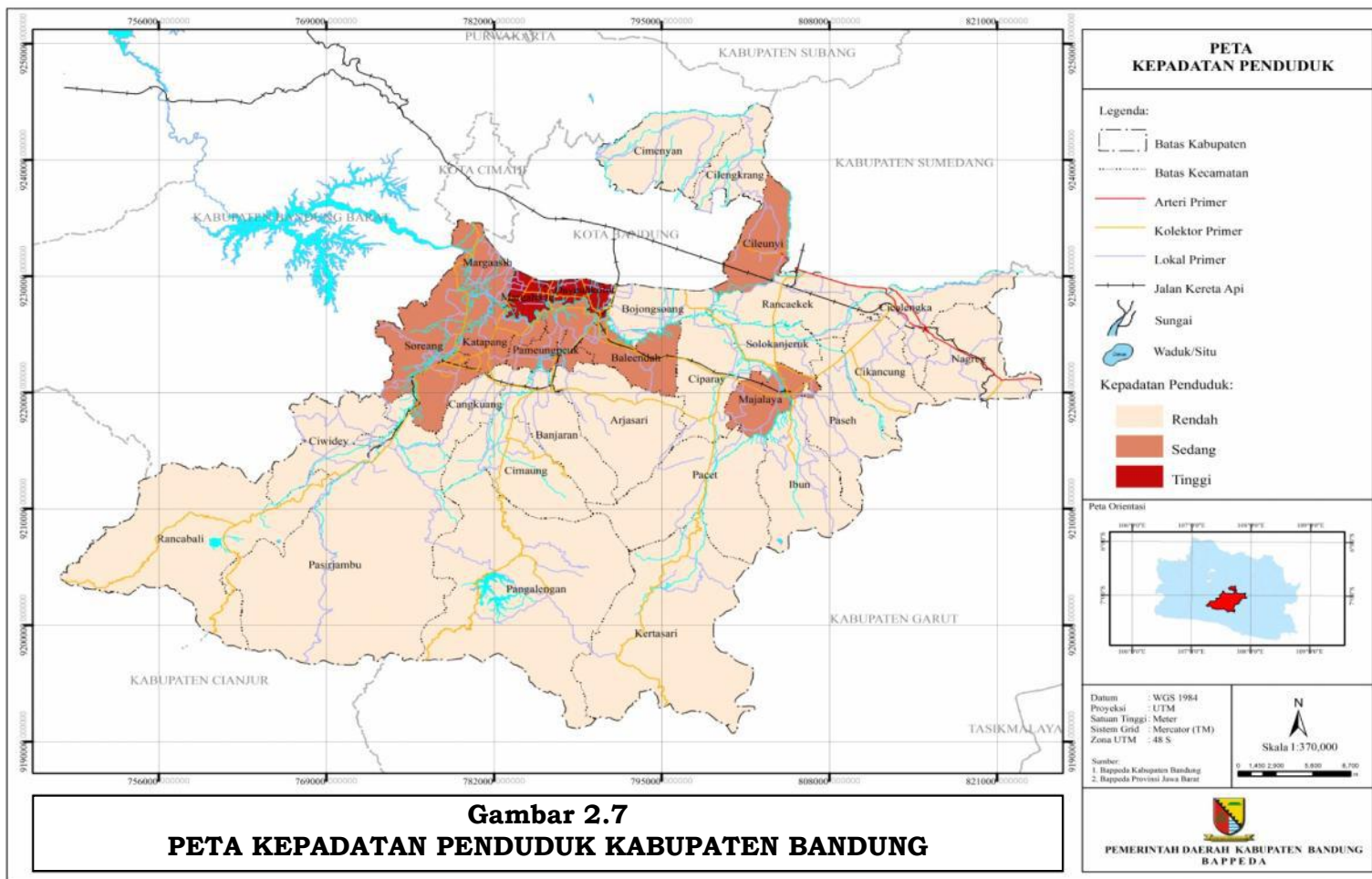
No	Kecamatan	Sebaran Penduduk		
		Jumlah Peduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (jiwa/Ha)
6	Kertasari	66.995	15.207,36	4,41
7	Pacet	66.995	9.193,96	7,29
8	Ibun	77.910	5.456,51	14,28
9	Paseh	123.371	5.102,90	24,18
10	Cikancung	86.031	4.013,63	21,43
11	Cicalengka	112.412	3.599,23	31,23
12	Nagreg	49.478	4.930,29	10,04
13	Rancaekkek	171.929	4.524,83	38,00
14	Majalaya	155.317	2.536,46	61,23
15	Solokanjeruk	79.807	2.400,66	33,24
16	Ciparay	155.594	4.617,57	33,70
17	Baleendah	239.623	4.155,54	57,66
18	Arjasari	94.027	6.497,79	14,47
19	Banjaran	118.247	4.291,79	27,55
20	Cangkuang	69.201	2.461,06	28,12
21	Pamengpeuk	72.520	1.462,32	49,59
22	Katapang	117.113	1.572,46	74,48
23	Soreang	108.890	2.550,68	42,69
24	Kutawaringin	93.197	4.730,26	19,70
25	Margaasih	141.876	1.834,49	77,34
26	Margahayu	123.176	1.054,33	116,83
27	Dayeuhkolot	114.670	1.102,91	103,97
28	Bojongsoang	112.990	2.781,22	40,63
29	Cileunyi	180.290	3.157,51	57,10
30	Cilengkrang	49.302	3.011,94	16,37
31	Cimencyan	109.834	5.308,33	20,69
	Jumlah	3.351.048	176.238,54	19,01

Sumber : Hasil Analisis

Klasifikasi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

- Kepadatan Rendah : 3,28 – 41,13 Jiwa/Ha
- Kepadatan Sedang : 41,14 – 82,27 Jiwa/Ha
- Kepadatan Tinggi : 82,28 – 123,41 Jiwa/Ha

Sebagian besar Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung masuk kedalam klasifikasi rendah Kecamatan yang termasuk kedalam klasifikasi sedang dan tinggi sebagian besar adalah Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.7
PETA KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG

A. Mobilitas Penduduk

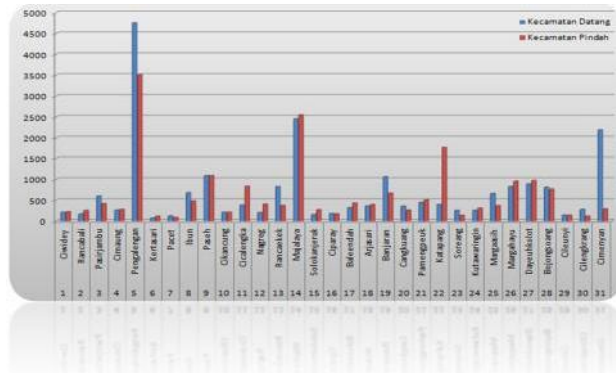
Mobilitas penduduk merupakan suatu pergerakan perpindahan penduduk dan kedatangan penduduk pada suatu wilayah tertentu sehingga dapat dilihat pergerakan penduduk pendatang dan penduduk yang pindah disuatu daerah untuk mengetahui mobilitas Kabupaten Bandung pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.8
Mobilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011

No	Kecamatan	Datang		Pindah		No	Kecamatan	Datang		Pindah	
		L	P	L	P			L	P	L	P
1	Ciwidey	101	109	111	109	17	Baleendah	200	122	255	174
2	Rancabali	134	37	110	142	18	Arjasari	176	185	201	194
3	Pasirjambu	315	283	240	179	19	Banjaran	560	502	338	328
4	Cimaung	164	98	121	157	20	Cangkuang	162	194	117	144
5	Pangalengan	2.546	2.209	1.818	1.687	21	Pamengpeuk	257	191	267	239
6	Kertasari	36	35	58	58	22	Katapang	224	174	985	780
7	Pacet	60	63	40	43	23	Soreang	130	124	68	64
8	Ibun	382	298	259	219	24	Kutawaringin	195	61	158	152
9	Paseh	627	461	652	436	25	Margaasih	328	332	276	91
10	Cikancung	108	104	119	91	26	Margahayu	538	290	470	486
11	Cicalengka	195	186	152	681	27	Dayeuhkolot	449	439	477	493
12	Nagreg	100	103	230	175	28	Bojongsoang	436	373	417	349
13	Rancaekek	406	417	211	161	29	Cileunyi	73	70	66	73
14	Majalaya	1.200	1.251	1.531	1.017	30	Cilengkrang	112	167	50	66
15	Solokanjeruk	89	66	154	115	31	Cimemyan	1.316	870	144	147
16	Ciparay	111	70	111	61		TOTAL	11730	9884	10206	9111

*Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012
Ket : L : Laki-laki / P : Perempuan*

Gambar 2.8
Mobilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011



Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa mobilitas penduduk tertinggi di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 berada di Kecamatan Pangalengan. dengan proporsi mobilitas penduduk yang datang ke Kecamatan Pangalengan lebih besar di banding kan dengan penduduk yang pindah atau keluar dari Kecamatan Pangalengan. sedangkan untuk mobilitas penduduk terendah Kabupaten Bandung pada tahun 2011 berada di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Kertasari.

B. Mortalitas dan Fertilitas

Mortalitas penduduk merupakan perubahan penduduk yang dilihat dari jumlah penduduk yang lahir dengan jumlah penduduk yang meninggal dunia sehingga dapat terlihat perubahan jumlah penduduk pada suatu daerah dan pada tahun tertentu. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat mortalitas penduduk di Kabupaten Bandung tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut :

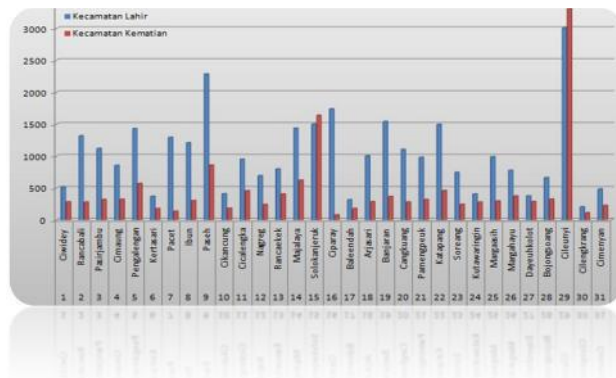
Tabel 2.9
Mortalitas dan Fertilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011

No	Kecamatan	Kelahiran		Kematian		No	Kecamatan	Kelahiran		Kematian	
		L	P	L	P			L	P	L	P
1	Ciwidey	260	258	144	140	17	Baleendah	152	165	87	92
2	Rancabali	663	654	146	134	18	Arjasari	530	474	153	133
3	Pasirjambu	579	541	172	147	19	Banjaran	780	763	222	145
4	Cimaung	482	372	174	150	20	Cangkuang	557	548	159	122
5	Pengalengan	666	765	324	247	21	Pamengpeuk	505	476	175	146
6	Kertasari	182	188	83	95	22	Katapang	692	804	314	145
7	Pacet	700	595	69	67	23	Soreang	409	337	133	112
8	Ibun	610	598	170	133	24	Kutawaringin	222	185	162	117
9	Paseh	1.166	1.121	459	400	25	Margaasih	525	465	162	135
10	Cikancung	221	189	97	86	26	Margahayu	394	383	177	198
11	Cicalengka	558	393	261	197	27	Dayeuhkolot	187	190	146	142
12	Nagreg	334	360	115	127	28	Bojongsoang	336	327	162	163
13	Rancaekek	416	382	229	177	29	Cileunyi	1.509	1.498	3.007	305
14	Majalaya	780	656	305	318	30	Cilengkrang	95	112	50	62
15	Solokanjeruk	758	744	1.502	137	31	Cimencyan	259	226	115	113
16	Ciparay	952	788	42	37		TOTAL	16.479	15.557	9.516	4.722

Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012

Ket : L : Laki-laki / P : Perempuan

Gambar 2.9
Mortalitas dan Fertilitas Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011



2. Struktur Penduduk

Struktur penduduk merupakan klasifikasi jumlah penduduk yang dapat dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin dan berdasarkan pemeluk keyakinan atau agama. berikut gambaran struktur penduduk Kabupaten Bandung :

A. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Struktur penduduk berdasarkan usia merupakan pengklasifikasian jumlah penduduk yang terbagi dalam 3 klasifikasi usia yaitu jumlah penduduk

pada usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun sampai dengan 65 tahun keatas. untuk mengetahui struktur penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia Tahun 2011(Jiwa)

No	Kecamatan	Usia			No	Kecamatan	Usia		
		0-14 tahun	15-64 tahun	65+ tahun			0-14 tahun	15-64 tahun	65+ tahun
1	Ciwidey	21.717	47.901	4.641	17	Baleendah	73.194	152.425	7.726
2	Rancabali	14.675	31.298	2.614	18	Arjasari	29.526	58.528	4.829
3	Pasirjambu	24.935	51.877	4.486	19	Banjaran	35.466	76.329	5.225
4	Cimaung	22.676	47.605	4.366	20	Cangkuang	20.935	43.574	2.999
5	Pengalengan	44.493	89.246	7.542	21	Pamengpeuk	21.767	46.681	2.831
6	Kertasari	20.960	42.418	3.282	22	Katapang	34.477	75.447	4.132
7	Pacet	34.249	63.880	4.843	23	Soreang	31.617	70.924	4.658
8	Ibun	24.615	48.697	4.011	24	Kutawaringin	27.811	59.855	4.290
9	Paseh	41.448	77.374	5.679	25	Margaasih	41.815	92.338	4.714
10	Cikancung	28.038	52.864	3.549	26	Margahayu	32.489	85.841	4.577
11	Cicalengka	35.536	71.728	4.793	27	Dayeuhkolot	30.796	79.964	3.812
12	Nagreg	15.748	31.000	2.234	28	Bojongsong	33.159	72.489	3.237
13	Rancaekek	49.022	114.634	6.675	29	Cileunyi	48.452	106.618	4.724
14	Majalaya	47.792	99.905	6.465	30	Cilengkrang	14.431	31.847	1.970
15	Solokanjeruk	23.161	52.223	3.594	31	Cimendan	30.744	71.993	4.619
16	Ciparay	47.932	99.121	7.020	TOTAL		1.003.676	2.146.624	140.137

Sumber : BPS, Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012

dari tabel 2.10 tergambar bahwa pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Bandung didominasi oleh penduduk yang berusia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk sebesar 2.146.624 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas.

B. Struktur Penduduk Pemeluk Agama

Struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2011

No	Kecamatan	Agama				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Ciwidey	73.996	236	27	0	0
2	Rancabali	48.569	12	6	0	0
3	Pasirjambu	81.073	150	73	0	2
4	Cimaung	74.569	73	5	0	0
5	Pengalengan	140.934	330	11	0	6
6	Kertasari	66.647	13	0	0	0
7	Pacet	102.893	62	10	7	0
8	Ibun	77.237	76	7	3	0
9	Paseh	124.151	240	110	0	0
10	Cikancung	84.233	190	27	1	0
11	Cicalengka	111.346	599	111	0	1
12	Nagreg	48.832	120	25	4	1
13	Rancaekek	167.839	1.992	390	30	80
14	Majalaya	152.575	1.339	218	6	24
15	Solokanjeruk	78.726	197	52	0	3
16	Ciparay	152.870	963	222	12	6
17	Baleendah	228.851	3.441	951	41	61
18	Arjasari	92.448	328	105	0	2

No	Kecamatan	Agama				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
19	Banjaran	115.706	1.115	172	6	21
20	Cangkuang	66.308	988	207	2	3
21	Pamengpeuk	70.678	475	123	0	3
22	Katapang	111.500	2.133	375	10	38
23	Soreang	105.671	1.198	315	4	11
24	Kutawaringin	91.880	59	17	0	0
25	Margaasih	125.899	8.825	3.085	80	978
26	Margahayu	101.030	11.565	8.145	1.231	936
27	Dayeuhkolot	111.880	2.010	593	51	38
28	Bojongsoang	106.038	2.177	557	64	49
29	Cileunyi	156.599	2.450	573	105	67
30	Cilengkrang	46.866	659	689	33	1
31	Cimencyan	103.981	2.006	1.268	80	21
Jumlah		3.221.825	46.021	18.469	1.770	2.352

Sumber : BPS, Kabupaten Bandung dalam Angka Tahun 2012

dari tabel 2.11 tentang struktur penduduk berdasarkan keyakinan pemeluk agama di Kabupaten Bandung dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung beragama Islam, dengan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebesar 3.221.825 jiwa, sedangkan yang paling terkecil atau sedikit jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang memeluk agama Hindu dengan jumlah penduduk yang memeluk agama Hindu sebesar 1.770 jiwa.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gambaran keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/ *purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.

Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun 2012 IPM Kabupaten Bandung mencapai 75,24.

a. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM) adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.

Kontribusi bidang pendidikan dalam pencapaian IPM di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir (periode tahun 2008-2012) masih perlu ditingkatkan lagi. Peranan komponen indeks pendidikan memang relatif paling tinggi dibandingkan dua komponen IPM lainnya yaitu kesehatan dan daya beli. Pencapaian IPM Kabupaten Bandung yang telah mencapai angka 75,24 di tahun 2012; ditopang oleh indeks pendidikan yang mencapai 85,05.

b. Indikator Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator : angka harapan hidup saat dilahirkan (AHH), angka kematian bayi (AKB), angka kematian kasar (AKK) dan status gizi. AHH merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun, kematian anak di bawah 5 tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatkan harapan untuk hidup.

Tabel 2.12
Capaian Angka Harapan Hidup
Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Wilayah	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
AHH	68,42	68,94	69,40	70,06	70,28

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

AHH Kabupaten Bandung tahun 2012 mencapai 70,28 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 70-71 tahun.

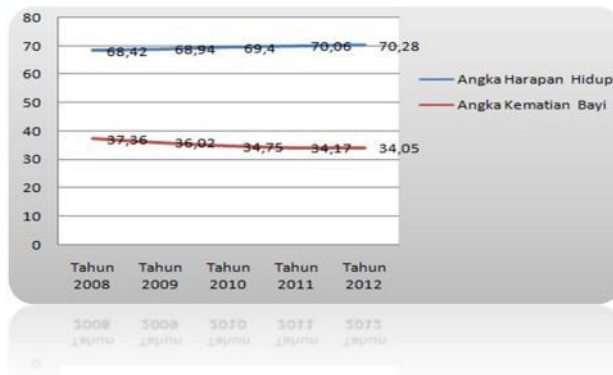
Tabel 2.13
Capaian Angka Kematian Bayi
Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Wilayah	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
AKB	37,36	36,02	34,75	34,17	34,05

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

AKB Kabupaten Bandung tahun 2012 mencapai 34,05 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup masih terdapat 34-35 bayi yang diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang mengidap infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman dan perawatan bayi yang kurang baik.

Gambar 2.10
Grafik AHH dan AKB Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012



Dari gambar grafik di atas terlihat angka harapan hidup berada di atas angka kematian bayi di Kabupaten Bandung, selain itu angka harapan hidup yang ada di Kabupaten Bandung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan grafik peningkatan, dan sebaliknya untuk angka kematian bayi tahun 2008-2012 menunjukkan grafik penurunan, ini menjadi nilai positif dari capaian indikator kesehatan di Kabupaten Bandung.

c. Indikator Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP)

Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah.

Determinasi utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah tingkat daya beli. Kemajuan angka IPM Kabupaten Bandung selama beberapa periode ternyata sangat ditunjang oleh adanya peningkatan komponen kemampuan daya beli masyarakat. Rata-rata kenaikan daya beli dari tahun 2008-2012 adalah sekitar 3,74 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Capaian Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Wilayah	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Daya Beli Masyarakat	Rp. 557.680,-.	Rp.565.320,-	Rp.565.320,-	Rp. 641.810,-.	Rp. 642.190,-.

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

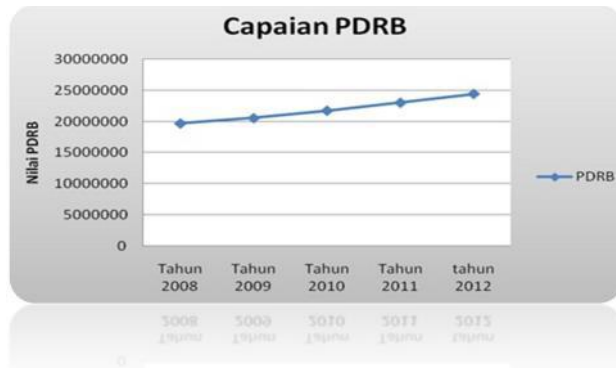
Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi.

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Bandung 2012 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 57,071 triliun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 24,44 triliun. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

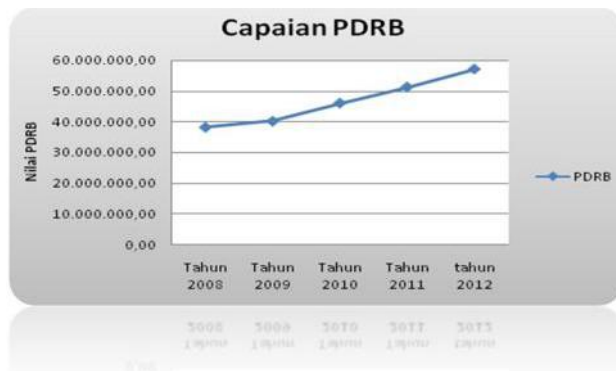
Dari ke-9 sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung yaitu sekitar 59,75 %. Sektor lainnya yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, restoran; dan sektor pertanian; yaitu masing-masing berperan 16,67 % dan 7,31%.

Gambar 2.11
Grafik Capaian PDRB Berdasarkan Harga Konstan



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan grafik yang terus menaik atau meningkat

Gambar 2.12
Grafik Capaian PDRB Berdasarkan Harga Konstan



Sama halnya dengan pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan PDRB berdasarkan harga berlaku pun menunjukkan grafik yang terus meningkat.

Tabel 2.15
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012
atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung

No	Sektor	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian / Agriculture	1.424.992,98	7,24	1.502.003,39	7,32	1.602.050,01	7,37	1,688,263.14	7.33	1,787,255.22	7.31
2	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	255.888,73	1,30	269.782,12	1,31	282.922,47	1,30	291,397.20	1.27	286,309.40	1.17
3	Industry Pengolahan / Manufacturing Industry	12.110.396,65	61,56	12.519327,64	60,98	13.173.587,93	60,61	13,857,488.88	60.18	14,605,911.06	59.75
4	Listrik, Gas dan Air Bersih / Electricity Gas and Water Supply	361.439,39	1,84	376.034,30	1,83	396.026,30	1,82	428,521.96	1.86	482,230.40	1.97
5	Bangunan / Konstruksi / Construction	339.547,36	1,73	355.614,56	1,73	381.103,63	1,75	411,973.98	1.79	432,749.38	1.77
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran / Trade, Hotel and Restaurant	2.994.763,36	15,22	3.211.263,99	15,64	3.474.795,78	15,99	3,748,625.24	16.28	4,073,645.70	16.67
7	Pengangkutan dan Komunikasi / Transport and Communication	795.218,84	4,04	843.661,61	4,11	892.448,05	4,11	960,418.42	4.17	1,036,304.54	4.24
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	436.277,89	2,22	451.138,21	2,20	474.864,56	2,18	508,799.47	2.21	550,913.19	2.25
9	Jasa-jasa / Services	955.207,67	4,86	1.000.817,32	4,87	1.056.862,46	4,86	1,130,748.84	4.91	1,187,903.28	4.86
Total		19.673.732,87	100	20.529.643,24	100	21.734.661,19	100	23,026,237.13	100	24,443,222.17	100

Sumber : BPS, Kabupaten Bandung Dalam Angka tahun 2012

Tabel 2.16
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung

No	Sektor	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian/ Agriculture	2.753.632,27	7,19	3.013.007,10	7,36	3.471.661,92	7,53	3,978,936.25	7.76	4,518,784.28	7.92
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	468.303,79	1,22	526.035,13	1,28	580.783,81	1,26	642,359.10	1.25	686,014.49	1.20
3	Industry Pengolahan/ Manufacturing Industry	23.275.745,49	60,79	24.565.562,89	60,00	27.471.535,02	59,60	30,116,379.01	58.72	32,915,231.13	57.67
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ Electricity Gas and Water Supply	642.658,73	1,68	674.520,69	1,65	741.188,33	1,61	824,630.98	1.61	954,918.90	1.67
5	Bangunan/ Konstruksi/ Construction	648.394,06	1,69	696.720,83	1,70	764.990,68	1,66	852,508.61	1.66	947,236.94	1.66
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ Trade, Hotel and Resto	6.005.197,92	15,68	6.780.385,10	16,56	7.796.200,55	16,91	8,920,233.69	17.39	10,436,027.24	18.29
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ Transport and Comm	1.766.609,79	4,61	1.795.161,77	4,38	1.933.148,22	4,19	2,159,485.64	4.21	2,374,097.92	4.16
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	792.877,54	2,07	820.502,95	2,00	898.354,49	1,95	990,504.14	1.93	1,123,606.62	1.97
9	Jasa-jasa/ Services	1.936.315,52	5,06	2.069.321,52	5,05	2.434.375,72	5,28	2,806,725.22	5.47	3,115,489.15	5.46
	Total	38.289.735,11	100	40.266.697,29	100	46.092.238,74	100	51,291,762.64	100	57,071,406.67	100

Sumber : BPS, Data Pokok BPS Kabupaten Bandung dalam Angka Tahun 2008-2012

Tabel 2.17
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sampai dengan 2012
atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bandung

No	Sektor	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	<i>Pertanian/ Agriculture</i>	7,19	7,24	7,36	7,32	7,53	7,37	7,76	7,33	7,92	7,31
2	<i>Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying</i>	1,22	1,30	1,28	1,31	1,26	1,30	1,25	1,27	1,20	1,17
3	<i>Industry Pengolahan/ Manufacturing Industry</i>	60,79	61,56	60,00	60,98	59,60	60,61	58,72	60,18	57,67	59,75
4	<i>Listrik, Gas dan Air Bersih/ Electricity Gas and Water Supply</i>	1,68	1,84	1,65	1,83	1,61	1,82	1,61	1,86	1,67	1,97
5	<i>Bangunan/ Konstruksi/ Construction</i>	1,69	1,73	1,70	1,73	1,66	1,75	1,66	1,79	1,66	1,77
6	<i>Perdagangan, Hotel dan Restoran/ Trade, Hotel and Restourant</i>	15,68	15,22	16,56	15,64	16,91	15,99	17,39	16,28	18,29	16,67
7	<i>Pengangkutan dan Komunikasi/ Transport and Communication</i>	4,61	4,04	4,38	4,11	4,19	4,11	4,21	4,17	4,16	4,24
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,07	2,22	2,00	2,20	1,95	2,18	1,93	2,21	1,97	2,25
9	<i>Jasa-jasa/ Services</i>	5,06	4,86	5,05	4,87	5,28	4,86	5,47	4,91	5,46	4,86
	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Data Pokok Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Dari data PDRB di atas baik PDRB pada harga konstan maupun PDRB harga berlaku menunjukkan trend pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. ini memberikan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

B. Laju Inflasi

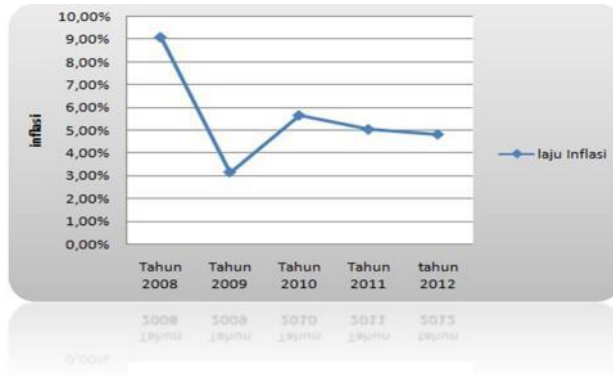
Inflasi PDRB Kabupaten Bandung selama tahun 2012 (Januari-Desember) tercatat sebesar 4,82 persen, turun dari inflasi PDRB tahun sebelumnya yang mencapai 5,04 Persen. Nilai ini masuk pada katagori inflasi ringan (dibawah 10 persen per tahun). Ada pun rata-rata inflasi yang terjadi di lihat dari 4 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2012 mencapai

Tabel 2.18
Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung per Tahun 2008-2012

No	Tahun	Laju Inflasi
1	2008	9,11%
2	2009	3,15%
3	2010	5,66%
4	2011	5,04%
5	2012	4,82%
Rata-rata Pertumbuhan		5,55%

Sumber : BPS, Data Pokok Kabupaten Bandung Tahun2008-2012

Gambar 2.13
Grafik Laju Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa laju inflasi di Kabupaten Bandung menunjukkan trend yang tidak stabil (naik, turun). Dimana inflasi terbesar terjadi pada tahun 2008 dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE Kabupaten Bandung pada kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2008-2012, laju pertumbuhan ekonomi pernah mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,96% dari tahun 2008. namun beranjak ketahun berikutnya yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6.15%.

Tabel 2.19

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	2008	5,30%
2	2009	4,34%
3	2010	5,88%
4	2011	5,94%
5	2012	6.15%

Sumber : BPS, Data Pokok Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Bandung tahun 2012 berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 9,58 % yaitu dari Rp 15.543.010, pada tahun 2011 menjadi Rp.17.032.495 sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 4,53%, yaitu dari Rp 6.977.680,00 pada tahun 2011 menjadi Rp 7.293.788 pada tahun 2012. Capaian PDRB perkapita tersebut belum sepenuhnya dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk setempat karena penghitungan nilai PDRB mengesampingkan kepemilikan serta sebagian besar aktivitas produksi yang terjadi di wilayah tersebut bukan milik dari penduduk setempat, demikian pula sebaliknya. PDRB perkapita memberikan peluang positif bagi para investor yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten Bandung,

Tabel 2.20

Pendapatan Perkapita Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Pendapatan Perkapita Tahunan (Rp)
1	2008	12.457.624,98
2	2009	13.061.263,91
3	2010	14.519.530
4	2011	15.543.010
5	2012	17.032.495

Sumber : BPS, Data Pokok Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Secara umum indikator makro di Kabupaten Bandung 2008-2012 dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Indikator Makro Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.299.988	3.351.048
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,93 %	1,47 %	1,35 %	2,63	1,54
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,30%	4,34%	5,88%	5,94%	6,15%
4	Inflasi PDRB	9,11%	3,15%	5,66%	5,04%	4,83%
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	38.282.169,44	41.201.900,67	46.092.238,72	51.280.929,46	57.071.406,68
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	19.674.494,54	20.527.539,56	21.734.661,19	23.031.965,80	24.443.222,17
7	Jumlah Keluarga Miskin	185.064	186.631	185.064	292.155-	277.806
8	Laju Pertumbuhan Investasi	3,69%	4,73%	7,14 %	7,43 %	7,55 %
9	Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)	12.457.624,98	13.061.263,91	14.519.530	15.543.010	17.032.495
10	IPM	72,5	73,39	74,24	75,01	75,24
11	Indeks Pendidikan	85,58	85,61	85,65	75,10	75,46
12	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	8,86	8,87	9,02	8,62	8,67
13	Angka Melek Huruf	98,84 %	98,87%	98,41 %	98,53	98,69
14	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,42	68,94	69,40	70,06	70,28
15	Indeks AHH	72,36	73,23	74,00	70,06	70,28
16	Indeks Daya Beli	59,55	61,31	63,07	65,13	65,21
17	Daya Beli (ribuan rupiah)	557,68	565,32	572,91	641,81	642,19

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2008-2012

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2008 - 2012 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang berangsur meningkat.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

A. Angka Melek Huruf

Indikator melek huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari aspek pendidikan. Angka melek huruf yang digunakan pada bahasan berikut adalah dihitung pada penduduk dewasa (berumur 15 tahun keatas) yang dapat membaca dan menulis minimal kata-kata/kalimat sederhana aksara tertentu, baik mampu membaca dan menulis huruf latin atau maupun huruf lainnya. Untuk lebih jelas mengenai capaian AMH Kabupaten Bandung pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s/d 2012
Kabupaten Bandung

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	2.173.926	2.243.466	2.178.158	2.183.747	2.323.360
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	2.199.414	2.269.104	2.213.351	2.154.436	2.352.426
3	Angka Melek Huruf	98,84	98,87	98,41	98.48	98.76

Sumber: Suseda BPS Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Sementara gambaran angka melek huruf per kecamatan selama tahun 2009 - 2012, dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Angka Melek Huruf Tahun 2008 s/d 2012
Kabupaten Bandung Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Angka Melek Huruf				
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	ARJASARI	96.41	96,44	96,51	96.51	97.77
2	BALEENDAH	99.49	99,52	98,93	98.93	97.57
3	BANJARAN	99.27	99,31	98,21	98.21	97.84
4	BOJONGSOANG	98.11	98,15	98,90	98.9	99.20
5	CANGKUANG	97.88	97,93	98,74	98.74	99.09
6	CICALENGKA	98.96	98,98	98,92	98.92	98.54
7	CIKANCUNG	98.84	98,88	98,22	98.22	99.02
8	CILENGKRANG	97.7	97,74	97,54	97.54	98.24
9	CILEUNYI	99.4	99,43	99,16	99.16	99.48
10	CIMAUNG	99.43	99,44	96,55	96.55	98.24
11	CIMENYAN	99.24	99,27	98,22	98.22	98.47
12	CIPARAY	99.2	99,24	98,20	98.2	98.96
13	CIWIDEY	99.02	99,05	98,06	98.06	98.71
14	DAYEUHKOLOK	99.53	99,57	99,58	99.58	99.73
15	IBUN	98.36	98,40	96,82	96.82	98.28
16	KATAPANG	99.8	99,83	99,22	99.22	99.36
17	KERTASARI	97.04	97,07	97,17	97.17	98.62

No	Kecamatan	Angka Melek Huruf				
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
18	KUTAWARINGIN	95.96	96,00	97,79	97.79	97.88
19	MAJALAYA	98.84	98,88	98,20	98.2	97.19
20	MARGAASIH	99.24	99,27	99,04	99.04	99.16
21	MARGAHAYU	99.62	99,66	99,77	99.77	99.78
22	NAGREG	98.73	98,76	98,19	98.19	99.69
23	PACET	99.09	99,13	97,08	97.08	96.68
24	PAMEUNGPEUK	98.22	98,27	99,08	99.08	99.60
25	PANGALENGAN	98.35	98,36	97,20	97.2	95.43
26	PASEH	98.64	98,67	97,46	97.46	97.42
27	PASIRJAMBU	98.83	98,88	98,82	98.82	99.43
28	RANCABALI	98.88	98,91	97,87	97.87	98.13
29	RANCAEKEK	99.12	99,16	99,21	99.21	99.32
30	SOLOKANJERUK	99.04	99,07	98,63	98.63	99.59
31	SOREANG	99.35	99,39	99,28	99.28	99.34

Sumber: Suseda BPS Kabupaten Bandung Tahun 2009,2010,2012

B. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dihitung dari populasi penduduk dewasa (berumur 15 tahun atau lebih). kelompok usia yang harus mendapatkan kesempatan sekolah berada pada umur 7-18 tahun. Kelompok umur tersebut terbagi menjadi tiga yaitu: kelompok umur 7-12 tahun untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), umur 13-15 tahun untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan umur 16-18 tahun untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Tabel 2.24
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah
Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
1	2008	8,86
2	2009	8,87
3	2010	9,02
4	2011	8,62
5	2012	8,67

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Pembangunan Olah Raga

Pembangunan olahraga ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan pembinaan olahraga melalui: pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan Lomba Gerak Jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, Tes Kesegaran Jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana, kegiatan Porseni SD, SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani Guru olahraga, penyelenggaraan lari 10K, penyelenggaraan gerak jalan

santai, penyelenggaraan TKJ, kegiatan POPDA SD,SMP, SMA /SMK penyelenggaraan lari 10 K, kegiatan jalan santai, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani SMP dan SMA.

Gambaran kondisi hasil pembangunan daerah bidang seni budaya dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, jumlah gedung olahraga, dan sebagainya.

Tabel 2.25
Perkembangan Seni, budaya dan olah raga
Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012

No	Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup Kesenian	608	803	-	560	560
2	Jumlah gedung Kesenian	-	-	-	-	1
3	Jumlah klub Olah raga per 10.000 penduduk	2	4	-	408	408
4	Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk	1	1	10	10	10

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2018-2012

Tabel 2.26
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	Cabang dan Tingkat	2008	2009	2010	2011	2012
Nasional						
1	Cabang Atletik	0	0	0	0	3
2	Cabang Renang	6	0	0	0	0
3	Cabang Anggar	1	0	0	0	2
4	Cabang Aeromodelling	0	0	0	0	2
5	Cabang Angkat Berat/Besi/Binaraga	6	0	0	0	2
6	Cabang Balap Motor	0	0	0	0	1
7	Cabang Biliar	0	0	0	0	2
8	Cabang Bola Basket	3	0	0	0	1
9	Cabang Bola Volley	2	0	0	0	3
10	Cabang Bolling	0	0	0	0	1
11	Cabang Dayung	10	0	0	0	4
12	Drum Band	1	0	0	0	0
13	Cabang Gantole	0	0	0	0	1
14	Cabang Golf	0	0	0	0	2
15	Cabang Gulat	7	0	0	0	8
16	Cabang Hoki	8	0	0	0	0
17	Cabang IPSI	0	0	0	0	1
18	Cabang judo	4	0	0	0	2
19	Cabang Karate	2	0	0	0	2
20	Cabang Kempo	3	0	0	0	4
21	Cabang Panahan	0	0	0	0	3
22	Cabang Panjat Tebing	0	0	0	0	2
23	Cabang PBSI	1	0	0	0	0
24	Cabang Senam	0	0	0	0	3
25	Cabang Sepaktakraw	0	0	0	0	2
26	Cabang Softball/Baseball	5	0	0	0	17
27	Cabang Squash	2	0	0	0	0
28	Cabang Tae Kwondo	2	0	0	0	1
29	Cabang Tarung Derajat	1	0	0	0	3
30	Cabang Tennis Meja	1	0	0	0	0
31	Cabang Tennis Lapangan	1	0	0	0	1
Provinsi						
1	Cabang Atletik	12	12	9	12	12
2	Cabang Renang	30	30	14	32	35
3	Cabang Anggar	22	22	19	19	19

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Cabang dan Tingkat	2008	2009	2010	2011	2012
4	Cabang Aeromodeling	9	9	9	9	9
5	Cabang Angkat berat/besi/binaraga	39	39	37	39	39
6	Cabang Balap Motor	6	6	4	6	6
7	Cabang Balap Sepeda	9	9	8	9	9
8	Cabang Berkuda	5	5	4	5	5
9	Cabang Biliar	10	10	8	10	10
10	Cabang Bola Basket	30	30	20	30	30
11	Cabang Bola Volley	40	40	34	40	40
12	Cabang bowling	9	9	6	9	9
13	Cabang Bridge	17	17	16	17	17
14	Cabang Catur	12	12	10	12	12
15	Cabang Dayung	30	30	28	30	30
16	Cabang Gantole	4	4	2	4	4
17	Drumband	28	28	24	28	28
18	Cabang Golf	7	7	7	7	7
19	Cabang Gulat	30	30	20	30	30
20	Cabang Hoki	39	39	36	39	39
21	Cabang IPSI	28	28	8	28	28
22	Cabang Judo	22	22	16	22	22
23	Cabang Karate	20	20	18	20	20
24	Cabang Kempo	21	21	19	21	21
25	Cabang Panahan	16	16	13	16	16
26	Cabang Panjat Tebing	15	15	12	15	15
27	Cabang Paralayang	6	6	4	6	6
28	Cabang PBSI	12	12	6	12	12
29	Cabang Senam	16	10	6	16	10
30	Cabang Sepaktakraw	16	14	12	16	14
31	Cabang Softball/Baseball	50	47	47	50	47
32	Cabang Squash	17	14	12	17	14
33	Cabang Tae Kwondo	15	13	13	15	13
34	Cabang Tarung Drajat	20	18	17	20	18
35	Cabang Tennis Meja	14	14	9	14	14
36	Cabang Tennis Lapangan	10	8	6	10	8
37	Cabang Terjun Payung	3	3	3	3	3
38	Cabang Tinju	12	8	6	12	8
39	Cabang Wushu	9	9	9	9	9
40	Cabang Sepak Bola	28	28	28	28	28

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2018-2012

B. Pembangunan Seni Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda, namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat

Tabel 2.27
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan yang di Lestarikan
Kabupaten Bandung 2008-2012

No.	Pelstarian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Benda	8	8	14	21	26
2.	Situs	17	17	29	34	45
3	Kawasan	5	5	7	9	17

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2018-2012

Tabel 2.28
Jumlah Keragaman Budaya yang dilestariakan
Kabupaten Bandung 2008-2012

No.	Ragam Budaya	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Seni Sunda	29	29	29	29	29
2.	Upacara Adat	24	24	24	24	24
3	Kampung/Rumah Adat	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2018-2012

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu : Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan, yaitu :

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan

penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	349.548 Orang	356.555 Orang	400.917 Orang	395.406 Orang	410.573 Orang
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	456.903 Orang	400.438 Orang	402.631 Orang	409.988 Orang	420.229 orang
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	76,50%	89,04%	99,57%	99,44%	97,70 %
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	105.494 Orang	106.608 Orang	154.751 Orang	141.700 Orang	139.155 Orang
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	198.798 Orang	206.499 Orang	190.535 Orang	194.100 Orang	185.772 Orang
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	53,07%	51,63%	81,22%	73,00%	74,91 %
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 thn	46.102 Orang	46.621 Orang	71.186 Orang	59.950 Orang	63.798 Orang
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	187.292 Orang	178.17 Orang	171.552 Orang	175.077 Orang	186.171 Orang
3.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	24,62%	26,17%	41,50%	33,67%	34,27%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun (2006-2010) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2008-2012

• **Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Selama kurun waktu 2008-2012 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah mencapai 1:226 dimana peningkatan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dari tahun 2011 di imbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. sedangkan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTS (13-15 tahun) mengalami penurunan dari tahun 2011 namun untuk jumlah sekolah mengalami peningkatan dengan capaian rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2012 mencapai 1:407. untuk jenjang sekolah SMA/MA/SMK jumlah penduduk usia 16-18 tahun mengalami peningkatan dan diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah SMA/MA/SMK sehingga tercapai rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2012 sebesar 1:694.

Tabel 2.30
Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk
Usia Sekolah di Kabupaten Bandung Tahun 2008- 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1 SD/MI						
1.1.	Jumlah sekolah	1547	1553	1593	1.536	1.578
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	456.903	400.438	402.631	409.988	397.093
1.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	1 : 295,35	1 : 257,85	1:252,75	1 : 267	1 : 252
2 SMP/MTs						
2.1.	Jumlah sekolah	401	411	473	443	456
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	198.798	206.499	190.535	194.100	168.281
2.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - 15 Tahun	1 : 495,76	1 : 502,43	1:402,82	1 : 438	1 : 369
3 SMA/MA/SMK						
3.1	Jumlah sekolah	238	250	253	259	269
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	187.292	178.170	171.552	175.077	186.171
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 - 18 Tahun	1 : 786,94	1 : 712,68	1:678,07	1 : 676	1:692

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2008-2012).

• **Rasio Guru/murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2012 ketersediaan guru di Kabupaten Bandung untuk seluruh jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dengan capaian jumlah guru SD berjumlah 17.097 guru, SMP 10.988 guru dan SMA sebanyak 7.707 guru. begitu juga dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA pada tahun 2012 mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi rasio jumlah guru terhadap murid yang semakin baik di tahun 2012. untuk penurunan jumlah guru dan jumlah murid per jenjang pendidikan baik SD, SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Bandung terjadi pada tahun 2010. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	15.159	15.936	14.363	15.475	17.097
1.2.	Jumlah Murid	403.247	410.245	419.990	420.242	416.951
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 26,6	1 : 25,74	1 : 29,24	1 : 25	1 : 24,01
				1:29,24		1:23
2	SMP/MTs.					
2.1.	Jumlah Guru	9.794	10.003	9.694	10.671	10.988
2.2.	Jumlah Murid	143.328	143.411	192.851	150.141	156.276
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 14,63	1 : 14,34	1:19,89	1 : 14	1:14
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Guru	6.397	6.970	6.370	7.514	7.736
3.2	Jumlah Murid	67.476	69.799	123.027	80.637	83.648
3.3	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 10,55	1 : 10,12	1:19,31	1 : 10,7	1:10,8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2008-2012)

• **Rasio Guru/murid Per Kelas Rata-rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2012, rasio guru/kelas SD/MI terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12 tahun di Kabupaten Bandung adalah 1 : 1,17 Interpretasi dari angka di atas adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh 1,17 ≈ 1 orang guru. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.32
Rasio Guru Per Kelas Rata-rata Terhadap Jumlah Murid
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	15.159	15.936	14.363	17.011	17.097
1.2.	Jumlah Kelas	11.724	11.474	9.668	12.083	12.202
1.3.	Rasio Guru/Kelas	1 : 1,29	1 : 1,39	1:1,48	1:1,4	1 : 1,17
1.4.	Jumlah Murid	403.247	410.245	419.990	420.242	416.951
1.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 34	1 : 36	1 : 43	1 : 34,8	1 : 42
1.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:1,29:34,4	1:1,39:35,75	1:1,48:43,44	1:1,4:34,8	1:1,17:34,2

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	9.794	10.003	9.694	10.671	10.988
2.2	Jumlah Kelas	3.389	3.763	3.441	3.943	4.226
2.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 2,89	1 : 2,66	1:2,8	1:2,71	1 : 2,60
2.4	Jumlah Murid	143.328	143.411	192.851	150.141	156.276
2.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 42	1 : 38	1 : 56	1:38,08	1 : 36,98
2.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:2,89 :42,3	1:2,66:38,11	1:2,8:56	1:2,71:38,08	1:2,60:36,98
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Guru	6.397	6.970	6.370	7.514	7.736
3.2	Jumlah Kelas	1.837	2.093	1.883	2.483	2.452
3.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 3,48	1 : 3,33	1:3,38	1:3,30	1 : 3,30
3.4	Jumlah Murid	67.476	69.799	92.712	80.637	83.648
3.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 37	1 : 33	1 : 49	1:32,48	1 : 35,91
3.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:3,48:36,73	1:3,33:33,35	1:3,38:49	1:3,03:32,48	1:3,30:35,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2008-2012).

• **Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik**

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Jika melihat jumlah ruang kelas pada periode tahun 2008- 2012 kondisi ruang kelas yang baik terus mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2009 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan jumlah ruang kelas kondisi baik pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup tinggi. namun dengan perbaikan dan pembangunan yang cepat pada tahun 2011 dan 2012 kondisi ruang kelas yang baik meningkat melebihi tahun 2008 dan 2009 sebelum terjadi bencana gempa bumi.

Tabel 2.33
Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	5.029	5.048	3.238*	5.311	6,019
1.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	10.288	9.132	4.633*	9.046	9,805
1.3.	Persentase	48,88	55,28	57,21	58,71	61,39
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	2.427	2.860	2.542*	2.651	2,791
2.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	3.429	3.969	2.423*	3.631	3,854
2.3.	Persentase	70,78	72,06	78,91	73,01	72,42
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah ruang kelas kondisi baik	1.254	1392	1.167*	1.505	1,797
3.2	Jumlah seluruh ruang kelas	1.740	1.882	1.380*	1.906	2,329
3.3	Persentase	72,07	73,96	76,27	78,96	77,16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2008-2010).

• **Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini/TK**

Pendidikan anak usia dini (PAUD)/taman kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Saat ini berbagai bidang ilmu pendidikan berkembang sangat pesat. Keadaan itu membuka wawasan baru dalam memahami dan mengubah cara mendidik anak. Mekipun pada tahun 2012 persentase jumlah siswa dan jumlah penduduk usia sekolah PAUD/TK mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2008-2011 namun tetap saja pelaksanaan PAUD/TK baru menjangkau sebagian kecil masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah siswa TK/RA yang baru mencapai sebesar 33,12 % pada tahun 2012.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi capaian PAUD di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.34
Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.1.	Jumlah Siswa TK/RA (Jiwa)	29.525	29.525	29.525	15.272	67.659
1.2.	Jumlah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun (Jiwa)	201.259	115.179	116.907	140.696	204,287
1.3.	Persentase (%)	14,67	25,63	25,26	10,85	33.12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Data Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2011-2012).

• **Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bandung cukup rendah, tidak mencapai 1%. angka putus sekolah dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2008-2012 pada jenjang pendidikan SD/MI angka putus sekolah terbesar atau tertinggi terjadi pada tahun 2008 mencapai 0,15. sedangkan untuk jenjang SMP/MTs angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 0,59. untuk jenjang SMA/MA/SMK angka putus sekolah terbesar terjadi pada tahun 2011 mencapai 0,87.

Tabel 2.35
Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah (Jiwa)	588	163	285	163	156
1.2.	Jumlah seluruh Siswa (Jiwa)	403.247	410.245	403.173	403.173	420,242
1.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,15	0,04	0,07	0,04	0.04
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah (Jiwa)	817	658	844	584	506
2.2.	Jumlah seluruh Siswa (Jiwa)	143.328	143.411	143.328	143.328	150,141
2.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,57	0,46	0,59	0,40	0.34
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Putus Sekolah (Jiwa)	403	541	391	586	458
3.2	Jumlah seluruh Siswa (Jiwa)	67.476	69.799	67.476	67.476	80,637
3.3	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,60	0,78	0,58	0,87	0.57

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2008-2012)

- **Angka Kelulusan Siswa**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua.

Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Bandung pada jenjang sekolah dasar (SD/MI) mengalami penurunan persentase kelulusan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 5,38 % dari tahun 2009. sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan 3,57 % dari tahun 2010. untuk tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan melebihi tahun-tahun sebelumnya. Untuk jenjang SMP/MTs penurunan angka kelulusan terjadi pada tahun 2010 dengan penurunan cukup tinggi sebesar 25,31% dari capaian tahun 2009. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada kurun waktu 5 tahun 2008-2012 angka kelulusan selalu mengalami kenaikan atau tidak terjadi penurunan.

Tabel 2.36
Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	55.096	55.220	50.300	56.912	63,476
1.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas VI	57.743	57.241	55.220	65.028	65,028

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	95,42	96,47	91,09	87,52	97.61
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	37.490	42.550	30.049	44.969	46,000
2.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	43.328	44.357	42.550	47.286	47,286
2.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	86,53	95,93	70,62	95,10	97.28
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	16.495	17.271	15.091	21.235	22,642
3.2	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	19.544	20.068	17.271	23.556	23,556
3.3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	84,40	86,06	87,38	90,15	96.12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).

• Angka Siswa Melanjutkan Sekolah

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa baik jenjang pendidikan SD/MI maupun jenjang pendidikan SMP/MTs. belum tentu selaras dengan jumlah siswa yang dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Melanjutkan sekolah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi persoalan tersendiri bagi siswa yang tidak mampu. Kendati dinyatakan lulus, belum tentu mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari persentase siswa SMP/MTs. yang dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, di mana pada tahun 2012 angka tersebut mengalami penurunan dengan mencapai 67,22 %. Angka tersebut menurut dari tahun 2010 yang mencapai 99,75 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi siswa melanjutkan sekolah di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2008,2009,2010, dan 2012.

Tabel 2.37
Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke SMP/MTs.	51.778	52.940	50.094	61.182	58,474
1.2.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	55.096	55.220	50,300	56.912	63,476
1.3.	Persentase	93,98	94,20	94,97	93,02%	92.12
2.	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK/MA	25.919	27.152	25,736	67.887	30,921
2.2.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	37.490	42.550	44,247	44.969	46,000
2.3.	Persentase	69,14	63,81	99,75	66,24	67.22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Data Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).

• **Kualifikasi Guru Berpendidikan \geq S1**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, khususnya yang tercantum pada pasal 29 ayat 1-6, dinyatakan bahwa tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Oleh karena itu guru-guru yang masih belum berpendidikan S1 harus mengikuti program pendidikan kualifikasi ke S1 yang diselenggarakan oleh LPTK (UPI, STIKIP, atau FKIP) yang memiliki program studi terakreditasi pada BAN-PT. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, khususnya yang tercantum pada pasal 11, yang menyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Persentase jumlah tenaga pendidik/guru di Kabupaten Bandung untuk jenjang pendidikan SD/MI yang berpendidikan \geq S1 pada akhir tahun 2012 cukup mengembirakan dimana capaian pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, khusus pada jenjang SMA/MA jumlah guru yang berpendidikan \geq S1 mencapai 92,27%.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi capaian kualifikasi guru berpendidikan \geq S1 per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2008-2012

Tabel 2.38
Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1 berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1	5.157	6.371	5.310	10.750	11.610
1.2.	Jumlah total guru	15.159	15.936	14,363	17.011	17.097
1.3.	Persentase	34,02	39,98	36,97	63,19	67,91
2.	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1	6.615	8.008	7,422	9.030	9.437
2.2.	Jumlah total guru	9.794	10.003	9.694	10.671	10.988
2.3.	Persentase	67,54	80,06	76,56	84,62	85,88
3.	SMA/MA					
3.1	Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1	5.317	6.154	5.110	6.904	7.138
3.2	Jumlah total guru	6.397	6.970	6.114	7.482	7.736
3.3	Persentase	83,12	88,29	83,17	92,27	92,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Data Statistik Pendidikan Tahun 2008-2012).

2. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita**

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sebanyak 4.081 buah dan jumlah Balita sebanyak 284.397 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1 : 70. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Bandung melayani 70 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012

Tabel 2.39
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah posyandu	3.883	3.926	3.991	4.068	4.081
2.	Jumlah balita	280.874	284.112	308.213	306.453	284.397
3.	Rasio	1 : 72	1 : 72	1 : 77	1 : 75	1 : 70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2008-2012).

• **Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Persatuan Penduduk**

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2012 mencapai 1 : 21.620. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/ Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 21.620 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.40
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Puskesmas	61	61	61	62	62
2.	Jumlah Poliklinik	318	317	309	254	24
3.	Jumlah Pustu	71	69	85	77	69
	Jumlah 1 s/d 3	450	447	455	393	155
4.	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.299.988	3.351.048
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 51.262	1 : 52.014	1 : 52.714	1 : 53.226	1 : 54.049
	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	1 : 9.833	1 : 10.009	1 : 10.407	1 : 12.992	1 : 139.627
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 44.042	1 : 45.983	1 : 37.830	1 : 42.857	1 : 48.566
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 6.949	1 : 7.098	1 : 7.067	1 : 8.397	1 : 21.620
5.	Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
6.	Jumlah Desa/kelurahan	275	276	276	276	280
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2:1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)

• Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung mengalami penambahan dari jumlah 6 rumah sakit pada tahun 2009-2010 menjadi 7 rumah sakit pada tahun 2011-2012 jumlah rumah sakit ini terdiri dari 4 rumah sakit daerah, 2 rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit AU/AD/POLRI. 7 rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung ini melayani 3.351.048 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dengan capaian rasio 1 : 478.721 dalam artian 1 rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung melayani 478.721 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2012. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.41
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	2	3	3	4	4
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	2	2	2	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	7	6	6	7	7
5.	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.290.437	3.351.048
6.	Rasio	1 : 446.715	1 : 528.810	1 : 459.364	1 : 470.062	1 : 478.721

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2008-2010)

• **Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk.

Jumlah dokter di Kabupaten Bandung pada tahun dalam kurun waktu 2008-2012 masih jauh dari capaian ideal, dimana rasio dokter terhadap jumlah penduduk masih di atas 1 : 2.500. hal ini terjadi Karena peningkatan jumlah penduduk dari tahun ketahun tidak sedending dengan peningkatan jumlah dokter yang ada di Kabupaten Bandung. Jika dilihat pada tahun 2008-2011 jumlah dokter selalu meningkat setiap tahunnya namun peningkatan jumlah penduduk lebih tinggi dan lebih pesat di bandingkan peningkatan jumlah dokter yang ada di Kabupaten Bandung sehingga cukup sulit untuk mencapai rasio ideal.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-20120.

Tabel 2.42
Jumlah Dokter di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Dokter	221	339	326	459	141
2.	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.290.437	3.351.048
3.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,071	0,107	0,102	0,139	0,042
4.	Rasio dokter terhadap penduduk	1 : 14.149	1 : 9.359	1 : 9.863	1 : 7.169	1 : 23.766

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2008-2010).

• **Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan**

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi.

Jumlah ibu bersalin pada tahun 2012 mencapai 66.234 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 42.428 orang atau sekitar 64,06 %. capaian ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 persentase jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 82,94%. dengan kata lain pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 18,88% dari tahun 2011.

Tabel 2.43
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	47.798	52.619	53.287	54.376	42.428
2.	Jumlah Total Ibu Bersalin	62.843	65.230	68.681	65.559	66.236
3.	Persentase	76,06	80,67	82.10	82,94	64,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2008-2012).

• **Jumlah Balita Gizi Baik**

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Bandung. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk terus mengalami penurunan dari 0,77 % pada tahun 2008 menjadi 0,02 % pada tahun 2012. hal ini diikuti dengan meningkatnya balita gizi baik dengan capaian sebesar 99,98 % dari seluruh jumlah balita yang ada di Kabupaten Bandung.

Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.44
Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Balita Gizi Baik	239.112	242.164	243.166	257.538	284.346
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	2.160	201	148	159	51
3.	Jumlah Balita seluruhnya	280.874	284.112	308.213	306.453	284.397
4.	Persentase :					
	- Gizi Baik	85,13	85,24	78,90	84,04	99,98
	- Gizi Buruk	0,77	0,07	0,05	0,05	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Data Profil Kesehatan Tahun 2008-2012).

- **Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin**

Tabel 2.45
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Tahun	Jumlah Rujukan Masyarakat Miskin
1.	2008	25.284
2.	2009	29.014
3.	2010	358.543
4.	2011	172.890
5.	2012	560.947

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

3. Pekerjaan Umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 27,52 %, pada tahun 2012 kondisi tersebut menaik menjadi 43,34 %. Demikian sebaliknya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami penurunan, yaitu dari 23,74 % pada tahun 2008 menjadi 18,48 % pada 2012.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.46
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	Panjang Jalan (km)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kondisi Baik	317,72	395,56	355,57	413,28	500,78
2.	Kondisi Sedang Rusak	316,22	207,49	235,19	229,09	233,06
3.	Kondisi Rusak	274,06	338,96	319,01	299,7	213,46
4.	Kondisi Rusak Berat	246,55	213,35	245,58	213,82	208,05
5.	Jalan secara keseluruhan	1.154,55	1.155,35	1.155,35	1.155,90	1.155,34
	Poporsi Kondisi Baik (%)	27,52	34,24	30,78	35,75	43,34
	Poporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	27,39	17,96	20,36	19,82	20,17
	Poporsi Kondisi Rusak (%)	23,74	29,34	27,61	25,93	18,48
	Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)	21,35	18,47	21,26	18,5	18,01

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2012.

- **Proporsi Jumlah Jembatan**

Mengenai proporsi jembatan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2012.

Tabel 2.47
Proporsi Jumlah Jembatan di Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kondisi Baik (unit)	163	287	385	524	582
2	Kondisi Rusak (unit)	85	217	369	280	222
	Jumlah Keseluruhan* (unit)	248	504	754	804	804
	Proporsi Kondisi Baik (%)	65,73	56,94	51,06	65,17	72,39
	Proporsi Kondisi Rusak (%)	34,27	43,06	48,94	34,83	27,61

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2012

Keterangan :

**Jumlah jembatan berdasarkan hasil pendataan tahun berjalan*

- **Rasio Jaringan Irigasi**

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya tanaman padi. Jaringan irigasi di kabupaten Bandung terdiri atas jaringan irigasi teknis dan non teknis. Luas areal yang dilayani oleh jaringan irigasi masih didominasi oleh irigasi non teknis yang mencapai 61,48% sedangkan irigasi teknis hanya 38,52%. Kewenangan pengelolaan irigasi non teknis dilaksanakan oleh Pemerintah desa dengan luas areal 0–25 ha dan Kabupaten dengan luas areal > 25 ha. Total luas irigasi non teknis mencapai 22.589,78 ha terbagi atas kewenangan desa lk. 3.736,89 ha dan kewenangan kabupaten lk.18.852,89 ha. Luas areal yang dilayani irigasi teknis lk.14.150,65 ha yang dikelola oleh Provinsi sebanyak 4 Daerah Irigasi (DI) Ciharang,

Cirasea, Wanir dan Wangisagara dan Irigasi Lintas sebanyak 7 DI (Cangkuang, Depok, Ciyasana, Buahbatu, Cibeunying-Ciateul, Ciregol dan Leuwikuya) dengan total luasan lk.11.039 ha. Pengelolaan Irigasi teknis oleh Kabupaten meliputi 8 DI (Leuwikuray, Juntihilir, Kiaraeunyeuh, Baros, Cibeureum, Cigadog, Cibodas dan Sudiplak) dengan luas areal lk.3.111,65 ha. Berikut adalah secara lengkap mengenai kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bandung;

Tabel 2.48
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012

No	Kewenangan	Kondisi	2008 (Km)	2009 (Km)	2010 (Km)	2011 (Km)	2012 (Km)
1	Kabupaten Bandung (Teknis)	Baik	7.235,60	8.320,94	7.731	23.877	25.505
		Rusak Ringan	3.617,80	5.426,70	8.929	8.321	6.874
		Rusak Berat	25.324,60	22.430,36	19.518	3.980	3.799
		Jumlah	36.178	36.178	36.178	36.178	36.178
2	Kabupaten Bandung (Non Teknis)	Baik	216,88	249,42	401.690	715,69	791,60
		Rusak Ringan	108,44	162,66	318.680	249.406	211.453
		Rusak Berat	759,09	672,34	364.050	119.281	81.328
		Jumlah	1.084,42	1.084,42	1.084,42	1.084,38	1.084,38
Total			37.262,42	37.262,42	37.262,42	37.262,38	37.262,38

Sumber : Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2012, BPS

Jaringan Drainase di Kabupaten Bandung terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum dari Hulu ke Hilir beserta anak-anak sungainya. Sungai Citarum merupakan sungai lintas Kabupaten/Kota, yang berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara di Laut Jawa. Untuk skala nasional, wilayah Sungai Citarum merupakan bagian dari wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Ciliwung-Cisadane-Citarum. Mengingat keberadaan Sungai Citarum yang sangat penting sebagai penyedia air baku ibukota, mempunyai dampak ekonomi serta secara regional menjadikannya sebagai wilayah sungai strategis nasional sehingga kewenangannya berada di pemerintah Pusat dan Provinsi.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural. Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat meluapnya Sungai Citarum terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005 dan 2010. Namun demikian, saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum.

Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi genangan juga terjadi di Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Cangkuang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, Cileunyi. Diharapkan pada tahun 2025, Lokasi-lokasi genangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Pada zona Citarum Hulu, permasalahan yang menakibatkan terjadinya luapan dan penurunan kualitas sungai diantaranya sebagai berikut; berkurangnya areal hutan lindung, berkembangnya permukiman tanpa

perencanaan yang baik, lahan kritis, erosi, sedimentasi, adanya limbah peternakan, adanya budidaya pertanian tidak ramah lingkungan, adanya limbah (industri, domestik dan sampah), dan permasalahan tata ruang. Pada Zona Citarum Hilir permasalahan yang terjadi antara lain terjadinya degradasi prasarana pengendalian banjir, pencemaran, sedimentasi, permasalahan tata ruang (pemanfaatan bantaran sungai dan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya),

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Permasalahan Banjir di Cekungan Bandung dapat dilakukan secara Filosofis, Normatif, dan Sosial Budaya. Secara Filosofis, diantaranya dengan melakukan relokasi penduduk dari wilayah banjir Secara Normatif dengan melalui Metode Struktur yaitu melalui konstruksi teknik sipil (membuat waduk atau embung, membuat kolam retensi, membuat/memperbaiki tanggul penahan banjir, melakukan normalisasi sungai, membuat polder dan sumur-sumur resapan) Secara Normatif Menggunakan Metode Non Struktur, yaitu melakukan manajemen daerah rawan Banjir (Sistem peringatan dini, diseminasi peringatan ancaman dan sistem evakuasi banjir, pembuatan peta bahaya banjir, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan banjir, asuransi bencana banjir) dan Manajemen Daerah Airan Sungai (penataan ruang, pengendalian erosi di hulu DAS, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian perijinan pemanfaatan lahan, pengendalian kualitas air sungai, kelembagaan/otorita DAS Citarum Hulu, pembuatan peta kawasan lindung, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk konservasi hulu DAS). Secara Sosial dan Budaya melalui mata pencaharian, perubahan perilaku permukiman sehat dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang positif.

Program Penanganan Banjir yang diharapkan dilakukan di Cekungan Bandung untuk 20 tahun kedepan adalah;

- Tanggap Darurat Daerah Banjir Dayeuh kolot, Baleendah dan Sekitarnya
- Perbaiki drainase di Cieunteung dan Andir
- Pembuatan Situ di Cieunteung serta relokasi penduduk
- Pemeliharaan berkala S. Citarum, S. Citepus, S. Cisangkuy dan S. Cikapundung
- Tersusunnya FS dan DED Pengelolaan Banjir Cekungan Bandung
- Pembuatan waduk-waduk kecil
- Penanggulangan Erosi dan Sedimentasi di hulu

4. Perumahan Rakyat

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase Luas Permukiman yang Tertata**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah

satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman.

Dari tahun 2009 sampai tahun 2011 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 12.469,50 ha atau mencapai 87,22% dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Bandung

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas area permukiman tertata (ha)	-	8.044,39	11.649,05	12.469,50	12.508,50
2.	Total Luas area permukiman (ha)	-	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	-	56,27	81,84	87,22	87,49

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Bandung 2012.

• Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut.

pada tahun 2011 dan 2012, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2008-2010 dimana luas pemukiman layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mencapai mencapai 12.508,50ha. Sedangkan luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung sebesar 14.297,30 Ha dengan kata lain sebesar 87,49 % luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung di dominasi oleh pemukiman layak huni hal ini mempengaruhi jumlah rumah layak huni dimana jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mencapai 713.351 unit rumah dari jumlah rumah tangga yang ada sebesar 865.623 (RT) yakni 82,41 % rumah tangga di Kabupaten Bandung menempati rumah layak huni.

Tabel 2.50
Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas permukiman layak huni (ha)	5.111,99	5.117,46	5.124,03	12.469,50	12.508,50
2.	Luas wilayah permukiman (ha)	14.200,22	14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30
3.	Persentase kawasan permukiman layak huni	35,99	35,79	35,84	87,22	87,49
4.	Jumlah rumah layak huni (unit)	575,446	576,940	577,680	711.486	713.351
5.	Jumlah rumah tangga (RT)	-	885.674	831.988	853.101	865.623
6.	Persentase rumah layak huni	-	79,80%	85%	83,40	82,41

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung 2012

- **Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih**

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertasih melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui : pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD.

Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pertasih belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung tercatat pada tahun 2011 dan 2012 jumlah rumah tangga yang mendapat akses air bersih mengalami penurunan dari tahun 2008-2009 dimana pada tahun 2012 jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih hanya mencapai 620.379 (RT) berkurang dari tahun awal 2008 yang mencapai 669.368. semakin meningkatnya jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bandung seharusnya di imbangi dengan pelayanan air bersih yang terus meningkat.

Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.51
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	669.368	832.806	763.184	615.705	620.379
2.	Jumlah rumah tangga	816.832	885.674	831.988	853.101	865.623
3.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	81,95	94,03	91,73	72,17	71,67

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

- **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)**

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut : 1) Fasilitas air

bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten Bandung yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 98,29 % pada tahun 2008. Kondisi ini meningkat menjadi 98,47 % pada tahun 2009. namun pada tahun 2010,2011 dan 2012 jumlah rumah tinggal yang memiliki fasilitas pembuang atau sanitasi semakin berkurang.

Berikut adalah gambaran kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.52

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja) di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja	802.872	872.082	797.392	450.651	460.750
2.	Jumlah rumah tinggal	816.832	885.674	831.988	853.101	865.623
3.	Persentase	98,29	98,47	95,84	52,83	53,23

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2011-2012).

- **Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per Satuan Penduduk**

Areal pemakaman pada umumnya terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu 1) Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah; 2) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan; 3) Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Di Kabupaten Bandung terdapat 2 (dua) area pemakaman, yaitu TPU dan TPBU. Kebutuhan akan TPU semakin meningkat diiringi dengan mortalitas penduduk yang terus bertambah. Hal ini di imbangi dengan ketersediaan lokasi TPU yang ada di Kabupaten Bandung pada kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2008-2012 terus meningkat.

Berikut ini secara lengkap mengenai kondisi area pemakaman di Kabupaten Bandung tahun 2008- 2012

Tabel 2.53
Daya Tampung Pemakaman di Kabupaten Bandung Tahun 2009-2012

No	Uraian	S/D 2008			S/D 2009			S/D 2010			S/D 2011			2012		
		Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)	93	247.982	43,397	108	269.574,00	47.175,45	128	282.073	49.362,78	138	291.170	60.418	156	310.395	64.407
2.	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	9	328.627	57,509	9	328.627,00	57.509,73	9	328.627	57.509,73	9	328.627	68.190	9	328.627	68.190
3.	Tempat pemakaman khusus (TPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	102	576.609	101	117	598.201,00	104.685,18	137	610.7	106.872,50	147	619.797	128.608	165	639.022	132.397
6.	Jumlah penduduk (jiwa)	3.127.008			3.172.860			3.215.548			3.299.988			3.351.048		
7.	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	1 : 30657			1 : 27118			1 : 23471			1 : 22449			1 : 20309		

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

- **Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran**

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami penambahan armada mobil pemadam yakni pada tahun 2008-2012 jumlah mobil pemadam kebakaran sebanyak 7 (tujuh) unit. Adapun luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 3.351.048 jiwa. Jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2012 sebanyak 220 kali. Dari data ini dapat diketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah Kabupaten Bandung, yaitu 1 : 25.177. Ini artinya bahwa satu mobil pemadam kebakaran harus melayani area Kabupaten Bandung seluas 25.177 ha.

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Permendagri no. 62 tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran.

Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Damkar saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung tahun 2008-2012 baru mencapai 35 % dengan tingkat waktu tanggap (*respon time*) penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 25 menit (standar yang ditetapkan dalam Permendagri No. 62 tahun 2008 adalah 15 menit). Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai presentase kondisi existing wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang terlayani.

Nilai presentase cakupan pelayanan kebakaran akan tetap/konstan apabila jumlah WMK atau Pos Damkar berjumlah tetap/tidak ada penambahan (*standard* presentase cakupan pelayanan kebakaran yang ditetapkan dalam Permendagri no. 62 tahun 2008 adalah mencapai 75%). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.54
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.290.437	3.351.048
3.	Luas Wilayah Kab. Bandung (ha)	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67
4.	Jumlah Kejadian Kebakaran (kali)	173	172	168	192	220
5.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran thd Luas Wil Kab Bdg	1 : 25.177	1 : 25.177	1:25.177	1 : 25.177	1 : 25.177

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
6.	Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bandung	30	30	30	30	48
7.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	20 %	23 %	23 %	25 %	27 %

Sumber : Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

5. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase Bangunan ber-IMB per Seluruh Bangunan**

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/ membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai Persentase Bangunan ber-IMB terhadap seluruh bangunan di Kabupaten Bandung tahun 2012.

Tabel 2.55
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012

NO.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	2.483	3.028	3.514	4.754	21.045
2.	Jumlah Bangunan	1.144.537	1.144.933	1.148.437	819.319	865.623
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,22 %	0,26 %	0,30 %	0,58 %	1 : 30

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

6. Perencanaan Pembangunan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ketersediaan Dokumen Perencanaan**

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2008-2009, untuk RPJP baru disahkan pada tahun 2011. Demikian pula dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD pada tahun 2008-2009 tidak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, akan tetapi

ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012. Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012 :

Tabel 2.56
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1.	Dokumen RTRW yg telah ditetapkan dgn PERDA	√		√		√		√		√		Perda No.3/2007
2.	Dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		√		√		√	√		√		Perda No.7/2011
3.	Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	√		√			√	√		√		Perda No.11/2011
4.	Dokumen Renstra SKPD yg telah ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah		√		√		√		√		√	Renstra-SKPD yang tersedia (baru sebagian) ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD (sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010)
5.	Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	√		√		√		√		√		Perbup No.262011 dan Perbup No.20/2012
6.	Dokumen Renja SKPD yg telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah		√		√	√			√		√	Renja-SKPD yang tersedia ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD (sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

7. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio Izin Trayek**

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Bandung wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008 sampaidengan 2011 sebanyak 2.141 izin. Jumlah ini

tidak mengalami peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2011). Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Izin Trayek perkotaan	2.141	2.141	2.141	2.141	421
2.	Izin Trayek perdesaan	260	260	260	260	0
3.	Jumlah Izin Trayek	2.401	2.401	2.401	2.401	421
4.	Jumlah penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.290.437	3.351.048
5.	Rasio Izin Trayek	0,00077	0,00076	0,00075	0,00073	0,00013

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

- **Jumlah Uji kir Angkutan Umum**

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten umum baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2012 sebanyak 31.635 unit kendaraan dari 41.514 unit kendaraan (76,20 %). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.58
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Angkutan Umum	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	9.645	7.281	75,49	4.330	3.489	80,58	8.972	8.176	91,13	13.468	13.326	98,95	15.810	11.572	73,19
2.	Mobil bus	659	514	78,00	203	176	86,70	452	441	97,57	1.357	3.736	275,31	2.815	3.085	109,59
3.	Mobil barang	480	375	78,13	267	259	97,00	25.264	23.974	94,89	21.017	17.498	83,26	22.439	16.975	75,65
4.	Kereta gandengan	8	0	0,00	8	0	0,00	16	0	-	-	12	N/A	225	2	0,89
5.	Kereta tempelan	2	0	0,00	2	2	100,00	52	52	100	-	13	N/A	225	1	0,44
	Jumlah	10.794	8.170	75,69	4.810	3.926	81,62	34.756	32.643	93,92	35.842	34.585	96,49	41.514	31.635	76,20

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

- **Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas**

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaannya yang terjadi. Pada tahun 2010, jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah 139. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada tahun 2009, yaitu sebanyak 152 unit. Jumlah ini hanya 1,23 %-nya dari jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia di jalan-jalan Kabupaten Bandung. Demikian pula pada tahun 2008 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas hanya mencapai 3,52 % dari 12.400 rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.59
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalulintas
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Tahun	Jumlah Pemasangan Rambu (unit)
1	2008	437
2	2009	152
3	2010	139
4	2011	261
5	2012	505

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

- **PROPORSI Jumlah TCs Penerangan Jalan Umum (PJU)**

Penerangan jalan umum merupakan salah satu prasarana jalan yang bertujuan untuk menerangi jalan-jalan umum pada malam hari, sehingga dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Selain itu PJU berfungsi sebagai hiasan kota dan lingkungan.

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai PJU di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.60
Proporsi Jumlah TC Penerangan Jalan Umum (PJU)
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s/d 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kondisi Baik (unit)	4.735	5.257	5.063	4.651	5.268
2	Kondisi Rusak (unit)	1.300	998	1.404	2.000	1.874
	Jumlah Keseluruhan PJU (unit)	6.035	6.255	6.467	6.651	7.142
	Proporsi Kondisi Baik (%)	78,46	84,04	78,29	69,93	73,76
	Proporsi Kondisi Rusak (%)	21,54	15,96	21,71	30,07	26,24
3	Jumlah PJU yang harusnya tersedia (unit)	23.107	23.107	23.107	23.107	23.107
	Proporsi Jumlah PJU yang ada terhadap jumlah PJU yang seharusnya tersedia (%)	26,12	27,07	27,99	28,78	30,91

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung 2012

8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling adalah sedikit 30% (tiga puluh persen). Luas RTH di Kabupaten Bandung tahun 2012 mencapai 33 ha. capaian ini masih jauh dari standar kebutuhan RTH yang seharusnya sebesar 52.871 Ha

Tabel 2.61
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	6,28 ha	6,92 ha	27,327 ha	28,287 ha	33 ha
2.	Luas wilayah (Perkotaan)	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49
	Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah.	0,026	0,029	0,113	0,119	0,137

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung tahun 2010.

Ñ **Status Penuaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri.**

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup menyangkut ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Dalam pengendalian pencemaran air, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengolahan air limbah yang berfungsi baik sehingga air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang. Dibuangnya air limbah melalui saluran khusus, dipasang alat ukur debit air limbah, dan diujinya kualitas air limbah setiap bulan; sementara ketentuan administrasi yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya izin pembuangan air limbah, dilakukannya pelaporan hasil pengujian kualitas air limbah dan pencatatan harian debit air limbah. Dalam pengendalian pencemaran udara, ketentuan teknis yang harus

dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengendalian pencemaran udara dan kelengkapannya yang berfungsi baik sehingga emisi cerobong memenuhi baku mutu sebelum dibuang, serta diujinya kualitas udara emisi dan ambien setiap 6 (enam) bulan; sementara ketentuan administrasi antara lain dilakukannya pelaporan hasil pengujian. Dalam pengendalian pengelolaan limbah B3, ketentuan teknis antara lain: dimilikinya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin dan dilakukannya pengelolaan limbah B3; sementara ketentuan administrasi antara lain: dimilikinya izin TPS Limbah B3, dilakukannya pelaporan pengelolaan limbah B3 termasuk neraca limbah B3 dan manifest. Berikut adalah Ratio Pencemaran Status Mutu Air Pada Industri pada tahun 2012.

Tabel 2.62
Status Pnaatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pengendalian Pencemaran Air					
	- Jumlah industri yang dipantau (menghasilkan air limbah)	-	131	144	152	163
	- Industri yang melakukan pengujian kualitas air limbah dan melaporkan secara rutin	-	75,33% (pengujian) 75,33% (pelaporan) 31,86% (rutin)	72,32% (pengujian) 70,44% (pelaporan) 41,07% (rutin)	66% (pengujian) 60% (pelaporan)	60%
	- Pnaatan Pengendalian Pencemaran Air	-	-	42%	52%	57%
2	Pengendalian Pencemaran Udara					
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan emisi)	-	143	170	189	189
	- Industri yang melakukan pengujian kualitas udara emisi cerobong limbah dan melaporkan secara rutin	-	45,4%	50%	61%	80%
	- Pnaatan Pengendalian Pencemaran Udara	-	-	46%	69%	77%
3	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3					
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan limbah B3)	-	156	156	175	174
	- Jumlah industri yang melakukan pengelolaan dan pelaporan pengelolaan limbah B3	-	23%	38%	43%	61%
	- Pnaatan Pengelolaan Limbah B3	-	-	38%	42%	50%

Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung

• **Prosentase Penaatan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup**

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Dalam pengendalian pencemaran air, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengolah air limbah yang berfungsi baik sehingga air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang, dibuangnya air limbah melalui saluran khusus, dipasangnya alat ukur debit air limbah, dan diujinya kualitas air limbah setiap bulan; sementara ketentuan administrasi yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya izin pembuangan air limbah, dilakukannya pelaporan hasil pengujian kualitas air limbah dan pencatatan harian debit air limbah. Dalam pengendalian pencemaran udara, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengendalian pencemaran udara dan kelengkapannya yang berfungsi baik sehingga emisi cerobong memenuhi baku mutu sebelum dibuang, serta diujinya kualitas udara emisi dan ambien setiap 6 (enam) bulan; sementara ketentuan administrasi antara lain dilakukannya pelaporan hasil pengujian. Dalam pengendalian pengelolaan limbah B3, ketentuan teknis antara lain: dimilikinya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin dan dilakukannya pengelolaan limbah B3; sementara ketentuan administrasi antara lain: dimilikinya izin TPS Limbah B3, dilakukannya pelaporan pengelolaan limbah B3 termasuk neraca limbah B3 dan manifest.

Berikut adalah kondisi penaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang tercatat pada BPLH pada tahun 2008-2010.

Tabel 2.63
Presentase Penuh Ketentuan Teknis dan Administrasi Usaha/Kegiatan
Bidang Lingkungan Hidup

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Pengendalian Pencemaran Air - Administrasi - Teknis	17% dari 150	24% dari 150	45% dari 150 74% dari 150	53% dari 158 58% dari 158	61% dari 175 65% dari 175
Pengendalian Pencemaran Udara - Administrasi - Teknis	42% dari 147 42% dari 147	44% dari 167 44% dari 167	48% dari 165 48% dari 165	64,4% dari 174 64,4% dari 174	80% dari 189 80% dari 189
Pengendalian Pencemaran Limbah B3 - Administrasi - Teknis	21% dari 155 34% dari 155	26% dari 156 48% dari 156	28% dari 156 54% dari 156	43% dari 175 65% dari 175	55% dari 174 71% dari 174

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung tahun 2008-2012

Keterangan : nilai persentase merupakan nilai yang dihitung apabila semua ketentuan administrasi dan teknis dipenuhi

• **Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara**

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh BPLH setiap tahun sejak tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH. Evaluasi terhadap hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya.

Pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet untuk menentukan status mutunya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.64
Pengujian Air dan Udara

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Pengujian Kualitas Air Sungai					
Lokasi Pengujian	70 lokasi, 3x pengujian	72 lokasi, 3x pengujian	75 lokasi, 3x pengujian	70 lokasi, 3x pengujian	70 lokasi, 3x pengujian
Status Mutu Air	97% cemar berat; 3% cemar sedang	96% cemar berat; 4% cemar sedang	99 % cemar berat; 1% cemar sedang	91% cemar berat 3% cemar sedang 1% cemar ringan	93% cemar berat 7% cemar sedang
Skor Storet Terburuk	S. Cibaligo Hilir (-144), S. Cikijing Hilir (-133)	S. Cipadaulun Hilir (-124), S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-115)	S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-142), S. Cibaligo Hilir (-133)	S. Baligo Hilir (-97), S. Citarik Hilir (-95) S. Cpadaulun setelah cikembang (-94)	S. Cisuminta Hilir (-123) S. Cibaligo (-111), S. Cikacembang hilir (-110)
Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk - BOD - COD	677 mg/L 1.444 /L	1.232 mg/L 1.549 mg/L	224 mg/L 492 mg/L	366 mg/L 809 mg?L	508 mg/L 640 mg/L
Pengujian Kualitas Udara Ambien					
Lokasi Pengujian	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik
Paremeter Tidak Memenuhi Baku Mutu	- Kebisingan 75,6 dB - TSP (debu) 262 µg/m ³	- Kebisingan 81,5 Db - TSP (debu) 401 µg/m ³	- Kebisingan 79,04 dB - TSP (debu) 395, 882, 972, 1.739, dan 2.139, µg/m ³	Kebisingan 70,53dB	- Kebisingan 85,59 dB - TSP (debu) 636 µg/m ³ , dan 318 µg/m ³

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2010.

Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu “cemar berat” dan hanya 1-4% berstatus “cemar sedang”. Adapun parameter yang dominan melampaui baku mutu rata-rata adalah: *fecal coliform*, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr⁶⁺. Status “cemar berat” ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu dengan parameter yang

umumnya melampaui baku mutu yaitu *fecal coliform*, pada tahun 2010 antara lain S. Cirawa (45.900/0,1 L), S. Ciburial (50.000/0,1 L), S. Cikawao (87.000/0,1L), S. Cibangoak (155.000/0,1), S. Cirasea Hulu (60.000/0,1L), dan Cikacembang Hulu (10.000/0,1L). *Fecal coliform* pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan.

Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing (Kabupaten Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi). Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan koordinasi dengan SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya.

a) Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.

Kerusakan hutan dan lahan telah memberikan dampak yang cukup luas, melalui kemerosotan keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan, penurunan kualitas tanah dan air hingga perubahan iklim ditingkat global yang saat ini kita hadapi. Tantangan bagi kita semua untuk mengendalikan kerusakan hutan dan lahan tersebut melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan factor produksi termasuk produksi biomasa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Di sisi lain kegiatan produksi biomasa yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomasa, sehingga dapat menurunkan mutu dan fungsinya, pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidupnya lainnya. Kerusakan tanah untuk produksi biomasa dapat disebabkan oleh sifat alami tanah, dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk produksi biomasa secara normal,

Salah satu jenis pelayanan minimal bidang lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota adalah Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.

Tabel 2.65
Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (% PI-SKT)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
% Pencapaian SPM	0	0	60	80	100

Sumber: BPLH Kab. Bandung

b) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan merupakan akibat dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan yang tidak dilaksanakan secara konsisten.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan maka perlu dilakukan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten dalam peningkatan penataan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya tutupan vegetasi, meningkatnya konservasi energi, menurunnya laju kemerosotan keanekaragaman hayati.

c) Kondisi Pengelolaan Lingkungan yang Bersifat Preventif

(1) Pelaksanaan Produksi Bersih

Upaya pengelolaan dan peningkatan kinerja lingkungan yang dilaksanakan sebagian besar difokuskan pada pengolahan di ujung (*end of pipe*), namun dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan, Bapedal (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) pada Tahun 1993 memperkenalkan *Produksi Bersih* atau Produksi Ramah Lingkungan. Sejak saat itu produksi bersih terus dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh sektor terkait di Indonesia.

Kegiatan yang berkaitan dengan produksi bersih di Kabupaten Bandung adalah :

- Tahun 2009 : sosialisasi produksi bersih, pelatihan 20 orang (SKPD dan pelaku usaha) dan implementasi pada 5 industri sebagai percontohan.
- Tahun 2010 : kegiatan in house training, implementasi produksi bersih, monitoring dan evaluasinya bagi 3 SKPD dan 7 pelaku usaha kegiatan industri. Penerapan produksi bersih pada 2 industri yang dibina menunjukkan adanya *triple win*, yaitu efisiensi biaya produksi, penghematan biaya pengelolaan lingkungan dan mengurangi *Non Product Output (NPO)* atau keluaran yang bukan hasil produksi/limbah

(2) Kegiatan yang telah dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak tersebut perlu dianalisis sejak awal perencanaan sehingga langkah pengendalian dampak

negative dan pengembangan dapat positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diantaranya Perda Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan), setiap pemrakarsa kegiatan diwajibkan untuk melakukan penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL/DPLH/SPPL.

Kegunaan dokumen tersebut bagi pemerintah adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegunaan bagi pemrakarsa kegiatan adalah memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan, serta sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan. Sedangkan bagi masyarakat adalah Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut.

Jumlah dokumen lingkungan yang sudah disetujui s.d Tahun 2010 adalah 376 buah (tidak termasuk dokumen SPPL). Untuk mengetahui sejauhmana implementasi dokumen lingkungan oleh pemrakarsa kegiatan, sejak Tahun 2007 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan dokumen lingkungan dengan jumlah kegiatan yang dipantau disesuaikan dengan alokasi keuangan yang ada (rata-rata berkisar 50-75 kegiatan/tahun), dengan hasil hanya 10-20% dari pemrakarsa kegiatan yang dipantau telah melaksanakan pengelolaan dan pemantuan lingkungan dengan kategori sangat baik dan baik.

d) Pelaksanaan Program Adipura

Program Adipura merupakan salah satu alat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya bagi masyarakat perkotaan, dan tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*Good Environmental Government*) dengan menciptakan kota yang bersih dan teduh (*Clean and Green City*). Pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Bandung di mulai sejak Tahun 2006, dengan lokasi Kota Soreang (terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Soreang, Kecamatan Katapang dan Kecamatan Kutawaringin). Dengan perolehan nilai sebagai berikut :

Tabel 2.66
Perolehan Nilai Program Adipura Tahun 2006-2010

No.	Kategori	Tahun 2009 - 2010	Tahun 2010 - 2011	Tahun 2011 -2012
1.	P1 (penilaian ke-1)	71,19	68,13	71,48
2.	P2 (penilaian ke-2)	71,30	69,50	72,63
3.	PV (penilaian verifikasi)	70,54	-	-
4.	Nilai Non Fisik	75,42	74,39	76,72
5.	Nilai Adipura	71,88	69,93	72,31
6.	Peringkat Kota Sedang Se-Jawa Barat	Ke-5 dari 7 kota	Ke-5 dari 7 kota	Ke-5 dari 7 kota
7.	Peringkat Seluruh Kota Se-Jawa Barat	Ke-13 dari 21 kota	Ke-20 dari 25 kota	-
8.	Penghargaan	Best Effort City dari Gubernur Jawa Barat	-	-

Peningkatan nilai tersebut dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya :

- Kegiatan penguatan kelembagaan : penetapan keputusan Bupati Bandung mengenai Tim Pengelola Titik Pantau serta Tim Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Adipura
- Penyelenggaraan koordinasi Program Adipura dengan seluruh pemangku kepentingan
- Perbaikan kondisi fisik dengan penanaman pohon peneduh dan pengadaan sarana pengelolaan sampah (mesin pencacah, komposter, tempat sampah terpilah), dengan dana dari APBD Kabupaten Bandung maupun partisipasi masyarakat.

• **Persentase Penanganan Sampah**

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Pada tahun 2009 Kabupaten Bandung hanya mempunyai 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Babakan, yang terletak di Desa Babakan - Kecamatan Ciparay. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak lk 6.983 m³ per hari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai lk 6.452 m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 560 m³ per hari (8,02 %). Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 6.423 (81,98 %) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA.

Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Bandung secara lengkap dalam kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.67
Persentase Volume Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani (m ³)	483	560	560	716	716
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	6.452	6.983	6.983	6.655	6.936
3.	Persentase	7,49	8,02	8,02	10,76	10,32

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

*Catatan : *) Tahun 2006 dan 2007 masih belum terbentuk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2009 sudah terpisah dengan Kabupaten Bandung Barat*

• **Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per Satuan Penduduk**

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 39 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 117 m³. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1.000 orang jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya dapat ditampung pada 0,037 m³. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya rasio daya tampung TPSS terhadap jumlah penduduk mencapai 0,048 m³ pada tahun 2006, 0,046 m³ pada tahun 2007 dan 0,036 m³ pada tahun 2008.

Tabel 2.68
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah TPSS (unit) (*)	38	39	41	42	42
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	114	117	246	252	252
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.299.988	3.351.048
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

**) Lokasi TPS ada di pasar dan pabr*

9. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanian di Kabupaten Bandung sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Jumlah Luas lahan bersertifikat tahun 2012 di Kabupten Bandung sebanyak 40.758 ha dari keseluruhan wilayah kabupaten bandung 176.239 ha jumlah lahan potensial di kabupaten Bandung atau sebesar 23,13 %

Adapun Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bandung berdasarkan data pokok perencanaan pembangunan daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.69
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bandung Tahun 2012

No.	Uraian	2012
1.	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (ha)	40.758
2.	Jumlah Wilayah Lahan Potensial	176.239
3.	Persentase	23,13

Sumber : Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Tahun 2012

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

- **Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil**

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah) selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.70
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012

No.	Kepemilikan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	KTP					E_KTP
a.	Sudah Memiliki	1.872.488	2.161.004	2.269.054	2.281.484	1.691.387
b.	Belum Memiliki	823.454	707.178	742.536	524.744	1.114.841
2.	KK					
a.	Sudah Memiliki	405.105	532.085	558.689	569.863	826.092
b.	Belum Memiliki	411.727	353.589	371.268	334.141	343.702
3.	Akte Kelahiran					
a.	Sudah Memiliki	2.684.589	2.822.230	2.705.375	1.793.701	1.835.801
b.	Belum Memiliki	466.848	507.428	649.228	1.538.901	1.515.247
4.	Akte Nikah (Non Muslim)					
a.	Sudah Memiliki	4.930	5.330	5.597	5.480	5.635
b.	Belum Memiliki	820	420	441	441	426

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2012.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta**

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Bandung pada lembaga pemerintah pada tahun 2011 mencapai 11.741 jiwa, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2009 yang hanya mencapai 11.053 jiwa, namun untuk jumlah pekerja perempuan yang bekerja pada lembaga swasta pada tahun 2009 mengalami penurunan yang sangat drastis yakni hanya mencapai 15.865 jiwa dari tahun-tahun sebelumnya yang memiliki capaian lebih dari 500.000 jiwa. Adapun jumlah pekerja di kabupaten Bandung tahun 2008, 2009 dan 2011 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.71

Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2011(Jiwa)

No	Uraian	2008	2009	2009	2011	2012
1.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	11.138	11.053	11.397	11.741	20.785
2.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga Swasta	558.190	590.392	601.392	15.865	604.912
3.	Jumlah total pekerja perempuan	569.328	601.445	612.789	615.653	625.697
4.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1,96	1,84	1,85	1,90	3,32
5.	Persentase pekerja perempuan di lembaga Swasta	98,04	98,16	98,1	98,09	96,67

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung Tahun 2008-2010

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga**

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata berjumlah 2-3 orang anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah anak	2.069.296	2.149.953	2.080.054	2.166.053	2.299.729
2.	Jumlah keluarga	816.832	885.674	856.879	864.067	871.257
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

Sumber : BKBP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda tahun 2006-2009).

• **Rasio Akseptor KB**

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Bandung cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Bandung mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Bandung saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Bandung pada tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pada kurun waktu 5 tahun terhitung tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 jumlah peserta KB terendah berda pa tahun 2008 dengan jumlah peserta sebanyak 436.405 dari 575.767 pasangan subur. sedangkan untuk jumlah peserta KB terbesar terjadi Pada tahun 2011 dengan jumlah peserta KB sebanyak 542.758 dari 650.652 pasangan usia subur. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2008-2012 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah PUS	575.767	600.609	627.110	650.652	652.514
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	436.405	473.550	455.807	542.758	533.822
3.	Jumlah Tidak Ber-KB	149.362	127.059	171.303	107.894	118.692
4.	Rasio Akseptor KB	75,80	78,84	82,01	83,42	81,81

Sumber : BKBP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda tahun 2008-2012)

13. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan social masyarakat yang sehat dan dinamis, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada gerak langkahnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks

Berbagai masalah kesejahteraan social berkembang di masyarakat pada tahun 2010, beberapa hal yang cukup menonjol antara lain: Keluarga Fakir Miskin (183,369 KK), keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni

(29.950 kk), wanita rawan sosial ekonomi (25,093 jiwa), Lanjut usia terlantar (24,401 jiwa) dan anak terlantar (12,247 jiwa)

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung relatif masih sangat besar. Adapaun persentase capaian kinerja dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut :

Tabel 2.74
Persentase PMKS yang tertangani terhadap total PMKS
di Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah PMKS	261.062	296.026	261.847	262.451	238.224
2.	Jumlah PMKS yang Tertangani	242	371	426	622	1.543
3.	Persentase PMKS yang Tertangani	0,09	0,1253268	0,1626904	0,2369966	0,64770972

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bandung Tahun 2008-2012

- **Kegiatan Keagamaan**

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Berikut merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bandung dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.75
Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No	Tahun	Kegiatan Keagamaan				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1.	2008	17	3	3	1	1
2.	2009	17	3	3	1	1
3.	2010	17	3	3	1	1
4.	2011	17	3	3	1	1
5.	2012	17	3	3	1	1
Jumlah Kegiatan		85	15	15	5	5

Sumber : Bagian Kes Sos Setda Kab. Bandung

14. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN

dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 311 PMA/PMDN berjumlah sebanyak 65.861 orang. capaian ini menurut dari tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada perusahaan PMA/PMDN mengalami penurunan disebabkan penurunan jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun tersebut. jumlah PMA/PMDN pada tahun 2012 di Kabupaten Bandung hanya mencapai 311 perusahaan berbeda jauh dengan tahun 2008-2009 yang mencapai lebih dari 500 PMA/PMDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.76
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2012
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	201.525	201.646	203.306	65.861
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	525	528	552	311
3	Rasio daya serap tenaga kerja	383 : 1	381 : 1	368:1	211 : 1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

• **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Pada tahun 2008 TPAK laki-laki di Kabupaten Bandung mencapai 60,22 % dan perempuan mencapai 53,50 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2006. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 mencapai 16,72 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK dan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2012 berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.77
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Bandung
Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	ANGKATAN KERJA										
	Bekerja	576.933	558.190	907.753	907.753	632.124	691.753	907.753	395.094	853.570	299.448
	Pengangguran	120.430	112.032	99.754	99.754	99.869	92.904	99.754	56.169	84.050	49.619
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	697.363	670.222	1.007.507	1.007.507	731.993	784.657	1.007.507	451.263	937.620	349.067
	Rasio Bekerja	0,827 : 1	0,833 : 1	0,901 : 1	0,901 : 1	0,864 : 1	0,882: 1	0,901 : 1	0,876 : 1	0,910 : 1	0,858 : 1
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			79.390	79.390			79.390	67.385		
	Sekolah	101.722	97.964			267.771	236.823			218.160	231.887
	Mengurus RT	81.324	216.795	185.199	185.199	149.226	342.435	185.199	907.522	11.496	591.293
	Lainnya	277.583	267.723	10.592	10.592	50.968	306.501	10.592	430.387	109.828	36.744
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	460.629	582.482	275.181	275.181	467.965	885.759	275.181	1.405.294	339.484	859.924
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	1.157.992	1.252.704	1.166.982	1.166.982	1.100.089	1.577.512	1.166.982	1.128.281	1.193.053	1.159.373
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	60,22	53,50	77,79	77,79	66,54	49,74	77,79	40,0		
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	17,27	16,72	9,90	9,90	13,6	11,84	9,90	12,45		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2018-2011.

- **Kesempatan Kerja**

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja.

Kesempatan kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 menurut lapangan usaha mencapai 1.323.877 orang. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006. Kesempatan kerja terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, disusul dengan lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan, restoran dan hotel.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan kerja di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010 menurut lapangan usaha.

Tabel 2.78

**Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012**

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian, peternakan, dan kehutanan	25.990	26.295	29.020	26.375	26.377
2	Industri dan pengolahan	224.062	223.562	151.065	146.721	257.363
3	Bangunan	389	405	2.647	1.562	1.046
4	Perdagangan Besar dan Eceran	4.678	5.600	4.874	6.061	7.316
5	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	1.028	1.613	1.585	1.700	1.810
6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	2.512	2.702	2.779	3.690	3.866
7	Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan	1.331	1.608	2.049	1.964	2.746
8	Listrik, Gas dan Air	343	590	614	691	694
Jumlah		260.333	262.375	194.633	188.764	299.589

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2008-2011

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase**

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Jumlah koperasi pada kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2008-2012 mengalami penambahan begitu juga dengan koperasi aktif pada tahun

2012 jumlah koperasi aktif sebanyak 820 koperasi. Bila dibandingkan dengan tahun 2008, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bandung meningkat sebesar 2,97 %, yaitu dari 49,59 % pada tahun 2008 menjadi 52,56 % pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah koperasi aktif	730	747	782	820	820
2	Jumlah koperasi	1.472	1.489	1524	1.555	1.560
3	Persentase koperasi aktif	49,59	50,17	51,31	52,75	52,56

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

- **Jumlah UKM non BPR/LKM UKM**

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Pada tahun 2012, jumlah UKM di Kabupaten Bandung mencapai sebanyak 7,894UKM. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80
Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah seluruh UKM	4.482	5.414	5.614	5.584	7,894
2	Jumlah BPR	49	24	58	67	74
3	Jumlah Koperasi	1.480	1.497	1.531	1.561	1.593

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012)

- **Jumlah BPR/LKM**

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan

dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah BPR	49	24	58	367	72
2.	Jumlah LKM					
	- Koperasi	41	41	76	30	36
	- Non koperasi	-	-	-		-

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2008-2009)

- **Jumlah Omzet**

Tabel 2.82
Jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Kegiatan	Jumlah Ozet				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Koprasi	450.085.140.647	585.110.682.769	596.812.896.420	644.264.923.374	663.592.871.075
2	UKMK	176.515.007.606	1.395.216.584	3.021.885.686.000	3.070.548.668.000	3.084.345.158.000

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010

16. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.

Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung.

Upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mencapai 3.121 investor, yaitu terdiri dari 3.121 investor dalam negeri dan 38 investor asing. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun

2008 sebanyak 17 investor, tahun 2009 sebanyak 30 investor dan tahun 2010 sebanyak 28 investor, dan tahun 2011 sebanyak 77 investor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.83
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Bandung
Tahun 2008-2012

No	Uraian	Jumlah Investor				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	PMDN	5	5	9	39	3.083
2.	PMA	12	25	19	37	38
3.	Total	17	30	28	77	3.121

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2006-2010.

• **Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Jumlah realisasi proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 11 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp 3.401.003.149. Jumlah realisasi ini lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang disetujui, yaitu 28 proyek sebesar Rp 1.882.376.683. Bila dibandingkan dengan investasi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah investasi pada tahun 2010 naik sebesar 73,92 % bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan menurun 70,94 % bila dibandingkan dengan tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2008	34	877.033.716,00	16	343.628.770,00
2009	22	682.269.594,00	13	89.634.094,00
2010	28	1.882.376.683,7	11	3.401.003.149,2
2011	19	867.245.993.476	77	3.132.722.592.614
2012	19	433.188.675.000	76	6.100.000.000.000

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2007-2010, dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan tahun 2012

17. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja “jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan”.

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 37 set, adapun jumlah seni dan budaya yang telah diselenggarakan sebanyak 16 kali pada tahun 2009-2011. Untuk tahun 2012 sarana dan penyelenggaraan seni budaya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya baik itu dalam jumlah penyelenggaraan seni dan budaya maupun jumlah situ dan kawasan budaya yang dilestarikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (set)	37	37	37	37	37
2.	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya (kali)	8	16	16	16	11
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	62	62	62	62	11
	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	89	89	89	89	50
	Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	69,66	31,31	31,31	31,31	22,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga.

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Pada tahun 2012 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bandung meningkat menjadi 1.078 organisasi dari 68 organisasi pada tahun 2010 , 67 organisasi pada tahun 2009 dan 58 organisasi tahun 2008. Sama halnya dengan kondisi organisasi olahraga di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2012 dengan jumlah capaian 159 organisasi olahraga dari 24 organisasi pada tahun 2008-2009.

Tabel 2.86
Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga
di Kabupaten Bandung Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Organisasi Pemuda	58	67	68	-	1.078
2	Jumlah Organisasi Olahraga	42	42	45	-	159

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, Tahun 2010. data Pokok tahun 2012

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk**

Polisi Pamong Praja merupakan aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2012 jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung sebanyak 80 orang. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008-2011. Rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2012 sebesar 0,24. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 24 orang. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.87
Rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Pol PP	104	96	88	195	80
2.	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.290.437	3.351.048
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,33	0,30	0,27	0,59	0,24

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

- **Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman/ ketertiban

masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mencapai 33,95. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2012 tersedia jumlah Linmas sebanyak 11.380 orang. Rasio ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 rasio Linmas mencapai 25,07, pada tahun 2009 mencapai 22,80 dan pada tahun 2010 mencapai 17,17 dan 2011 16,77 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Linmas	7.838	7.235	5.520	5.520	11.380
2	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.290.437	3.351.048
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	25,07	22,80	17,17	16,77	33,95

Sumber : Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan**

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Jumlah pos siskamling di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 3.735 buah, adapun jumlah desa dan kelurahan sebanyak 280 desa/kel. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sebesar 1 : 13. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 13 buah.

Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89
Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Pos Siskamling	4.587	4.476	4.476	5.280	3.735
2.	Jumlah Desa dan kelurahan	276	276	276	176	280
3.	Rasio Pos Siskamling per desa /kelurahan	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 30	1 : 13

Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008-20012.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut

- **Persentasi Penduduk Miskin**

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 sebanyak 292.155 jiwa atau 8,99 % terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 mencapai 298.724 jiwa atau sebesar 9.29 %. Selanjutnya, presentase penduduk di atas garis kemiskinan pada tahun 2011 mencapai 91.01 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2010, di mana pada tahun 2010 presentase penduduk di atas garis kemiskinan mencapai 90.81 % Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan dan presentase penduduk miskin di atas garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.90
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah penduduk	3.116.056	3.148.951	3.174.499	3.229.988	3.351.048
2.	Jumlah Penduduk miskin	287.924	261.048	294.911	292.155	277.806
3.	Angka Kemiskinan	9.24	8.29	9.29	8.99	8.32
4.	Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan	90.58 %	91.71 %	90.70 %	90.01 %	91.68 %

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

- **Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA**

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Penegakan Perda					
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	80	82	22	35	40
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	80	82	22	35	40
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100
2.	Penegakan K3					
a.	Jumlah Pelanggaran K3	12	12	10	8	11
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	12	12	10	8	11
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	100%	100%	100%		100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

- **Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.

Berkaitan hal tersebut di atas, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun ini telah disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Tabel 2.92
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat :					
	- Ada	√	√	√	T/a	√
	- Tidak Ada					

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun2008-2010.

21. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ketersediaan Pangan Utama**

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Bandung dengan berbasiskan kemandirian

penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 513.856 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 3.215.548 jiwa penduduk sebanyak 308.688 ton (65,32 %). Jumlah ketersediaan pangan utama dan jumlah penduduk tahun 2010 meningkat bila dibandingkan tahun 2006-2009. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.93

Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	415.877	472.565	513.856	472.989	552.029
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.127.008	3.172.860	3.215.548	3.299.978	3.351.048
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama (ton)	295.575	308.688	312.841	331.978	337.115
4.	Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	71,59	65,32	60,88	70,19	61,07

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2006- 2010

• **Regulasi Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu : UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Namun Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2009 belum mempunyai peraturan perundang-undangan/regulasi terkait dengan ketahanan pangan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94

Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	V	V	V	V	V
2.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada (SK BUPATI, SKPG, SPN) :					
	- Ada	V	V	V	V	V
	- Tidak Ada					

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2008-2012.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Kelompok Binaan LPM**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bandung tahun 2009 sebanyak 282 kelompok, adapun jumlah LPM sebanyak 276 LPM, dengan demikian rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebanyak 2,83 kelompok atau 2-3 kelompok per LPM. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008-2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.95

Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah LPM	276	276	276	276	280
2.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	276	276	276	276	280
3.	Rata-rata kelompok Binaan LPM per LPM	100	100	100	100	100

Sumber : BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

- **Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta

pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Jumlah PKK di Kabupaten Bandung tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sedangkan kenaikan jumlah PKK terjadi pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah PKK	113.244	76.214	55.633	73.436	4.158
	Jumlah PKK Aktif	113.244	76.214	55.633	73.436	4.158
	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	4.550	4.933	4.960	4.960	1.014
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,04	0,065	0,089	6,75	0,24

Sumber : BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2008- 2012

• **Jumlah LSM yang Aktif**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Jumlah LSM di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 215 LSM, dari jumlah tersebut yang tidak aktif sebanyak 103 LSM, dengan demikian jumlah LSM aktif sebanyak 112 LSM. Jumlah LSM aktif ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97
Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah LSM terdaftar	121	165	215	264	271
2.	Jumlah LSM tidak aktif	76	88	112	57	8
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	45	77	103	207	263

Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

23. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

- **Ketersediaan Dokumen Statistik**

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.98
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	PDRB	√		√		√		√		√	
2.	IPM	√		√		√		√		√	
3.	Suseda	√		√		√		√			√
4.	KBDA	√		√		√		√		√	
5.	Indeks Gini Ratio	√			√		√		√		√
6.	Input Output	√			√		√		√		√
7.	IKM	√		√		√		√		√	
8.	IHK		√		√		√	√			√

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 20108-2012

24. Kearsipan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Pengelolaan Arsip Secara Baku**

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip, dari 79 SKPD di Kabupaten Bandung pada tahun 2008-2012, sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010 dan 2011

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	69	69	69	70	72
2.	Jumlah SKPD	69	69	69	70	72
3.	Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	100	100	100	100	100

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung Tahun 2008-2011

- **Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu**

Mengelola arsip memerlukan teknik/cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 69 orang, dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 69 orang atau 100 %. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, 2007, dan 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100
Pengelola Arsip Terpadu di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Diperlukan	69	69	69	70	72
2.	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	30	30	69	70	72
3.	Persentase SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	37,97	75,95	100	100	100

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012.

25. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, *mobile*, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Bandung terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2009, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kabupaten Bandung sebanyak 44 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 50 unit, jumlah titik hotspot sebanyak 9 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 5 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 6 unit. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008) jumlah sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang mengalami peningkatan hanya ketersediaan akses internet, di mana pada tahun 2006-2007 jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet sebanyak 37 SKPD, pada tahun 2008 sebanyak 34 SKPD dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 44 SKPD yang telah memiliki akses internet. Sarana/prasarana lainnya tidak mengalami peningkatan, bahkan jumlah radio komunikasi yang aktif mengalami penurunan, dari sebanyak 21 radio yang aktif pada tahun 2006-2007 menurun menjadi 6 radio yang aktif pada tahun 2008-2009.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.101

Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi)

Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Surat Kabar	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	34	44	100	28	28
2	Jumlah sistem informasi yang ada	50	50	38	38	38

No.	Surat Kabar	2008	2009	2010	2011	2012
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemda	9	9	5	5	5
4.	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	5	5	3	3	3
5.	Jumlah radio komunikasi yang aktif	6	6	6	6	6

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012.

26. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Jumlah Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Selama kurun waktu tahun 2008-2010, Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik Pemda, namun pada tahun 2011 dan tahun 2011 mengalami penambahan yang signifikan yakni pada tahun 2011 jumlah perpustakaan milik Pemda berjumlah 15 perpustakaan dan pada tahun 2012 semakin meningkat mencapai 125 perpustakaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemda	1	1	1	15	125
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda (Desa)	138	138	185	138	276
3.	Total Perpustakaan (1+2)	139	139	186	153	401

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2008- 2012.

- **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

Jumlah pengunjung ke perpustakaan milik Pemda Kabupaten Bandung pada tahun 20102 dapat diketahui sebanyak 130.951 orang. Jumlah ini

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2011, namun bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009 jumlah pengunjung ini mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.103
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1.980	1.158	13.400	14.810	10.951
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	6.127	2.710	29.460	20.620	39.157
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	8.107	3.868	42.860	35.430	50.108

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012.

• **Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan**

Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Pada tahun 2012 jumlah buku yang tersedia di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Bandung sebanyak 31.483 buah dengan total judul buku sebanyak 14.843 jenis, dengan rata-rata jumlah buku per jenis (setiap judul) sebanyak 14.843 buah. Jumlah ketersediaan buku pada tahun 2012 ini jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2008-2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104
Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Judul Buku	1.980	1.158	13.400	368	14.843
2.	Total Jumlah Buku	6.127	2.710	29.460	478	31.483
3.	Rata-rata Jumlah Judul Buku	3	3	3	1	47,15

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2008- 2012.

• **Jumlah Kendaraan Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan pustaka yang ada di Perpustakaan milik Pemda, saat ini Pemerintah

Kabupaten telah menyediakan kendaraan yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling, namun jumlahnya sejak tahun 2008-2010 baru sebanyak 4 unit. Selain itu telah tersedia pula kendaraan layanan internet dan motor pintar, masing-masing berjumlah 1 unit. Namun pada tahun 2011 jumlah mobil perpustakaan keliling mengalami penurunan menjadi 1 unit mobil perpustakaan keliling.

Dengan adanya kendaraan perpustakaan keliling, kendaraan layanan internet dan motor pintar diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses perpustakaan serta akan memberikan nilai tambah bukan saja sebagai peningkatan pengetahuan, namun akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian. Namun jika capaian menurut hal tersebut sangat atau menjadi sulit untuk dicapai.

Tabel 2.105
Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah mobil unit perpustakaan keliling	3	3	4	1	4
2.	Jumlah mobil layanan internet	1	1	1	1	1
3.	Jumlah motor pintar	1	1	1	1	1

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu:

1. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan**

Produktivitas padi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 6,12 ton/ha. Produktivitas ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009), di mana pada tahun 2006 produktivitas padi mencapai 5,60 ton/ha, tahun 2007 mencapai 5,83 ton/ha, dan tahun 2008 mencapai 5,86 ton/ha.

Produktivitas sayuran pada tahun 2010 mencapai 141,06 kwt/ha, bila dibandingkan dengan tahun 2007-2009 produktivitas ini meningkat, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006 produktivitas tersebut menurun, di mana pada tahun 2006 produktivitas sayuran mencapai 36,38 ton/ha.

Produktivitas buah-buahan pada tahun 2010 mencapai 0,85 kw/pohon, produktivitas ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, di mana pada tahun 2006 produktivitas buah-buahan mencapai 0,44 kw/pohon dan pada tahun 2009 mencapai 0,59 kw/pohon. Produktivitas tanaman hias pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 produktivitas tanaman hias mencapai 12,49 tangkai/m² sedangkan pada tahun 2007

dan 2008, masing-masing mencapai 2,71 tangkai/m² dan 5,68 tangkai/m².

Produktivitas perkebunan pada tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Pada tahun 2010 produktivitas perkebunan mencapai 1,16 ton/ha sedangkan tahun 2006-2009 masing-masing mencapai 6,42 ton/ha, 2,32 ton/ha, 2,16 ton/ha dan 1,16 ton/ha.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012

Tabel 2.106
Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan,
Tanaman Hias dan Perkebunan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	74.676	75.772	84.232	81.308	86.919
	Luas Panen (ha)	70,453	78.522	84.020	77.286	85.914
	Produksi (ton)	412.877,00	472.564	513.856	472.989	552.029
	Produktivitas (ton/ha)	5,86	6,02	6,12	6,12	6,36
2.	Palawija					
	Luas Tanam (ha)	21.018	24.265	26.863	21.871	23.099
	Luas Panen (ha)	15.781	20.615	26.826	20.670	18.694
	Produksi (ton)	325.713	429.737	569.233	236.018	201.032
	Produktivitas (ton/ha)	20,63	20,84	21,21	11,94	10,75
3.	Sayuran					
	Luas Tanam (ha)	25.139	22.007	20.155	40.671	42.877
	Luas Panen (ha)	31.096	34.619	20.746	36.361	52.488
	Produksi (ton)	559.753	696.840	464.872	685.038	783.488
	Produktivitas (ton/ha)	18,00	33,56	22,41	19,74	19,94
4.	Buah-buahan					
	Luas Tanam (pohon)	305.218	266.700	200.700	289.282	207.602
	Luas Panen (pohon yg menghasilkan)	540.071	447.699	623.406	931.550	737.627
	Produksi (kw)	304.705	266.532	532.874	574.281	466.243
	Produktivitas (kw/pohon)	0,56	0,59	0,85	0,62	0,63
5.	Tanaman Hias					
	Luas Tanam (M ²)	86.044	187.841	182.231	177.066	176.132
	Luas Panen (M ²)	115.682	115.544	44.597	77.804	247.432
	Produksi (tangkai)	488.425	426.962	400.259	618.115	974.602
	Produktivitas (tangkai/M ²)	5,68	4,06	12,49	7,94	3,94
6.	Perkebunan					
	Luas Tanam (ha)	10.805	11.097	13.643	14.094	14.485
	Luas Panen (ha)	4.706	5.030	7.482	8.560	10.805
	Produksi (ton)	23.348	23.367	34.849	9.451	11.604
	Produktivitas (ton/ha)	2,16	2,11	1,16	1,10	1,07

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2012.

- **Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu**

Pada tahun 2010 jumlah produksi daging mencapai 45.352.413 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 10,27 kg/kapita/th. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 produksi daging mencapai 40.912.117 kg dan

konsumsi daging 9,5 kg/kapita/th, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

Konsumsi telur di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 2,33 kg/ kapita/th, dengan jumlah produksi sebanyak 8.398.280 kg. Jumlah konsumsi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), yaitu konsumsi telur pada tahun 2006 mencapai 1,66 kg/kapita/th, pada tahun 2007 mencapai 1,62 kg/kapita/th dan pada tahun 2008 mencapai 1,74 kg/kapita/th. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi pada setiap tahunnya (2006-2010).

Konsumsi susu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 8,84 kg/kapita/tahun, sementara konsumsi susu nasional adalah sebesar 6,10 kg/kapita/tahun, sehingga telah melebihi batas standar konsumsi susu nasional. Jumlah konsumsi tahun 2010 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007-2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2007 jumlah konsumsi susu mencapai 6,90 kg/kapita/th, pada tahun 2008 mencapai 8,38 kg/kapita/th sedangkan pada tahun 2006 mencapai 8,93 kg/kapita/th. Sama halnya dengan jumlah konsumsi, jumlah produksi pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012

Tabel 2.107
Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, Telur dan Susu
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Daging :					
	Produksi (ton)	39.275	40.912	45.183	75.144	32.801
	Konsumsi (kg/kapita/th)	9,48	9,49	10,5	17,38	8,61
2.	Telur					
	Produksi (ton)	5.881	7.128	8.323	8.416	7.595
	Konsumsi (kg/kapita/th)	1,74	2,08	2,33	2,37	2,25
3.	Susu					
	Produksi (ton)	57.171	59.534	62.876	77.062	67.608
	Konsumsi (kg/kapita/th)	8,38	8,62	8,84	10,72	10,05

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

2. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi**

Penanganan lahan kritis di Kabupaten Bandung selalu dilakukan tiap tahun yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Bandung, Swasta serta Swadaya Masyarakat.

Faktor pendorong kekritisian lahan terus meningkat seiring dengan kebutuhan dan pertumbuhan penduduk, sehingga peran pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menangani lahan kritis harus selalu ditingkatkan.

Lahan kritis di Kabupaten Bandung Dalam Angka seharusnya tinggal 6.814,72 Ha di tahun 2009, namun data RTK 2010 dari Departemen Kehutanan menunjukkan bahwa luasan lahan kritis di Kabupaten Bandung adalah sebesar 59.969,39 Ha. Hal tersebut tidak terlepas dari pembukaan lahan untuk kepentingan masyarakat, serta penebangan pohon yang sudah masak tebang

Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitas Hutan dan Lahan (RP-RHL periode 2011-2015) didasarkan pada data RTK dari Departemen Kehutanan Tahun 2010. RP-RHL Tahun 2011 ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kehutanan termasuk rencana penanganan lahan kritis dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Pada tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi lahan kritis seluas 6.159.68 Ha dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta dan Swadaya, seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat serta swasta dalam rangka penanganan lahan kritis, pada tahun 2012 dapat direalisasikan rehabilitasi lahan kritis seluas 16.300,11 Ha dengan sumber dana yang sama.

Adapun Kawasan Hutan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Bandung merupakan lahan yang dalam hal pengelolaannya menjadi kewenangan dari perhutani dan BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam).

Tabel 2.108
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha)	4.418,36	1.084,50	7.349,75	6.154,18	31.514,60
2.	Total luas lahan kritis (ha)	9.056,19	6.814,72	59.969,39	53.814,71	16.300,11
3.	Luas Hutan rakyat	8.773,55	9.600,58	10.452,54	16.607,59	16.882,59

Sumber : Dinas Perhutanan, Perkebunan dan Kehutanan 2012

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

- **Energi**

Beberapa potensi energi di Kabupaten Bandung yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- (a). Energi panas bumi (geothermal)
- (b). Energi Mikrohidro
- (c). Energi Biogas
- (d). Energi matahari (surya)
- (e). Energi bahan bakar nabati (limbah organik)

Adapun perincian Panas Bumi dari tahun 2008-2012 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.109
Jenis-jenis Potensi Energi Non Fosil Tahun 2008-2012

No	Jenis Energi	Potensi	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Panas Bumi :						
	a) Kamojang	300 MW	210 MW	210 MW	210 MW	210 MW	210 MW
	b) Wayang Windu	400 MW	227 MW	227 MW	227 MW	227 MW	227 MW
	c) Patuha	480 MW	-	-	-	-	-
	d) Cibuni	300 MW	-	-	-	-	-
	e) Darajat (90% kegiatan inti di Kab. Garut)	400 MW	270 MW	270 MW	270 MW	270 MW	270 MW
	f) Penerimaan DBH (Rp. Miliar)		51,9	59,5	59,5	78,1	105,3

Adapun perincian rasio elektrifikasi tahun 2008-2010 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.110
Rasio Elektrifikasi Tahun 2008-2012

No	Perincian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rumah Tangga	756,368	766,983	773,053	479.089	511.687
2	Pelanggan	409,122	426,137	446,486	292.101	327.480
3	RE (%) Dinamis	54.090	55.560	57.756	60.97	64.00
	RE (%) Statis		59.030			

• **Sumberdaya Mineral Pertambangan**

Keberadaan sumberdaya mineral di Kabupaten Bandung adalah berupa andesit, tanah urug dan emas yang tersebar di kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk dan Banjaran dengan jumlah perusahaan yang melaksanakan produksi sebanyak 22 perusahaan dengan luas lahan 119,17 ha. Dari jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang aktif. Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug, juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Kondisi pengeolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.

Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

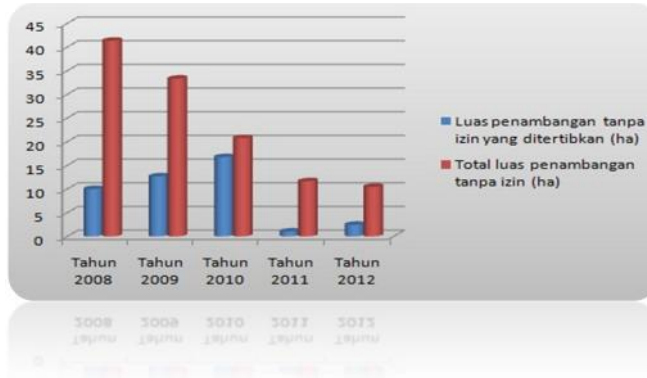
Luas penambangan tanpa izin di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mencapai 10,46 ha, dan luasan yang berhasil ditertibkan seluas 2,46 ha (23,52 %). Langkah penanganan yang telah dilakukan adalah dengan pendekatan dan mendorong kepada para pengusaha yang belum berijin untuk mengikuti prosedur perijinan yang ditetapkan untuk.

Tabel 2.111
Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008 – 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (ha)	10	12,68	16,755	1,031	2.46
2.	Total luas penambangan tanpa izin (ha)	41,33	33,33	20,755	11,65	10.46
3.	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	24,20	38,03	80,73	8,85	23,52

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Tahun 2008-2012.

Gambar 2.15
Diagram Luas Penambangan Tanpa Izin dengan Luas Penertiban



- **Kegeologian**

Kondisi wilayah Kabupaten Bandung yang pegunungan, dataran tinggi maupun pedataran menjadi menimbulkan daerah ini mempunyai kerentanan potensi gerakan tanah/longsor terutama di lahan dengan kemiringan lereng yang curam. Ditambah dengan kondisi geologi yaitu litologi maupun struktur geologi yang beragam menambah potensi terjadinya bencana geologi berupa gerakan tanah/longsor maupun gempa. Keterkaitan dengan potensi gerakan tanah di Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya gerakan tanah/longsor. Tercatat terdapat 22 kecamatan yang terdapat potensi bencana geologi/ gerakan tanah. Sampai dengan tahun 2011, telah dilaksanakan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya gerakan tanah, yaitu Kecamatan Kertasari, Arjasari dan Rancabali. Hal ini menyebabkan masih adanya Kecamatan yang belum terpetakan lahan yang mempunyai potensi gerakan tanah/longsor.

Namun demikian, penanganan kejadian bencana gerakan tanah/longsor telah dilakukan dengan upaya mitigasi dan sosialisasi kepada warga yang terkena gerakan tanah/longsor untuk menghindari kerugian jiwa maupun material. Penanganan gerakan tanah /longsor dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal (pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat) maupun instansi di Kabupaten Bandung.

- **Sumberdaya Air Tanah**

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cakungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan 'One basin one management'. Menurut hasil penelitian dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung Soreang adalah 368,5 juta m³/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m³. Dengan kebutuhan air

yang banyak tersebut maka diperlukan suatu penanganan dan manajemen yang pengelolaan air tanah yang tepat agar di menjadi cepat habis. Langkah yang telah diambil dalam pengendalian jumlah air tanah adalah dengan melalui ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Diharapkan dengan adanya ijin dapat terkendainya pengambilan air tanah sesuai dengan kajian yang telah ditetapkan, sehingga upaya konservasi dan pemenuhan kebutuhan air terjalin seimbang.

Upaya konservasi juga dilakukan dengan mewajibkan seluruh pengambil air tanah untuk menyediakan sumur serapan dalam agar jumlah air yang diambil dapat terisi kembali oleh adanya sumur resapan dalam tersebut. Selain itu juga, upaya konservasi dilakukan dengan membagi zonasi kondisi air tanah yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan zonasi tersebut diharapkan dapat diketahui dan dijaga kondisi dimana pengambilan air tanah pada zona kritis dibatasi.

4. Pariwisata

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Kunjungan Wisata**

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2008-2009 berjumlah 49 dan bertambah 4 objek wisata pada tahun 2010 sedangkan beranjak menuju tahun 2011 dan 2012 jumlah objek wisata di Kabupaten Bandung mengalami penurunan 8 objek wisata menjadi 45 objek wisata yang tersedia di Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2012.

Tabel 2.112
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah obyek wisata (obyek)	49	49	53	45	45
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	4.306.602	5.458.218	6.069.539	5.124.142	5.636.556
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	87.890	111.392	123.869	113.870	125.257

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012.

5. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tercatat sebanyak 8.122 ton. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009). Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2010 mencapai 20,26 kg/perkapita/tahun. Jumlah ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung, di mana pada tahun 2006 jumlah konsumsi ikan mencapai 15,67 kg/kapita/tahun, pada tahun 2007 mencapai 16,10 kg/kapita/tahun, tahun 2008 mencapai 17,23 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2009 mencapai 18,73 kg/kapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.113
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 – 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Produksi Ikan (ton)					
	- Target	7.331	7.696	8.108	8.694	9.306
	- Realisasi	7.336	7.719	8.122	8.695	10.398
2.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	17,23	18,73	20,26	21,29	23.28
3.	Persentase Konsumsi Ikan terhadap Realisasi Produksi	14,68	13,74	15,78	13,35	17,51

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2011.

6. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ekspor Bersih Perdagangan**

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 833.686.178 Nilai ini mengalami keniakan di bandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2008-2012. pada kurun waktu 5 tahun dari tahun 2008-2012 penurunan ekspor hanya terjadi pada tahun 2009, menurun dari nilai ekspor tau 2008.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.114
Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Nilai Ekspor	507.346.266,81	406.188.974,51	456.850.398,57	511.338.087	833.686.178
2.	Nilai Impor	-	-	-	-	-
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	507.346.266,81	406.188.974,51	456.850.398,57	511.338.087	833.686.178

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2012.

7. Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Pertumbuhan Industri**

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama indutsri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari 701 industri menjadi 751 industri pada tahun 2010. Peningkatan ini terjadi pada industri kecil, di mana pada tahun 2009

berjumlah sebanyak 535 industri, dan pada tahun 2010 berjumlah 580 industri.

Apabila dilihat dari tabel pertumbuhan industri, mengalami kenaikan setiap tahunnya pada industri kecil dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dengan kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 144 industri kecil. Pada industri menengah juga mengalami kenaikan sebanyak 38 industri, sedangkan industri besar naik sebanyak 16 industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.115
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No	Klasifikasi Industri	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Aneka	Aglo meka	Aneka	Aglo meka	Aneka	Aglo meka	Aneka	Aglo meka	Aneka	Aglo meka
1	Industri Besar	21	32	15	38	43	43	32	46	35	50
2	Industri Menengah	24	61	23	63	79	67	9	70	9	76
3	Industri Kecil	10	216	20	228	3	244	4	247	9	257
	Jumlah	55	309	58	329	125	354	45	363	53	383
	Jumlah Total Aneka dan Aglomeka	364		387		479		408		436	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

8. Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Transmigrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan transmigrasi bedol desa. Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Bandung. Tercatat pada tahun 2012 Jumlah Transmigrasi Umum sebanyak 40 KK atau 136 Jiwa, serta Transmigrasi Swakarsa dan Bedol Desa tidak ada Berikut adalah gambaran mengenai Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Bandung Pada tahun 2012.

Tabel 2.116
Transmigrasi menurut Jenis Kabupaten Bandung Tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Transmigrasi Swakarsa	0	0
2.	Transmigrasi Umum	40	136
3.	Transmigrasi Bedol Desa	0	0
	T O T A L	40	136

Sumber : Data Pokok Perencanaan Pembangunan tahun 2012

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/ angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan/Angka Konsumsi Rata-rata RT per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pada tahun 2009 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bandung mencapai Rp 334.757,00, terdiri dari : bahan pangan sebesar Rp 211.395,00 dan non pangan sebesar Rp 123.362,00. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007, di mana pada tahun 2006 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan baik pangan maupun non pangan sebesar Rp 217.616,00 dan pada tahun 2007 sebesar Rp 333.830. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117
Angka Konsumsi Rata-rata RT perKapita Sebulan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012 (Rupiah)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (pangan)	211.395	250.000	290.000	339.000	398.000
2.	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (non pangan)	753.000	753.000	798.000	800.000	825.800
3.	Jumlah pengeluaran per kapita sebulan (pangan+non pangan)	932.395	1.003.000	1.088.000	1.189.000	1.223.800

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari : aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

1. Aksesibilitas Daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/ prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 1 : 843, ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km, dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 843 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2007 dan 2008, yang mana pada tahun 2007 dan 2008, ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1 : 176 dan 1 : 182, yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 176 kendaraan (Tahun 2007) dan sebanyak 182 kendaraan (Tahun 2008).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2010 lebih banyak atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008,. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.118
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung
Tahun 2007 s.d. 2011

No.	Uraian	2007	2008	2010	2011
1.	Panjang Jalan	1.227,03	1.154,55	1.155,36	1.155,90
2.	Jumlah Kendaraan :				
	- Roda 4	49.944,00	28.411,00	120.719,00	54.852
	- Roda 2	148.220,00	181.605,00	853.212,00	272.520
	Jumlah	198.164,00	210.016,00	973.931,00	327.372
3.	Rasio	1 : 176	1 : 182	1 : 843	1 : 283,2

*Sumber : Data Samsat Kabupaten Bandung Tahun 2010,
BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2007- 2008).*

2. Penataan wilayah

Penataan wilayah di Kabupaten Bandung diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2007-2027. Salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Bandung terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu : kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi : hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi : kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa, kawasan Hankam). Rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung seluas 46.171,71 ha sedangkan rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan budidaya seluas 130,066.96 ha.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti : kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Di tengah rentannya kondisi keuangan global, industri perbankan nasional berhasil bertahan dan mempertahankan kinerja baik sepanjang 2012, baik secara kuantitas maupun kualitas. Cukup stabilnya kinerja sektor perbankan nasional berdampak positif pada perbankan di Kabupaten Bandung. Pada tahun ini walaupun mengalami perlambatan namun tetap stabil pada kisaran 10,47 persen. Peningkatan pertumbuhan pada semester II, dimana laju ub sektor ini tumbuh dari negatif 0,75 persen dan meningkat menjadi 13,53 persen pada semester II. Adapun tingkat kontribusi pada sektor ini tidak mengalami perubahan, tetap pada besaran 0,30 persen baik di tahun 2011 maupun di tahun 2012

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan Lembaga Keuangan Non Bank, jumlah bank umum di Kabupaten Bandung seluruhnya berjumlah 132 unit, Adapun jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) seluruhnya berjumlah 88 unit, dan Jumlah Lembaga Keuangan Non Bank berjumlah 76 buah. Sehingga Jumlah Bank dan Non Bank di Kabupaten Bandung berjumlah 296. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.119
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Bandung Tahun 2011

No	Uraian	2011
1.	Bank Umum	132
2.	Bank Perkreditan Rakyat	88
3.	Lembaga Keuangan Non Bank	76
Jumlah		296

Sumber : KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2012

4. Ketersediaan Air Bersih

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan air bersih salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih. Air bersih (*clean water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas : ledeng (perpipaan), sumur lindung, sumur tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan, air kemasan, pompa dan sumber air lainnya.

Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bandung sebanyak 615.705 rumah tangga atau mencapai 72,17% dari total jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu terdiri dari : jumlah pengguna air bersih bersumber dari : ledeng sebanyak 146.086 rumah tangga, sumur lindung sebanyak 82.826 rumah tangga, sumur tidak terlindung sebanyak 15.354 rumah tangga, mata air terlindung sebanyak 116.271 rumah tangga, mata air tidak terlindung sebanyak 17.579 rumah tangga, air kemasan sebanyak 137.189 rumah tangga, pompa sebanyak 133.333 rumah tangga dan air lainnya sebanyak 204.463 rumah tangga. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah pengguna air bersih pada tahun 2011 mengalami penurunan dari capaian tahun 2008 dan 2009 dimana pada tahun 2008 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 81,95 % rumah tangga dan pada tahun 2009 mencapai 94,03 % rumah tangga. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008, 2009 dan 2011.

Tabel 2.120
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Sumber Air Berih	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Ledeng (Perpipaan)	77.255	62.032	69.227	146.086	151.049
2.	Sumur Lindung	5.206	266.367	291.409	82.826	165.751
3.	Sumur Tidak Terlindung	167.849	23.653	36.709	15.354	18.344
4.	Mata Air Terlindung	330.513	145.031	109.037	116.271	143.129
5.	Mata Air Tidak Terlindung	36.763	26.313	26.014	17.579	19.077
6.	Sungai	112.970	294	-	-	-
7.	Air Hujan	20.366	1.227	-	-	-

No	Sumber Air Berih	2008	2009	2010	2011	2012
8.	Air Kemasan	16.317	164.183	190.492	137.189	50.102
9.	Pompa	35.465	195.193	103.019	133.333	110.348
10.	Air lainnya	14.128	1.381	6.081	204.463	245.244
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	669.368	832.806	831.988	615.705	620.379
12.	Jumlah Rumah Tangga	816.832	885.674	831.988	853.101	865.623
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	81,95	94,03	100	72,17	71,67

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

5. Fasilitas Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2009 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 535.975 rumah tangga atau mencapai 71.17 % dari jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu terdiri dari : rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 watt sebanyak 214.390 rumah tangga, dengan daya listrik 900 watt sebanyak 125.954 rumah tangga, dengan daya listrik 1.300 watt sebanyak 88.436 rumah tangga, dengan daya listrik 2.200 watt sebanyak 58.957 rumah tangga, dengan daya listrik > 2.200 watt sebanyak 48.238 rumah tangga. Persentase yang menggunakan listrik pada tahun 2009 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), di mana pada tahun 2006 persentase pengguna listrik mencapai 70,72 %, pada tahun 2007 mencapai 70.87 % dan pada tahun 2008 mencapai 71.02 %. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.121
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	RT dengan daya 450 watt	163.648	170.454	178.594	181.200	182.500
2.	RT dengan daya 900 watt	96.143	100.142	178.594	150.000	183.946
3.	RT dengan daya 1.300 watt	67.505	70.312	73.670	72.500	75.100
4.	RT dengan daya 2.200 watt	45.003	46.875	49.113	52.000	53.200
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	36.821	38.352	40.184	47.600	60.200
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	409.119	426.136	446.484	503.300	554.946
7.	Jumlah Rumah Tangga	756.368	766.983	773.053	825.500	850.768
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (rasio elektifikasi) (6)/(7)	54.09%	55.56%	57.76%	60.97%	65.23%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung, Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

6. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan. Selama kurun waktu 2008-2012 jumlah restoran dan rumah makan yang berhasil di data oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung tidak mengalami kenaikan dan penurunan jumlah usaha restoran dan rumah makan yaitu 40 restoran dan 467 restoran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.122
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jenis Usaha Restoran	40	40	40	40	40
2.	Jenis Usaha Rumah Makan	467	467	467	467	467

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2010.

7. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel/penginapan.

Pada tahun 2008-2011, jumlah penginapan di Kabupaten Bandung sebanyak 29 buah, terdiri dari : hotel bintang 3sebanyak 2 unit dan hotel non bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 27 unit.perubahan terjadi pada tahun 2011-2012 pada tahun ini jumlah hotel/penginapan mengalami penrunan menjadi 13 hotel/penginapan yakni berkurang 16 penginapan/hotel dari tahun 2008-2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	1	1
2.	Hotel Bintang 4	-	-	-	-	1
3.	Hotel Bintang 3	2	2	2	-	-
4.	Hotel Bintang 2	-	-	-	1	1
5.	Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	27	27	27	11	11
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	29	29	29	13	13

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2012

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bandung.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Bandung sebanyak 9 (sembilan) kasus, yaitu tindak kriminal pembunuhan, kasus pencurian, dan kasus penganiayaan. Dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,000288; ini artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 terdapat 2 (dua) atau 3 (tiga) tindak kriminal. Kasus kriminal yang terjadi pada tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.124
Angka Kriminalitas di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	26	4	32	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	2	3	9	4
3.	Jumlah Kejahatan Seksual/Perkosaan	2	14	4	1	4
4.	Jumlah kasus Penganiayaan Berat	32	32	16	57	56
5.	Jumlah kasus Pencurian dengan Pemberatan	80	224	286	374	317
6.	Jumlah kasus Perjudian	2	9	4	68	39
7.	Jumlah kasus Pemerasan	8	17	4	9	1
8.	Jumlah Tindak Pidana yang di Laporkan	1641	1790	2147	2293	2165

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
9.	Jumlah Tindak Pidana yang diselesaikan	1179	1091	1223	1163	1056
10.	Persentase Tindak Pidana yang diselesaikan	72 %	61 %	58 %	50 %	48,7 %

Sumber : BPS Kab. Bandung Tahun 2008 - 2012

**Tabel 2.125
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2012**

No.	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	14	4	Gratis
2.	SITU	14	4	Gratis
3.	TDP	14	4	Gratis
4.	IUI	14	5	Gratis
5.	TDI	14	4	Gratis
6.	IMB	14	6	250-7500 / m2
7.	HO	14	6	150-750/m2
8.	IPT	14	3	Gratis
9.	Reklame	14	2	Gratis
10.	IPLC	14	3	Gratis
11.	Jasa Konstruksi	14	4	Gratis

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2012.

**Tabel 2.126
Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d 2012**

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Pajak Daerah	51.654.333.709,60	47.951.110.528,00	59.385.578.062,00	137.799.240.880	186.141.858.448,00
	Pajak Hotel	521.130.207,60	481.269.352,00	1.122.094.256,00	1.382.279.874	2.311.227.053,00
	Pajak Restoran	2.022.405.964,86	2.486.992.882,00	3.541.972.662,00	4.871.316.085	6.894.597.594,00
	Pajak Hiburan	1.822.568.665,00	2.146.174.144,00	2.063.299.025,00	955.618.520	706.313.905,00
	Pajak Reklame	1.818.712.879,50	1.599.992.419,00	2.022.621.402,00	2.547.378.797	2.712.275.886,00
	Pajak Penerangan Jalan	45.332.157.472,64	41.035.282.809,00	50.234.236.814,00	64.705.088.990	83.975.194.771,00
	Pajak Pengam-bilan dan Pengolahan Bahan Galian C	61.134.120,00	64.681.980,00	108.188.999,00	142.701.367	192.014.591,00
	Pajak Parkir	76.224.400,00	136.716.942,00	293.164.904,00	597.392.330	453.376.485,00
2.	Retribusi	36.067.479.245,10	40.870.885.107,00	60.370.841.839,00	3.011.256.483	41.045.068.255,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	29.122.980.499,00	32.380.883.654,00	50.640.948.750,00	23.171.379.397	28.858.845.421,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	1.609.269.878,00	1.840.236.134,00	2.451.180.000,00	1.866.534.430	2.813.859.600,00
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	5.335.228.868,10	6.649.765.319,00	8.022.691.887,00	7.753.466.857	7,845,721,588,00

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Tabel 2.127
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Bandung
Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	0	6	2	8	7
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	3	3	0	1	2
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0	0

Sumber : Bagian Hukum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Adapun gambaran ketersediaan Perda yang telah dihasilkan kurun waktu 2008–2012 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.128
Ketersediaan Perda di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
1.	01 / 2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008	31 Mar 08	31 Mar 08	1
2.	02 / 2008	Pembentukan Desa Warjabakti Kec Cimaung Kab Bandung	19 Agust 08	19 Agust 08	2
3.	03 / 08	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Bandung Th 2007 s/d 2027	19 Sept 08	19 Sept 08	3
4.	04 / 08	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007	19 Agust 08	19 Agust 08	4
5.	05 / 08	Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung	22 Agust 08	22 Agust 08	5
6.	06 / 08	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab Bandung No 23 Th 2007 ttg Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan	7 Okt 08	7 Okt 08	6
7.	07 / 08	Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah	9 Okt 08	9 Okt 08	7
8.	08 / 08	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat	13 Okt 08	13 Okt 08	8
9.	09 / 08	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4 Nop 08	4 Nop 08	9
10.	10 / 08	Penanggulangan Kemiskinan di Kab Bandung	5 Nop 08	5 Nop 08	10
11.	01 / 2009	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan	19 maret 09	19 maret 09	1
12.	02 / 2009	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung	23 maret 09	23 maret 09	2
13.	03 / 09	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang	30 maret 09	30 maret 09	3

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung			
14.	04 / 09	Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung	02 april 09	02 april 09	4
15.	05 / 09	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	06 april 09	06 april 09	5
16.	06 / 09	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	17 april 09	17 april 09	6
17.	07 / 09	Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	29 april 09	29 april 09	7
18.	08 / 09	Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung	04 mei 09	04 mei 09	8
19.	09 / 09	Izin Penyelenggaraan Reklame	04 mei 09	04 mei 09	9
20.	10 / 09	Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung	15 juli 09	15 juli 09	10
21.	11 / 09	Dokumen Pengelolaan Lingkungan	15 juli 09	15 juli 09	11
22.	12 / 09	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin	15 juli 09	15 juli 09	12
23.	13 / 09	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Bandung TA 2008	5 agust 09	5 agust 09	13
24.	14 / 09	Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung	20 agust 09	20 agust 09	14
25.	15 / 09	Rumah Susun (Rusun)	20 agust 09	20 agust 09	15
26.	16 / 09	Tata Bangunan	20 agust 09	20 agust 09	16
27.	17 / 09	Pajak Restoran	20 agust 09	20 agust 09	17
28.	18 / 09	Pajak Penerangan Jalan	20 agust 09	20 agust 09	18
29.	19 / 09	Pajak Reklame	20 agust 09	20 agust 09	19
30.	20 / 09	Pembangunan, Pengendalian Dan Pengelolaan Pasar	20 agust 09	20 agust 09	20
31.	21 / 09	Pengelolaan Sampah	20 agust 09	20 agust 09	21
32.	22 / 09	Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama Di Kabupaten Bandung	20 agust 09	20 agust 09	22
33.	23 / 09	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung	20 agust 09	20 agust 09	23
34.	24 / 09	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa	24 agust 09	24 agust 09	24
35.	25 / 09	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum	24 agust 09	24 agust 09	25

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
		Daerah Kab Bandung			
36.	26 / 09	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kab Bandung	24 agust 09	24 agust 09	26
37.	01 / 2010	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kab Bandung	11 Feb 2010	11 Feb 2010	1
38.	02 / 2010	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kab Bandung	29 mar 2010	29 mar 2010	2
39.	03 / 2010	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kab Bandung	29 mar 2010	29 mar 2010	3
40.	04 / 2010	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kab Bandung	29 mar 2010	29 mar 2010	4
41.	05 / 2010	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2010	08 apr 2010	08 apr 2010	5
42.	06 / 2010	Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3 mei 2010	3 mei 2010	6
43.	07 / 2010	Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air	30 Juni 2010	30 Juni 2010	7
44.	08 / 2010	Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah	6 Sept 2010	6 Sept 2010	8
45.	09 / 2010	Perubahan Atas Perda Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol	6 Sept 2010	6 Sept 2010	9
46.	10 / 2010	Pencabutan Peraturan Daerah Kab Bandung No 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat	6 Sept 2010	6 Sept 2010	10
47.	11 / 2010	Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bandung	20 Sept 2010	20 Sept 2010	11
48.	12 / 2010	Perubahan Atas Perda Nomor 20 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Dinas Daerah Kab Bandung	20 Sept 2010	20 Sept 2010	12
49.	13 / 2010	Perubahan Atas Perda Nomor 9 tahun 2006 Tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (PERSERO) di Kab Bandung	29 Okt 2010	29 Okt 2010	13
50.	14 / 2010	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Citra Bangun Sarana Kab Bandung	29 Okt 2010	29 Okt 2010	14
51.	15 / 2010	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	18 Nop 2010	18 Nop 2010	15
52.	16 / 2010	Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kab Bandung.	18 Nop 2010	18 Nop 2010	16
53.	17 / 2010	Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kab Bandung.	18 Nop 2010	18 Nop 2010	17

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
54.	18 / 2010	Pedoman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).	18 Nop 2010	18 Nop 2010	18
55.	19 / 2010	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009.	26 Nop 2010	26 Nop 2010	19
56.	20 / 2010	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 Kab Bandung.	26 Nop 2010	26 Nop 2010	20
57.	01 / 2011	Pajak Daerah	10 Jan 2011	10 Jan 2011	1
58.	02 / 2011	Perubahan Ketiga Atas Perda Kab Bandung No 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan	18 Feb 11	18 Feb 11	2
59.	03 / 2011	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2006	18 Feb 2011	18 Feb 2011	3
60.	04 / 2011	APBD 2011	11 Maret 2011	11 Maret 2011	4
61.	05 / 2011	Sistem Kesehatan Daerah Kab Bandung	20 Juni 11	20 Juni 11	5
62.	06 / 2011	Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kab Bandung	20 Juni 2011	20 Juni 2011	6
63.	07 / 2011	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	20 Juni 2011	20 Juni 2011	7
64.	08 / 2011	Pengelolaan Air Tanah	20 Juni 2011	20 Juni 2011	8
65.	09 / 2011	Pengelolaan Usaha Pertambangan	20 Juni 2011	20 Juni 2011	9
66.	10 / 2011	Irigasi	20 Juni 2011	20 Juni 2011	10
67.	11 / 2011	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	10 Agust 2011	20 Agust 2011	11
68.	12 / 2011	Perijinan Industri di Kab Bandung	10 Agust 2011	10 Agust 2011	12
69.	13 / 2011	Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kab Bandung	10 Agust 2011	10 Agust 2011	13
70.	14 / 2011	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	10 Agust 2011	10 Agust 2011	14
71.	15 / 2011	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemda di Luar Rumah Sakit	29 Sept 11	18 Sept 11	15
72.	16 / 2011	Perubahan Kedua Atas Perda Kab Bandung No 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung	29 Sept 2011	29 Sept 2011	16
73.	17 / 2011	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010	3 Okt 2011	3 Okt 2011	17
74.	18 / 2011	Perubahan Keempat Atas Perda Kab Bandung No 23 Thn 2007 Ttg Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan	24 Nov 2011	24 Nov 201	
75.	19 / 2011	Perubahan APBD TA 2011	16 Nov 2011	16 Nov 2011	
76.	20 / 2011	Retribusi Rumah Potong Hewan	7 Des 2011	7 Des 2011	
77.	21 / 2011	Retribusi Penjualan Produksi	7 Des 2011	7 Des 2011	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
		Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan Kab Bandung			
78.	22 / 2011	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	7 Des 2011	7 Des 2011	
79.	23 / 2011	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	7 Des 2011	7 Des 2011	
80.	01 / 2012	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Raharja	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
81.	02 / 2012	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PD BPR Kab bandung	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
82.	03 / 2012	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Citra Bangun Selaras Kab bandung	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
83.	04 / 2012	Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbanka	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
84.	05 / 2012	Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
85.	06 / 2012	Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemkab Bandung	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
86.	07 / 2012	Izin Lokasi	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
87.	08 / 2012	Perizinan Perdagangan di Kab Bandung	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
88.	09 / 2012	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab Bandung	2 Jan 2012	2 Jan 2012	
89.	10 / 2012	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012	26 Jan 2012	26 Jan 2012	
90.	11 / 2012	Retribusi Jasa Umum	24 Feb 2012	24 Feb 12	
91.	12 / 2012	Retribusi Jasa Usaha	24 Feb 12	24 Feb 12	
92.	13 / 2012	Retribusi Perizinan Tertentu	24 Feb 2012	24 Feb 2012	
93.	14 / 2012	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No 7 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
94.	15 / 2012	Perubahan Atas Perda Kab bandung No 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
95.	16 / 2012	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wil Kab bandung	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
96.	17 / 2012	Perubahan Atas Perda Kab bandung No 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
97.	18 / 2012	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2017	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
98.	19 / 2012	Pembentukan Kelurahan Rancaekek Kencana Kec Rancaekek Kab bandung	7 Mei 2012	7 Mei 2012	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
99.	20 / 2012	Rumah Susun	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
100.	21 / 2012	Rencana Tapak	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
101.	22/ 2012	Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah	7 Mei 2012	7 Mei 2012	
102.	23/ 2012	Perubahan Ketiga Atas Perda Kab Bandung No 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung	15 Juni 2012	15 Juni 2012	
103.	24 / 2012	Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bandung	15 Juni 2012	15 Juni 2012	
104.	25 / 2012	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No 21 Thn 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung	15 Juni 2012	15 Juni 2012	
105.	26/ 2012	Pembentukan Desa Resmi Tinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	3 Agust 2012	3 Agust 2012	
106.	27 / 2012	Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung	3 Agust 2012	3 Agust 2012	
107.	28 / 2012	Pembentukan Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung	3 Agust 2012	3 Agust 2012	
108.	29 / 2012	Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR Kab Bandung Menjadi PT BPR Kerta Raharja	3 Agust 2012	3 Agust 2012	
109.	30 / 2012	Pembangunan Kepemudaan	3 Agust 2012	3 Agust 2012	
110.	31 / 2012	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011	18 Sept 2012	18 Sept 2012	
111.	32 / 2012	Perubahan APBD TA 2012	20 Nov 2012		

Sumber : *Bagian Hukum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.*

2. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah desa/kelurahan swadaya, swakarya, dan swasembada di Kabupaten Bandung tahun 2008-2012.

Tabel 2.129
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	97	97	97	176	176
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	104	104	104	6	6
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	201	201	201	182	182
5.	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Sumber : BPMPD Kab.Bandung

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar

jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.130
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rasio ketergantungan	52,19	48,95	54,10	53,17	52,13

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012).



Bab III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 157 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung pasal 20 (1) terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

A. Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol. C, dan Pajak Parkir.

B. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pelayanan Kesehatan, RSD Majalaya, RSD Soreang, Pelayanan Persampahan/

Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak KTP, Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil, Pelayanan Pemakaman, Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Fatwa Pengarahan Rencana Pemanfaatan Lokasi, Ijin Pemanfaatan Tanah, Ijin Pemanfaatan Hutan, Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, Perijinan Perdagangan, Jasa Usaha Terminal, Perijinan Industri, Jasa Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata, Jasa Usaha Penyedotan Kakus, Jasa Usaha RPH, Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR, Izin Pembuangan Limbah Cair, Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, Perijinan Transportasi, Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan, Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.

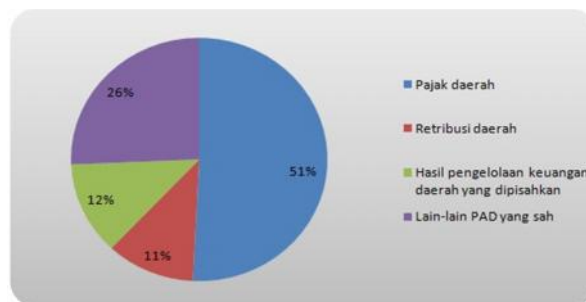
C. Bagian Laba Usaha Daerah

Hasil Bagian Laba Usaha Daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: PDAM, Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan, Bank Karya Produksi Desa.

D. Lain-lain PAD yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Penerimaan Lainnya, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR).

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

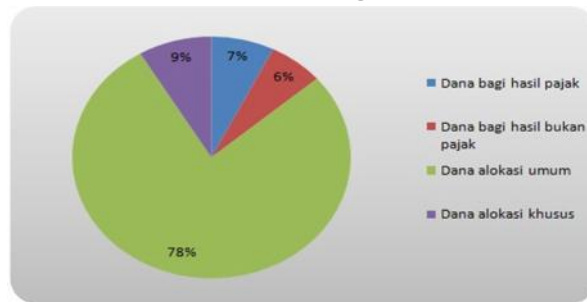


2. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat.

- A. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Bagi Hasil Pajak.
Bagi hasil pajak di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh 21).
 - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung terdiri dari: Iuran Provisi Sumber Daya Alam, Iuran Tetap/Landrent, Iuran Eksploitasi (Royalti), Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan, Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan, Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi, Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam.
- B. Dana Alokasi Umum (DAU)
- C. Dana Alokasi Khusus

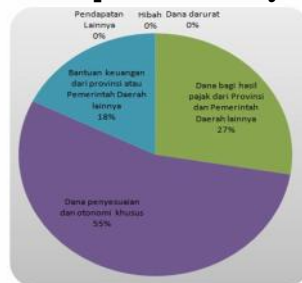
Gambar 3.2
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari, Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Gambar 3.3
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2012



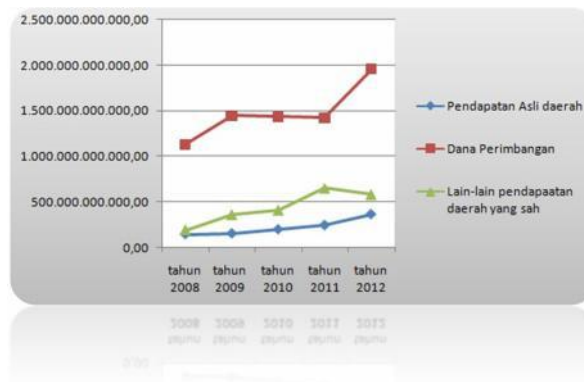
Kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Pendapatan Daerah pada periode tahun 2006 -2010 yaitu:

- Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2008-2012 selalu mengalami peningkatan pendapatan setiap tahunnya dengan capaian pada

tahun 2008 pendapatan daerah sebesar Rp.1.467.678.537.174,08 meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 2.962.414.601.182,00 yakni meningkat sebesar Rp 1.434.736.064.007,92.

- Peningkatan capaian pendapatan asli daerah periode tahun 2008-2012 terjadi peningkatan setiap tahun yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 144.660.409.277,08 pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 366.316.690.578. Peningkatan tersebut dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Dana Perimbangan periode tahun 2008-2012 terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.132.888.252.124, pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.954.099.527.667. Peningkatan tersebut dari beberapa komponen yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, serta dari komponen Dana Alokasi Khusus.
- Peningkatan capaian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah periode tahun 2008-2012 secara umum mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 190.129.875.773 Untuk tahun 2008, dan sebesar Rp. 581.997.382.937 untuk tahun 2012. Namun secara parsial khusus untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi dari tahun 2009 ke tahun 2010 ada penurunan yaitu sebesar Rp. 148.311.429.207 untuk tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 118.178.976.622. Sementara dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 205.525.313.670 untuk tahun 2011, sedangkan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 103.201.045.110. Sementara untuk komponen Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 445.459.218.440 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 318.053.232.000 untuk tahun 2012. Sementara Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 108.748.711.214 dan tahun 2012 sebesar Rp. 160.743.105.827. Khusus untuk penerimaan dari dana darurat hanya terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 44.266.548.000 dan penerimaan pendapatan lainnya terdapat pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 113.733.480. Penurunan atau peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Gambar 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012



Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 s/d Tahun 2012 Kabupaten Bandung

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.467.678.537.174,08	1.955.142.904.011,00	2.042.977.659.292,00	2.547.511.407.969,70	2.902.414.601.182,00	15,22%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	144.660.409.277,08	153.271.649.974,00	198.658.826.439,00	244.500.099.259,70	366.316.690.578,00	21,56%
1.1.1.	Pajak daerah	51.654.333.709,60	47.951.110.528,00	59.385.578.062,00	137.799.240.880,00	186.141.858.448,00	36,76%
1.1.2.	Retribusi daerah	36.067.479.245,10	41.592.879.257,00	60.254.329.366,00	32.791.380.684,00	41.045.068.255,00	7,96%
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	35.674.088.462,00	43.280.145.688,00	52.790.345.015,00	43.117.989.633	45.168.813.789,00	7,43%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	21.264.507.860,38	20.447.514.501,00	26.220.266.396,00	30.791.488.062,70	93.960.950.086,00	61,74%
1.2.	Dana Perimbangan	1.132.888.252.124,00	1.444.122.553.979,00	1.436.030.033.073,00	1.511.531.819.966,00	1.954.099.527.667,00	61,45%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	112.566.362.458,00	123.122.062.283,00	150.591.707.804,00	123.223.997.650,00	143.431.554.029,00	7,48%
1.2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	7.767.820.666,00	210.157.050.696,00	80.252.415.269,00	85.384.881.316,00	124.927.690.638,00	624,10%
1.2.3.	Dana alokasi umum	1.001.542.069.000,00	1.080.215.507.000,00	1.086.282.210.000,00	1.202.706.641.000,00	1.518.230.253.000,00	129,48%
1.2.4.	Dana alokasi khusus	11.012.000.000,00	30.627.934.000,00	118.903.700.000,00	100.036.300.000,00	167.510.030.000,00	45,59%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	190.129.875.773,00	357.748.700.058,00	408.288.799.780,00	791.479.488.780,00	581.997.382.937,00	45,95%
1.3.1	Hibah				-	-	
1.3.2	Dana darurat		44.266.548.000,00		-	-	0,00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	108.748.711.214,00	112.040.363.851,00	118.058.122.758,00	140.494.956.670,00	160.743.105.827,00	10,45%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	10.570.533.600,00	53.130.359.000,00	172.051.700.400,00	445.459.218.440,00	318.053.232.000,00	189,19%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	70.696.897.479,00	148.311.429.207,00	118.178.976.622,00	205.525.313.670,00	103.201.045.110,00	28,40%
1.3.5	Pendapatan Lainnya	113.733.480,00			-	-	0,00%

Permasalahan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung yaitu:

- Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan.
Penatalaksanaan keuangan APBD berawal dari sumber daya pengelola keuangan. Selama periode tahun 2008-2012 SDM pengelola keuangan sering dilakukan upaya peningkatan kualitasnya baik pengetahuan dan keterampilan, namun upaya peningkatan tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh antara lain;
 1. Adanya mutasi pegawai pengelola keuangan dengan pegawai baru yang belum sama sekali mengenal tentang keuangan, artinya adanya kekurangan tepatan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.
 2. Program dan pelatihan keuangan diperlukan jangka panjang dan terstruktur, semisal setara diploma 1.
 3. Perekrutan tenaga keuangan dan akuntansi masih sangat minim, padahal setiap SKPD, unit SKPD, atau bagian SKPD memerlukan tenaga pengelolaan keuangan dan akuntansi.
- Tatakelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan yang meliputi;
 1. Kesalahan prosedural akuntansi untuk transaksi yang terjadi;
 2. Terlambatnya pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja sering terhambat, penatausahaan pada bagian keuangan tidak tepat waktu;
 3. Pengendalian keuangan belum terlaksana sepenuhnya, karena data keuangan belum dapat siap setiap saat dibutuhkan (*real time of data*), dalam arti angka-angka yang disajikan belum final.

Potensi dan tantangan perkembangan APBD Kabupaten Bandung di masa mendatang yaitu:

- Adanya pelimpahan wewenang dalam pemungutan beberapa sumber pendapatan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, seperti Pajak BPHTB, Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) merupakan suatu potensi dan sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola sumber pendapatan tersebut menjadi riil pendapatan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh bantuan keuangan eksternal baik pusat maupun provinsi.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung, urusan wajib dan urusan pilihandilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah

Kabupaten Bandung serta pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

- Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2008-2012 sebagai berikut:

- Rata-rata pertumbuhan Aset Daerah mencapai 14,33%, kenaikan signifikan terjadi pada Aset Lancar sebesar 11,71%; Investasi Jangka Panjang sebesar 9,08%; Aset Tetap sebesar 15,45%; dan Dana Cadangan sebesar 6,05%; Aset Lainnya sebesar 298,10%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Bandung berada pada kondisi sehat.
- Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana mencapai 0,14%, penurunan terjadi pada Kewajiban sebesar 41,54%; Ekuitas Dana Lancar meningkat sebesar 12,84%; Ekuitas Dana Investasi meningkat sebesar 0,15%; dan Ekuitas Dana Cadangan meningkat sebesar 0,28%. Tingginya pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu. Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012 beserta prosentase rata-rata pertumbuhannya disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012**

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan %
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	191.526.788.054,58	351.013.724.821,26	308.941.232.345,78	362.433.506.325,71	387.074.212.528,20	11,71%
1.1.1.	Kas	157.140.199.862,85	321.211.280.186,47	260.614.672.312,04	289.002.760.406,83	310.559.810.358,87	11,78%
1.1.2.	Piutang	17.134.943.777,50	14.249.762.254,85	17.746.616.652,77	43.032.060.864,50	42.728.408.184,50	27,01%
1.1.3.	Persediaan	17.251.644.414,23	15.552.682.379,94	30.579.943.380,97	30.398.685.054,38	33.785.993.984,83	32,00%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	220.533.035.650,03	226.106.783.791,08	248.166.160.285,74	235.383.100.507,16	253.326.811.403	9,08%
1.2.1.	Investasi Non Permanen	14.846.850.000,00	14.846.850.000,00	14.264.968.129	1.329.060.102,00	4.392.500.000,00	57,04%
1.2.2.	Investasi Permanen	205.686.185.650,03	211.259.933.791,08	233.901.192.157	234.054.040.405,16	248.943.311.403,23	9,40%
1.3.	ASET TETAP	3.538.063.595.810,36	3.782.314.440.699,00	3.120.351.244.770,00	5.444.647.444.187,00	6.005.517.210.614,00	15,45%
1.3.1.	Tanah	696.526.308.461,00	659.338.032.807,00	499.568.609.742,00	2.477.330.846.110,00	2.493.411.319.733,00	62,24%
1.3.2.	Peralatan dan mesin	224.586.781.725,06	300.846.842.517,00	297.618.894.617,00	340.078.673.985,00	451.583.825.334,00	1,64%
1.3.3.	Gedung dan bangunan	1.194.201.548.511,90	1.283.048.154.007,00	1.009.635.580.606,00	1.103.823.960.914,00	1.343.272.674.120,00	6,85%
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.320.478.598.817,40	1.494.945.501.571,00	1.281.646.558.618,00	1.487.400.859.032,00	1.658.716.692.054,00	7,20%
1.3.5.	Aset tetap lainnya	79.832.943.225,00	19.394.569.088,00	17.202.642.479,00	20.922.743.892,00	28.942.227.757,00	-1,00%
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	22.437.415.070,00	24.741.340.709	14.678.958.708,0	15.090.360.254,00	29.590.471.616,00	85,39%
1.4.	DANA CADANGAN	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	38.682.630.515,00	24.449.273.420,00	6,05%
1.4.1.	Dana Cadangan	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	38.682.630.515,00	24.449.273.420,00	6,05%
1.5.	ASET LAINNYA	345.604.231,53	5.924.090.005,53	5.928.389.005,53	6.047.631.706,00	16.548.077.696,00	298,10%
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	200.847.478,00	197.130.348,00	195.579.348,00	195.579.348,00	195.579.348,00	-2,99%
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	144.756.753,53	107.930.753,53	71.780.753,53	64.030.000,00	64.030.000,00	-7,51%
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	0,00%
1.5.4.	Aset tak berwujud	-	-	-	556.251.000,00	10.317.874.990,00	0,00%
1.5.5.	Aset Lain-lain	-	5.619.028.904,0	5.661.028.904,0	5.788.022.358,00	5.970.593.358,00	1,02%
	JUMLAH ASET	3.999.651.280.517,86	4.424.543.566.369,23	3.720.071.553.459,41	6.087.194.313.240,87	6.686.924.585.661,43	14,33%

Tabel 3.3

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2008-2012 Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (Rupiah)
2.	KEWAJIBAN	24.119.160.778,24	27.485.681.608,95	4.007.609.100,62	434.168.471,07	20.661.945.998,62	41,54
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24.119.160.778,2	27.485.681.609,0	4.007.609.100,6	434.168.471,1	20.661.945.998,6	41,54
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	987.706.995,35	170.856.206,00	400.187.946,00	220.867.134,07	320.774.779,11	0,09
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-	-			-	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	591.139.367,00	4.782.331.496,06	3.607.288.454,62		200.397.718,51	1,65
2.1.4.	Utang jangka pendek lainnya	22.540.314.415,89	22.532.493.906,89	132.700,00	213.301.337,00	20.140.773.501,00	27.863,54
3.	EKUITAS DANA	3.975.532.119.739,61	4.397.058.034.760,28	3.716.081.944.358,79	6.053.672.961.870,66	6.678.072.954.412,71	0,14
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	167.407.627.276,34	323.528.043.212,31	304.951.623.245,16	361.847.252.437,97	381.354.707.146,95	0,12
3.1.1.	SILPA	155.509.599.178,14	317.829.389.787,76	256.487.127.025,06	288.707.585.817,76	309.929.497.577,76	0,12
3.1.2.	Pendapatan yang Ditangguhkan	175.239.547,36	157.566.304,36	119.936.186,36	66.789.287,00	187.483.179,00	0,04
3.1.3.	Cadangan piutang	17.134.943.777,50	14.249.762.254,85	17.764.616.652,77	43.379.975.447,83	43.175.914.485,87	0,27
3.1.4.	Cadangan persediaan	17.251.644.414,23	15.552.682.379,94	30.579.943.380,97	30.398.685.054,38	33.785.993.984,83	0,32
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-22.663.799.640,89	-24.261.357.514,60		-705.783.169,00	-5724182081	33,01
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	3.758.942.235.691,91	4.014.345.464.495,61	3.374.445.794.061,27	5.683.002.301.532,69	6.272.268.973.845,76	0,15
3.2.1.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	220.533.035.650,03	226.106.783.791,08	248.166.160.285,74	235.383.100.507,16	253.335.811.403,23	0,09
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	3.538.063.595.810,35	3.782.314.440.699,00	3.120.351.244.770,00	5.444.647.444.187,00	6.005.517.210.614,00	0,15
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	345.604.231,53	5.924.240.005,53	5.928.389.005,53	6.609.033.459,53	16.553.228.449,53	2,96
3.2.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-		(3.637.276.621)	-3.137.276.621,00	-0,02
3.3.	EKUITAS DANA CADANGAN	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	8.823.407.900,00	24.449.273.420,00	0,28
	Diinvestasikan dalam dana cadangan	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	8.823.407.900,00	24.449.273.420,00	0,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.999.651.280.517,85	4.424.543.716.369,23	3.720.089.553.459,41	6.054.107.130.341,73	6.698.734.900.411,33	0,14

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain dapat dibagi dua garis besar berdasar obyek laporan keuangan yang dijadikan analisis, yaitu :

1. Rasio atas Neraca;
2. Rasio atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung periode tahun 2008-2012 dapat disampaikan sebagaimana yang tergambar dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.4
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2008-2012 Kabupaten Bandung

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
I	Rasio atas Neraca					
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>); { Aset Lancar/Kewajiban Lancar}	794,09	1.277,08	7.708,87	822,38	1.626,41
2.	Rasio cash (<i>cash ratio</i>); { Kas+Surat Berharga/Kewajiban Lancar}	651,52	1.168,65	6.503,00	655,76	1.304,91
3.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>); { Kas+Surat Berharga+ Piutang /Kewajiban Lancar}	722,56	1.220,49	6.945,82	753,40	1.484,45
II	Rasio atas LRA					
4.	Rasio Kemandirian; { PAD / Total Pendapatan}	9,86	7,84	9,72	10,55	12,62
5.	Rasio Efektivitas PAD; { Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD}	103,66	101,17	102,95	101,49	114,85
6.	Rasio Keserasian (Belanja Tdk Langsung terhadap Total APBD); { Belanja Tdk Langsung / Total APBD}	67,01	71,68	68,57	66,85	59,82
7	Rasio Keserasian (Belanja Langsung terhadap Total APBD); { Belanja Langsung /Total APBD}	32,99	28,32	31,43	33,42	38,37

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*);

Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio lancar kabupaten bandung periode tahun 2006 sampai 2010 menunjukkan rasio yang positif (lancar), artinya bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh aset lancar minimal Rp79.409,00 pada tahun 2008.

Pada tahun 2006 tidak ada kewajiban lancar, sehingga tidak diperoleh rasio lancar, artinya jumlah aset lancar pada tahun 2006 sejumlah

Rp250.535.025.708,25 dalam keadaan bebas atau tidak dijamin untuk pembayaran kewajiban lancar.

2. Rasio Kas (*Cash Ratio*);

Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas dan surat berharga dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio kas kabupaten bandung periode tahun 2006 sampai 2010 menunjukkan rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas minimal Rp.65.152,00 pada tahun 2008.

Pada tahun 2006 tidak ada kewajiban lancar, sehingga tidak diperoleh rasio kas, artinya jumlah aset kas pada tahun 2006 sejumlah Rp.225.993.089.522,31 dalam keadaan bebas atau tidak dijamin untuk pembayaran kewajiban lancar.

3. Rasio Quick (*Quick Ratio*);

Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas, surat berharga dan piutang dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio *quick* kabupaten bandung periode tahun 2006 sampai 2010 menunjukkan rasio yang sangat sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas, surat berharga dan piutang minimal Rp72.256,00 pada tahun 2008.

Pada tahun 2006 tidak ada kewajiban lancar, sehingga tidak diperoleh rasio *quick*, artinya jumlah aset kas, surat berharga dan piutang pada tahun 2006 yang berjumlah Rp242.159.881.081,44 dalam keadaan bebas atau tidak dijamin untuk pembayaran kewajiban lancar.

4. Rasio Kemandirian;

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan daerah kabupaten bandung (otonomi fiskal) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil ketergantungan pemerintah kabupaten bandung terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat dan provinsi).

Rasio kemandirian kabupaten selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata sebesar 8,80%. Rasio kemandirian tertinggi diperoleh pada tahun 2010, yaitu sebesar 9,72%, artinya bahwa dari total pendapatan daerah yang diperoleh kabupaten bandung tahun 2010 kontribusi PAD nya sebesar 9,72%.

5. Rasio Efektivitas PAD;

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas PAD kabupaten selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata sebesar 101,09%. Upaya pencapaian target PAD bisa dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Sehingga selama periode tahun 2006 hingga 2010 pemerintah kabupaten telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai perolehan PAD. Rasio efektivitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2008, yaitu sebesar 103,66%.

6. Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja APBD;

Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung (program/kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio keserasian belanja tidak langsung kabupaten Bandung selama periode 2006 hingga 2010 rata-rata mencapai 66,89% dari total belanja APBD, artinya ini menunjukkan belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja hibah, belanja bansos dan bantuan keuangan lainnya) masih relatif tinggi yang berdampak kurang optimalnya belanja program/kegiatan, pelayanan dan investasi. Rasio terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu 63,12%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2009 yaitu sebesar 71,68%.

7. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja APBD;

Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti persentase belanja langsung (program/kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin tinggi.

Rasio keserasian belanja langsung kabupaten Bandung selama periode 2006 hingga 2010 rata-rata mencapai 33,11% dari total belanja APBD artinya ini menunjukkan belanja Program/kegiatan, pelayanan dan investasi untuk masyarakat masih sangat rendah. Rasio terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 28,32%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2007 yaitu sebesar 36,88%.

3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada :

- Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan pos dana perimbangan dan pos bagi hasil pajak provinsi.

Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah.

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada objek dan subjeknya, serta penggalan potensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa kegiatan intensifikasi yang secara rutin dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2006-2010 antara lain melalui :

- a) Sosialisasi, pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- b) Pengumpulan pengolahan data base pajak dan retribusi;
- c) Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Bandung dengan instansi terkait dalam pengelolaan penerimaan BPHTB Penagihan langsung ke Objek PBB;

d) Regulasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terutama yang berhubungan dengan perubahan tarif.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, yang berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable).
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.
3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.
4. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (*public domain*) dan urusan individu (*private domain*), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.
5. Mengupayakan bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) agar lebih efektif dan efisien, serta mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.
6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
7. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sekolah.
8. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa.
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
12. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
13. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan.
 - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.
 - d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bandung dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 yaitu:

- Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 1.581.500.800.228
- Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 2.886.523.261.378,00 hal ini terjadi karena adanya penyertaan modal investasi daerah.

Persentase belanja antara pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran terbesar justru terjadi pada tahun 2009 sebesar 71,39% dibandingkan tahun 2012 sebesar 54,79%

Secara lengkap analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2006-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Proporsi Belanja Daerah

No	Uraian	2011 (Rp)	2012* (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	1.425.619.588.006,00	1.457.667.009.637,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.009.986.019.398,00	1.025.346.506.224,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	399.363.074.453,00	412.016.720.056,00

No	Uraian	2011 (Rp)	2012* (Rp)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.760.520.000,00	4.778.126.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	11.509.974.155,00	15.525.657.357,00
B	Belanja Langsung	106.044.180.583,00	123.833.790.591,00
1	Belanja Honorarium PNS**)	13.744.386.900,00	20.147.791.291,00
2	Belanja Uang Lembur**)	5.810.810.550,00	1.291.080.650,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.285.350.000,00	194.055.360,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	5.135.043.940,00	9.175.073.959,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	661.467.000,00	834.225.000,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	23.006.243.093,00	24.109.263.512,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	1.050.313.750,00	750.035.150,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	631.812.400,00	1.580.474.575,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	54.718.752.950,00	65.751.791.094,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	-	-
	TOTAL	1.531.663.768.589,00	1.581.500.800.228,00

Tabel 3.6.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bandung

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase total Belanja Aparatur dengan Total Pengeluaran
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
3	Tahun anggaran 2008	991.815.774.429	1.500.493.294.753,30	66,10
4	Tahun anggaran 2009	1.279.421.739.311	1.792.084.186.440,38	71,39
5	Tahun anggaran 2010	1.338.456.710.720	2.365.665.031.671,76	56,58
6	Tahun anggaran 2011	1.531.663.768.589	2.471.031.708.806,00	61,98
7	Tahun anggaran 2012	1.581.500.800.228	2.886.523.261.378,00	54,79

3.1.5 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Kabupaten Bandung pada kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 2.902.413.601.182,00
- Belanja daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.850.023.261.378,00
- Pengeluaran pembiayaan daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp.36.500.000.000,00
- Hasil analisis antara realisasi pendapatan daerah terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah defisit riil terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.-154.227.909.471,00

Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada tahun 2006-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung

NO	Uraian	(2008)	(2009)	(2010)	2011	2012
		(Rp)				
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.467.564.803.694,08	1.955.142.904.011,00	2.042.977.659.292,00	2.316.803.799.335,00	2.902.413.601.182,00
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.480.102.230.212,00	1.784.808.639.830,38	2.106.019.303.925,70	2.460.240.275.222,00	2.850.023.261.378,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.644.638.896,30	10.516.743.852,00	21.382.771.658,76	10.791.433.584,00	36.500.000.000,00
	Defisit riil	-35.182.065.414,22	159.817.520.329,62	-84.424.416.292,46	-154.227.909.471,00	15.890.339.804,00

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil									
		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)		(2012)	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	155.509.599.178,14	0,98	317.829.389.787,76	0,99	340.329.389.788	93,80	258.190.830.139,06	84,82	288.707.585.817,76	90,16
2	Penyertaan Modal (Investasi)	1.028.000.000,00	0,01	-	-	22.500.000.000	6,20	38.682.630.515,00	12,70	16.500.000.000,00	5,15
3	Pencairan Dana Cadangan			-	-	-	-	20.000.000	0,01	15.000.000.000,00	4,69
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-		-		-					
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-		-					
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-		-		-		7.500.000.000,00	2,46		
7	Penerimaan Piutang Daerah	33.179.063,00	0,00	-		-		19.059.650,00	0,01		
8	Penerimaan Bunga Dana Cadangan	2.253.574.355,00	0,01	2.502.270.281,00	0,01	-					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	158.824.352.596		320.331.660.069		362.829.389.788		304.412.520.304,06		320.207.585.817,76	

**Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2008 – 2012 Kabupaten Bandung**

No.	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	187.263.177.694	100,00%	155.509.599.178	100,00%	317.829.389.787,8	100,00%	258.190.830.139,06	100,00%	288.707.585.817,8	100,00%
2.	Pelampauan penerimaan PAD	5.111.624.984	2,73%	1.053.461.324	0,68%	5.678.541.416,0	1,79%	50.154.588.652,00	19,43%	47.369.080.560,0	16,41%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	11.732.171.124	6,27%	153.141.822.950	98,48%	19.382.128.157,0	6,10%	37.151.621.902,00	14,39%	85.986.823.824,0	29,78%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	910.865.680	0,49%	7.839.969.493	5,04%	75.073.177.451,0	23,62%	12.508.033.986,00	4,84%	32.021.353.652,0	11,09%
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	(141.541.937.390)	(75,58%)	(172.600.333.374)	(110,99%)	(307.465.956.146)	(96,74%)	(195.321.666.192,00)	(75,65)	(213.087.782.790,65)	(73,81%)
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.	Kegiatan lanjutan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

3.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2008-2012

3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama

Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama pada periode tahun 2006 -2010 yaitu:

- Pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 13,13%. Pengeluaran terbesar dari Belanja Tidak Langsung terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Belanja Pegawai, dan Hibah dibandingkan tahun lainnya pada periode ini. Namun demikian pengeluaran terbesar Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa justru terjadi pada tahun 2007. Sedangkan pengeluaran terbesar Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga justru terjadi pada tahun 2009.
- Pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung sebesar 12,60%. Pengeluaran terbesar dari Belanja Langsung terjadi pada tahun 2010 dibandingkan tahun lainnya pada periode ini.
- Pertumbuhan rata-rata Pengeluaran Pembiayaan sebesar -21,30%. Pengeluaran Pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2007, yang diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Secara lengkap perincian mengenai Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama periode tahun 2008-2012 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Tabel 3.10

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2008 s/d Tahun 2012 Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	987.745.296.835,00	1.279.421.739.311,38	1.529.823.777.260,00	1.640.115.443.895,00	1.736.329.871.127,00	12,20%
2.1.1	Belanja Pegawai	816.189.249.767,00	960.281.724.576,00	1.204.567.047.876,00	1.425.619.588.006,00	1.511.662.036.637,00	12,52%
2.1.2	Belanja Bunga			0,00			0,00%
2.1.3	Belanja Subsidi			0,00			0,00%
2.1.4	Belanja Hibah	42.504.679.278,00	27.377.476.060,00	128.536.223.454,00	77.848.070.250,00	41.734.739.950,00	%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	33.906.459.065,00	25.421.455.142,00	44.587.956.162,00	12.063.758.000,00	1.855.669.700,00	28,90%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	46.734.275.845,00	38.133.822.632,00	30.977.719.768,00	31.856.358.773,00	61.050.186.000,00	8,45%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	47.738.142.880,00	111.572.884.512,00	104.904.830.000,00	89.436.367.366,00	114.890.114.940,00	16,26%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	672.490.000,00	116.634.376.389,38	16.250.000.000,00	3.291.301.500,00	5.137.123.900,00	%
2.2	BELANJA LANGSUNG	492.356.933.377,00	504.664.906.369,00	814.303.254.411,76	820.124.831.327,00	1.113.693.390.251,00	17,31%
2.2.1	Belanja Pegawai	80.439.960.806,00	42.431.559.390,00		72.313.780.054,00	130.434.550.552,00	16,02%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.436.761.163,00	313.307.976.912,00		575.340.515.488,00	493.670.423.251,00	%
2.2.3	Belanja Modal	180.480.211.408,00	148.925.370.067,00		172.470.535.785,00	489.588.416.448,00	%
2.3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.391.064.541,30	7.997.540.760,00	21.538.000.000,00	10.791.433.584,00	21.500.000.000,00	%
2.3.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.391.064.541,30	7.500.000.000,00	0,00	8.823.407.900,00	15.000.000.000,00	%
2.3.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	497.540.760,00	21.028.000.000,00	20.000.000,00	16.500.000.000,00	%
2.3.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00		510.000.000,00	1.948.025.684,00	5000.000.000	-73,10%
2.3.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00		0,00			0,00%
2.3.5	Pembentukan dana cadangan dari bunga dana cadangan	2.253.574.355,00	2.502.270.281,00	0,00			0,00%
2.3.6	Koreksi atas SiLPA		16.932.811,00				0,00%
	Jumlah (2.1+2.2+2.3)	1.500.493.294.753,3	1.792.084.186.440,38	2.365.665.031.671,76	2.471.031.708.806,00	2.886.523.261.378,00	

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2015, senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2). Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
- 3). Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bias diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2011-2015 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

- 1). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a). Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b). Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - c). Penataan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d). Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e). Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil,
 - f). Meningkatkan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan PAD.

- g). Meningkatkan pelayanan serta pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi pajak.
- h). Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 2). Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).
Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a). Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - b). Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui peningkatan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.

- **Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2005-2010 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2009 yang baru mencapai sebesar 73,39 sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1). Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2). Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
- 3). Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka

- melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 4). Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 5). Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
 - 6). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 7). Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(KUKM) serta dukungan infrastruktur pedesaan;
 - 8). Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
 - 9). Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
 - 10). Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
 - 11). Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
 - 12). Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
 - 13). Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a). Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk Tahun 2012-2015 belum termasuk acces);

- b). Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
- c). Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- d). Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e). Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- f). Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- g). Mengalokasikan belanja bagi Hasil yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah), dana perimbangan (setelah dikurangi belanja pegawai dan dana alokasi khusus), kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal Desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h). Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2011-2015 adalah :

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

- **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2011-2015 adalah :

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
- 3) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

- **Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra**

Arah kebijakan Tahun 2011-2015 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bandung. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

- 1) Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bandung;
- 2) Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
- 3) Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.

- 4) Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- 5) Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- 6) Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan, dan industri manufaktur;

Dengan mempertimbangkan trend pencapaian pendapatan daerah dan kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional Kabupaten Bandung serta kapasitas SKPD penghasil Kabupaten Bandung, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bandung rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan di bawah 10%.

**Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN	2.378.600.572.067,80	2.801.080.050.450,65	2.804.302.293.440,12	3.003.954.233.902,52	2.823.268.532.616,95
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	240.907.807.907,00	318.947.610.018,00	430.127.599.111,12	507.622.962.086,52	504.052.810.425,95
1.1.1.	Pajak daerah	111.418.999.229,00	159.885.000.000,00	243.777.364.885,12	254.960.000.000,00	249.960.000.000
1.1.2.	Retribusi daerah	32.589.001.964,00	39.518.426.609,00	51.214.186.650,00	28.596.966.788,52	30.026.815.128
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	43.137.049.283,00	45.234.438.807,00	51.617.417.126,00	50.105.551.398,00	50.105.551.398,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	53.762.757.431,00	74.309.744.602,00	83.518.630.450,00	173.960.443.900,00	173.960.443.900,00
1.2.	Dana Perimbangan	1.474.200.198.064,00	1.868.112.703.843,00	2.061.368.459.952,00	2.225.271.019.832,00	2.065.211.236.741,00
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	111.244.712.548,00	132.284.941.439,00	99.044.928.763,00	94.822.243.899,00	94.822.243.899,00
1.2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	60.193.844.516,00	50.087.479.404,00	73.165.812.189,00	75.304.955.933,00	72.619.692.842,00
1.2.3.	Dana alokasi umum	1.202.706.641.000,00	1.518.230.253.000,00	1.730.063.709.000,00	1.897.769.300.000,00	1.897.769.300.000,00
1.2.4.	Dana alokasi khusus	100.055.000.000,00	167.510.030.000,00	159.094.010.000,00	157.374.520.000,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	663.492.566.096,80	614.019.736.589,65	312.806.234.377,00	271.060.251.984,00	254.004.485.450,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	152.892.228.656,80	176.840.060.729,65	172.117.326.739,00	269.535.921.984	254.004.485.450
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	444.406.177.440,00	318.054.232.000,00	428.493.318,00		
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	66.194.160.000,00	119.125.443.860,00	140.260.414.320,00	1.524.330.000,00	
1.3.5	Pendapatan Lainnya					

Keterangan : Proyeksi pendapatan tersebut belum termasuk DAK, Sertifikasi guru dan TPP, Bos dan bantuan gubernur

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp)				
1	Pendapatan	2.378.600.572.067,00	2.801.080.050.450,00	2.804.302.293.440,12	3.003.954.233.902,00	2.823.268.532.616,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	38.682.630.516,00	8.823.407.900,00	8.823.407.900,00	8.823.407.900,00	8.823.407.900,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	258.190.830.193,00	288.707.585.818,00	309.929.497.577,00	370.596.621.123,00	370.596.621.123,00
	Total penerimaan	2.675.474.032.722,00	3.098.611.044.168,00	3.123.055.198.917,12	3.383.374.262.925,00	3.202.688.561.639,00
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.488.799.471.689,00	1.646.446.955.673,00	1.911.871.122.506,00	1.610.638.398.355,00	1.610.638.398.335,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.186.674.561.033,00	1.452.164.088.495,00	1.211.184.076.411,12	1.772.735.864.590,00	1.592.050.163.304,00

**Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung**

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp)				
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
IIa	Belanja Langsung	708,094,063,748	579,484,422,442	624,367,971,464	627,785,302,640	630,740,379,032
IIb	Pembentukan dana cadangan		15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	
	Dikurangi:					
IIc	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
IIId	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	15,000,000,000				
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (IIa+IIb-IIc-IIId)					
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
IIIa	Belanja Tidak Langsung	1,194,186,580,103	1,281,451,243,805	1,280,861,557,114	1,278,649,501,838	1,321,291,512,395
	Dikurangi:					
IIIb	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (IIIa-IIIb)					
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*					



4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan periode pembangunan tahap I tahun 2005 – 2010, merupakan kondisi capaian hasil rencana yang belum dapat terselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Permasalahan yang dihadapi memiliki implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap target capaian sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung tahun 2005 – 2025.

Beberapa hasil rumusan dan analisa terhadap sasaran pokok RPJPD tahap II (tahun 2010 – 2015), kebijakan nasional dan provinsi, indikasi terhadap kebijakan RTRW serta kebijakan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota berbatasan mengindikasikan masih adanya permasalahan yang perlu diselesaikan dalam periode waktu tahun 2010 – 2015.

Gambaran permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Bandung, merupakan permasalahan strategis dan menjadi agenda utama untuk penanganannya. Penyajian permasalahan dikelompokkan ke dalam masing – masing urusan pembangunan.

4.1.1. Urusan Pendidikan

Perbaikan dan peningkatan pembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu upaya dalam pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan. Melalui indikatorangka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan layanan pendidikan, sarana prasarana pendidikan dan lain-lain, dapat terlihat upaya perbaikan yang dilakukan dalam urusan pendidikan ini. Besarnya porsi anggaran yang disiapkan dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan, terutama perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar diharapkan dapat memperkuat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Permasalahan yang masih dihadapi saat ini di urusan pendidikan mencakup: 1).Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, 2).Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, 3).Belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan serta pemerataannya yang belum optimal, serta 4).Rendahnya minat siswa SLTP untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SLTA).

4.1.2. Urusan Kesehatan

Intervensi program/kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif telah dan terus menerus dilakukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian pula sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, baik di rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus diupayakan agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan perbaikan cakupan pelayanan untuk ibu dan anak terus dilakukan. Rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1 : 84. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Bandung melayani 77 balita. Selain itu rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2010 mencapai 1 : 7.067. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/ Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 7.067 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2009 adalah 1 : 9.359. Ini artinya 1 dokter melayani 9.359 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan urusan kesehatan yang masih dirasakan saat ini, diantaranya: 1).belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis/dokter, 2).ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan yang masih terbatas, 3). Pola hidup sehat yang belum memasyarakat, serta 4). Masih adanya budaya penanganan persalinan oleh bukan tenaga kesehatan.

4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2010, adalah 355,57 Km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, adalah sebesar 30,78%.

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Panjang jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sepanjang 1.044,81 km. Angka ini tidak mengalami perubahan bila dibandingkan tahun 2009.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Sampai tahun 2010 luas permukiman yang tertata mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari 14.297,30 ha luas permukiman, Luas permukiman yang tertata mencapai 81,84 % (11.649,05 ha). Sementara rumah tinggal berakses sanitasi yang sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi melalui fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan air

limbah (air bekas) dan pembuangan sampah pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 98,47%.

Permasalahan: Perbaikan sarana dan prasarana dasar pemukiman selalu diupayakan melalui berbagai program agar terjadi akselerasi pencapaian MDG's. Permasalahan yang menjadi fokus perhatian adalah kondisi infrastruktur jalan dan hal ini juga menjadi fokus Pemerintah Pusat, berkaitan dengan buruknya drainase jalan serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Masih tingginya kerusakan jaringan jalan di Kabupaten Bandung (kondisi jalan rusak berat meningkat hingga 21,26 % pada tahun 2010) perlu mendapat perhatian sebagai pendukung jalur distribusi dan pemasaran.

4.1.4. Urusan Perumahan

Perumahan dan permukiman yang baik, harus memiliki infrastruktur dasar permukiman agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur tersebut, antara lain air bersih, sanitasi dan energi listrik. Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan : rumah tangga di Kabupaten Bandung yang telah memanfaatkan tenaga listrik sebanyak 446.484 (57,76%) sisanya sebanyak 42,24% belum bisa menikmati listrik dan sebagian besar berada di daerah perbatasan dan perkebunan. Ini menunjukkan masih cukup rendah aksesibilitas masyarakat terhadap listrik serta terbatasnya sumber daya listrik.

4.1.5. Urusan Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bandung, sebesar 26,13% dari 30% yang dianjurkan/ditargetkan. Oleh karena itu, dapat tergambarkan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung masih terbatas dan perlu untuk dikembangkan, karena fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro selain berfungsi sosial-ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark.

4.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Sinergitas dokumen perencanaan dengan realisasi pelaksanaan APBD belum optimal menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Sehingga target dan capaian tiap SKPD bisa menyebabkan tidak berkesinambungan serta penggunaan teknologi informasi belum optimal dalam rangka peningkatkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.1.7. Urusan Perhubungan

Pada tahun 2010 jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang sebanyak 139 unit. Jumlah ini hanya 1,12% dari jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia di jalan-jalan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2009 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan baru mencapai 1 : 156 sehingga belum

terpenuhi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya.

4.1.8. Urusan Lingkungan Hidup

Masih rendahnya daya tampung TPSS dan rendahnya kuantitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah tergambar dari masih rendahnya persentase penanganan sampah, yaitu hanya sebesar 8,02%. Hal tersebut didukung dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama swasta dalam pengelolaan sampah sehingga menyebabkan isu lingkungan, terutama lingkungan permukiman berkaitan dengan persampahan perlu penanganan serius, karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

4.1.9. Urusan Pertanahan

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

Permasalahan : administrasi pertanahan di Kabupaten Bandung sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa belum adanya data yang dapat menggambarkan hal tersebut.

4.1.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Total jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 meningkat 1,33 % bila dibandingkan tahun 2010 yaitu menjadi 3.215.548 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa. Dalam menilai tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan akte nikah, gambaran di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 75,34%, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 60,08% dan kepemilikan akte kelahiran sebesar 80,65 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bandung masih perlu meningkatkan tertib administrasi kepemilikan KTP, KK dan Akte Kelahiran.

4.1.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Bandung masih sangat kecil, yaitu sebesar 1,84%. Sementara di lembaga swasta partisipasi perempuan sebesar 98,16%. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bandung, terjadi pada 15 rumah tangga dari 885.674 rumah tangga

4.1.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan Pemerintah adalah 2 (dua) orang anak. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata berjumlah 2-3 orang anak.

4.1.13. Urusan Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakikatnya adalah pembangunan manusia yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya

Manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan social masyarakat yang sehat dan dinamis, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada gerak langkahnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks.

Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi statis saat ini maka perkembangannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan statis kontemporer. Permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial meliputi: 1).Masih tingginya pertumbuhan PMKS baru dibanding dengan penanganannya, 2).masih minimnya SDM di bidang sosial, 3).Belum memadainya sarana prasarana untuk penanganan masalah sosial, 4).Adanya kecenderungan peningkatan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama pada anak dan perempuan, 5).Belum adanya keterpaduan penanganan program antar SKPD yang terkait dengan persoalan sosial.

4.1.14. Urusan Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2010, adalah 1:0,87. Angka partisipasi angkatan kerja sebesar 1.516.650 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,873 serta rasio ketergantungan sebesar 54,10.

Permasalahan: Sebagian besar permasalahan dalam urusan ketenagakerjaan, berkaitan dengan jenjang pendidikan serta miss match antara lulusan dan permintaan tenaga kerja. Secara umum, dapat menggambarkan permasalahannya sebagai berikut:Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan, Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri, Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja serta, Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi sehingga daya saing tenaga kerja rendah

4.1.15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi sebagai lembaga ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan menggerakkan roda ekonomi di wilayah.Peran koperasi sangat penting sebagai pendukung peningkatan potensi usaha lokal, penyedia informasi, lembaga distribusi dan pemasaran. Di Kabupaten Bandung, selain peran koperasi masih terbatas pada kesejahteraan anggotanya serta masih rendahnya kesadaran arti penting koperasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat, jumlah koperasi yang tidak aktif pun sangat besar (51,31%). Koperasi yang aktif, sebagian besar berupa koperasi simpan pinjam.Dan Terkait UKM permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya aksesibilitas informasi dan kesempatan untuk berkembangnya UKM Di Kabupaten Bandung.

4.1.16. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu sebanyak 28 investor, penurunan paling kuat terlihat dari investor asing yang turun menjadi 19 investor dari 25 investor di tahun 2009, namun realisasi nilai investasi yang ditanamkan

pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 263,55% bila dibandingkan dengan tahun 2009.

4.1.17. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja “jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan”.

Permasalahan : Belum optimalnya pengelolaan data base tentang seni dan budaya, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Bandung

4.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada tahun 2010 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bandung sebanyak 68 buah, sedangkan pada tahun 2006-2009, jumlah organisasi ini masing-masing sebanyak 47 buah pada tahun 2006, 53 buah pada tahun 2007 dan 58 buah pada tahun 2008, dan 67 pada tahun 2009.

Sementara banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 45 buah.

4.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini menitikberatkan pada kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma sehingga perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi dalam hal pembinaan.

4.1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 5,88 % dengan laju inflasi sebesar 5,66%. Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi (9 sektor), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 8,21 %. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor bangunan/ konstruksi; sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor listrik gas dan air bersih; sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa; yaitu masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 7,17 %; 6,66%; 5,24%; 5,32%; 5,26 % serta 5,60%. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 5,21% yaitu dari Rp 6.507.360,00 tahun 2009 menjadi Rp 6.846.640,00 di tahun 2010. Berdasarkan PDRB perkapita (ADHK) menunjukkan pertumbuhan tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung, tetapi kenaikannya masih kecil dan belum bisa menunjukkan yang berarti.

Dalam hal ketertiban dan ketentraman, jumlah aparatur yang ada belum terdistribusi dengan baik dan kualifikasi untuk SDM penegak Perda masih dirasakan kurang, perlu dilakukan identifikasi ulang seluruh jenjang kepegawaian agar terjadi rasionalisasi untuk mencapai “minim struktur kaya fungsi”. rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Di Kabupaten Bandung jumlah polisi pamong praja pada tahun 2010 sebanyak 88 orang atau mempunyai rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2010 sebesar 0,0027. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung baru bisa terlayani oleh polisi pamong praja sebanyak 27 orang.

Begitu pun dengan keberadaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jumlah aparatur yang ada belum terdistribusi dengan baik dan kualifikasi untuk SDM penegak Perda masih dirasakan kurang, perlu dilakukan identifikasi ulang seluruh jenjang kepegawaian agar terjadi rasionalisasi untuk mencapai minim struktur kaya fungsi. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 17 : 10.000 Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010, bisa terlayani oleh jumlah Linmas sebanyak 17-18 orang.

Dalam hal pelayanan dan antisipasi bencana kebakaran, di Kabupaten Bandung rasio mobil pemadam terhadap luasan sebesar 1 : 25.177 ha, artinya satu unit mobil pemadam kebakaran harus bisa melayani area Kab. Bandung seluas 25.177 Ha.

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, diketahui ada sebanyak 238.224 Rumah Tangga Sasaran dari 853.101 total Rumah Tangga atau sebesar 27,92% Rumah Tangga Sasaran Program perlindungan Sosial di Kabupaten Bandung.

Permasalahan:

- 1) Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita serta rendahnya inflasi yang terjadi, belum berpengaruh besar terhadap pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung.
- 2) Masih tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan (pertanian dan perkebunan).
- 3) Belum memadainya jumlah layanan mobilitas pelayanan bencana kebakaran.
- 4) Masih rendahnya jumlah Polisi Pamong praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- 5) Masih rendahnya Jumlah Linmas untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis.

4.1.21. Urusan Ketahanan Pangan

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 513.856 ton Gabah Kering Giling (GKG), dengan jumlah konsumsi oleh 3.215.548 jiwa penduduk sebanyak 312.841 ton (60,88 %). Jumlah ketersediaan bahan pangan tidak sebanding dengan peningkatan

konsumsi bahan pangan dan belum meratanya distribusi serta kemampuan dalam konsumsi bahan pangan di Kabupaten Bandung. Luas wilayah pertanian di Kabupaten Bandung menjadi salah satu potensi yang belum dioptimalkan dengan baik, dalam rangka meningkatkan hasil-hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna. Program dan kegiatan dalam urusan ini belum didukung dengan regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tata laksana Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di daerah.

4.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM sebanyak 1 kelompok dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,089 kelompok atau setiap anggota PKK di Kabupaten Bandung mempunyai kelompok binaan PKK hanya 0,089 kelompok. Jumlah LSM di Kabupaten Bandung yang terdaftar pada tahun 2010 sebanyak 215 LSM, dari jumlah tersebut yang tidak aktif sebanyak 112 LSM, dengan demikian jumlah LSM aktif sebanyak 103 LSM. Jumlah LSM aktif ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009).

Masih kecilnya rata-rata kelompok-kelompok binaan serta tren meningkatnya bentukan LSM perlu disikapi sebagai membaiknya kehidupan berorganisasi dan menyalurkan aspirasi di masyarakat yang perlu disertai dengan pembinaan dan pengarahan agar mendukung pembangunan secara umum.

4.1.23. Urusan Statistik

Ketersediaan dokumen statistik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa dokumen statistik yang masih belum tersedia perlu segera dilengkapi melalui koordinasi dan kerjasama antar SKPD sehingga dokumen referensi pengambilan kebijakan semakin baik sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih optimal.

4.1.24. Urusan Kearsipan

Dari 79 SKPD di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2010, sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 79 orang, dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan pelatihan baru sebanyak 60 orang atau sekitar 75,95%. Peningkatan kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam Pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi.

4.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Keberadaan surat kabar dan media informasi lain sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara *up to date* terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Masih banyak penduduk yang belum teraliri listrik, terutama di daerah perbatasan dan perkebunan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam menunjang perluasan informasi dan peningkatan perekonomian.

4.1.26. Urusan Perpustakaan

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat serta menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Dua buah perpustakaan yang berada di Kabupaten Bandung, masih dirasa kurang. Oleh karena itu peningkatan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan bahan pustaka serta infrastruktur pendukungnya masih diperlukan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap perpustakaan dengan meningkatkan ketersediaan perpustakaan keliling.

4.1.27. Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian pada PDRB harga berlaku sebesar Rp 3.471.661.92 (7.53%) atau ketiga terbesar setelah industri pengolahan dari manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian, potensi dan kontribusi cukup besar belum ditandai dengan sinergitas para pelaku usaha hulu dan hilir melalui jaringan usaha bersama dalam pengembangannya agar bisnis yang modern berdaya saing dan berkelanjutan.

4.1.28. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2010 luas lahan kritis di Kabupaten Bandung mencapai 59.969,39 ha dan telah dilakukan rehabilitasi seluas 2.493,12 ha (8,8 %), mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya 6.814,72 Ha dan terehabilitasi seluas 1.084,5 ha (15,91%). Luasan rehabilitasi lahan dan hutan memerlukan penanganan serius berkaitan dengan topografi dan iklim Kabupaten Bandung, karena akan menyebabkan bencana, baik erosi atau pun banjir.

4.1.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Luasan pertambangan tanpa ijin masih cukup besar, yaitu 20,755 Ha. Dengan luas penambangan yang ditertibkan sudah mencapai 80,73 % Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan regulasi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

4.1.30. Urusan Pariwisata

Cukup tingginya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bandung, yaitu 6.069.539 orang (rata-rata per objek wisata 123.869 orang) bisa diartikan tingginya potensi wisata di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur serta rencana induk pengembangan kepariwisataan harus segera diperbaiki.

4.1.31. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tercatat sebanyak 8.122 ton. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009). Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2010 mencapai 20,26 kg/ perkapita/tahun meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung.

4.1.32. Urusan Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai Rp 456.850.398,57. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008, namun mengalami kenaikan dari tahun 2009.

4.1.33. Urusan Perindustrian

Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari 751 industri pada tahun 2010 dari 701 industri pada tahun 2009.

4.1.34. Urusan Ketransmigrasian

Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Bandung.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan pengungkapan permasalahan per urusan di atas, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yang menjadi prioritas penanganan:

1. Pelayanan publik;
2. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, Kesehatan, dan kesalehan sosial);
3. Pembangunan Perdesaan dan ketahanan pangan;
4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. Infrastruktur wilayah dan tata ruang;
6. Kemiskinan, serta;
7. Lingkungan hidup dan bencana.

Penjabaran masing – masing isu strategis disajikan dalam uraian berikut:

- 1) Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substansif) dan pelayanan administrasi. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus diperbaiki dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.
- 2) Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai kesehatan yang secara kontinyu

- diintervensi melalui program/kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis.
- 3) Pembangunan pedesaan di Kabupaten Bandung merupakan strategi yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat lebih dari 96 % dari total wilayah merupakan wilayah pedesaan. Kesenjangan dalam segi ekonomi antara wilayah pedesaan dan perkotaan menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pedesaan merupakan aspek penting dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan core businessnya “Sektor Pertanian”, karena potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung dalam memenuhi surplus pangan terutama padi, tetapi Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dalam mempertahankan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan nilai investasi serta memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan peran UKM yang menunjang usaha pertanian dan peternakan. Selain itu, perkembangan ekonomi pedesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi pertanian, sangat berhubungan dengan sektor pariwisata, produksi kewaspadaan serta keamanan pangan dan bahan baku sektor lainnya.
 - 4) Keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam.
 - 5) Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sektor infrastruktur terdiri atas : prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman, yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan antar wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya. Beberapa masalah yang masih perlu langkah penanganan lanjutan, di antaranya ialah perlu adanya perda tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR Baleendah-Dayeuhkolt, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal ini menyebabkan terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa dokumen harus mengacu terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya.
 - 6) Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung. Hal tersebut, terutama karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego sektor) serta belum terukur secara

jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.

- 7) Berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana, dalam penanganan banjir dan genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan longsor-an longsor-an tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Hubungan Isu Strategis

No	ISU STRATEGIS DAERAH		
	RPJMN 2010-2014	RPJMD JAWA BARAT 2008-2013	RPJMD KAB. BANDUNG 2010-2015
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat.	Pelayanan Publik
2	Pendidikan	Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan	Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, Kesehatan dan kesalehan social)
3	Kesehatan	Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat	
4	Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	
	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska konflik		Pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan
5	Ketahanan Pangan		
6	Iklim Investasi dan Usaha		
7	Infrastruktur	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Infrastruktur wilayah dan tata ruang
8	Energi		
9	Lingkungan Hidup dan Bencana	Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup dan Bencana
10	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	Apresiasi dan pengembangan budaya daerah	
11	Bidang Polhukam	-	Keamanan dan ketertiban masyarakat
12	Bidang Perekonomian	-	-
13	Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-



Bab V PENYAJIAN VISI MISI DAN SASARAN

5.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah pada tahap kedua 2011-2015 Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025. Pada tahap ini perlu perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Isu global seperti : *climate change, sustainable city, sustainable development, global warming* atau pun krisis internasional,serta isu nasional antara lain : MP3EI, *public private partnership*, demokrasi, perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu utama yang dihadapi Kabupaten Bandung antara lain : pelayanan publik, lingkungan hidup dan bencana, kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan keshalehan sosial), pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan, keamanan dan ketertiban masyarakat, infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015, yang hendak dicapai adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2011-2015

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.	Maju	Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
	Mandiri	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
	Berdaya Saing	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam konteks sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta), dan bertanggung jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
	Pemantapan Pembangunan Perdesaan	Kondisi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung dengan memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
	Religius	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.
	Kultural	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Berwawasan Lingkungan	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2010-2015, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing.

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan mampu bersaing tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2010 – 2015, sebagai berikut :

Misi Pertama : **“Meningkatkan profesionalisme birokrasi”**.

Peningkatan profesionalime birokrasi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang **“Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) yang profesional tidak semata-mata bergantung kepada Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah adanya kepastian hukum, rasa keadilan, demokratis, transparan, responsif, akuntabel dan bebas dari KKN. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya sebagai berikut : peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya; penerapan sistem *reward and punishment* yang berkeadilan; peningkatan kesejahteraan aparatur; peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi; peningkatan kualitas pelayanan publik

dengan pola pendekatan pelayanan prima; peningkatan disiplin kerja aparatur; peningkatan komunikasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dengan masyarakat; peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah; peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman stabilitas kehidupan masyarakat; peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bandung; peningkatan pemahaman aparat/terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; penganalisaan penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial; serta peningkatan pengawasan internal.

Misi Kedua: **“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”**.

SDM berkualitas yang berlandaskan iman dan takwa merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung yang **”Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Keimanan dan ketakwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama secara lebih baik.

Kesalehan sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat yang bertakwa, merupakan kesatuan utuh dari pengetahuan, sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan yang terefleksikan dalam kesalehan sosial, merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan SDM berkualitas yang berlandaskan iman dan taqwa, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yaitu : peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional); peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; penganjuran dan penerapan wajib belajar 12 tahun; peningkatan fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat; peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun; peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah; penyelenggaraan pendidikan usia dini; penyelenggara dan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal; peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi; peningkatan sarana dan prasarana olahraga; peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; peningkatan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas KIA; peningkatan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang; pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED; serta peningkatan Polindes menjadi Poskesdes; peningkatan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu; peningkatan ketersediaan, pemerataan serta kualitas obat dan alat kesehatan; peningkatan kemandirian masyarakat serta pengembangan system kewaspadaan

dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan KLB penyakit menular; peningkatan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular; peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan; peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin; peningkatan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan; peningkatan pelaksanaan JAMKESMAS dan JAMKESDA melalui prinsip-prinsip Asuransi; peningkatan advokasi ke sector swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan; peningkatan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS; pengembangan seluruh desa menjadi desa siaga; peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat dan pengembangan desa siaga penanggulangan bencana (Dasipena); peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Poskesdes serta Puskesmas di seluruh wilayah; peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan; peningkatan pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman Al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam; serta peningkatan keberdayaan lembaga keagamaan.

Pada misi kedua ini selain menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan takwa dari aspek pendidikan dan kesehatan juga menitikberatkan pada pelestarian budaya sunda.

Budaya sunda merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat Bandung, yang jugamerupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia. Budaya sunda sangat kaya akan nilai-nilai, hal ini merupakan falsafah hidup yang akan membentuk sikap dan karakter masyarakat Sunda termasuk dalam mengambil peran sentral dalam pembangunan.

Masyarakat Sunda harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Karakter *masyarakat Sunda anu boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana* harus dikembangkan sebagai bagian dari jati diri kesundaan. Dalam budaya sunda dikenal istilah **“Sabilulungan”**, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot saphanean, rempug jukung sauyunan, rampag gawe babarengan yang mengandung arti *silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi*. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat **“Sabilulungan”** yang identik dengan *nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyakola* dan sikap yang *luhur, luhung, parigel, gesit binangkit*.

Budaya sunda perlahan-lahan akan hilang jika benteng pertahanan kurang efektif dalam menghadapi dampak negatif derasnya arus globalisasi. Oleh karenanya perlu digali dan dikembangkan nilai-nilai budaya sunda yang baik untuk dapat memotivasi potensi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian budaya sunda, diantaranya yaitu : peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini; peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai budaya sunda dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan; peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda; pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat sunda; pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan

pelestarian keragaman budaya sunda, peningkatan sabilulungan dalam proses pengelolaan budaya sunda di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Ketiga: **“Memantapkan pembangunan perdesaan”**.

Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan. Perdesaan menjadi tumpuan/penopang nadi kehidupan wilayah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu tumpuan pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan perdesaan yang mantap, menuju Kabupaten Bandung yang **“Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”** diantaranya yaitu : peningkatan infrastruktur perdesaan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintahan desa; peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; perkuatan lembaga-lembaga usaha tingkat desa; peningkatan pendapatan asli daerah desa; peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kesetabilan harga dan akses pangan; dan pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.

Perwujudan tersebut akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan.

Misi Keempat : **“Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”**.

Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bandung yang ditandai oleh tidak adanya tindak kriminal/kejahatan ataupun kerusuhan, serta adanya rasa saling percaya, harmoni dan semangat **“Sabilulungan”** dari seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kondisi yang aman dan tertib merupakan landasan bagi kelangsungan kehidupan yang tenang dan damai serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan sesuai harapan dan cita-cita bersama. Dinamika pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat akan bergerak selaras dengan tuntutan perubahan, serta kehendak dan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas demokrasi yang bertanggung jawab, disertai dengan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat.

Kondisi yang aman dan tertib akan terwujud apabila adanya : pengembangan semangat **“Sabilulungan”** dalam menjaga keamanan dan ketertiban; peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pemahaman produk hukum; peningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum; pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa; terlaksananya penegakan hukum; terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif; peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat; peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.

Misi Kelima: **“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”**.

Ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Bandung yang **“Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah diantaranya yaitu :peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah; pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat; peningkatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah; penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai kebutuhan; peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat; penataan areal pemakaman; peningkatan pelayanan air bersih; peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan; penyediaan sarana, prasarana serta utilitas perumahan; peningkatan pembangunan perumahan yang layak huni.

Misi Keenam: **“Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”**.

Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing perlu mengedepankan semangat **“Sabilulungan”** dalam hal : peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif berbasis UMKM; peningkatan keterampilan kewirausahaan; penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi local; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; mempermudah aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan potensi investasi Kabupaten Bandung; peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja; peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan; mempermudah akses permodalan; pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui *One Village One Product (OVOP)*; pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu; pembangunan dan pengembangan kawasan wisata; penataan pedagang kakilima dan asongan.

Misi Ketujuh: **“Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan”**.

Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan polemik yang tidak bisa dihindari. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola berpikir

dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya mengandalkan pada mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum.

Sebagai wilayah yang rawan bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta penanganan bencana yang sederhana dan mudah diterapkan, sesuai dengan pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Pemulihan keseimbangan lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang **"Maju, Mandiri dan Berdaya Saing"**.

Faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kerusakan dan memulihkan keseimbangan lingkungan sertapenerapan pembangunan berkelanjutan, diantaranya yaitu : peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan; Peningkatan penegakan hukum lingkungan; peningkatan peran serta penegak hukum dalam mengelola lingkungan; peningkatan peran serta masyarakat serta stakeholder(**"Sabilulugan"**) dalam pengelolaan lingkungan; peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; pengembangan produksi ramah lingkungan; peningkatan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; peningkatan sarana dan prasarana lingkungan; pengendalian kerusakan hutan dan lahan; pengembangan sistem informasi lingkungan; optimalisasi pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi; penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang dengan luas kawasan perkotaan; reboisasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain); pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau; reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis; penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi dan interpretasi daerah potensi bencana; peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran berbasis pengurangan resiko; serta pemetaan dan deliniasi kawasan rawan bencana.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi kesatu : "Meningkatkan profesionalisme birokrasi".	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan 2. Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 5. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Misi kedua : "Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda".	Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penduduk melek huruf 2. Meningkatnya penduduk bersekolah 3. Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidikan 4. Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan. 5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 6. Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan. 7. Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS 8. Terkendalinya pertumbuhan penduduk 9. Meningkatnya kegiatan keagamaan 10. Terwujudnya pelestarian budaya sunda. 11. Meningkatnya minat baca masyarakat
Misi ketiga : "Memantapkan Pembangunan Perdesaan".	Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya infrastruktur desa 2. Meningkatnya perkembangan kemandirian desa 3. Meningkatnya kemandirian pangan.
Misi keempat : "Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah".	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya produk hukum daerah yang mendukung Kamtibmas 2. Menurunya tingkat pelanggaran perda 3. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda 4. Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan KAMTIBMAS
Misi kelima : "Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah".	Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah 2. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni 4. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancar
Misi keenam : "Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing".	Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar. 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja 3. Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing 4. Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal.
Misi ketujuh : "Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan".	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau 3. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam 4. Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran

**Tabel 5.3
Indikator Kinerja Misi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
MISI PERTAMA :Misi kesatu : Meningkatkan profesionalisme birokrasi.								
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	72,38	72.06	72.87	73,5	74,0	74,5
2	Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung	dokumen	5	6	4	4	3	3
3	Jumlah Lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku	Lembaga	28	28	37	63	110	164
4	Cakupan Penerbitan KK	persen	60	63	91	94	97	100
5	Cakupan penerbitan KTP	persen	64	70	75	93	97	100
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	46	49	60	61	62	62,5
Sasaran 2 : Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah								
7	Jumlah Perda Yang Diterbitkan	buah perda	22	23	31	11	13	25
Sasaran 3 : Meningkatnya SDM aparatur yang professional								
8	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	persen	23,95	23,95	13,6	16,03	23,07	23,34
9	Prosentase Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran Disiplin	persen	95	95	65	80	80	80
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah								
10	Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	persen	0	33,33	100	100	100	100
11	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan	persen	93,1	93,24	93,67	98,11	100	100
Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi								
12	Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD	Program /aplikasi	1	2	3	5	6	8
13	Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung	unit kerja / SKPD	28	28	28	51	62	72

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah								
14	Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti.	persen	100	100	77,47	100	100	100
15	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan	persen	9,72	11,86	12,62	13,7	13,70	13,70
16	Persentase serapan belanja daerah	persen	87,25	87,25	93,04	90,53	91	91,5
17	Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)	kali	-	276	223	230	240	250
18	Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)	kali	-	283	268	287	311	308
MISI KEDUA :Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda								
Sasaran 1 : Meningkatnya penduduk melek huruf								
1	Angka Melek Huruf (AMH)	poin	98,41	98,48	98,69	98,76	98,77	98,81
Sasaran 2 : Meningkatnya penduduk bersekolah								
2	Rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	9,02	8,62	8,67	8,72	8,77	8,82
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini	poin	29,63	30,16	39,59	33,12	31,97	32,61
4	APM SD /Sederajat	poin	98,42	99,57	99,59	99,61	99,65	99,67
5	APM SMP /Sederajat	poin	70,55	81,22	81,44	81,60	82	82,25
6	APM SMA /Sederajat	poin	37,81	41,5	41,84	41,94	42	42,25
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik								
7	Presentase rata - rata guru berpendidikan min. S1/D4 semua jenjang	persen	69,70	71,50	72,81	78,25	78,5	80,67
Sasaran 4 : Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan								
8	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional	orang	-	65	78	80	85	90
9	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	club	-	408	408	420	482	445
10	Jumlah data potensi Pemuda berprestasi	orang	-	337	353	371	390	409
11	Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk	gedung	-	1548	1590	1640	1689	1789
Sasaran 5 : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat								
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	persen	34,75	34,11	34,05	33,7	33,1	32,5
13	Indeks Kesehatan	persen	74	75,10	75,46	75,65	75,83	76,02

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita	Rp/kapita	4197	4200	4500	5000	5500	6000
Sasaran 6 : Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan.								
16	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)	persen	72	83	76	77	80	85
17	Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar	persen	36	47	52	61	71	81
18	Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi)	persen	80	61,59	91,3	86	88	90
19	Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas yang memenuhi standar	persen	100	100	100	100	100	100
20	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota	persen	20	20	40	60	80	100
22	Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100	100
Sasaran 7 : Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS								
23	Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian (ekonomi)	persen	4	4,07	4,22	4,53	4,9	5,5
24	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS	persen	24	34	44	54	60	76
25	Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial.	persen	74,5	10,84	21,02	34,23	50,34	70,71
Sasaran 8 : Pengendalian jumlah penduduk								
26	laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	2,56	2,65	1,65	1,52	1,48	1,45

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
27	Prosentase capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB disetiap desa	persen	80	82	85	87	90	95
28	Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif	persen	64	65	66	67	68	70
Sasaran 9 : Meningkatnya kegiatan keagamaan								
29	Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro	kali	12	18	18	18	18	18
30	Rasio jumlah sarana ibadah menurut pemeluknya 1. Islam 2. Kristen 3.Hindu 4.Budha	rasio	1:230 1:1.475 1:824 1:2.214	1:335 1:2.195 1:824 1:1.390	1:245 1:3.491 1:2.384 1:2.518	1:245 1:3.491 1:2.384 1:2.518	1:245 1:3.491 1:2.384 1:2.518	1:245 1:3.491 1:2.384 1:2.518
31	Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat	unit	8.172	8.255	8.338	8.381	8.400	8.420
Sasaran 10 : Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda								
32	Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan	jenis	10	10	15	20	25	30
33	Jumlah keragaman budaya yang dilestariakan	jenis	10	10	15	20	25	25
34	Jumlah benda cagar budaya yang dilestariakan	buah	10	10	15	20	25	30
Sasaran 11 : Meningkatnya minat baca masyarakat								
35	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	15.000	14.800	15.000	12.500	14.000	15.000
36	Jumlah koleksi buku perpustakaan	buku	13.728	14.100	20.285	20.785	21.535	21.535
MISI KETIGA : Memantapkan Pembangunan Perdesaan								
Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur desa								
1	Presentase layanan air bersih di pedesaan (pola pemberdayaan)	persen	9,96	11	12	14	20	27
2	Presentase rumah layak huni (pola pemberdayaan)	persen	35	50	60	70	85,77	85,89
3	Presentase rumah tangga yang mengakses MCK	persen	35	50	60	70	70	70
4	Presentase jalan desa kondisi baik	persen	30	50	60	70	72	75

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
5	Persentase desa yang mengangkut sampah dari sumber ke TPS	persen	30	45	55	65	65	65
Sasaran 2 : Meningkatkan perkembangan kemandirian desa								
8	Jumlah Desa Swasembada	desa	0	0	0	0	1	2
9	Jumlah Desa Swakarya	desa	0	0	7	7	10	12
10	Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama (ton)- skor PPH (pola pangan harapan) dan skor PPH konsumsi pangan	Persen	73,9	73,9	79,1	84,3	89,6	94,8
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah								
Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda								
1	Cakupan patrol petugas (kali/minggu)	Kali/minggu	1	1	1	7	7	7
2	Jumlah Anggota Linmas	orang	5,520	5,520	5,520	5,560	5,560	5,560
3	(Cakupan) Penegakan Perda	persen	10	n/a	n/a	60	65	70
Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.								
4	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Persen	3,2	3,2	16,11	25,8	25,8	25,8
5	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Persen	2,9	2,9	14,7	26,47	26,47	26,47
Sasaran 3 : Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat								
6	Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang linmas	persen	50	50				
7	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	persen	2,5	2,5	20	25	25	25
MISI KELIMA : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah								
Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah								
1	Persentase penambahan panjang jalan kabupaten	km	Jalan lingkaran banjaran (tembus bojongsereh) sepanjang 0,550 km	0	0	0	2	2

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
2	Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari "banjir"	persen	41 lokasi	34,20	41,36	54,95	63,52	78,56
3	Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari "longsor"	persen	55 lokasi	25,57	30,11	38,64	47,16	64,20
4	Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik	persen	sedang : 20,36 baik: 35,77	sedang : 19,83 baik: 35,77	sedang : 20,17 baik: 43,34	sedang : 15,80 baik: 48,78	sedang : 14,36 baik: 54,78	sedang : 12,86 baik: 60,78
5	Presentase kondisi jembatan baik	persen	21,36	32,34	43,16	56,22	62,44	67,41
6	Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten yang sudah ada	persen	58,5	60	63,33	66,67	70	73,3
7	Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	persen	0,1	0,12	0,61	1,43	2,18	3,56
Sasaran 2 : Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni								
8	rasio elektrifikasi rumah tangga miskin	poin	3,18	8,93	14,15	20,34	27,84	37,84
9	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen/unit	85 (707.600 unit)	85,52 (711.486 unit)	85,52 (711.486 unit)	85,77 (712.626 unit)	85,77 (713.626 unit)	85,89 (714.626 unit)
10	persentase luas permukiman yang tertata	persen	81,84	87,22	87,22	88,22	89,22	90,22
11	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan	persen	9,96	11	12	14	20	27
12	Akses aman terhadap sanitasi	persen	51	52	54	56	58	60
Sasaran 3 : Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah								
13	Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk	Rasio	1:25	1:18	1:19	1:25	1:27	1:29
14	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	persen/RDTR	29,03 (9 RDTR)	29,03 (9 RDTR)	29,03 (9 RDTR)	35,48 (11 RDTR)	38,71 (12 RDTR)	41,94 (13 RDTR)
15	Persentase bangunan ber IMB	persen/unit	0,30 (3514 unit)	0,58 (4754 unit)	2,43 (21.045 unit)	5 (22.097 unit)	6 (23.423 unit)	8 (25.297 unit)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
Sasaran 4 : Terwujudnya system transportasi yang tertib dan lancar								
16	rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang	Rasio	1:12	1:12	1:19	1:15	1:15	1:15
17	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata daripada rambu, marka, dan guardrill)	persen	0,35	1,19	3,04	4,24	5,99	7,7
18	Presentase PJU terpelihara	persen	-	11,04	15,98	22,09	24,35	26,67
19	persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	persen	99,83	95,84	92,03	100	100	100
MISI KEENAM : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing								
Sasaran 1 : Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar								
1	Jumlah pelaku UMKM	orang	6375	7218	7894	8109	8672	9236
2	Nilai Investasi	Rp. milyar	354.15	3692	6302	6500	6600	6700
3	jumlah sertifikasi produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal	Sertifikat produk	188	75	100	100	100	100
4	Jumlah Koperasi	unit kerja	1.524	1.562	1.593	1.737	1.795	1.853
5	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	unit	-	3	5	5	5	5
6	Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di bidang usaha perdagangan	unit	2.271	2.417	2.672	2.750	3.025	3.327
7	Jumlah Omzet kecil/menengah	Rp. Triliun	2,176	2,220	2,249	2,279	2,347	2,418
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja								
8	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	persen	7	14	21	28	35	42
9	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	persen	83	84,5	86	87,5	89	90,5
10	Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan	persen	40	45	50	55	60	65
11	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	90	91	92	93	94	95
Sasaran 3 : Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan mampu berdaya saing								
12	Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan	orang	0	17	34	49	69	94

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
	bersertifikat CBIB							
13	jumlah kelompok usaha yang bermitra	kelompok	0	0	1	2	3	5
14	produktivitas komoditas Padi	Kuintal/Ha	61,19 kuintal/Ha	61,20 kuintal/Ha	63,66 kuintal/Ha	63,75 kuintal/Ha	64,14 kuintal/Ha	64,56 kuintal/Ha
	produktivitas komoditas Palawija		107,97 kuintal/Ha	107,54 kuintal/Ha	108,18 kuintal/Ha	108,22 kuintal/Ha	108,67 kuintal/Ha	108,88 kuintal/Ha
15	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat(unit usaha)	Unit usaha	22	33	40	48	58	70
16	Jumlah pencapaian indeks pertanian (IP)	poin	1,97	1,98	2,01	2,1	2,29	2,3
17	Jumlah Kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura	kelompok	0	5	9	20	30	40
Sasaran 4 : Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal								
18	Jumlah kunjungan wisata	orang	4.607.330	5.124.142	5.645.569	6.234.555	6.900.220	7.629.023
19	Jumlah daya tarik wisata	lokasi	-	40	45	50	55	60
20	Jumlah mitra kerja pariwisata	orang	1049	1124	1224	1312	1442	1572
MISI KETUJUH : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan								
Sasaran 1 : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan								
1	Prosentase luasan pertambangan berijin	persen	81,56	88,74	89,77	90,65	91,56	92,48
2	Cakupan pelayanan sampah	persen	10,46	11,36	13,26	15,16	19,06	22
3	Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap bulan	M ³ /sumur	15.785,10	17.016,37	16.954,97	16.885,17	16.675,00	16.660,00
4	Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan	persen	37,5	50	62,5	75	87,5	100
5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk	Rasio	28	1:49	1:27,5	1:25,6	1:17,6	1:16,5
Sasaran 2 : Terciptanya lingkungan yang bersih								
6	Presentase luas RTH perkotaan	persen	0,1	0,11	0,1	0,12	0,12	0,12
7	Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persen	87,50	90	90	90	90	90
8	Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	persen	42	45	50	55	60	65
9	Perolehan Nilai Adipura	poin	71,88	74	74	74	74	74

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kondisi Awal 2010	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
10	Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	Kebijakan	3	3	0	1	2	1
Sasaran 3 : Terselenggaranya konservasi sumber daya alam								
11	Prosentase luas lahan kritis yang ditanami	persen	2,33	10,28	32,86	40,22	47,58	54,94
12	Luas hutan rakyat/agroforestry	Ha	650	715	1640	2390	3165	12,925
Sasaran 4 : Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran								
13	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	30	30,06	48	50	60	65
14	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	persen	-	80	100	100	100	100
15	Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	persen	20	20	27	30	40	50
16	Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung	kecamatan	0	10	20	31	31	31



Bab VI **STRATEGI DAN** **ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini dihadapkan dalam berbagai persoalan baik internal maupun eksternal. Salah satu falsafah yang masih hidup dan dianut oleh masyarakat Kabupaten Bandung adalah falsafah Sabilulungan yaitu falsafah saling membantu bahu membahu, *nulung kanu butuh, nalang kanu susah*. Hal ini menjadi energi kolektif luar biasa untuk digunakan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Secara kontekstual terwujud dalam bentuk kerja sama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya sinergitas Antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan.

Perumusan visi dan misi yang telah dijabarkan dalam tujuan serta sasarnya perlu dipertegas dengan upaya atau cara yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi. Pendekatan yang dipergunakan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan menggunakan metode analisis SWOT yang telah disusun dalam tahapan perumusan penyusunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2010 – 2015) diuraikan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”			
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi
			Strategi
Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi			
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima	1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan	1.1.1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 1.1.1.1. Penyediaan outlet - outlet pelayanan publik yang mudah dijangkau masyarakat 1.1.1.2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada unit - unit pelayanan publik 1.1.1.3. Peningkatan layanan adminduk secara profesional 1.1.2. Memaduserasikan ketatalaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) 1.1.2.1. Penataan standar operasional prosedur unit - unit pelayanan yang lebih sederhana, transparan dan memiliki kepastian waktu dan biaya 1.1.2.2. Penguatan kelembagaan unit pelayanan publik 1.2. Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.2.1. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.2.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD 1.2.1.2. Dukungan terhadap percepatan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah 1.2.1.3. Peningkatan manajemen kontrol pimpinan daerah terhadap regulasi pemerintahan daerah 1.3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional 1.3.1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 1.3.1.1. Dukungan terhadap penerapan jabatan fungsional sesuai kompetensi 1.3.1.2. Peningkatan penempatan PNS sesuai jenjang pendidikan dan pelatihan yang ditempuh 1.3.2. Menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang berkeadilan 1.3.2.1. Peningkatan disiplin pegawai 1.3.2.2. Penerapan sistem karir PNS berbasis kompetensi dan kinerja 1.4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 1.4.1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi 1.4.1.1. Peningkatan penyediaan data dan informasi yang benar, akurat dan layak di berbagai sektor pembangunan 1.4.1.2. Penerapan penggunaan basis data dan informasi terpadu 1.4.2. Meningkatkan pemenuhan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 1.4.2.1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 1.4.2.2. Peningkatan keberpihakan terhadap aspirasi perencanaan pembangunan yang diusung masyarakat

Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
		1.5. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.5.1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi data dan informasi	1.5.1.1. Peningkatan penyediaan data dan informasi publik berbagai sektor yang mudah diakses masyarakat
				1.5.1.2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi bagi SKPD
		1.6. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1.6.1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1.6.1.1. Percepatan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
				1.6.1.2. Penyelenggaraan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban internal keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
				1.6.1.3. Peningkatan keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda				
2	Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan	2.1. Meningkatnya penduduk melek huruf	2.1.1. Meningkatkan keaksaraan fungsional	2.1.1.1. Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek huruf
				2.1.1.2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pemberantasan buta huruf
		2.2. Meningkatnya penduduk bersekolah	2.2.1. Mendorong dan mendukung penerapan rintisan wajib belajar 12 tahun	2.2.1.1. Perwujudan masyarakat tuntas wajib belajar 9 tahun
				2.2.1.2. Percepatan penerapan penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun
				2.2.1.3. Peningkatan partisipasi siswa lulusan SMP/ sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/ sederajat
				2.2.1.4. Perluasan kesempatan siswa miskin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah
			2.2.2 Memfasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/ Sederajat	2.2.2.1. Pemberian beasiswa miskin bagi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah
				2.2.2.2. Peningkatan penyediaan dana beasiswa bagi yang berprestasi
			2.2.3. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	2.2.3.1. Peningkatan kuantitas ruang kelas baru setiap jenjang pendidikan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”			
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi
			<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Strategi</td> <td style="width:50%">Arah Kebijakan Strategis</td> </tr> </table>
Strategi	Arah Kebijakan Strategis		
			2.2.3.2.Peningkatan kondisi dan kualitas ruang kelas setiap jenjang pendidikan
			2.2.3.3.Peningkatan fasilitas sekolah sesuai standar nasional
			2.2.4. Mendorong pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah antar wilayah secara proporsional
			2.2.4.1.Pemberian kemudahan terhadap pendirian sekolah jenjang menengah yang dikelola masyarakat
			2.2.5.Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan
			2.2.5.1.Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
			2.2.6. Memperluas dan memperkaya kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan
			2.2.6.1.Pengembangan kurikulum pendidikan menengah umum ke pendidikan kejuruan
			2.2.7. Memperkuat dan memperdalam relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah
			2.2.7.1.Perwujudan kurikulum pendidikan berkarater pada setiap jenjang pendidikan
		2.3. Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik	2.3.1 Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
			2.3.1.1.Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan diklat tenaga pendidik dan kependidikan
			2.3.2 Memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
			2.3.2.1.Pemberian bantuan biaya bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan sekolah
			2.3.2.2.Pemberian kemudahan bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang akan melanjutkan sekolah secara mandiri
			2.3.3. Meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal
			2.3.3.1.Peningkatan sekolah berstandar nasional
			2.3.4. Menyelenggarakan pendidikan usia dini
			2.3.4.1.Perluasan pendidikan anak usia dini yang berkualitas oleh masyarakat secara mandiri
		2.4. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	2.4.1. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi
			2.4.1.1.Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA
			2.4.1.2.Peningkatan pertumbuhan klub - klub olahraga prestasi dan rekreasi
			2.4.2. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
			2.4.2.1.Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga di setiap kecamatan

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
				2.4.2.2. Peningkatan penyelenggaraan berbagai event olahraga tingkat nasional dan regional di Kawasan Olahraga Terpadu si Jalak Harupat
			2.4.3. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	2.4.3.1. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan
		2.5. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat	2.5.1. Meningkatkan kualitas Kesehatan Ibu dan Anak	2.5.1.1. Pemberian kemudahan layanan kesehatan ibu hamil dan anak balita di fasilitas - fasilitas kesehatan masyarakat
				2.5.1.2. Peningkatan pemanfaatan Pos YANDU bagi pemeriksaan kesehatan ibu dan anak
				2.5.1.3. Peningkatan peranan kader - kader penggerak di masyarakat untuk promosi kesehatan ibu
			2.5.2. Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONEB serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes	2.5.2.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan hingga menjangkau desa.
			2.5.3. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu	2.5.3.1. Penyediaan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah
			2.5.4. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan	2.5.4.1. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat
			2.5.5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan KLB penyakit menular dan cara menghindari terjadinya kasus lebih banyak	2.5.5.1. Peningkatan peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam kesiapan menghadapi KLB
			2.5.6. Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular	2.5.6.1. Peningkatan pemantauan penyakit menular secara periodik

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
			2.5.7. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan	2.5.7.1. Peningkatan kemudahan akses masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan
		2.6. Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan	2.6.1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat	2.6.1.1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup sehat
			2.6.2. Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga	2.6.2.1. Peningkatan respon dan peran aktif pemerintah desa dalam upaya preventif dan promotif penyebaran penyakit menular
		2.7. Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS	2.7.1. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	2.7.1.1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			2.7.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	2.7.2.1. Peningkatan rasa kesetiakawanan sosial masyarakat terhadap PMKS
			2.7.3. Meningkatkan upaya pengurangan resiko korban bencana	2.7.3.1. Percepatan waktu reaksi tanggap darurat terhadap korban bencana
		2.8. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	2.8.1. Menyediakan data keluarga dan Administasi kependudukan secara tertib dan terkini	2.8.1.1. Pemutakhiran data keluarga dan penduduk secara periodik per semester dan tahunan
			2.8.2. Mengendalikan pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, ketahanan keluarga, dan tersedianya data mikro keluarga	2.8.2.1. Peningkatan keluarga berencana dan sejahtera
			2.8.3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	2.8.3.1. Perwujudan perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga sejahtera
		2.9. Meningkatnya kegiatan keagamaan	2.9.1. Meningkatkan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat	2.9.1.1. Penanaman sikap toleransi dan sikap saling menghargai antar umat beragama

Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
			2.9.2. Meningkatkan pemahaman keagamaan, melalui masyarakat pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam	2.9.2.1. Penerapan kewajiban mengaji bagi anak - anak muslim usia Sekolah Dasar
			2.9.3. Meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi sumber daya umat	2.9.3.1. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana umat sesuai syari'at yang berlaku
			2.9.4. Meningkatkan keberdayaan lembaga keagamaan	2.9.4.1. Peningkatan pengelolaan lembaga - lembaga keagamaan secara swadana dan menjadi milik umat
				2.9.4.2. Perwujudan rintisan pembangunan islamic center sebagai pusat pengembangan budaya religius islami
		2.10. Terwujudnya pelestarian budaya sunda	2.10.1. Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini	2.10.1.1. Peningkatan rasa cinta dan memiliki terhadap seni dan budaya tradisional sunda semenjak anak usia dini
			2.10.2. Meningkatkan dan mengembangkan keberdayaan seniman, budayawan Sunda, dan lembaga-lembaga adat sunda	2.10.2.1. Peningkatan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya sunda skala regional maupun nasional
			2.10.3. Meningkatkan pelestarian fasilitas kebudayaan serta cagar budaya	2.10.3.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas situs dan cagar budaya masyarakat sunda
		2.11. Meningkatnya minat baca masyarakat	2.11.1. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pendayagunaan perpustakaan	2.11.1.1. Perwujudan semua masyarakat mampu baca dan tulis
				2.11.1.2. Penanaman gemar membaca bagi anak usia sekolah
Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Perdesaan				
3	Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri	3.1. Meningkatnya infrastruktur desa	3.1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan	3.1.1.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar tingkat desa
			3.1.2. Memperkuat sabilulungan RAKSA Desa	3.1.2.1. Penguatan pembangunan perdesaan pola sabilulungan RAKSA Desa
		3.2. Meningkatnya perkembangan kemandirian desa	3.2.1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa	3.2.1.1. Peningkatan kemampuan teknis dan fungsional aparatur pemerintahan desa
			3.2.2. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat	3.2.2.1. Penguatan keberdayaan kelembagaan masyarakat desa

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
			3.2.3. Meningkatkan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa	3.2.3.1. Mendorong gerakan <i>sabilulungan ngawangun</i> desa
			3.2.4. Memperkuat lembaga keuangan desa	3.2.4.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga keuangan mikro tingkat perdesaan
			3.2.5. Meningkatkan pendapatan asli desa	3.2.5.1. Pengembangan jenis dan objek pendapatan asli desa
		3.3. Meningkatnya kemandirian pangan	3.3.1. Mengembangkan intensifikasi pertanian produk pangan	3.3.1.1. Peningkatan intensitas produksi pertanian tanaman pangan
			3.3.2. Mengembangkan diversifikasi produk pangan	3.3.2.1. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan
			3.3.3. Meningkatkan pemenuhan konsumsi pangan bagi rumah tangga miskin di perdesaan	3.3.3.1. Peningkatan mutu dan keamanan pangan daerah
				3.3.3.2. Peningkatan kemudahan penyediaan pangan pokok bagi rumah tangga miskin
Misi 4 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah				
4	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	4.1. Tersediannya produk hukum daerah yang mendukung Kamtibmas	4.1.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pemahaman produk hukum	4.1.1.1. Pemberian kemudahan bagi masyarakat untuk turut serta dalam perumusan dan penyusunan berbagai produk hukum melalui ruang - ruang publik yang tersedia
		4.2. Menurunnya tingkat pelanggaran perda	4.2.1. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	4.2.1.1. Peningkatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat atas berbagai PERDA
			4.2.2. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan swakarsa	4.2.2.1. Perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat secara swakarsa
			4.2.3. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah	4.2.3.1. Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain.
				4.2.3.2. Penerapan sanksi yang tegas terhadap aparat pelanggar perda
		4.3. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparat penegak Peraturan Daerah	4.3.1.1. Peningkatan kemampuan teknis operasi aparat penegak PERDA
				4.3.1.2. Penguatan jajaran SATPOL PP
		4.4. Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat	4.4.1. Meminimalisasi adanya ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas dan kebencanaan	4.4.1.1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mencegah berbagai tindakan kejahatan maupun kebencanaan yang dapat mengancam dan mengganggu lingkungan

Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
		4.5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan KAMTIBMAS	4.5.1. Meningkatkan pembinaan politik bagi masyarakat	4.5.1.1. Perwujudan kondisi kehidupan berpolitik yang lebih demokratis dan tidak anarkis
			4.5.2. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	4.5.2.1. Peningkatan sikap kebersamaan dan saling memiliki untuk menjaga keutuhan kebangsaan
			4.5.3. Meningkatkan peran serta linmas dalam Kamtibmas	4.5.3.1. Penguatan kelembagaan Linmas agar lebih profesional
Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah				
5	Terwujudnya keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah	5.1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah	5.1.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah	5.1.1.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
				5.1.1.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tembok di daerah rawan longsor
				5.1.1.3. Penataan dan perbaikan drainase di wilayah genangan banjir
			5.1.2. Meningkatkan pelayanan air bersih	5.1.2.1. Peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat
			5.1.3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan	5.1.3.1. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
		5.2. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	5.2.1. Mengatur pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat	5.2.1.1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan tata ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya
			5.2.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	5.2.1.1. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap perencanaan tata ruang dalam ruang - ruang publik yang tersedia
			5.2.2. Menyediakan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan	5.2.2.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan penataan ruang
				5.2.2.2. Peningkatan ketersediaan data spasial
			5.2.3. Meningkatkan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat	5.2.3.1. Pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
			5.2.4. Mengatur dan menata areal pemakaman umum dan bukan umum	5.2.4.1. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan bukan umum
		5.3. Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni	5.3.1. Menyediakan sarana, prasarana serta utilitas perumahan	5.3.1.1. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana serta utilitas perumahan
			5.3.2. Meningkatkan pembangunan perumahan yang layak huni	5.3.2.1. Peningkatan fasilitasi pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu
		5.4. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancar	5.4.1. Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan	5.4.1.1. Peningkatan kemampuan teknis operasional dan pengelolaan perhubungan
			5.4.2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	5.4.2.1. Perwujudan sistem transportasi yang aman dan lancar
				5.4.2.2. Peningkatan fasilitas perlengkapan perhubungan yang nyaman dan aman
Misi 6 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing				
6	Meningkatkan Kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah	6.1. Meningkatkan pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar	6.1.1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	6.1.1.1. Pemberian kemudahan bagi pelaku UMKM terhadap manajemen dan permodalan
			6.1.2. Mengembangkan industri produktif berbasis UMKM	6.1.2.1. Pengembangan dan peningkatan industri kreatif
			6.1.3. Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal	6.1.3.1. Peningkatan kondisi iklim investasi yang menarik dan memudahkan bagi investor
			6.1.4. Meningkatkan keterampilan kewirausahaan	6.1.4.1. Peningkatan kemampuan teknis kewirausahaan bagi pelaku UMKM
			6.1.5. Mengembangkan model kemitraan usaha hulu-hilir	6.1.5.1. Peningkatan fasilitasi model kerjasama bapak asuh
			6.1.6. Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM	6.1.6.1. Mengembangkan kawasan yang akan dijadikan kawasan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif
			6.1.7. Meningkatkan promosi dan kerjasama pengembangan potensi investasi Kabupaten Bandung	6.1.7.1. Peningkatan penyelenggaraan event promosi investasi yang berbasis potensi lokal

Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”			
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi
			Strategi
			6.1.8 Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah
		6.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	6.2.1. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan
			6.2.2. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja
			6.2.3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kerja
		6.3. Berkembangnya usaha agribisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing	6.3.1. Mengembangkan potensi agribisnis
			6.3.2. Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan
			6.3.3. Mempermudah akses permodalan pelaku agribisnis pemula
			6.3.4. Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan
			6.3.5. Menerapkan konsep ekonomi perdesaan melalui <i>One Village One Product</i> (OVOP)
			6.3.6. Membangun dan mengembangkan kawasan agropolitan
		6.4. Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal	6.4.1. Membangun dan mengembangkan kawasan wisata terpadu
			6.4.2. Membangun dan mengembangkan objek wisata
			6.4.3. Menata pedagang kakilima dan asongan di kawasan wisata
Misi 7 : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan			
7	Menciptakan lingkungan yang	7.1. Meningkatnya pengawasan dan	7.1.1. Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku
			7.1.1.1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”				
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi	
			Strategi	Arah Kebijakan Strategis
	serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana	pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan	pengelolaan lingkungan
			7.1.2. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan	7.1.2.1. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup
			7.1.3. Mengoptimalkan pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi	7.1.3.1. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah sesuai kaidah - kaidah lingkungan
			7.1.4. Mengembangkan sistem informasi lingkungan	7.1.4.1. Penerapan pemanfaatan sistem informasi dan sumber daya lingkungan
			7.1.5. Memantau kualitas lingkungan secara berkesinambungan	7.1.5.1. Peningkatan daya dukung lingkungan serta pengendalian tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan
			7.1.6. Membina dan mengawasi usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	7.1.6.1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan
			7.1.7. Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	7.1.7.1. Penyesuaian terhadap mitigasi perubahan iklim
		7.2. Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau	7.2.1. Mewujudkan hutan kota dan ruang terbuka hijau	7.2.1.1. Peningkatan kuantitas hutan kota dan ruang terbuka hijau
			7.2.2. Meningkatkan peran serta masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan	7.2.2.1. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang, menujupembangunanberkelanjutan dan mitigasi bencana
			7.2.3. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan melalui instrument dokumen lingkungan	7.2.3.1. Peningkatan pemantauan dampak lingkungan hasil kajian lingkungan
			7.2.4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	7.2.4.1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
			7.2.5. Mengembangkan produksi ramah lingkungan	7.2.5.1. Peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan

**Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2015**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”			
No	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi
			Strategi
			7.2.6. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan
			7.2.7 Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan
		7.3. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	7.3.1. Mengendalian kerusakan hutan dan lahan
			7.3.2. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau
			7.3.3. Melestarikan sumber daya hayati dan ekosistem
			7.3.4. Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan tanah dan air
		7.4. Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran	7.4.1. Menyediakan data dan informasi daerah yang berpotensi bencana.
			7.4.2. Meningkatkan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
			7.4.3. Memetakan kawasan rawan bencana
			7.2.6.1.Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemantauan lingkungan
			7.2.7.1.Peningkatan kuantitas fasilitas sapras lingkungan
			7.3.1.1.Peningkatan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana
			7.3.2.1.Peningkatan dan perluasan kawasan yang berfungsi lindung dan daerah hijau
			7.3.3.1.Peningkatan upaya konservasi lingkungan
			7.3.4.1.Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung
			7.4.1.1.Peningkatan potensi dan penanganan kebencanaan geologi (gempabumi/tanah longsor)
			7.4.2.1.Peningkatan cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
			7.4.3.1.Peningkatan ketersediaan peta deliniasi rawan bencana

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi serta dijabarkan dengan beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun (2010 – 2015) Kabupaten Bandung, nampak keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di masing – masing misi.

1. Misi pertama, *Meningkatkan profesionalisme birokrasi* diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Sasaran yang ingin dicapai meliputi meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dengan strategi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dengan tetap memaduserasikan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) baik berdasarkan pada regulasi pusat maupun standar pelayanan minimal (SPM). Sasaran lainnya di misi ini terkait dengan regulasi pemda, SDM aparatur, perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu menjembatani menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan.
2. Misi kedua, *Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda* diarahkan pada kualitas SDM masyarakat kabupaten Bandung yang memiliki jatidiri sebagai masyarakat religius dan berbudaya dalam periode 5(lima) tahun ke depan. Bidang pembangunan yang menjadi sasaran meliputi Pendidikan (3 sasaran), Kesehatan (2 sasaran), Olahraga dan Pemuda (1 sasaran), Sosial (1 sasaran), Kependudukan (1 sasaran), keagamaan (1 sasaran) dan kebudayaan (1 sasaran) serta 1 sasaran pendukung pendidikan yaitu perpustakaan. Keseluruhan bidang tersebut memiliki keterkaitan terhadap kondisi kualitas SDM di masa yang akan datang.
3. Misi ketiga, *Memantapkan pembangunan Perdesaan*, diarahkan pada model pendekatan pembangunan yang berada di level terkecil penyelenggaraan pemerintahan yaitu desa/kelurahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil desa memiliki otonomi dalam mengatur berbagai kebijakan pembangunan skala desa. Dengan konsep memajukan desa maka secara otomatis pembangunan kabupaten pun akan mengalami kemajuan. Tujuan pembangunan pada misi ini adalah mewujudkan kemandirian desa dengan fokus pada 3(tiga) sasaran utama yaitu penyediaan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan di masing – masing desa, dimana hingga saat ini sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa ada pada sektor pertanian. Kemampuan penyelenggara pemerintahan desa dalam mengelola segala potensi sumber daya yang ada dapat memacu pembangunan berbagai sektor di tingkat desa.

4. Misi keempat, *Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah*, merupakan faktor penentu keberhasilan berjalannya pembangunan di setiap level pemerintahan. Tujuan misi ini adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salahsatu kewajiban utama melindungi segenap masyarakat atas berbagai ancaman maupun gangguan yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bidang pembangunan yang dilakukan di misi ini meliputi penerapan dan penegakan hukum, aparaturnya keamanan dan ketertiban wilayah, serta kewaspadaan dini masyarakat atas berbagai rongrongan yang akan mengganggu ketentraman wilayah.
5. Misi kelima, *Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah*, diarahkan untuk mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis antara lain bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan serta perhubungan/transportasi. Keempat sasaran tersebut, dirasakan masih banyak kekurangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga masih relevan menjadi agenda priortias pembangunan selama 5(lima) tahun ke depan. Pengaturan antara tata ruang dengan infrastruktur sesuai dengan konsep perencanaan pembangunan wilayah dimana terdapat aktivitas, sistem pergerakan dan penggunaan lahan.
6. Misi keenam, *Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing*, diarahkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa penguasaan sektor – sektor ekonomi skala mikro, kecil dan menengah mampu bertahan terhadap goncangan krisis ekonomi maupun moneter yang pernah terjadi di negara ini. Untuk itu dengan melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung penguatan para pelaku UMKM, usaha agribisnis sebagai *corebisnis*, potensi wisata dan ketrampilan tenaga kerja diharapkan mampu mewujudkan tujuan misi ini. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Bandung mampu menghasilkan produk – produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran regional, nasional maupun pasar global. Kenyataan ini memacu pemerintah daerah untuk terus mendorong dan memberikan fasilitasi agar para pelaku usaha yang bergerak di sektor – sektor tersebut dapat terus dipacu pertumbuhannya.
7. Misi ketujuh, *Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan*, diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta melaksanakan mitigasi bencana. Tekanan penduduk yang semakin besar

terhadap lingkungan pada gilirannya perlu dikendalikan agar dapat tetap terjaga kondisi lingkungan yang diharapkan baik di masa kini maupun yang akan datang. Kondisi yang dicapai dalam 5(lima) tahun ke depan mengarah pada 4(empat) sasaran strategis yaitu: Pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan, terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau, adanya konservasi/perlindungan sumber daya alam serta meminimalkan tingkat resiko bencana dan kebakaran. Upaya – upaya yang akan dilakukan dalam periode 5(lima) tahun ke depan memerlukan dukungan semua elemen masyarakat kabupaten Bandung untuk mewujudkannya.

Bab VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan SKPDnya. Untuk mendapatkan program pembangunan yang inheren di setiap strategi, maka dibutuhkan kebijakan umum. Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunannya.

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

A. Misi 1: Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi

Tujuan : Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan	0%	100%	Program Pengembangan Data/informasi	Urusan Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Persentase Gedung yang telah memenuhi standar	100%	100%	Program Pengembangan Data/informasi		Dispartasih
1			Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan	-	30 orang	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappeda
1			Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	100%	Program Kerjasama Pembangunan		Bappeda

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1			Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar	96.98%	100%	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		Bappeda
1			Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi	98.40%	100%	Program pengembangan pembangunan ekonomi		Bappeda
1			Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan social budaya	94.97%	100%	Program perencanaan social budaya		Bappeda
1			Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA	97.12%	100%	Program pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Bappeda
1			- Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan	93.10%	100%	Program perencanaan pembangunan daerah		Bappeda/ Dispertasih
1			Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	0%	100%			Bappeda
1			Penilaian lakip tahun berkenaan	C	B	Program perencanaan pembangunan daerah		Setda
1			Peringkat urutan penyelenggaraan pemma tahun berkenaan kabupaten	21	15			Setda
			Rata-rata Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPd	-	32,5	Program perencanaan pembangunan daerah		Kecamatan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1			Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja kinerja Kabupaten Bandung	5 dokumen	21 Dok	Program pengembangan data/informasi/s tatistik daerah	Urusan Statistik	Bappeda/ Disnakan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan	Memaduserasi kan ketatalaksana an norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku	28 Lembaga	164 Lembaga	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Urusan Kearsipan	Bapapsi
1			Persentase pemenuhan bukti fisik (peta/foto /dok/arsip) tindak lanjut/ penyempur naan sejarah kab. Bandung 1846 – 2010 (%)	5%	30%	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Bapapsi
1	Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggara an pemerintahan daerah	Persentase kehadiran anggota DPRD >50% pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD	90 %	90 %	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setwan
1			Persentase penetapan anggaran tepat waktu	0	80%			Setwan
1			Persentase rekomendasi DPRD yang ditindak lanjuti	44%	45%			Setwan
1			Jumlah Perda Yang disahkan tahun berjalan	22 Perda	103 Perda	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Setwan
1			Persentase fasilitasi penetapan produk hukum daerah(%)	100 %	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Setda
1	Meningkatnya SDM aparatur yang profesional	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya	Persentase dokumen analisis kepegawaian yang dimiliki SKPD	0	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Setda
1	Meningkatnya kegiatan keagamaan	Meningkatkan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat	Frekuensi Pertemuan Ulama Umoro	12	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Setda

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1			Rasio jumlah sarana ibadah menurut pemeluknya 1. Islam 2. Kristen 3.Hindu 4.Budha	1:230 1:1.475 1:824 1:2.214	1:245 1:3491 1:2384 1:2518	Program dst..., Peningkatan Kehidupan Beragama		Setda
1	Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat partisipasi Pemilu	61,45	70	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Setda
1	Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar	Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	750	1.200	Program peningkatan promosi dan kerjasama institusi		Setda
1	Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase kesesuaian waktu penyelesaian kontrak barang jasa	100	100			Setda
1			Frekuensi penguasaan .pemilikan .penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	1	Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah		Setda
1	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi data dan informasi	Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)	-	250	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah		Setda
1						Program kerjasama informasi dan media masa		Setda
			Rata-rata Jumlah berita /informasi kecamatan yang diberitakan di media masa (release)	-	1 - 2	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah		kecamatan
1	Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)	-	308	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Setda
1			Persentase fasilitasi penetapan produk hukum daerah(%)	100	100	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Setda

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1			Persentase paket pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui ULP dan LPSE tahun berjalan	90	100			Setda
1			Persentase fasilitasi penataan/ pemekaran desa/kelurahan	8,9%	88,9%	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Setda
1			Rata-rata Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan	-	30	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Kecamatan dan kelurahan
1	Meningkatnya SDM aparatur yang profesional	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	23.95 %	23.34 %	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		BKPP
1		Menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman) yang berkeadilan	Prosentase penyelesaian administrasi Kepegawaian	23.32 %	18.44 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		BKPP
1			Prosentase pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja minimal	0	>50 %			BKPP
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Cakupan Penertiban KK	60%	100%	Program penataan administrasi kependudukan	Urusan Penataan Administrasi Kependudukan	Disduk
1			Cakupan penertiban KTP	64%	100%			Disduk
1			Cakupan Penerbitan akta kelahiran	46%	62,5%			Disduk
1			Cakupan penerbitan akta kematian	0.80%	1.71%			Disduk
			Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK Lingkup Kecamatan	-	38%	Program penataan administrasi kependudukan		Kecamatan
			Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP Lingkup Kecamatan	-	100%			Kecamatan
1	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi data dan informasi	Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD	1 Aplikasi	8 Aplikasi	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Urusan Komunikasi dan Informasi	BAPAPSI

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1			Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung	28 SKPD	72 SKPD		Urusan Komunikasi dan Informasi	BAPAPSI
1			Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis (modul)	3 modul	5 modul	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Urusan Komunikasi dan Informasi	Bapapsi
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah institusi yang menjadi objek pengawasan internal secara berkala	67 OPD (100 %)	70 OPD	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Inspektorat
1	Meningkatnya SDM aparatur yang profesional	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang terlatih	14 orang	35 orang	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Inspektorat
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah penanganan kasus atas pengaduan masyarakat yang disampaikan mas media. SMS dan kasus yang dilimpahkan dari instansi yang lebih tinggi	20 pengaduan	379 pengaduan	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		Inspektorat
1			Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	0%	13.70 %	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		DPPK
1			Persentase serapan belanja daerah	87.25 %	91,5%			DPPK
1			Rata-rata persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan	-	100%			Kecamatan
1			Persentase potensi pajak retribusi daerah hasil kajian yang dapat diimplementasikan	10	100	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Setda
1			Persentase asset tanah pmda yang bersertifikat	2,83	6,53			Setda
1			Capaian target PAD Bidang Perhubungan	65.46 %	95.00 %	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Dishub

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Penerapan Agenda reformasi birokrasi. Kebijakan ini diindikasikan dengan:

- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mewujudkan ketersediaan data dan Informasi pembangunan serta pencapaian pemenuhan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama pelayanan langsung pada masyarakat (publik) dengan pemenuhan kualitas sarana dan prasarana pendukung serta perbaikan peraturan, norma, prosedur, dan kriteria sebagai penunjang.
- Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Meningkatnya SDM aparatur yang profesional dengan menegakkan sistem reward and punishment (penghargaan dan hukuman) yang berkeadilan serta peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
- Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam perwujudan transparansi informasi pembangunan pada masyarakat.
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam Penyelenggaraan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban internal keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

B. Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda

Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.

Tabel 7.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2	Meningkatnya penduduk bersekolah	Menyelenggarakan pendidikan usia dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini	29,63	32,61	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Urusan Pendidikan	Dikbud
2		Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	APK SD dan sederajat	103,32	104,58			Dikbud
2			APM SD dan sederajat	98,42	99,67			Dikbud/ Kecamatan
2			APK SMP dan sederajat	91,55	91,61			Dikbud
2			APM SMP dan sederajat	70,55	82,25			Dikbud/ Kecamatan
2			APK SMA dan sederajat	48,74	55	Program Pendidikan Menengah		Dikbud
2			APM SMA dan sederajat	37,81	42,25			Dikbud/ Kecamatan
2	Meningkatnya penduduk melek huruf	Meningkatkan keaksaraan fungsional	Angka melek huruf (AMH)	98,41	98,81	Program Pendidikan Non Formal		Dikbud

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2	Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1	69,70	75	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dikbud
2		Meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal	Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A tahun berkenaan	11,85	13,91	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Dikbud
2	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pendayagunaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan (pengunjung pengguna anggota non anggota) yang terlayani oleh jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung	15000 Orang	71.300 Orang	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Urusan Perpustakaan	Bapapsi
2			Jumlah koleksi buku perpustakaan	13728 Judul	21.535 Judul			Bapapsi
2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan	Rata-rata belanja obat yang bermutu per kapita (Rp/kap)	4.197	6.000	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Urusan Kesehatan	Dinkes
2		Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan	Cakupan Penjangkaran Kesehatan siswa SD dan setingkat	70%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinkes
2			BOR LOS TOI	58,13 3,55 1,93	60-85 6-9 1-3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		RSD Majalaya
2			BOR LOS TOI	0 0 0	85,00 3,00 0,55	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		RSD Soreang
2			BOR LOS TOI	0 0 0	60-85 6,9 1-3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		RSUD Cicalengka
2		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan	Terpantainya keamanan pangan dan bahan berbahaya serta peredaran makanan dan minuman di wilayah	13%	90%	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Dinkes
2	Meningkatnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat serta menggunakan fasilitas	Meningkatkan promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector	Terlaksananya Kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media dan pemberdayaan	100%	100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Dinkes

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	kesehatan	dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat	masyarakat					
2			Rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan kesehatan RS	-	1 : 80	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		RSUD Cicalengka
2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Dinkes
2	Meningkatnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan	Meningkatkan promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)	72	85	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Dinkes
			Rata-rata Persentase Layanan air bersih di kecamatan	-	25	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		kecamatan
2		Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular	Desa/kelurahan mengalami wabah dan KLB penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Dinkes
2			AFP rate per 100000 penduduk < 15 tahun	2	3			Dinkes
2			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	74,18%	90%			Dinkes
2			Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	82,16%	90%			Dinkes
2			Penemuan Penderita Diare	88%	100%			dinkes
2			Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi)	80%	90			dinkes

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2		Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes	Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas yang memenuhi standar (%)	100	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Dinkes
2			Persentase proses penilaian akreditasi RS versi 2012	0	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		RSUD Cicalengka
2		Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan	Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota	20%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Dinkes
2			Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%	100%			Dinkes
2			Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%			dinkes
2		Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes	Persentase Puskesmas Pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar	36%	81%	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		Dinkes
2			Persentase pemenuhan perlengkapan dan sarana prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	100%	100%			Dinkes

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2			Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain	377	<10	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		RSD Majalaya
2	Meningkatnya perilaku Masyarakat hidup bersih dan sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan	Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat	Rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan kesehatan RS	-	5000	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		RSD Soreang
2			Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain	-	800	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		RSD Soreang
2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes	Terselenggaranya kegiatan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan obat-obatan perlengkapan dapur dan rawat inap logistik barang cetakan dan pengembangan type Rumah Sakit	1 Paket	1 Paket	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		RSUD Cicalengka
2			Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain	331	800	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		RSD Soreang
2			Baku mutu limbah cair RS BOD COD TSS PH	30,00 80,00 50 6-9	30,00 80,00 50,00 7,00			
2			Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi (%)	-	80%	Program pemeliharaan sarana dan prasarana		RSUD Cicalengka

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Baku mutu limbah cair RS BOD COD TSS PH	-	< 30 <80 <30 6-9	rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata		RSUD Cicalengka
2			Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi (%)	18,5 %	95 %	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit		RSD Majalaya
			Baku mutu limbah cair RS BOD COD TSS PH	5,8 16 12 6,4	< 30 < 80 < 30 6 - 9	jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata		RSD Majalaya
2		Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan	Cakupan puskesmas dengan tenaga dokter dan paramedic	72%	100%	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Dinkes
2			Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%)	52,6	80	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		RSD Majalaya
2			Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%)	-	-	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		RSD Soreang
2			Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%)	-	80	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		RSUD Cicalengka
2			Cakupan Puskesmas Santun Lansia	8	12	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		Dinkes
2		Meningkatkan kualitas Kesehatan Ibu dan Anak	Presentase persalinan yang di tolong oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kabupaten (%)	80,10	90	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Dinkes
			Rata-rata Presentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetens kala Kecamatan (%)	-	90	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Kecamatan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2			Cakupan perempuan/ anak korban kekerasan KDRT yang mendapat pelayanan penanganan pengaduan	17%	11%	Program Penguatan Kelembagaan Pengaruhutamaan Gender dan Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BKBPP
2	Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan	Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga	Persentase Desa binaan P2WKSS skala Kabupaten	10%	100%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		BKBPP
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Rata-rata Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi)	-	2 - 3			Kecamatan
2			Cakupan kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak	42%	70%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		BKBPP
2		Mengendalikan pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, ketahanan keluarga, dan tersedianya data mikro keluarga	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun	7%	35%	Program Keluarga Berencana	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBPP
2			laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurut kelahiran	2,56%	2,30%	Program Keluarga Berencana		BKBPP
2			Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif	60%	70%			BKBPP
2			Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	21%	7%			BKBPP
2			Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	5%	30%			BKBPP
2			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan	50%	100%			BKBPP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2			Pencapaian Akseptor Aktif	81%				BKBPP
2			Cakupan pembinaan remaja dan kegiatan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi	25%	90%	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		BKBPP
2						Program pelayanan kontrasepsi		BKBPP
2			capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa	80%	95%	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		BKBPP
2			Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan remaja yang rentan terhadap pengguna narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	30%	90%	Program peningkatan penanggulangan narkoba PMS termasuk HIV/AIDS		BKBPP
2			Cakupan penyediaan alat dan media informasi pengasuhan dan tumbuh kembang anak	25%	90%	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		BKBPP
2			Cakupan anggota BKB ber KB	38%	70%	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita		BKBPP
2			Cakupan pasangan usia subur peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang Ber KB	48%	87%	Program Keluarga Sejahtera		BKBPP
2	Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS	Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Rata-rata Keluarga Fakir Miskin (PMKS) yang di tangani mampu memiliki kemandirian (ekonomi)	4%	5,50%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Urusan Sosial	Dinsos
2			Rata-rata PMKS mampu mengurus diri sendiri dan menghadapi situasi kritis	1,19%	14,43%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Dinsos

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2			Rata-rata anak yang di tangani mampu mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni	1,83%	10,26%	Program pembinaan anak terlantar		Dinsos
2			Rata-rata penyandang cacat yang ditangani berfungsi secara fisik	13,8%	39,45%	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma		Dinsos
2		Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS	24%	76%	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		Dinsos
2			Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial	74,50%	70,71%	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana PSK narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Dinsos
2			Presentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperandala m pembangunan bidang kesejahteraan sosial	34,80%	28,06%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Dinsos/ Kecamatan
2	Terwujudnya pelestarian budaya sunda	Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak dini	Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan	10	30	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan Kebudayaan	Dikbud
2		Meningkatkan pelestarian fasilitas kebudayaan serta cagar budaya	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestariakan	10	30	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Dikbud
2			Jumlah keragaman budaya yang dilestariakan	10	25	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Dikbud
			Rata-rata Jumlah keragaman budaya yang dilestariakan tingkat Kecamatan (jenis)	-	2 - 5			Kecamatan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah data potensi Pemuda berprestasi	0	- Pemuda Prestasi : 409	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dispopar
2					-KUPP (Kelompok Usaha Pemuda produktif) : 350			
2					- Pemuda Bekerja : 431581			
2			Rata-rata Jumlah Pemuda berprestasi kea Kecamatan	-	5 - 10	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Kecamatan
2			Jumlah yang mengikuti penyuluhan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda bagi : Pemuda pelajar Usia 16 - 30 th, FKWM dan FIKR (orang	-	600 org	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Dispopar
			Rata rata Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan per tahun (kali)	-	12	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Kecamatan
2		Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaporan	Melaksanakan Monitoring Evaluasi Pelaporan tentang ke Organisasi di tiap Kecamatan sewilayah kabBandung	42 cabor tiap kecamatan	Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		Dispopar
2	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi	-	Provinsi : 725	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Dispopar
2					Nasional : 90			
2					Tk. Nasional Jumlah Klub Olahraga per 10000 Penduduk			
			Rata-rata Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan		5 - 12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		Kecamatan
2		Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Gedung olahraga per 10000 penduduk	-	1739 gedung	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Dispopar/ kecamatan

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Perluasan kesempatan bagi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta mendorong penerapan norma agama dan nilai luhur budaya sunda dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan ini diindikasikan oleh :

- Peningkatan Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Bandung
- Meningkatnya penduduk yang bersekolah seluruh jenjang pendidikan, ditandai dengan kenaikan Angka Partisipasi Sekolah dan Penurunan Angka Putus Sekolah.
- Terwujudnya rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun
- Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dengan adanya pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan.
- Meningkatnya Indeks Kesehatan/Indeks Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung
- Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
- Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan.
- Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS serta partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan dengan mengadakan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
- Meningkatnya kegiatan keagamaan dan pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam.
- Terwujudnya pelestarian budaya sunda dengan Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini Meningkatkan dan mengembangkan keberdayaan seniman, budayawan Sunda, dan lembaga-lembaga adat sunda.
- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan Menyediakan data keluarga dan Administasi kependudukan secara tertib dan terkini.
- Meningkatnya minat baca masyarakat dan kemudahan akses masyarakat terhadap pendayagunaan perpustakaan.
- Beroperasinya secara penuh sistem Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) pada RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSD Cicalengka.

C. Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Perdesaan

Tujuan : Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

**Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung**

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3	Meningkatnya infrastruktur desa	Memperkuat sabilulungan RAKSA Desa	Pendampingan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (PNPM dan PPIP)		1 paket	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispersitash

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3			Presentase layanan air bersih di pedesaan pola pemberdayaan	9,96%	27%	Program Lingkungan Sehat Perumahan		Dispertasih
3			Akses aman terhadap sanitasi pola pemberdayaan	51%	60%			Dispertasih
			Presentase rumah layak huni pola pemberdayaan	85%	85,89	Program pengembangan perumahan		Dispertasih
3			Jumlah Kegiatan pembangunan desa yang melibatkan peranserta masyarakat			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		BPMPD
3			Presentase jalan desa kondisi baik	30%	75%	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan		BPMPD
3			Presentase rumah layak huni	35 %	85%			BPMPD
3			Presentaselayana n air bersih di pedesaan	35 %	70%			BPMPD
3			Presentaserumah tangga yang mengakses MCK	35 %	70%			BPMPD
3			Persentase desa yang mengangkut sampah dari sumber ke TPS	30 %	65%			BPMPD
3	Meningkatnya perkembangan kemandirian desa	Meningkatkan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa	Rata-rata Presentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan	-	60%	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan		Kecamatan
3		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa	Jumlah Desa Swasembada	0	0-2 (BPMPD) 7(Kecamatan)	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		BPMPD/ Kecamatan
3			Jumlah Desa Swakarya	0	12 BPMPD 0-2 (Kecamatan)			BPMPD/ Kecamatan
3		Memperkuat lembaga keuangan desa	Jumlah Desa Swasembada	0	2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		BPMPD/ Kecamatan
3			Jumlah Desa Swakarya	0	12			
3			Rata-rata Jumlah kelembagaan ekonomi perdesaan tingkat kecamatan (Lembaga)	0	8-10 (per kecamatan)			
3		Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat	Jumlah personil kebencanaan yang memiliki keahlian penanggulangan bencana	0	250	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		BPBD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3	Meningkatnya kemandirian pangan	Meningkatkan pemenuhan konsumsi pangan bagi rumah tangga miskin di perdesaan	Persentase Jumlah ketersediaan pangan utama (skor PPH)	96.8 %	100 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/ Perkebunan	Urusan Ketahanan Pangan	BKP3
3			Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH)	73.9 %	89.6 %			BKP3
3			Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH)	73.9	89.6			BKP3
3			Terlaksananya Cadangan pangan pemerintah daerah (ton)	-	60			BKP3
			Rata-rata jumlah jenis tanaman pangan yang dikonsumsi masyarakat tingkat kecamatan	-	2 - 3			Kecamatan
3	Meningkatnya kemandirian pangan	Mengembangkan intensifikasi pertanian produk pangan	Jumlah Kelompok yang terbina melalui penyuluh	1.590 poktan	2.119poktan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Urusan Pertanian	BKP3
3			Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP:					BKP3
3			1 Sayuran	1	3			
3			2. Tan Hias	0	1			
3			3 Buah-buahan	0	1			
3	Meningkatnya perkembangan desa	Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat	Rata-rata Jumlah perempuan pelaku ekonomi produktif (orang)	-	50 - 150	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan		Kecamatan
3	Meningkatnya kemandirian pangan	Mengembangkan diversifikasi produk pangan			10 kali	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		BKP3
3	Berkembangnya usaha agribisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing	Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan			24 org	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		BKP3
3	Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat	Meminimalisasi adanya ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas dan kebencanaan	Jumlah personil yang siap diturunkan pada tahapan pra. saat dan pasca bencana	0	250	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		BPBD

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Memantapkan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan.

Kebijakan ini diindikasikan oleh :

- Meningkatkan infrastruktur desa dan Memperkuat sabilulungan RAKSA Desa
- Meningkatkan perkembangan kemandirian desa dengan Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa dan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa serta Memperkuat lembaga keuangan desa.

- Meningkatnya kemandirian pangan dengan Mengembangkan intensifikasi pertanian produk pangan dan diversifikasi produk pangan serta pemenuhan konsumsi pangan bagi rumah tangga miskin di perdesaan.
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- Tersedianya dana penunjang untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
- Ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan utama

D. Misi 4 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Tujuan : Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 7.4

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
4	Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat	Meminimalisasi adanya ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas dan kebencanaan	Pengakuan Perda	10%	70%	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
4			Pengakuan perda	100%		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Kesbangpol
4	Menurunkan tingkat pelanggaran perda	Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Cakupan patrol petugas	1	7	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Satpol PP
4			Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	2.5 % (100 orang tercapai 100 %)	25 % (1000 orang)	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Kesbangpol
			Rata-rata persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini		65%			Kecamatan
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan KAMTIBMAS	Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	3.2 % (100 orang tercapai 100 %)	25.80 % (800 orang)	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Kesbangpol
4			Rata-rata persentase jumlah Masyarakat yang mengikuti	-	30%	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Kecamatan

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			sosialisasi tentang wawasan kebangsaan					
4	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah	Penegakan peraturan daerah	20%	60%	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Satpol PP
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan KAMTIBMAS	Meningkatkan pembinaan politik bagi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	2.9% (100 orang tercapai 100 %)	26.47% (900 orang)	Program pendidikan politik masyarakat		Kesbangpol
4	Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat	Meminimalisasi adanya ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas dan kebencanaan	persentase terbinya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang linmas	50% (60 orang tercapai 100 %)		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Kesbangpol
4			Jumlah Anggota Linmas	5.520 anggota	5.560 anggota	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Satpol PP

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu meningkatkan Keamanan dan Ketertiban secara terpadu dan menyeluruh.

Adapun hasil capaian kebijakan ini diindikasikan dengan:

- Tersediannya produk hukum daerah yang mendukung Kamtibmas dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pemahaman produk hukum.
- Menurunnya tingkat pelanggaran perda dan Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda dengan Meningkatkan kapasitas aparat penegak Peraturan Daerah.
- Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat dengan Meminimalisasi adanya ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas dan kebencanaan.
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan KAMTIBMAS melalui pembinaan politik bagi masyarakat.

E. Misi 5: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah

Tujuan : Terwujudnya keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

**Tabel 7.5
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung**

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah	Persentase penambahan panjang jalan kabupaten	Jalan Lingkar Banjaran (Tembus Bojongsereh) sepanjang 0.550 Km	60 % (pengadaan lahan)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Urusan Pekerjaan Umum	Bina Marga
5			Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari banjir	41 Lokasi	78,56 % Bina Marga 45% Kecamatan	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Bina Marga/ Kecamatan
5			Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari longsor	55 Lokasi	64.20 % Bina Marga 50% Kecamatan	Program Pembangunan turap/talud/brojong		Bina Marga/ kecamatan
5			Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik	Sedang : 20.36 %	Sedang : 12.86 %	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Bina Marga
5				Baik : 35.77 %	Baik : 60.78 %			
5				Presentase kondisi jembatan baik	21.36%			
			Rata-Rata Presentase jalan mantap (baik dan sedang) kabupaten lingkup kecamatan	-	60%			Kecamatan
5			presentase kondisi jalan dan jembatan kabupaten	-	72 %	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan		Bina Marga
5			Persentase Ketersediaan data daerah milik jalan, utilitas, dan penggunaan damija	-	72 %	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Bina Marga
5			presentase ketersediaan alat berat untuk menunjang kegiatan kebinamargaan (%)	-	24, 10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Bina Marga
5			presentase penataan pedestrian kawasan strategis dan cepat tumbuh di 7 wilayah	-	49.58 %	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Bina Marga
5			Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi	58.50	73.30	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		SDAPE
			kewenangan kabupaten yang sudah ada			Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam		SDAPE

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5			Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	0.10	3.56	Program pengendalian banjir		SDAPE
5			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	11.76	100	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		SDAPE
5			Rasio elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	3.18	10.00	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		SDAPE
5			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85 % (707.600 unit)	85.89 % (714.626 unit)	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Perumahan	Dispertasih/kecamatan
5			Persentase luas permukiman yang tertata	81.84%	90.22%			Dispertasih
5		Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan	9.96%	27%	Program Lingkungan Sehat Perumahan		Dispertasih
5			Akses aman terhadap sanitasi	51%	60%			Dispertasih
5			Jumlah pembinaan kelompok pengelola air bersih dan sanitasi	135 Kelompok	235 Kelompok	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		Dispertasih
5		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah	Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk	1:25	1:29	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		Dispertasih
5	Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan pelayanan pemanfaatan ruang kepada masyarakat	Persentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	29,03% (9 RDTR)	41,94% (13 RDTR)	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Penataan Ruang	Dispertasih
5			Persentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	9,73% (6 RDTR + 1 RTRW)	35,69% (10 RDTR + 1 RTRW)	Program Perencanaan Tata Ruang		Bappeda
5		Mengatur pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat	Persentase rencana tapak yang disahkan	100% (64 SP)	100% (115 SP)	Program Pemanfaatan Ruang		Dispertasih
5		Mengatur dan menata areal pemukiman umum dan bukan umum	Presentase bangunan ber-IMB	0.30 % (3.514 unit)	8 % (25.297 unit)	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Dispertasih

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5			Persentase luas peruntukan lahan yang berijin terhadap total luas lahan rencana peruntukan lahan	12,31	13,27			Dispertasih
5		Mengatur pola penggunaan lahan pada wilayah yang berembang pesat	Tersedianya informasi mengenai sarana prasarana di kawasan strategis	-	1 dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Dispertasih
5	Terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancar	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji	33.33 %	33.33 %	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Urusan Perhubungan	Dishub
5			tersedianya terminal angkutan penumpang	66.67 %	66.67 %			Dishub
5			tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten	38.52 %	38.52 %	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Dishub
5			rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang	1:12	1:15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dishub
5			VCR dan LoS	VCR = 0.84 LoS = D	VCR = 0.84 LoS = D			Dishub
5			tersedianya terminal angkutan penumpang	66.67 %	66.67 %	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Dishub
5			tersedianya halte pada wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	0.37 %	2.57 %			Dishub
5			Presentase fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata daripada rambu-rambu, marka, dan guadrill)	0.35 %	7.70 %	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		Dishub
5			Tingkat keselamatan lalu lintas	230 kasus/tahun	248 kasus/tahun			
5			VCR dan LoS (rata-rata)	VCR 0.84 LoS D	VCR 0.75 LoS D			
5			Presentase PJU terpelihara	Pemeliharaan PJU 4000 TC	26.67 %	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Bina Marga
5			Persentase PJU yang terbangun	Pembangunan OJU 700 TC	35.33 %			Bina Marga

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5			persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	99.83 %	100%	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Dishub
5			Persentase tingkat pengendalian komunikasi dan informasi	40%	75%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Dishub

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan, yaitu: Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar wilayah dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang.

Kebijakan ini diindikasikan dengan :

- Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah dengan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah dan pelayanan air bersih.
- Terwujudnya Pembangunan Jalan Baru (Non Tol) di Kabupaten Bandung (Jl. Lingkar Tengah Selatan Soreang, Jl. Lingkar Selatan Majalaya, Jl. Lingkar Ciparay, Jl. Sekunder pada Koridor Katapang – Pameungpeuk, dll)
- Terwujudnya Jalan Mantap Kabupaten Bandung sebesar 73,64%
- Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengatur pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat serta Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan Menyediakan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan.
- Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni dengan Menyediakan sarana, prasarana serta utilitas perumahan dan Meningkatkan pembangunan perumahan yang layak huni dengan cakupan yang lebih luas.
- Terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancar dengan Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan dan sarana dan prasarana perhubungan.
- Terlaksananya Pembangunan Jalan Baru (Tol) tahap awal Jl. Soreang- Pasirkoja
- Rintisan pelaksanaan Tata Transportasi Lokal (Tatralok) dengan merintis penataan angkutan publik ke arah angkutan massal yang lebih efisien dan ekonomis, serta penataan terminal untuk menunjang peningkatan pelayanan transportasi publik.
- Perintisan pengembangan rumah-rumah vertikal seperti rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) di wilayah-wilayah perkotaan seperti di wilayah Cileunyi, Majalaya, Baleendah, dan Margahayu.

F. Misi 6 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 7.6
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6	Berkembangnya usaha agribisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing	Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan	Jumlah kelompok Yang terbina melalui penyuluh	1.590 poktan	2.119 poktan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Urusan Pertanian	BKP3
6			Jumlah Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan	233 org	1197 org	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		BKP3
6		Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan	Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan	1 org	24 org	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan		BKP3
6			Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	16	32	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		Disnakan
6			Meningkatnya status kesehatan (%)	58.75	66.25			Disnakan
6			Meningkatnya kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (%)	7.87	100	Program peningkatan produksi hasil peternakan		Disnakan
6		Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan	Peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)	22	70	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		Disnakan
6		Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	240	82	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Disnakan
6			Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	55.45	77.18			Disnakan
6			Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)	32	296	Program pengembangan budidaya perikanan		Disnakan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6			Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (orang)	0	94			Disnakan
6			Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas)	0	9	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar		Disnakan
6			Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum (lokasi)	5	50			Disnakan
6		Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan	Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)	14	95	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (dst...)		Disnakan
6	Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar	Mengembangkan industri produktif berbasis UMKM	Jumlah pelaku UMKM	6,375	9,236	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag
6			Jumlah tenaga kerja UMKM	28,957	37,480			Diskoperindag
			Rata-rata jumlah pelaku UMKM Tingkat Kecamatan	-	25 – 35%			Kecamatan
6			Jumlah omzet UMKM	3,021,886,684,000	3,272,919,514,831			Diskoperindag
6			Jumlah pelaku UMKM	6,375	9,236	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Diskoperindag
6			Jumlah tenaga kerja UMKM	28,957	37,480			Diskoperindag
6			Jumlah Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal	55 Sertifikasi	100 Sertifikasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Diskoperindag
6			Jumlah koperasi	1,524	1,653	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Diskoperindag
6			Jumlah koperasi aktif	790	940			Diskoperindag
6	Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah		Tingkat fasilitas advokasi perlindungan konsumen	0	40 putusan	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Urusan Perdagangan	Diskoperindag
6			Nilai ekspor barang dan jasa (\$)	456.850.399.57	993.433.738.90	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Diskoperindag

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6			Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	8 pasar	2 pasar	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Diskoperindag
6			Jumlah Omzet kecil/menengah (Rp)	2.176.213.790.000	2.418.422.559.371	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		Diskoperindag
6		Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM	Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah	3.460 IKM	4.550 IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Diskoperindag
6			Jumlah lokasi PKL yang sudah ditata	-	2 pasar	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		Diskoperindag
			Rata-rata Persentase Jumlah PKL yang terdata dan dibina dikecamatan	-	80%	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		Kecamatan
6			Jumlah Omzet Koperasi	3,021,886,684,000	3,272,919,514,831	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Urusan Perindustrian	Diskoperindag
6			Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah	4.118 IKM	4.550 IKM	Program Penataan Struktur Industri		Diskoperindag
6			Jumlah potensi produk unggulan IKM	98 IKM	88 IKM	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial		Diskoperindag
6	Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing	Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan	Jumlah unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Urusan Pertanian	Distanbunhut
6			jumlah kelompok usaha yang bermitra	0 kelompok	5 kelompok			Distanbunhut
6			Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Jumlah pencapaian produktivitas komoditas	64.56 kuintal/ha	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Distanbunhut
6		Padi		108,88 kuintal/ha				
6		Palawija						
6			Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)	1.97	2.30	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Distanbunhut
6			Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)	1.97	2.30	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Distanbunhut
6			Jumlah rata-rata pencapaian			Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan		Distanbunhut
6			a. Sayuran		216,50 kuintal/ha			
6			b. Buah-buahan		104,00 kuintal/ha			

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6			c. Tanaman hias		17.48 tangkai/ha			
6			d. Tanaman obat		3.25 kg/m2			
6			Jumlah pencapaian produktivitas perkebunan					Distanbunhut
6			a. Kopi	1.160 ton/ha	1.195 ton/ha			
6			b. Teh	1.983 ton/ha	2.500 ton/ha			
6			c. Cengkeh	0.220 ton/ha	0.220 ton/ha			
6			d. Tembakau	0.864 ton/ha	1.000 ton/ha			
6			Jumlah kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura	0 kelompok	40 kelompok	Program Peningkatan kesejahteraan petani		Distanbunhut
6			jumlah kelompok usaha yang bermitra	0 kelompok	5 kelompok	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan		Distanbunhut
6			Meningkatnya SDM penyuluh pertanian pada produksi pertanian/perkebunan		10 kali	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		BKP3
6	Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal	Membangun dan mengembangkan kawasan wisata terpadu	Jumlah kunjungan wisata	4.607.330 orang	7.629.023 orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Urusan Pariwisata	Dispopar
6			Jumlah daya tarik wisata	-	60 lokasi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Dispopar
6			Jumlah mitra kerja pariwisata	1.049 orang	1.572 orang	Program Pengembangan Kemitraan		Dispopar
6		Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal	Jumlah Ijin yang diterbitkan (20 kewenangan)	8,127	8,200	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Urusan Penanaman Modal	BPMP
6			Nilai Investasi	82,318,127,650	190,000,000,000			BPMP
6			Jumlah Investor	29 (PMA / PMDN)	83 PMA = 41			BPMP
6					PMDN = 41			
6			Nilai Investasi (PMA/PMDN) sektor Usaha = primer, sekunder, dan tersier	354,156,876,684 (M)	6,700,000,000,000 (T)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		BPMP
6					(kenaikan) 100.000.000 (101 %)			
6			Jumlah Investor	29	83 PMA = 41			BPMP
6					PMDN = 41			
6					5000			
6					(ijin usaha lainnya)			

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6			Jumlah Potensi Investasi	11 bidang usaha (sektor primer, skunder & tertier)	16 Bidang usaha	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		BPMP
6			Nilai Investasi	1,200,000,000,000	4,000,000,000			
6	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	11%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Ketenagakerjaan	Disnaker
6			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	90%	95%			Disnaker
6			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	83%	90.5 %	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Disnaker
6			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	65%			Disnaker
6			Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	7%	42%	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Disnaker
6			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	52%	56%			Disnaker
6			1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	29%	43%			Disnaker
6			2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	55%			Disnaker
6			Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	150	150	Program Transmigrasi Regional		Disnaker

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Kebijakan umum pembangunan : Meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat.

Kebijakan ini diindikasikan dengan :

- Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar dengan Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan Mengembangkan industri produktif berbasis UMKM serta Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal.
- Meningkatnya kualitas tenaga kerja dengan Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan, kualitas SDM pencari kerja dan sarana dan prasarana pelatihan kerja.

- Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing dengan Mengembangkan potensi agribisnis serta Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan dan Mempermudah akses permodalan pelaku agribisnis pemula
- Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal dengan melaksanakan Pembangunan dan mengembangkan kawasan wisata terpadu serta Menata pedagang kakilima dan asongan di kawasan wisata.
- Pengembangan konsep *one village one product* (OVOP) sebagai konsep penggalian potensi ekonomi local akan terus dilakukan seiring dengan implementasi konsep agropolitan sebagai pendukung pengembangan potensi ekonomi local melalui perbaikan mutu dan kemasan, promosi dan pemasaran menuju peningkatan nilai tambah dan daya saing.
- Pengembangan pertanian dengan tujuan peningkatan nilai tambah sektor pertanian yang dititikberatkan pada pengembangan agribisnis pertanian ramah lingkungan untuk komoditas padi, hortikultura dan perkebunan kopi, pengembangan agribisnis unggulan lokal (palawija, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan serta pengembangan pertanian terpadu
- Pada sektor perdagangan, pembangunan pasar terpadu mengacu pada rencana detail tata ruang kecamatan (RDTRK) direncanakan akan dibangun di beberapa wilayah, di antaranya Banjaran, Cicalengka dan Soreang.
- Pada sektor pariwisata, perbaikan dan peningkatan penatakelolaan objek wisata serta kemitraan akan menjadi sentral pengembangan sector ini disamping promosi pariwisata.

G. Misi 7 : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan terdiri dari :

- Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana

Tabel 7.7

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
7	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Mengendalikan kerusakan hutan dan lahan	Jumlah Penyuluh kehutanan pada perlindungan dan konservasi hutan	-	21	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Urusan Kehutanan	BKP3
7		Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau	Luas Hutan Rakyat	650 ha	12.925 ha	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		Distanbunhut
7		Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan tanah dan air	Jumlah kelompok tani berbasis AUK	30 Kelompok	50 Kelompok	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Distanbunhut
7		Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau	Persentase luas lahan kritis yang tertanami	2.33 %	54.94 %	Program rehabilitasi hutan dan lahan		Distanbunhut

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
7		Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan tanah dan air	Persentase luasan pertambangan berijin (%)	81.56%	92,48%	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
7			Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap bulan (m3/sumur)	15.785.10	16.660.00	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan		SDAPE
7			Prosentasi ketersediaan peta zonasi kerentanan gerakan tanah	37.50	100			SDAPE
7			Persentase wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun system data dan informasi kebencanaan daerah	0%	100%	Program pengembangan data/informasi	Urusan Perencanaan Pembangunan	BPBD
7	Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran	Memetakan kawasan rawan bencana	Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung	0	31	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Urusan	BPBD
7	Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat	Meminimalisasi adanya ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas dan kebencanaan	Persentase bantuan logistic dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana	0%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
			Rata rata Persentase penanganan kejadian bencana alam	-	60%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		Kecamatan
7			Jumlah Kecamatan yang telah melakukan mitigasi bencana	0	31			BPBD
7	Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran	Memetakan kawasan rawan bencana	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	0%	100%	Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar		BPBD
7	Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat	Meminimalisasi adanya ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas dan kebencanaan	Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana	0%	100%	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial		BPBD
7	Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran	Meningkatkan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30%	65%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		Dispartasih

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
7			Peningkatan Capaian Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	50%			Dispertasih
7			Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memnuhi standar kualifikasi	35%	75%			Dispertasih
7			Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000liter pada WMK	30%	65%			Dispertasih
7	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mengoptimalkan pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi	Cakupan pelayanan sampah	10.46 %	22%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	Dispertasih
7			Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk	23 buah	70 buah			Dispertasih
7			Cakupan pelayanan sampah		1:16.5			
7			Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk		85 unit			
7			Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk	50 unit	1:13.6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Dispertasih
7	Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau	Mewujudkan hutan kota dan ruang terbuka hijau	Presentase luas RTH perkotaan	0.10 %	0.119 %	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Urusan Penataan Ruang	Dispertasih
			Rata-rata persentase pengelolaan RTH Tingkat Kecamatan	-	85%	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Kecamatan
7						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Dispertasih
7	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mengembangkan sistem informasi lingkungan	Jenis dokumen yang dapat diakses	2	5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		BPLH
7		Memantau kualitas lingkungan secara berkesinambungan	Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji	48%	80%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		BPLH

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
7			Jumlah sarana pengolahan limbah yang dibangun pemerintah	1	2			BPLH
7		Membina dan mengawasi usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase Cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/ijin lingkungan	20%	20%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan		BPLH
7			Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	42%	65%			BPLH
7			Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	87.5 %	90%			BPLH
7			Persentase kegiatan penertiban pelanggar hukum lingkungan	100%	100%			BPLH
7			Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	100%	100%			BPLH
7			Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	3	1			BPLH
7			Jumlah sarana kebersihan		71 unit	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Dispertasih
7	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Melestarikan sumber daya hayati dan ekosistem	Luas tanah (ha) untuk produksi biomassa yang dipantau status kerusakannya	0	1,500	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		BPLH
7			Jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas	300	540			BPLH
7			Jumlah lubang resapan biopori yang dibuat masyarakat	2,000	7,000			BPLH

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu mengendalikan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan, penataan ruang, serta penanggulangan bencana

Kebijakan ini diindikasikan dengan :

- Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta Mengoptimalkan pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi.
- Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau dengan Mewujudkan hutan kota dan ruang terbuka hijau serta Meningkatkan peran serta masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pencegahan dampak lingkungan melalui instrument dokumen lingkungan.
- Terselenggaranya konservasi sumber daya alam dengan Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau serta melakukan pengendalian kerusakan hutan dan lahan untuk Melestarikan sumber daya hayati dan ekosistem.
- Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran dengan Menyediakan data dan informasi daerah yang berpotensi bencana dan Memetakan kawasan rawan bencana, serta Meningkatkan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Menurunnya luas wilayah bencana banjir di sungai citarum dan anak sungainya
- Menurunnya kandungan pencemaran limbah sungai
- Terfasilitasinya bantuan dan penanganan korban akibat bencana secara cepat dan tepat sasaran.
- Menurunnya resiko bencana pada lokasi potensi dan rawan bencana
- Tercapainya Respon Time 15 menit terhadap pelayanan kebakaran pada setiap kejadian kebakaran di Wilayah manajemen Kebakaran di Kabupaten Bandung.
- Meningkatnya cakupan pelayanan/pengelolaan persampahan.



Bab VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung, berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD,

8.1 Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015

Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi;
2. Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional;
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
4. Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial;
5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
6. Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM;
7. Pengembangan produk unggulan;
8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan;
9. Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan;
10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
11. Pemantapan kemandirian pangan,

Rencana program prioritas kepala daerah periode tahun 2010 – 2015 yang merupakan program prioritas kepala daerah terpilih, sudah menjadi bagian dari rencana program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung, berikut Rencana Program Prioritas Kepala Daerah Periode Tahun 2010-2015 yaitu :

1. Strategi peningkatan pendapatan pertanian melalui : Produk pertanian organik, Konservasi berbasis ekonomi, Rumah kemasan, Pengembangan agribisnis potensi lokal, Pembenahan bumdes pertanian, Restoran organik,
2. Pengembangan pasar tradisional melalui : pembenahan tempat dan kelengkapan jenis jualan,
3. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui : relokasi, penetapan waktu jual dan penataan kios,

4. Pengelolaan sampah melalui : pembenahan TPS, penyiapan TPA alternatif dan pengolahan sampah (organik dan anorganik)
5. Pembuatan air minum mineral,
6. Penanggulangan akibat banjir melalui Peninggian bangunan rumah, pembuatan danau dan sumur resapan, dan pembentukan tim siaga bencana,
7. Perbaikan infra struktur jalan melalui penutupan dengan sirtu, perbaikan permanen APBD/APBN dan pembangunan tol soroja,
8. Peningkatan derajat kesehatan melalui Revitalisasi posyandu, perbaikan fasilitas puskesmas setara RS dan penerapan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,
9. Penataan taman kota/kecamatan/desa/kelurahan
10. Pemberdayaan aparatur pejabat tiap tingkatan,
11. Wisata terpadu,
12. Perbaikan rumah kumuh,

8.2 Rencana Program Urusan Setiap SKPD

Bahwa dalam rangka menunjang program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015, yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat, maka pelaksanaan program tersebut, harus ditunjang oleh anggaran program operasional dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Program urusan SKPD,

Pada RPJMD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, alokasi anggaran program urusan setiap SKPD dari Tahun 2011-2015 sebesar Rp 4,890,225,613,160,00(untuk tahun 2011 dan tahun 2012 berdasarkan anggaran APBD perubahan tahun 2011 dan tahun 2012, untuk tahun 2013 berdasarkan APBD murni tahun 2013, untuk tahun 2014 dan tahun 2015 berdasarkan RKPD tahun 2014), untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BL Urusan Program	860,132,218,071	1,061,846,021,998	943,301,835,344	860,585,527,296	1,164,100,352,451

Sedangkan untuk indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah RPJMDperubahan Tahun 2010-2015 berdasarkan Misi, dapat di lihat pada tabel berikut:

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Misi 1 : Meningkatkan profesionalisme Birokrasi															
1.06.15	Meningkatkan profesionalisme Birokrasi	Program Pengembangan Data/informasi	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk menunjang perencanaan	0%	100	313,142,500	100	252,745,000	100	297,900,000	100	325,000,000	100	325,000,000	Bappeda
1.06.15		Program Pengembangan Data/informasi	Persentase Gedung yang telah memenuhi standar	100	100		100	254,320,000	100	1,447,720,000	100	1,042,492,000	100	1,146,741,200	Dispertasih
1.23.15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung	5	6	878,016,250	4	823,850,000	4	865,000,000	3	1,130,000,000	3	1,130,000,000	Bappeda
1.23.15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja peternakan dan perikanan	-	1	667,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnakan
1.24.15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pemenuhan bukti fisik (peta/foto /dok/arsip) tindak lanjut/ penyempurnaan sejarah kab. Bandung 1846 – 2010 (%)	5	15	72,309,000	20	57,928,000	20		25	197,244,200	30	236,693,040	Bapapsi
1.24.16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku (lembaga)	28	28	158,336,000	37	427,551,841	63	456,734,000	110	642,334,200	164	770,801,040	Bapapsi
1.20.15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kehadiran anggota DPRD >50% padasetiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD (%)	90	75	17,343,098,750	70	19,814,686,750	75	17,885,956,450	75	18,253,233,700	90	19,060,897,700	Setwan
1.20.15			Persentase penetapan	-	-	-	20	-	40	-	60	-	80	-	Setwan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			anggaran tepat waktu (%)												
1.20.15			Persentase rekomendasi DPRD yang ditindak lanjuti	44	41	-	37	-	41	-	42	-	45	-	Setwan
1.20.26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda Yang disahkan tahun berkenaan	22	23	369.892.200	31	656.239.950	11	261,299,450	13	193,723,590	25	203,466,750	Setwan
1.20.26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda Yang disahkan tahun berkenaan	-	-	202.502.250	-	365.000.000	-	-	-	-	-	-	BPBD
1.20.30		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)	23,95	23,95	2,932,829,300	13,6	3,466,085,000	16,03	4,331,000,000	23,07	6,450,000,000	23,34	6,950,000,000	BKPP
1.20.31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase penyelesaian administrasi Kepegawaian	23,32	23,32	1,334,000,000	21,42	2,633,714,000	18,4	3,034,156,200	18,43	3,409,337,000	18,44	3,409,337,000	BKPP
1.20.31			Prosentase pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja minimal	-	-	-	-	-	-	-	>50	-	>50	-	BKPP
1.06.16		Program Kerjasama Pembangunan	Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	100	300,000,000	100	125,000,000	100	47,390,000	-	-	-	-	Bappeda
1.06.19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar	96,98	97,97	295,214,500	98,73	228,809,800	98,74	302,500,000	100	340,000,000	100	340,000,000	Bappeda
1.06.22		Program pengembangan pembangunan ekonomi	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan	98,4	99,32	932,650,000	98,73	1,012,069,984	100	836,140,000	100	900,000,000	100	900,000,000	Bappeda

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ekonomi												
1.06.23		Program perencanaan social budaya	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan social budaya	94,97	95,95	368,195,000	96,2	276,595,000	99,37	274,189,700	100	500,000,000	100	500,000,000	Bappeda
1.06.24		Program pengembangan pasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan pasarana dan SDA	97,12	97,97	193,867,500	98,73	178,838,400	99,37	350,880,000	100	140,000,000	100	140,000,000	Bappeda
1.06.21		Program perencanaan pembangunan daerah	- Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan	93,10%	93,24%	1.573.848.000	93,67%	998,554,150	98,11%	1.884.447.900	100%	1,495,000,000	100%	2,095,000,000	Bappeda
1.06.21			Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	0%	33,33%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1.06.21		Program perencanaan pembangunan daerah	Penilaian lakip tahun berkenaan	-	C	-	C	105,000,000	C	175,000,000	CC	325,000,000	B	325,000,000	Setda
1.06.21			Peringkat urutan penyelenggaraan pemda tahun berkenaan kabupaten	-	21	-	30	-	25	-	20	-	15	-	Setda
1.06.20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (orang)	0	0		0		10	70,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	Bappeda
1.06.21		Program perencanaan pembangunan daerah	- Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap	-	-	-	-	-	100	20.000.000	-	-	-	-	Dispertasih

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			program yang dianggarkan												
1.06.21		Program perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD	0	0	-	0	-	25%	769,311,500	30%	553,000,000	32,5%	566,900,000	Kecamatan
1.24.18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis	3	1	115,660,000	2	190,000,000	3	95,424,900	4	273,600,000	5	328,320,000	BAPAPSI
1.24.17		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi (lokasi)	0	0	-	0	-	4	80,000,000	8	88,330,000	12	105,996,000	BAPAPSI
1.25.17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta seminar internet sehat dan pelatihan teknis bidang TIK (orang)	320	300	78,350,000	400	60,907,000		78,794,000	544	120,000,000	616	144,000,000	BAPAPSI
1.25.17		Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD (jenis)	1	2	770,890,000	3	2,181,812,900	5	2,093,543,500	6	2,543,276,000	8	3,051,931,200	BAPAPSI
			Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung (satker)	28	28		28		51		62		72		BAPAPSI
1.20.20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah institusi yang menjadi objek pengawasan internal secara berkala (satker)	67 OPD (100%)	39	1,573,766,000	70	1,356,324,641	70	1,735,843,000	70	2,700,000,000	70	6,200,000,000	Inspektorat
1.20.21		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang terlatih (orsng)	14	-	-	5	26,820,000	12	35,157,000	8	-	10	-	Inspektorat
1.20.24		Program Mengintensifikan	Jumlah penanganan	20 pengaduan	94	54,000,000	75	-	75	-	75	-	60	-	Inspektorat

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penanganan pengaduan masyarakat	kasus atas pengaduan masyarakat yang disampaikan mas media, SMS dan kasus yang dilimpahkan dari instansi yang lebih tinggi												
1.20.31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase dokumen analisis kepegawaian yang dimiliki SKPD	0	8,33	237,360,000	13,90	-	68	-	80	-	100	-	Setda
1.19.17		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi Pertemuan Ulama Umaro	12	18	0	18	Rp500,000,000	18	3,735,565,000	18	3,405,000,000	0	0	Setda
		program pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH	Rasio jumlah sarana ibadah menurut pemeluknya 1. Islam 2. Kristen 3.Hindu 4.Budha	1:230 1:1.475 1:824 1:2.214	1:335 1:2195 1:824 1:1390		1:245 1:3491 1:2384 1:2518		1:245 1:3491 1:2384 1:2518		1:245 1:3491 1:2384 1:2518	0	0	Setda	
			Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat	8.172	8.255	-	8.338	-	8.381	-	8.400	-	0	0	Setda
		Program dst..., Peningkatan kehidupan Beragama	Frekuensi Pertemuan Ulama Umaro	-	-		-		-		-		18	3,405,000,000	Setda
			Rasio jumlah sarana ibadah menurut pemeluknya 1. Islam 2. Kristen 3.Hindu 4.Budha	-	-		-		-		-		1:245 1:3491 1:2384 1:2518	Setda	
			Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat	-	-		-		-		-		8.420	Setda	
1.20.20		Program peningkatan system pengawasan	Tingkat partisipasi Pemilu	61,45	0	2,663,804,500	68,89	4,674,435,000	60	4,385,618,342	60	3,760,000,000	70	4,325,000,000	Setda
			Persentase	100	100		100		100		100		100	Setda	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab	
					2011		2012		2013		2014		2015			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	kesesuaian waktu penyelesaian kontrak barang jasa													
			Persentase Pengadaan barang/jasa yang melalui ULP/LPSE tahun berkenaan	90	95	100		100		100		100		100	Setda	
1.16.15		Program peningkatan promosi dan kerjasama institusi	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan (jenis)	750	800	850		900		1.000		1.200		1.200	Setda	
1.20.20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rata-rata Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan		13,44	8,939,453,000	13,45	11,713,930,443	25	12,690,143,500	27,5	7,222,121,520	30	7,649,583,672	Kecamatan dan kelurahan	
1.20.17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	0	9,72	4,612,609,600	12,62	9,660,880,258	13,7	8,212,245,683	13,70%	6,511,449,000	13,7	9,331,035,784	DPPK	
			Persentase serapan belanja daerah (%)	0	87,25	-	93,04	-	90,53	-	91	-	91,5	-	-	DPPK
			Persentase potensi pajak retribusi daerah hasil kajian yang dapat diimplementasikan	10	20	4,099,101,750	25	1,515,000,000	30	2,725,000,000	50	3,385,000,000	100	3,435,000,000	Setda	
			Persentase asset tanah pemda yang bersertifikat (%)	2,83	2,93		2,93		3,96		5,24		6,53		Setda	
1.20.17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Capaian target PAD Bidang Perhubungan (%)	65,46	88,59	196,370,000	78,47		91,16		93		95	Dishub		
1.20.17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun	0	0	-	0	-	100	163,650,000	100	226,850,000	100	238,700,000	Kecamatan	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			berkenaan												
1.10.15		Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan Penertiban KK (%)	60	63	6,179,485,300	91	15,304,637,500	94	19,948,283,760	97	14,599,569,800	100	16,209,526,780	Disduk
			Cakupan penertiban KTP (%)	64	70		75		93		97		100		Disduk
			Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)	46	49		60		61		62		62,5		Disduk
			Cakupan penerbitan akta kematian (%)	0,8	0,95		1,05		1,22		1,46		1,71		Disduk
1.10.15		Program penataan administrasi kependudukan	Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK Lingkup Kecamatan	-	-	-	-	33,65%	258,175,000	35%	301,000,000	38%	313,600,000	Kecamatan	
			Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP Lingkup Kecamatan	-	-	-	93%	97%		100%		Kecamatan			
1.09.15		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Frekuensi fasilitasi penetapan lokasi penggunaan dan Pemanfaatan tanah (kali)	-	2	322,460,000	2	322,426,235	3	259,986,235	1	600,000,000	1	600,000,000	Setda
1.20.25		Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)	-	276	768,948,500	223	697,274,350	230	1,153,619,000	240	1,225,000,000		Setda	
1.25.		Program kerjasama informasi dan media masa	Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)	-	276		223		230		240		250	1,225,000,000	Setda
1.20.25		Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	Rata-rata Jumlah berita /informasi kecamatan yang diberitakan di media masa (release)	-	-		-		1 - 2		1 - 2	100,000,000	1 - 2		Kecamatan
1.20.16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil	Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan	-	283	1,386,264,250	268	1,768,567,560	287	1,507,750,500	311	4,775,000,000	308	4,755,000,000	Setda

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kepala daerah	masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)												
1.20.16		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase fasilitasi penetapan produk hukum daerah(%)	100	100	2,873,914,275	100	3,721,320,000	100	5,056,425,400	100	5,525,000,000	100	6,090,000,000	Setda
1.20.27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase fasilitasi penataan/ pemekaran desa/kelurahan	8,9	26,7	846,019,125	44,4	1,800,000,000	44,4	502,971,100	55,6	1,550,000,000	88,9	1,550,000,000	Setda
			Jumlah penyelesaian tapal batas wilayah administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Misi I						63,451,505,300		86,806,323,762		98,027,821,120		94,907,561,010		107,157,530,166	
Misi 2 Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda															
1.01.15	Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini (%)	29,63	30,16	1,038,900,367	39,59	2,517,830,242	31,34	1,688,748,000	31,97	2,309,722,800	32,61	2,309,722,800	Dikbud
1.01.16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD dan sederajat	103,32	104,31	401,563,585,974	104,37	316,948,452,413	104,42	143,846,310,507	104,49	73,336,079,850	104,58	73,336,079,850	Dikbud
1.01.16			APM SD dan sederajat	98,42	99,57		99,59		99,61		99,65		99,67		Dikbud
1.01.16			APK SMP dan sederajat	91,55	91,56		91,57		91,59		91,6		91,61		Dikbud
1.01.16			APM SMP dan sederajat	70,55	81,22		81,44		81,6		82		82,25		Dikbud
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata APM tingkat SD/ sederajat	-	-	-	-	-	-	91	10,000,000	92	11,000,000	Kecamatan		
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata APM tingkat SMP/ sederajat	-	-	-	-	-	-	60	-	63	-	Kecamatan		
1.01.17		Program Pendidikan Menengah	APK SMA dan sederajat	48,74	54,09	28,340,321,000	54,2	32,181,202,500	54,36	79,069,989,243	54,5	69,261,553,122	55	72,261,553,122	Dikbud
			APM SMA dan sederajat	37,81	41,5		41,84		41,94		42		42,25		Dikbud
1.01.17		Program Pendidikan Menengah	Rata-rata Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ sederajat Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	42	-	42	1,300,000,000	Kecamatan	
1.01.18		Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf (AMH)	98,41	98,48	2,244,020,000	98,84	4,622,322,000	98,73	8,736,196,000	98,77	6,144,815,600	98,81	6,144,815,600	Dikbud

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1	69,7	71,5	6,554,865,000	72,81	4,641,716,000	73,25	2,385,473,500	73,5	3,296,460,200	75	3,296,460,200	Dikbud
1.01.22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A tahun berkenaan	11,85	11,85	814,973,525	11,86	1,775,000,000	13,89	6,507,200,000	13,9	2,057,000,000	13,91	2,057,000,000	Dikbud
1.02.15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rata-rata Belanja Obat yang bermutuper kapita (Rp/kap)	4,197	4,200	14,081,161,555	4,500	18,355,267,650	5,000	11,428,330,400	5,500	8,007,415,400	6,000	9,581,000,000	Dinkes
1.02.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjangkaran Kesehatan siswa SD dan setingkat	70%	53%	5,456,978,750	65%	10,099,443,750	77%	7,180,831,698	89%	6,895,031,213	100%	7,102,000,000	Dinkes
1.02.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR	58,13	58,13	21,835,363,541	81,52	30,000,000,000	84,87	22,463,629,575	60-85	30,000,000,000	60-85	42,257,600,000	RSD Majalaya
			LOS	3,55	3,76		3,72		3,91		6 - 9		6 - 9		
			TOI	1,93	2		0,63		0,03		1-3		1-3		
1.02.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR	0	82,01	21,468,017,500	85,91	25,289,814,400	85	17,933,730,257	85	24,000,000,000	85	24,000,000,000	RSD Soreang
			LOS	0	3,73		3,17		3		3		3		
			TOI	0	0,81		0,55		0,55		0,55		0,55		
1.02.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR	0	54,87	4,239,425,734	68,88	7,117,986,416	62,4	5,502,483,813	60-85%	5,602,483,813	60-85%	15,121,785,600	RSD Cicalengka
			LOS	0	2,81		2,9		2,88		6,9		6,9		
			TOI	0	2,34		1,33		1,8		1 - 3		1 - 3		
1.02.17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase produk olahan makanan dan minuman yang telah sertifikasi layak edar.	13%	32%	163,125,000	52%	143,498,000	65%	135,513,000	81%	145,013,000	90%	146,000,000	Dinkes
1.02.19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan	100%	100%	439,550,000	100%	511,636,000	100%	515,330,000	100%	515,330,000	100%	872,000,000	Dinkes
1.02.19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan kesehatan RS	-	1:53	15,000,000	10%	16,664,000	13%	26,086,800	11%	26,086,800	10%	50,000,000	RSD Cicalengka
1.02.20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	998,540,000	100%	1,144,950,000	100%	900,600,000	100%	1,450,000,000	100%	1,155,800,000	Dinkes
1.02.21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan	72	83	614,065,000	76	467,656,500	77	685,000,000	80	685,000,000	85	693,000,000	Dinkes

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)												
1.02.21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rata-rata Persentase Layanan air bersih di kecamatan	-	-	-	-	-	-	20	10,000,000	25	11,000,000	Kecamatan	
1.02.22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Desa/kecamatan mengalami wabah dan KLB penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	4.208.724.900	100	3.712.888.550	100	3.983.099.550	100	3.748.206.500	100	3.995.000.000	Dinkes
1.02.22			AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (org)	2	2		2		2		3		3		Dinkes
1.02.22			Penemuan Penderita Pneumonia Balita (%)	74,18	86		86		86		86		90		Dinkes
1.02.22			Penemuan Pasien Baru TB/BTA Positif (%)	82,16%	80		82		84		86		90		Dinkes
1.02.22			Penemuan Penderita Diare (%)	88%	100		100		100		100		100		dinkes
1.02.22			Cakupan desa/kecamatan UCI (Universal Child Imunisasi)	80%	61,59		91,3		86		88		90		dinkes
1.02.23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas yang memenuhi standar (%)	100	100	1,346,947,000	100	1,513,225,000	100	888,285,500	100	695,000,000	100	1,585,388,000	Dinkes
1.02.23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase proses penilaian akreditasi RS versi 2012	0	10	98,975,000	30	30,850,000	40	37,020,000	90	37,020,000	100	50,000,000	RSD Cicalengka
1.02.24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota (%)	20	20	35,644,813,676	40	46,006,556,204	60	32,578,640,039,38	80	25,418,538,431	100	30,000,000,000	Dinkes

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.24			Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin(%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinkes
1.02.24			Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin(%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	dinkes
1.02.25		Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas Puskesmas Pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar (%)	36	47	6,790,500,000	52	13,792,757,400	61	10,035,323,500	71	9,292,380,200	81	12,100,000,000	Dinkes
			Persentase pemenuhan perlengkapan dan sarana prasarana puskesmas Puskesmas pembantu dan jaringannya (%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-
1.02.26		Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain	377	106	4,394,260,000	44	11,033,125,700	11	17,158,681,700	< 10	-	< 10	-	RSD Majalaya
1.02.19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan kesehatan RS	-	2500	49,000,000	2700		3600		4000		5000		RSD Soreang
1.02.26		Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain	-	331	1,557,834,600	876		900	9,853,851,436	800	-	800	-	RSD Soreang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab	
					2011		2012		2013		2014		2015			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.26		Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain	-	985	8,812,058,446	1007	15,737,442,395	403	8,197,300,857	400	9,495,415,674	400	15,440,364,452	RSD Cicalengka	
1.02.27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi (%)	25%	12%	165,000,000	0%	399,106,900	20%	470,531,262	40%	494,714,722	50%	935,015,124	RSD Soreang	
			Baku mutu limbah cair RS													
			1. BOD	30	30,5		59,3		35,2		30		30			
			2. COD	80	53,76		104,6		62,08		80		80			
			3. TSS	50	17		16		55		50		50			
4. PH	6,9	6,68	7	7,29	7	7										
1.02.27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi (%)	-	20%	172,285,320	46%	399,106,900	63%	470,531,262	80%	494,714,722	80%	935,015,124	RSD Cicalengka	
			Baku mutu limbah cair RS													
			1.BOD		34,5		28		38,5		< 30		< 30			
			2.COD		13,6		49,4		67,97		<80		<80			
			3.TSS		18		20		11		<30		<30			
4.PH		7,48	7,71	7,36	6 - 9	6 - 9										
1.02.27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi (%)	18,50%	-	246,000,000	-	399,106,900	-	470,531,262	95	494,714,722	95	935,015,124	RSD Majalaya	
			Baku mutu limbah cair RS													
			1.BOD	5,8	< 30		< 30		< 30		< 30		< 30			
			2.COD	16	< 80		< 80		< 80		< 80		< 80			
			3.TSS	12	< 30		< 30		< 30		< 30		< 30			
4.PH	6,4	6 - 9	7,36	7,36	6 - 9	6 - 9										
1.02.28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan puskesmas dengan tenaga dokter dan paramedic (%)	72	80	1,764,540,000	90	2,622,106,360	100	5,305,120,720	100	4,178,160,000	100	3,900,000,000	Dinkes	
1.02.28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%)	52,6	41,58	215,023,500	55		63,90		70		80		RSD Majalaya	
1.02.28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%)	0	0	320,259,500	0		0		0		0		RSD Soreang	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%)	-	49	129,411,500	59	175,149,000	63	113,999,000	70	136,798,800	80	236,314,560	RSD Cicalengka
1.02.30		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	8	8	72,545,000	8	48,531,500	11	50,000,000	11	50,000,000	12	55,000,000	Dinkes
1.02.32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kabupaten (%)	80,1	80,33	1,095,520,000	87.12	1,547,540,500	87	1,909,669,000	88	2,000,000,000	90	2,300,000,000	Dinkes
1.02.32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rata-rata Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetensk ala Kecamatan (%)	0	0		0		0		85		90	1,300,000,000	Kecamatan
1.11.16		Program Penguatan Kelembagaan Pengaruhutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan/ anak korban kekerasan KDRT yang mendapat pelayanan penanganan pengadilan	17%	16%	254,520,000	14%	331,269,900	13%	275,000,000	12%	700,000,000	11%	770,000,000	BKBPP
1.11.18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Desa binaan P2WKSS skala Kabupaten	10%	20%	62,000,000	40%	107,901,900	60%	250,000,000	80%	250,000,000	100%	260,000,000	BKBPP
1.11.18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rata-rata Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi)						2 - 3	376,112,000	2 - 3	436,500,000	2 - 3	435,600,000	Kecamatan
1.11.17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan partisipasi	42%	45%		50%	164,613,050	60%	180,000,000	65%	300,000,000	70%	310,000,000	BKBPP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			perempuan dan anak												
1.12.15		Program Keluarga Berencana	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun	7%	42%	1,587,966,000	390%	1,623,457,115	250%	1,225,000,000	4%	1,480,000,000	35%	1,635,000,000	BKBPP
1.12.15		Program Keluarga Berencana	laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurut kelahiran (%)	2,56	2,65		1,65		1,52		1,48		1,45		BKBPP
1.12.15			Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif	60%	65%		74%		79%		68%		70%		BKBPP
1.12.15			Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	21%	15%		12%		9%		8%		7%		BKBPP
1.12.15			Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	5%	18%		20%		26%		25%		30%		BKBPP
1.12.15			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan	50%	60%		75%		90%		95%		100%		BKBPP
1.12.15			Pencapaian Akseptor Aktif	81%	93%	195,185,400	0		0		0		0		BKBPP
1.12.16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan pembinaan remaja dan kegiatan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi	25%	35%	141,000,000	50%	154,823,640	65%	270,000,000	85%	300,000,000	90%	350,000,000	BKBPP
1.12.17		Program pelayanan kontrasepsi						134,820,885							
1.12.18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa	80%	82%	366,019,000	85%	518,714,172	87%	520,000,000	90%	750,000,000	95%	760,000,000	BKBPP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.12.21		Program peningkatan penanggulangan narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan remaja yang rentan terhadap pengguna narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	30%	45%	22,000,000	60%	77,807,174	75%	75,000,000	85%	75,000,000	90%	75,000,000	BKBPP
1.12.22		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan penyediaan alat dan media informasi pengasuhan dan tumbuh kembang anak	25%	35%		50%	37,700,000	75%	217,680,000	85%	50,000,000	90%	60,000,000	BKBPP
1.12.23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita	Cakupan anggota BKB ber KB	38%	45%	70,660,000	47%	232,658,000	65%	250,000,000	60%	250,000,000	70%	300,000,000	BKBPP
		Program Keluarga Sejahtera	Cakupan pasangan usia subur peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang Ber KB	48%	62%		66%		73%		80%		87%		BKBPP
1.13.15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rata-rata Keluarga Fakir Miskin (PMKS) yang di tangani mampu memiliki kemandirian (ekonomi)	4%	4,07%	518,904,500	4,22%	1,189,000,000	4,53%	2,267,182,000	4,90%	2,408,600,000	5,50%	3,240,000,000	Dinsos
1.13.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rata-rata PMKS mampu mengurus diri sendiri dan menghadapi situasi kritis	1,19%	1,73%	453,821,750	4,28%	1,908,197,500	6,22%	1,510,953,924	9,59%	2,802,000,000	14,43%	3,510,000,000	Dinsos
1.13.17		Program pembinaan anak terlantar	Rata-rata anak yang di tangani mampu mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni	1,83%	2,18%	107,100,000	3,26%	307,965,000	4,54%	455,000,000	7,40%	1,150,000,000	10,26%	1,890,000,000	Dinsos

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.13.18		Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma	Rata-rata penyandang cacat yang ditangani berfungsi secara fisik	1,38%	2,59%	193,070,500	7,90%	633,894,000	14,59%	713,130,000	25,73%	1,196,400,000	39,45%	2,160,000,000	Dinsos
1.13.19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS	24%	34%	79,425,000	44%	254,227,500	54%	497,500,000	60%	51,000,000	76%	110,000,000	Dinsos
1.13.20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana PSK narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial	74,50%	10,84%	141,525,000	21,02%	347,500,000	34,23%	188,261,500	50,34%	375,000,000	70,71%	131,250,000	Dinsos
1.13.21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	34,80%	0	653,374,250	8,29%	1,512,230,500	13,82%	2,018,761,535	20,00%	1,945,413,400	28,06%	Rp 2,050,000,000	Dinsos
1.13.21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rata-rata Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	250	130.000.000	-	-	-	-	Kecamatan	
1.17.15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan	10	10	688,510,880	15	14,965,391,000	20	24,447,109,000	25	28,567,500,000	30	1,567,500,000	Dikbud
1.17.16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	289,000,000	15	3,575,000,000	20	4,445,000,000	25	1,045,000,000	30	1,045,000,000	Dikbud
1.17.17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan	10	10	321,000,000	15	768,137,000	20	1,175,803,000	25	947,250,700	25	947,250,700	Dikbud

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.17.17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rata-rata Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan tingkat Kecamatan (jenis)	-	-	-	-	-	-	2 - 5	25,000,000	2 - 5	25,000,000	Kecamatan	
1.18.15		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Jumlah data potensi Pemuda berprestasi	0	337	50.000.000	353	1,242,582,000	371	67,894,400	390	110.000.000	409	200,000,000	Dispopar
			Jumlah data potensi KUPP (kelompok Usaha Pemuda Produktif)		288		302		317		333		350		
			Jumlah data potensi pemuda bekerja		355.063		372.816		391.456		411.029		431.581		
1.18.16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor pembangunan	-	240,000,000	925,420,000	420,000,000	495,000,000	650,000,000	Dispopar					
1.18.17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah yang mengikuti penyuluhan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda bagi : Pemuda pelajar Usia 16 - 30 th, FKWM dan FIKR (orang)	-	155 org	300 org	250,000,000	300 org	400,000,000	500 org	275,000,000	600 org	300,000,000	Dispopar	
1.18.17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rata rata Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan per tahun (kali)	-	-	-	-	-	12	15,290,000	12	15,290,000	Kecamatan		
1.18.16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rata-rata Jumlah Pemuda berprestasi kala Kecamatan	-	-	20,000,000	5 - 10	334,955,000	5 - 10	354,255,000	5 - 10	367,600,000	Kecamatan		
1.18.19		Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah cabor per kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi pelaporan (cabor)	-	32	200,000,000	34	4,566,325,750	37	310,000,000	40	5,032,500,000	42	150,000,000	Dispopar

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.18.20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi	-	703	750,000,000	716	1,599,891,000	722	1,262,475,000	723	1,375,000,000	725	2,050,000,000	Dispopar
			Tk. Nasional	-	65		78		80		85		90		
			Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk	-	408 klub		408 klub		420 klub		432 klub		445 klub		Dispopar
1.18.20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rata-rata Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan	-	-		-		5 - 10	560,958,000	5 - 10	778,900,000	5 - 12	810,200,000	Kecamatan
1.18.21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung olahraga per 10000 penduduk (gedung)	-	1543 gedung	1,246,786,000	1590 gedung	20,748,959,400	1640 gedung	4,735,105,600	1689 gedung	24,897,500,000	1739 gedung	52,500,000,000	Dispopar
1.18.21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rata-rata Jumlah Gedung Olah Raga Tingkat Kecamatan												Kecamatan
1.26.21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pempustaka (pengunjung pengguna anggota non anggota) yang terlayani oleh jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung (orang)	15.000	14800	527,374,000	15.000	999,502,249	12.500	878,000,000	14.000	635,417,000	15.000	762,500,400	Bapapsi
			Jumlah koleksi buku perpustakaan	13.728 Judul	14.100 Judul		20.285 Judul		20785 Judul		21.535 Judul		21.535 Judul		
Jumlah Misi 2						586,111,977,668		611,676,315,115		449,843,856,316		367,231,207,275		410,605,432,408	
Misi 3 Memantapkan pembangunan perdesaan															
1.04.16	Meman-tapkan pembangunan perdesaan	Program lingkungan sehat perumahan	Presentase layanan air bersih di pedesaan pola pemberdayaan	9,96%	11%		12%		14%		20%		27%		Dispertasih
			Akses aman terhadap sanitasi pola pemberdayaan	51%	52%		54%		56%		58%		60%		Dispertasih
1.04.15		Program pengembangan perumahan	Presentase rumah layak huni pola pemberdayaan	85 %	85,52 %		85,52 %		85,65 %		85,77 %		85,89 %		Dispertasih

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.22.17	Memantapkan pembangunan perdesaan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pendampingan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (PNPM dan PPIP)	0	0	0	1 paket	1,134,500,000	1 paket	656,500,000	1 paket	722,150,000	1 paket	794,365,000	Dispertasih
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Kegiatan pembangunan desa yang melibatkan peranserta masyarakat		857,587,500		1,411,500,000		2,474,213,900		2,550,438,765		3,060,526,518	BPMPD	
1.22.15		Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Presentase jalan desa kondisi baik	30%	50%	1,402,672,500	60%	2,321,500,000	70%	6,174,501,152	72%	4,196,678,168	75%	5,016,013,802	BPMPD
			Presentase rumah layak huni	35%	50%		60%		70%		75%		85%		BPMPD
			Presentaselayanan air bersih di pedesaan	35%	50%		60%		70%		70%		70%		BPMPD
			Presentaserumah tangga yang mengakses MCK	35%	50%		60%		70%		70%		70%		BPMPD
			Persentase desa yang mengangutsa mpahdarisumber ke TPS	30%	45%		55%		65%		65%		65%		65%
1.22.15		Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rata-rata Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	40%	435,940,000	50%	565,500,000	60%	602,200,000	Kecamatan
1.22.18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Desa Swasembada	0	0	155,515,000	0	4,659,100,500	0	656,345,000	0 - 1	911,250,000	0 - 2	1,093,500,000	BPMPD
			Jumlah Desa Swakarya	0	0		7		7		10		12		BPMPD
1.22.18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Rata Jumlah Desa Swakarya					8		12		7		Kecamatan	
			- Rata-rata jumlah Desa Swasembada				0		0 - 1		0 - 2		657,936,800		
1.22.16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Desa Swasembada	0	0	50,000,000	0	67,500,000	0	155,000,000	1	87,750,000	2	105,300,000	BPMPD
			Jumlah Desa Swakarya	0	0		7		7		10		12		BPMPD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab	
					2011		2012		2013		2014		2015			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.22.16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rata-rata Jumlah kelembagaan ekonomi perdesaan tingkat kecamatan (Lembaga)					5 - 7	4,250,000	6 - 8	15,000,000	8 - 10	15,000,000	Kecamatan		
1.21.16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan/ Perkebunan	Rata-rata jumlah jenis tanaman pangan yang dikonsumsi masyarakat tingkat kecamatan (jenis)							2 - 3	15,000,000	2 - 3	15,000,000	Kecamatan		
1.21.16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan/ Perkebunan	Persentase Jumlah ketersediaan pangan utama (skor PPH)	96,80%	96,80%	816,653,000	95,90%	1,760,509,850	98,40%	2,540,500,000	99,20%	2,030,000,000	100%	3,207,400,000	BKP3	
			Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH)	73,90%	73,90%		73,90%		79,10%		84,30%		89,60%		BKP3	
			Terlaksananya Cadangan pangan pemerintah daerah (ton)	-	-		-		30		60		60		BKP3	
2.01.15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok)	1,59	1,59	1,180,649,000	1,68	2,372,148,950	1.888	Rp1,916,334,233	2,080	1,267,500,000	2.119	1,474,990,000	BKP3	
			Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP:													BKP3
			1 Sayuran	1	1				2		3		3			
			2, Tan Hias	0	0				1		1		1			
3 Buah-buahan	0	0				1		1		1						
1.22.19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rata-rata Jumlah perempuan pelaku ekonomi produktif (orang)	-	-	-	-	-	-	50 - 150	15,000,000	50 - 150	15,000,000	Kecamatan		
2.01.19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				5 unt	200,000,000	90 org	60,000,000	8 kali	218,000,000	10 kali	218,000,000	BKP3		

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.01.18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				40,000,000	30 org	348,750,000	240 org	133,900,000	12 org	65,300,000	24 org	78,360,000	BKP3
1.19.15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah personil yang siap diturunkan pada tahapan pra, saat dan pasca bencana	0	200		250		250	109,250,000	250	109,250,000	250	109,250,000	BPBD
1.22.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah personil kebencanaan yang memiliki keahlian penanggulangan bencana	0	40		200		250	200,000,000	250	200,000,000	250	200,000,000	BPBD
Jumlah Misi 3						4,503,077,000		14,275,509,300		16,017,224,285		13,596,804,933		16,662,842,120	
Misi 4 Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah															
1.19.15	Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan Perda	10%		910,000,000		5,163,181,014	60%	6,784,031,014	65%	7,026,031,014	70%	2,256,156,054	Satpol PP
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan perda	100%	100%	4,062,648,000	100%	1,450,460,000	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
1.19.16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patrol petugas (kali/minggu)	1	1	740,000,000	1	799,600,000	1	794,200,000	7	2,294,200,000	7	2,304,200,000	Satpol PP
1.19.16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	2,5 % (100 orang tercapai 100 %)	2,5 % (100 orang tercapai 100 %)	232,111,000	20 % (800 orang tercapai 100 %)	1,138,115,000	25 % (1000 orang tercapai 100 %)	2,236,273,450	25 % (1000 orang)	2,914,273,450	25 % (1000 orang)	2,914,273,450	Kesbangpol
1.19.16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rata-rata persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	-	-	-	-	-	50%	844,399,500	60%	2,217,705,000	65%	2,205,705,000	Kecamatan
1.19.18		Program pengembangan wawasan kebangsaan	persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	3,2 % (100 orang tercapai 100 %)	3,2 % (100 orang tercapai 100 %)	178,175,000	16,11 % (500 orang tercapai 100 %)	518,830,050	25,80 % (800 orang tercapai 100 %)	935,767,000	25,80 % (800 orang)	935,767,000	25,80 % (800 orang)	935,767,000	Kesbangpol

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.19.18		Program pengembangan wawasan kebangsaan	tentang wawasan kebangsaan Rata-rata persentase jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)	-	-	-	-	25%	742,300,000	27,5%	876,100,000	30%	902,740,000	Kecamatan	
1.19.20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Presentase Penegakan peraturan daerah yang dilakukan	20%	30%	34,000,000	30%	50,000,000	40%	50,000,000	50%	50,000,000	60%	60,000,000	Satpol PP
1.19.21		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	2,9 % (100 orang tercapai 100 %)	2,9 % (100 orang tercapai 100 %)	119,075,000	14,70 % (500 orang tercapai 100 %)	527,731,500	26,47 % (900 orang tercapai 100 %)	1,321,920,000	26,47 % (900 orang)	1,321,920,000	26,47 % (900 orang)	1,321,920,000	Kesbangpol
1.19.22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	persentase terbanyaknya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang linmas	50 % (60 orang tercapai 100 %)	50 % (60 orang tercapai 100 %)	35,031,000	50 % (60 orang tercapai 100 %)	46,800,000	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
1.19.22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Anggota Linmas (org)	5,520	5,520		5,520		5,560	50,000,000	5,560		5,560		Satpol PP
Jumlah Misi 4						6,311,040,000		9,694,717,564		13,758,890,964		17,635,996,464		12,900,761,504	
Misi 5 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah															
1.03.15	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase penambahan panjang jalan kabupaten	Jalan Lingkar Banjaran (Tembus Bojongsereh) sepanjang 0,550 Km	0%	834,666,000	0%	15,563,342,900	0%	20,750,750,500	25,71 % (pengadaan lahan)	40,500,000,000	60 % (pengadaan lahan)	46,600,000,000	Bina Marga
1.03.16	Keterpaduan Tata Ruang Wilayah	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari banjir	41 Lokasi	34,20%	5,350,000,000	41,36%	9,139,550,000	54,95%	24,250,757,500	63,52%	6,600,000,000	78,56%	30,700,000,000	Bina Marga

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.16		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rata-ratapersentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong tingkat kecamatan	-	-		30%	241,855,000	35%	1,074,480,500	40%	1,541,100,000	45%	1,594,110,000	Kecamatan
1.03.17		Program Pembangunan turap/tahud/brojong	Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari longsor	55 Lokasi	25,57%	4,923,000,000	30,11%	13,248,775,000	38,64%	6,311,100,000	47,16%	8,016,000,000	64,20%	65,040,000,000	Bina Marga
1.03.17		Program Pembangunan turap/tahud/brojong	Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari longsor						50%	51.000.000	50%		50%	51.000.000	Kecamatan
1.03.15		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan Kabupaten; 1.sedang 2.baik Persentase kondisi jembatan baik	20,36% 19,83% 35,77% 35,77% 21,36% 32,34%	19,83% 35,77% 35,77% 32,34%	89,006,996,000	20,17% 43,34% 43,16%	140,479,446,528	15,80% 48,78% 56,22%	119,964,534,218	14,36% 54,78% 62,44%	162,601,421,303	12,86% 60,78% 67,41%	267,351,000,000	Bina Marga
1.03.15		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang) kabupaten lingkup kecamatan	-	-		45%	50,000,000	50%	1,967,341,000	55%	2,165,000,000	60%	2,244,700,000	Kecamatan
1.03.20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	presentase ketersediaan data kondisi jalan kabupaten	-	54%	750,000,000	63%	695,612,000	65%	700,000,000	68%	606,301,750	72%	1,000,000,000	Bina Marga
1.03.22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase ketersediaanda a daerah milik jalan, utilitas, dan penggunaan damija	-	54%	250,000,000	63%	243,450,000	65%	500,000,000	68%	250,018,000	72%	500,000,000	Bina Marga
1.03.23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	presentase ketersediaan alat berat untuk menunjang kegiatan kebinamargaan (%)	-	4,56	3,050,000,000	9,82	6,548,580,000	12,8	4,561,552,805	18,76	2,000,000,000	24, 10	6,200,000,000	Bina Marga

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	presentase penataan pedestrian kawasan strategis dan cepat tumbuh di 7 wilayah	-	0	500,000,000	42,73	2,496,175,000	44,21	1,900,000,000	46,37	1,700,000,000	49,58	4,700,000,000	Bina Marga
1.03.24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kabupaten yang sudah ada	58,5	60	11,684,173,750	63,33	13,095,742,250	66,67	16,968,736,139	70	13,140,630,735	73,3	13,350,000,000	SDAPE
1.08.17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100,000,000													
1.03.28		Program pengendalian banjir	Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	0,1	0,12	4,175,275,000	0,61	3,412,894,250	1,43	4,325,045,000	2,18	3,206,642,804	3,56	3,875,000,000	SDAPE
1.03.26		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	11,76	17,65	550,000,000	23,53	729,760,000	35,29	740,940,000	82,35	1,500,000,000	100	1,500,000,000	SDAPE
2.03.17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	3,18	8,93	1,568,250,000	14,15	1,929,044,450	20,34	1,911,252,000	27,84	3,090,369,200	37,84	2,450,000,000	SDAPE
1.04.15		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85 % (707,600 unit)	85,52 % (711,486 unit)	11,096,332,150	85,52 % (711,486 unit)	19,007,246,750	85,65 % (712,626 unit)	19,597,564,600	85,77 % (713,626 unit)	6,928,350,000	85,89 % (714,626 unit)	7,038,900,000	Dispertasih
			Persentase luas permukaan yang tertata	81,84%	87,22%		87,22%		88,22%		89,22%		90,22%		
1.04.15		Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata Cakupan ketersediaan rumah layak huni lingkup kecamatan	-	-	-	-	-	55%	8.400.000.000	60%	-	70%	-	Kecamatan
1.04.16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan	9,96%	11%	4,870,450,000	12%	8,217,541,490	14%	7,042,493,390	20%	13,140,356,200	27%	14,454,391,820	Dispertasih

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Akses aman terhadap sanitasi	51%	52%		54%		56%		58%		60%		Dispertasih
1.04.17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah pembinaan kelompok pengelola air bersih dan sanitasi (Kelompok)	135	155	295,890,000	175	250,000,000	195	247,825,000	215	272,607,500	235	299,868,250	Dispertasih
1.04.20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk	1:25	1:18	98,075,000	1:19	150,000,000	1:25	300,000,000	1:27	330,000,000	1:29	363,000,000	Dispertasih
1.05.15		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	9,73 (6 RDTR + 1 RTRW)	12,51(8R DTR + 1 RTRW)	1.838.888.500	12,51(8R DTR + 1 RTRW)	1.183.400.000	13,90 (9RDTR + 1 RTRW)	2.001.125.000	23,76 (9RDTR+ 1RTRW)	1.127.112.500	35,69 (10RDTR +1RTRW)	1.187.323.750	Bappeda
1.05.15		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	29,03% (9 RDTR)	29,03% (9 RDTR)	1.289,250,000	29,03% (9 RDTR)	700,000,000	35,48% (11 RDTR)	1.126,125,000	38,71% (12 RDTR)	602,112,500	41,94% (13 RDTR)	662,323,750	Dispertasih
1.05.16		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase rencana tapak yang disahkan	100% (64 SP)	100% (87 SP)	646,925,000	95 % (98 SP)	1,120,001,500	93% (98 SP)	650,000,000	100% (110 SP)	715,000,000	100% (115 SP)	786,500,000	Dispertasih
1.05.17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase bangunan ber-IMB	0,30 % (3,514 unit)	0,58 % (4,754 unit)		2,43 % (21,045 unit)	178,522,500	5 % (22,097 unit)	1,168,125,000	6 % (23,423 unit)	1,691,305,000	8 % (25,297 unit)	1,860,435,500	Dispertasih
1.05.17			Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang [%].	12,31	12,44		12,71		12,82		13,02		13,27		Dispertasih
1.06.18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah informasi mengenai sarana prasarana di kawasan strategis (dok)	-	-	-	-	-	1 dok	461,100,000	1 dok	307,210,000	1 dok	337,931,000	Dispertasih

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.07.16		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian (populasi 4.000 unit)	33,33%	33,33%	285,000,000	33,33%	546,210,000	33,33%	356,580,000	33,33%	605,000,000	33,33%	130,000,000	Dishub
			Persentase pengelolaan terminal angkutan penumpang	66,67%	66,67%		66,67%		66,67%		66,67%		66,67%		66,67%
1.07.17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten	38,52%	38,52%	970,000,000	38,52%	1,241,961,000	38,52%	2,018,727,000	38,52%	2,365,000,000	38,52%	2,295,000,000	Dishub
1.07.15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang	1:12	1:12	458,000,000	1:19	1,363,804,800	1:15	1,703,156,336	1:15	750,000,000	1:15	8,165,000,000	Dishub
			VCR dan LoS	VCR = 0,84 LoS = D	VCR = 0,84 LoS = D		VCR = 0,84 LoS = D	VCR = 0,84 LoS = D	VCR = 0,84 LoS = D	VCR = 0,84 LoS = D	VCR = 0,84 LoS = D	VCR = 0,84 LoS = D	Dishub		
1.07.15		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase pengelolaan terminal angkutan penumpang	66,67%	66,67%		66,67%	-	66,67%	-	66,67%	500,000,000	66,67%	26,100,000,000	Dishub
			Persentase ketersediaan halte pada wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	0,37%	0,37%		0,37%		1,10%		1,47%		2,57%		Dishub
1.07.19		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata daripada rambu-rambu, marka, dan guadrill)	0,35%	1,19%	491,000,000	3,04%	2,699,276,000	4,24%	1,251,270,000	5,99%	1,400,000,000	7,70%	1,670,000,000	Dishub
			Jumlah penanganan kasus kecelakaan lalu lintas (kasus/tahun)	230	539		461		248		248		248		

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			VCR dan LoS (rata-rata)	VCR 0,84 LoS D	VCR 0,84 LoS D		VCR 0,84 LoS D		VCR 0,82 LoS D		VCR 0,79 LoS D		VCR 0,75 LoS D		
1.07.15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Presentase PJU terpelihara	Pemeliharaan PJU 4000 TC	11,04	3,150,000,000	15,98	7,250,000,000	22,09	10,900,000,000	24,35	4,500,000,000	26,67	10,000,000,000	Bina Marga
			Persentase PJU yang terbangun	Pembangunan PJU 700 TC	2,6		6,9		22,61		32,5		35,33		Bina Marga
1.07.20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	99,83%	95,84%		92,03%	-	100%	79,430,000	100%	385,000,000	100%	300,000,000	Dishub
1.25.15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pengendalian komunikasi dan informasi	40%	40%	120,000,000	40%	-	75%	-	75%	100,000,000	75%	50,000,000	Dishub
Jumlah Misi 5						146,962,921,400		251,182,191,418		254,703,885,988		282,034,424,992		522,143,160,320	
Misi 6 Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing															
2.01.18	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok Yang terbina melalui penyuluh (kelompok)	1,59	1,59	206,000,000	1,68	60,000,000	1,888	548,600,000	2,08	369,500,000	2,119	359,500,000	BKP3
2.01.20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan	233 org	200 org	884,500,000	379 org	804,950,000	192 org	697,060,000	213 org	234,000,000	213 org	234,000,000	BKP3
2.05.22		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan (org)	1	12	85,728,000	197	-	10	23,100,000	12	59,400,000	24	71,280,000	BKP3
2.01.21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	16	16	578,429,250	20	1,086,260,000	24	1,057,298,550	28	900,000,000	32	1,371,415,000	Disnakan
			Meningkatnya status kesehatan hewan (%)	58,75	60		62,5		63,75		65		66,25		Disnakan
2.01.22		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong	7,87	26,97	2,085,777,000	45,69	3,893,702,500	68,16	4,200,571,000	85,02	2,370,725,000	100	4,325,000,000	Disnakan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			peningkatan produksi hasil peternakan (%)												
2.01.23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)	22	33	435,645,000	40	405,000,000	48	353,290,000	58	437,000,000	70	550,719,000	Disnakan
2.01.24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	240	141	1,936,064,500	167	3,392,800,000	118	1,974,983,334	78	1,374,000,000	82	2,170,000,000	Disnakan
			Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	55,45	61,72		63,54		63,95		68,59		77,18		Disnakan
2.05.20		Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)	32	72	1,369,067,000	126	1,387,937,900	186	5,026,855,500	241	1,467,160,000	296	1,330,000,000	Disnakan
			Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (orang)	0	17		34		49		69		94		Disnakan
2.05.24		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas)	0	0	135,560,000	3	233,860,000	3	159,590,000	6	195,000,000	9	212,960,000	Disnakan
			Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum (lokasi)	5	11		18		27		38		50		Disnakan
2.05.23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (dst,..)	Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)	14	23	356,675,000	35	483,790,000	50	346,845,000	70	435,000,000	95	445,885,000	Disnakan
1.15.15		Program penciptaan iklim	Jumlah pelaku UMKM (unit)	6,375	7,218	169,200,00	7,894	150,000,000	8,109	175,000,00	8,672	200,000,00	9,236	225,000,00	Diskoperindag

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab									
					2011		2012		2013		2014		2015											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah tenaga kerja UMKM (org)	28.957	57.120		61,088		34,043		35,962		37,480		Diskoperindag									
			Jumlah omzet UMKM (trilyun Rp.)	3,021	3,084	0	3,084,		3,145	0	3,208	0	3,272	0	Diskoperindag									
1.15.15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rata-rata jumlah pelaku UMKM Tingkat Kecamatan (unit usaha)	-	-		-		15 -20		32,732,000		20 -25		30,000,000	25 - 35	30,000,000	Kecamatan						
1.15.16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaku UMKM	6,375	7,218		1,027,421,500		7.894		1,053,087,000		8,109		1,377,600,550		8,672		1,060,000,000	9,236	1,360,000,000	Diskoperindag		
			Jumlah tenaga kerja UMKM	28,957	57,120		60,120		34,0430		35,962		37,480		Diskoperindag									
1.15.17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal	55 Sertifikasi	75 sertifikasi		195,106,000		60 Sertifikasi		144,617,500		100 Sertifikasi		315,445,950		100 Sertifikasi		220,000,000		100 Sertifikasi		370,000,000	Diskoperindag
1.15.18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi	1,524	1,562				1,593		1,613		1,633		1,653						1,653		604,000,000	Diskoperindag
			Jumlah koperasi aktif	790	839		286,220,000		871		321,325,000		871		319,174,000		906		538,000,000		940		Diskoperindag	
2.06.15		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Tingkat fasilitas advokasi perlindungan konsumen (putusan)	0	0		195,000,000		10		290,645,000		35		186,495,250		40		615,000,000		40		480,000,000	Diskoperindag
2.05.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang dan jasa (\$ juta)	456,85	511,34		150,350,000		833,67		543,450,000		821,02		267,345,500		903,12		135,000,000		993,43		695,650,417	Diskoperindag
2.06.18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata (unit pasar)	8	2		4,458,337,500		3		20,258,553,500		2		9,300,391,775		2		4,245,000,000		2		1,430,000,000	Diskoperindag
2.07.15		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Omzet kecil/menengah (Rp. trilyun)	2,176	2,220		215,500,000		2,249		787,400,000		2,279		704,470,000		2,347		1,437,000,000		2,418		1,100,000,000	Diskoperindag
2.07.16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah (unit IKM)	3,460	4,210		627,725,000		4,239		610,917,000		4,450		886,660,000		4,500		632,000,000		4,550		622,500,000	Diskoperindag
2.07.17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Omzet Koperasi (Rp.Milyar)	3,021	3,084		485,542,500		3,084		1,065,000,000		3,145		640,605,000		3,208		1,035,000,000		3,272		265,000,000	Diskoperindag

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.18		Program Penataan Struktur Industri	Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah (unit IKM)	4,118	4,210	75,638,000	4,239		4,450	95,350,000	4,500		4,550	55,000,000	Diskoperindag
2.07.19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah potensi produk unggulan IKM (unit IKM)	98	22	50,000,000	40	112,650,000	80	75,000,000			88		Diskoperindag
2.06.19		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah lokasi PKL yang sudah ditata (unit pasar)			-	2	225,000,000	2	136,200,000	2	320,000,000	2	60,000,000	Diskoperindag
2.06.19		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Rata-rata Persentase Jumlah PKL yang terdata dan dibina dikecamatan						60%	7,000,000	70%		80%		Kecamatan
2.01.17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura					1,034,300,000							Distanbunhut
			jumlah kelompok usaha yang bermitra (Kelompok)	0	0		1		2		3		5		Distanbunhut
2.01.19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya SDM penyuluh pertanian pada produksi pertanian/perkebunan (org/kali)					-	90		8		10		BKP3
2.04.15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata (juta orang)	4,60	5,12	210,000,000	5,64	404,600,000	6,23	1,024,000,000	6,90	1,155,000,000	7,62	1,270,500,000	Dispopar
2.04.16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata (lokasi)	-	40	820,000,000	45	1,709,000,000	50	1,585,000,000	55	1,342,000,000	60	1,443,200,000	Dispopar
2.04.17		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)	1,049	1,124	140,000,000	1,224	575,000,000	1,312	735,000,000	1,442	522,500,000	1,572	502,150,000	Dispopar
1.16.15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Ijin yang diterbitkan utk.20 jenis kewenangan (dokumen/lbr)	8,127	10,208	1,109,850,000	7,581	1,266,480,000	8,200	1,250,000,000	8,200	1,250,000,000	8,200	1,380,000,000	BPMP
			Nilai Investasi (Rp. Milyar)	82,318	215,4		152,256		170		170		190		BPMP
			Jumlah Investor PMA	29 (PMA / PMDN)	37		38		39		39		41		BPMP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Investor PMDN		38	0	38	0	38	0	40	0	41	0	
1.16.16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMA/PMDN sektor Usaha (P,S,T) (Rp. Trilyun)	0,354	3.692	6,302	6,500	6,600	6,700	6,850	6,900	6,950	7,000	7,050	BPMP
1.16.15			Jumlah Investor PMA (unit)	29	37	38	39	40	41	42	43	44	45	BPMP	
			Jumlah Investor PMDN (unit)		38	38	38	38	38	38	38	38	38		
			Jumlah Ijin yang dikeluarkan (dokumen)	-	2.194	3.121	4.800	4.850	5.000						
1.16.17		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah Potensi Investasi (jenis Usaha P,S,&T)	11	18	12	14	15	16	17	18	19	20	BPMP	
			Nilai Investasi (Rp.Trilyun)	1,200	2.050	3,692	3,700	3,800	4,000						
1.14.15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	3,712,598,000	-	3,068,312,790	-	19,086,541,920	-	10,225,000,000	11%	16,293,200,000	Disnaker
			Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	90%	91%		92%		93%		94%		95%	Disnaker	
1.14.16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	83%	84,50%	1,204,455,000	86%	2,955,121,880	87,50%	5,307,062,875	89%	5,788,897,500	90,50%	6,691,140,000	Disnaker
			Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	45%	-	50%	-	55%	-	60%	-	65%	-	Disnaker
1.14.17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	7%	14%	923,275,000	21%	2,201,932,995	28%	3,350,113,550	35%	1,982,703,000	42%	2,275,745,000	Disnaker
			- Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta progra	52%	52%		53%		54%		55%		56%	Disnaker	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			m jamsostek												
			- Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	29%	32%		35%		38%		41%		43%		Disnaker
			- Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	51%		52%		53%		54%		55%		Disnaker
2.08.17		Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	150	35	200,000,000	40	257,080,000	25	230,000,000	25	240,000,000	25	250,000,000	Disnaker
1.21.16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah pencapaian produktivitas komoditas Padi (kw/ ha)	61,19	61,20	6.125.145.493	63,66	6.526.341.905	63,75	7.319.164.000	64,14	8.348.352.815	64,56	10.223.188.097	Distanbunhut
			Jumlah pencapaian produktivitas komoditas Palawija (kw/ha)	107,97	107,54		108,18		108,22		108,67		108,88		
2.01.18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)	1,97	1,98	2.094.250.000	2,01	2.601.775.000	2,1	4.635.606.000	2,29	3.584.874.000	2,3	3.873.361.000	Distanbun hut
2.01.19		Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura:			1.413,739,130		2.162,700,000		4.375,560,046		2.049,767,000		2.459,720,400	Distanbunhut
			a. Sayuran (kw/ha)	193,02	196,96		198,13		204,07		210,19		216,50		
			b. Buah-buahan (kw/ha)		50,70	98,00	100,00	102,00	104,00						
			c. Tanaman hias (tangkai/ha)		13,25	13,53	16,81	17,14	17,48						
			d. Tanaman obat (kg/m ²)		2,89	3,07	3,13	3,19	3,25						
			Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas perkebunan												
			a. Kopi (ton/ha)	1,160	1,175	1,190	1,190	1,190	1,195						
			b. Teh (ton/ha)	1,983	1,982	2,050	2,220	2,350	2,500						
c. Cengkeh (ton/ha)	0,220	0,084	0,205	0,900	0,215	0,220									
d. Tembakau (ton/ha)	0,864	0,882	0,892	0,892	0,950	1,000									
2.01.15		Program Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura (kelompok)	0	5	427,500,000	9	281,000,000	20	484,000,000	30	380,000,000	40	456,000,000	Distanbunhut

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.01.17		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	jumlah unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil(kelompok)	5	9	813,633,980	16	1.034.300.000	27	893,820,000	33	1.096.044.000	49	1,071,960,000	Distanbunhut
Jumlah Misi 6						33,301,760,853		60,843,154,970		84,102,218,300		50,944,492,315		60,783,372,595	
Misi 7 Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menetapkan Pembangunan Berkelanjutan															
1.08.17	Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menetapkan Pembangunan Berkelanjutan	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Jumlah Penyuluh kehutanan pada perlindungan dan konservasi hutan (orang)	0	-	162,047,500	-	181,000,000	-	177,500,000	21	207,000,000		207,000,000	BKP3
1.08.17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luas Hutan Rakyat (ha)	650	715	-	2,335	64,616,349	4,745	143,100,000	7,910	144,531,000	12,925	173,437,200	Distanbunhut
1.08.15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah kelompok tani berbasis AUK/agroforestry (kelompok)	30	30	-	35	300,000,000	40	349,057,000	45	528,260,000	50	633,912,000	Distanbunhut
2.02.16		Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)	2,33	10,28	2,523,750,000	32,86	3,433,803,500	40,22	4,232,192,000	47,58	1,521,099,000	54,94	1,825,318,800	Distanbunhut
2.03.15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Prosentase luasan pertambangan berijin (%)	81,56	88,74	787,600,000	89,77	335,520,220	90,65	1,163,561,000	91,56	925,000,000	92,48	625,000,000	SDAPE
2.03.16		Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap bulan (m3/sumur)	15,785,10	17,016,37	413300000	16,954,97	489,911,000	16,885,17		16,675,00	850,000,000	16,660,00	600,000,000	SDAPE
			Prosentasi ketersediaan peta zonasi kerentanan gerakan tanah	37,5	50		62,5		75		87,5		100		SDAPE
1.06.15		Program pengembangan data/informasi	Persentase wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun system data dan informasi kebencanaan daerah	0%	25%		50%		100%		100%	1,000,000,000	100%	600,000,000	BPBD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung	0	0	10	135,000,000	20		31	240,000,000	31	240,000,000	BPBD	
1.19.22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase bantuan logistic dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana	0%	75%	1,160,000,000	100%	825,000,000	100%	770,000,000	100%	4,498,500,000	100%	2,640,000,000	BPBD
			Jumlah Kecamatan yang telah melakukan mitigasi bencana	0	5		15		31		31		31		BPBD
1.19.22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rata rata Persentase penanganan kejadian bencana alam					50%	436,340,000	55%	564,300,000	60%	606,100,000	Kecamatan	
1.06.19		Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	0%	80%		100%	475,000,000	100%	367,500,000	100%	600,000,000	100%	500,000,000	BPBD
1.04.18		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana	0%	100%	225,000,000	0%		100%		100%		100%	BPBD	
1.04.19		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30%	30,06%	1,236,972,500	48%	3,207,125,000	50%	2,037,734,370	60%	2,241,507,807	65%	2,465,658,588	Dispertasih
			Peningkatan Capaian Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	20%	20%		27%		30%		40%		50%		Dispertasih
1.04.19			Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	35%	40%		58%		60%		65%		75%	Dispertasih	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.19			Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000liter pada WMK	30%	30%		37%		40%		45%		65%		Dispersasi
1.08.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan sampah	10,46%	11,36%	9,946,840,850	13,26%	14,951,931,300	15,16%	10,351,139,000	19,06%	10,809,342,500	22%	11,890,276,750	Dispersasi
			Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk (unit)	23	42		42		45		65		70		Dispersasi
			Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk	1:15	1:18,9		1:16,5		1:15,4		1:14,4		1:13,6		Dispersasi
1.08.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rata-rata Cakupan pelayanan pelayan sampah skala kecamatan	-	-	-	-	-	25%	682,200,000	30%	754,800,000	35%	776,600,000	Kecamatan
1.08.24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Presentase luas RTH perkotaan	0,10%	0,11%	814,425,000	0,10%	1,394,902,500	0,12%	2,608,925,000	0,12%	1,247,500,000	0,12%	1,372,250,000	Dispersasi
1.08.24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rata-rata persentase pengelolaan RTH Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	75%	739,690,000	80%	670,200,000	85%	668,900,000	Kecamatan
1.03.27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				175,000,000									Dispersasi
1.08.19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jenis dokumen yang dapat diakses	2	2	150,000,000	2	100,000,000	3	170,000,000	5	450,000,000	5	500,000,000	BPLH
1.08.20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji	48%	55%	595,000,000	60%	444,000,000	65%	492,000,000	75%	1,650,000,000	80%	2,000,000,000	BPLH

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah sarana pengolahan limbah yang dibangun pemerintah	1	0	-	0	-	5		0		2		BPLH
1.08.16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase Cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/ijin lingkungan	20%	20%	860,000,000	20%	730,000,000	20%	1,730,000,000	20%	2,735,000,000	20%	2,800,000,000	BPLH
			Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	42%	45%		50%		55%		60%		65%		BPLH
1.08.16			Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	87,50%	90%		90%		90%		90%		90%		BPLH
1.08.16			Persentase kegiatan penertiban pelanggaran hukum lingkungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BPLH
1.08.16			Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BPLH
1.08.16			Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	3	3	-	0		1		2		1		BPLH
1.08.16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana kebersihan								71 unit	1,748,000,000	71 unit	1,922,800,000	Dispertasih
1.08.17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas tanah (ha) untuk produksi biomassa yang dipantau status kerusakannya	0	600	440,000,000	800	300,000,000	1	397,000,000	1,2	850,000,000	1,5	800,000,000	BPLH
1.08.17			Jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas	300	540		540		540		540		540		BPLH

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Kode-ring	Misi	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kab, Bandung Tahun Ke-										SKPD Yang Bertanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.08.17			Jumlah lubang resapan biopori yang dibuat masyarakat	2	7	7	7	7	7	7	7			BPLH	
Jumlah Misi 7						19,489,935,850		27,367,809,869		26,847,938,370		34,235,040,307		33,847,253,338	
Jumlah Total (1+2+3+4+5+6+7)						860,132,218,071		1,061,846,021,998		943,301,835,343		860,585,527,296		1,164,100,352,451	

Bab IX

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraannya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Dari aspek tersebut diperoleh data primer dari kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah serta hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya. Dengan hal tersebut maka untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 dapat dicapai, sebagaimana disajikan pada tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Daerah Tahun 2011 – 2015

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	I.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	I.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)					
	I.1.1.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung (Jutaan Rupiah)					
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	3.978.936,25	4.518.784,28	5.139.864,55	5.859.509,81	6.671.659,37
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	642.359,10	686.014,49	762.887,38	840.647,27	916.249,04
3	Industry Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	30.116.379,01	32.915.231,13	36.073.543,97	39.743.476,24	43.754.063,50
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Supply</i>	824.630,98	954.918,90	1.040.494,07	1.143.032,60	1.267.973,75
5	Bangunan/ <i>Konstruksi/ Construction</i>	852.508,61	947.236,94	1.080.385,70	1.272.277,79	1.500.243,98
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and Restaurant</i>	8.920.233,69	10.436.027,24	12.247.559,22	14.088.691,37	16.219.933,06

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport and Communication</i>	2.159.485,64	2.374.097,92	2.672.585,98	2.986.489,67	3.319.839,92
8	Keuangan, persewaan dan Jasa perusahaan/	990.504,14	1.123.606,62	1.275.492,46	1.448.042,21	1.616.093,52
9	Jasa-jasa/ <i>Services</i>	2.806.725,22	3.115.489,15	3.592.640,93	4.120.182,16	4.712.124,09
10	Total	51.291.762,64	57.071.406,68	63.885.454,24	71.502.349,11	79.978.180,23
	I.1.1.3 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam DRB atas Dasar Harga Berlaku (HB) Kabupaten Bandung (%)					
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	7,76	7,92	8,05	8,19	8,34
2	Pertambangan dan penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,25	1,20	1,19	1,18	1,15
3	Industry pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	58,72	57,67	56,47	55,58	54,71
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Suly</i>	1,61	1,67	1,63	1,60	1,59
5	Bangunan/ <i>Konstruksi/ Construction</i>	1,66	1,66	1,69	1,78	1,88
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and Restaurant</i>	17,39	18,29	19,17	19,70	20,28
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport and Communication</i>	4,21	4,16	4,18	4,18	4,15
8	Keuangan, ersewaan dan Jasa perusahaan/	1,93	1,97	2,00	2,03	2,02
9	Jasa-jasa/ <i>Services</i>	5,47	5,46	5,62	5,76	5,89
10	Total	100	100	100	100	100
	I.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan Per Kapita dan Inflasi					
1	Pendapatan Perkaita pertahun (Rp)	15.852.245	17.255.692	18.374.882	20.032.446	21.823.511
	I.1.3 Indikator Makro					
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988	3.351.048	3.401.984	3.452.333	3.502.392
2	Laju pertumbuhan penduduk (%)	2,65	1,65	1,52	1,48	1,45
3	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,94	6,15	6,03	6,06	6,09
4	Inflasi PDRB(%)	5,04	4,82	5,58	5,53	5,44
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	51.291.762,64	57.071.406,68	63.885.454,24	71.502.349,11	79.978.180,23
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta rupiah)	23.026.237,14	24.443.222	25.913.128,77	27.482.879,78	29.154.664,56
7	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	292.155	277.806	267.776	257.756	247.738
8	Laju Pertumbuhan Investasi (%) (LPE Bangunan)	8,10	5,04	6,06	8,13	7,77
9	IPM	75,01	75,24	75,44	75,46	75,89
10	Indeks Pendidikan	75,10	75,46	85,20	85,34	85,47
11	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	8,62	8,67	8,72	8,77	8,82
12	Angka Melek Huruf (%)	98,48	98,69	98,73	98,77	98,81
13	Angka Harapan Hidup (Thn)	70,06	70,28	70,39	70,50	70,61
14	Indeks AHH/ Kesehatan	75,10	75,46	75,65	75,83	76,02
15	Indeks Daya Beli	65,13	65,21	65,53	65,85	66,17
16	Daya Beli (rupiah)	641.810	642.190	643.570	644.950	646.330
	I.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat					
	I.2.1 Perkembangan Angka Melek Huruf					
1	Angka Melek Huruf (%)	98,48	98,69	98,73	98,77	98,81
2	Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	8,62	8,67	8,72	8,77	8,82
3	Angka Partisipasi Murni SD	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67
4	Angka Partisipasi Murni SMP	81,42	81,71	82,08	82,53	83,06
5	Angka Partisipasi Murni SMA	41,60	41,75	41,94	42,25	42,65
7	Angka partisipasi Kasar SD	104,35	104,37	104,42	104,49	104,58
8	Angka partisipasi Kasar SMP	91,57	91,58	91,59	91,60	91,61
9	Angka Partisipasi Kasar SMA	54,15	54,36	54,69	55,13	55,68
	I.2.2 Kondisi Ketenagakerjaan					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	53,05	53,58	54,11	54,65	55,20
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki	77,85	78,63	79,42	80,21	81,02
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	28,01	28,29	28,57	28,86	29,15
4	Kesempatan Kerja	89,25	90,14	91,04	91,95	92,87
5	Kesempatan Kerja laki-Laki	91,19	92,10	93,02	93,95	94,89
6	Kesempatan Kerja Perempuan	83,79	84,63	85,48	86,33	87,19
7	Pengangguran laki-laki	10,50	10,39	10,28	10,17	10,06
8	Pengangguran Perempuan	17,68	17,5	17,32	17,14	16,96
	I.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
	I.3.1 Perkembangan Seni, budaya dan olah raga					

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah grup Kesenian	1.193	1.388	1.583	1.778	1.973
2	Jumlah gedung Kesenian	1	2	2	2	3
3	Jumlah klub Olah raga per 10.000 penduduk	7,98	9,99	12	14,01	16,02
4	Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk	1,342	1,413	1,484	1,555	1,626
B. ASPEK PELAYANAN UMUM						
II.1 Fokus Layanan Urusan Wajib						
II.1.1 Pendidikan						
II.1.1.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
1	APS SD/MI (%)	99,67	99,77	99,87	99,97	99,98
2	APS SMP/MTs	92,13	93,05	93,98	94,92	95,87
3	APS SMA/MA/SMK (%)	43,5	45,6	48,0	50,6	53,4
II.1.1.2 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah						
1	Rasio SD/MI (Jumlah sekolah terhadap warga penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun)	1 : 273	1 : 286	1 : 298	1 : 311	1 : 323
2	Rasio SMP/MTs (Jumlah sekolah terhadap warga penduduk kelompok usia 13– 15 tahun)	1 : 440	1 : 476	1 : 482	1 : 487	1 : 491
3	Rasio SMA/MA/SMK MTs (Jumlah sekolah terhadap warga penduduk kelompok usia 16-18 tahun)	1 : 672	1 : 660	1 : 650	1 : 640	1 : 632
II.1.1.3 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan						
1	Rasio Guru terhadap Murid (SD/MI)	1:25	1:23	1:22	1:21	1:20
2	Rasio Guru terhadap Murid (SMP/MTs)	1:20	1:21	1:22	1:23	1:24
3	Rasio Guru terhadap Murid (SMA/MA)	1:14,52	1:15,01	1:15,49	1:15,98	1:16,47
II.1.1.4 Rasio guru per kelas rata-rata						
1	Rasio Jumlah Guru per Kelas SD/MI	1:1,5	1:1,6	1:1,7	1:1,8	1:1,9
2	Rasio Jumlah Guru per Kelas SMP/MTs	1 : 2,6	1 : 2,6	1 : 2,5	1 : 2,5	1 : 2,5
3	Rasio Jumlah Guru per Kelas SMA/MA	1 : 3,1	1 : 2,9	1 : 2,8	1 : 2,7	1 : 2,6
II.1.1.5 Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan						
1	Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik SD/MI	60,11	61,91	63,71	65,50	67,28
2	Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik SMP/MTs	73,247	74,114	74,981	75,848	76,715
3	Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik SD SMA/MA (%)	69,696	67,677	65,658	63,639	61,62
II.1.1.6 Persentase Siswa Jenjang						
1	Persentase Siswa Jenjang (%) TK/RA	21,32	22,33	23,33	24,34	25,34
II.1.1.7 Jumlah Siswa Putus Sekolah						
2	Angka Putus Sekolah (Persentase) SD/MI	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
3	Angka Putus Sekolah (Persentase) SMP/MTs	0,36	0,30	0,24	0,19	0,15
4	Angka Putus Sekolah (Persentase) SMA/MA	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21
II.1.1.8 Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan						
1	Angka Kelulusan Siswa (Persentase) SD/MI	97,76	97,87	97,98	98,10	98,20
2	Angka Kelulusan Siswa (Persentase) SMP/MTs	96,45	97,36	98,16	98,88	99,52
3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase) SMA/MA	87,17	88,55	88,75	93,25	78,45
II.1.1.9 Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan						
1	Persentase Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke jenjang Smp/MTs	95,807	96,009	96,211	96,413	96,615
2	Persentase Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke jenjang SMA	64,01	64,76	64,81	65,14	65,43
II.1.1.10 Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 berdasarkan Jenjang Pendidikan						
1	Persentase Jumlah Guru Berpendidikan >= S1(SD/MI)	50,75	53,75	56,35	58,62	60,61
2	Persentase Jumlah Guru Berpendidikan >= S1(SMP/MTs)	84,98	86,65	88,17	89,55	90,82
3	Persentase Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 (SMA/MA)	93,75	92,76	91,93	91,21	90,59

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.1.2 Kesehatan					
	II.1.2.1 Jumlah Posyandu dan Balita					
1.	Jumlah posyandu	4.187	4.324	4.461	4.598	4.736
2.	Jumlah balita	283.372	283.121	282.870	282.619	282.368
3.	Rasio	1 : 68	1 : 66	1 : 63	1 : 62	1 : 60
	II.1.2.2 Puskesmas, Poliklinik dan Pustu					
1	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 52.380	1 : 52.922	1 : 53.488	1 : 54.080	1 : 54.698
2	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	1 : 10.030	1 : 10.110	1 : 10.225	1 : 10.345	1 : 73.295
3	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 47.142	1 : 47.704	1 : 48.968	1 : 49.573	1 : 50.202
4	Rasio Puskesmas per Kecamatan	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
	II.1.2.3 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk					
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	3	4	4	4	4
2.	Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk	1 : 366.655	1 : 338.703	1 : 347.678	1 : 356.933	1 : 366.477
	II.1.2.4 Dokter					
1.	Rasio Dokter persatuan penduduk	1 : 8.397	1 : 7.663	1 : 7.095	1 : 6.222	1 : 6.243
	II.1.2.5 Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan					
1	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	82,61	83,18	83,70	84,17	84,61
	II.1.2.6 Persentase Balita Gizi Baik dan buruk Gizi					
1	Persentase Gizi Baik	99,32	99,38	99,45	99,51	99,57
2	Persentase Gizi Buruk	0,69	0,62	0,56	0,50	0,43
	II.1.3 Pekerjaan Umum					
	II.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan					
1	Proporsi Kondisi Baik (%)	34,78	42,78	48,78	54,78	60,78
2	Proporsi Kondisi Sedang (%)	18,86	17,36	15,86	14,36	12,86
3	Proporsi Kondisi Rusak (%)	25,11	22,61	20,11	17,61	15,11
4	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	19,26	17,26	15,26	13,26	11,26
	II.1.3.1 Rasio Jaringan Irigasi					
1.	Rasio Jaringan Irigasi thd luas lahan budibudaya	1:39	1:41	1:43	1:45	1:47
	II.1.4. Perumahan Rakyat					
	II.1.4.1 Persentase Luas Permukiman yang Tertata					
1	Persentase luas permukiman yang tertata	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63
	II.1.4.2 Permukiman layak huni dan rumah layak huni					
1	Rasio rumah layak huni	1 : 21,4350	1 : 20,8841	1 : 20,3450	1 : 19,8175	1 : 19,3014
	II.1.4.3 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih					
1	Persentase penduduk berakses air bersih	93,753	95,071	96,389	97,707	99,025
	II.1.4.4 Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar)					
1	Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar)	100,804	101,983	103,162	104,341	105,52
	II.1.4.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum					
1	Rasio TPU persatuan penduduk	21.47	23.67	25.87	28.07	30.27
	II.1.4.6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran					
1	Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran	30,06%	40,09%	50,11%	60,13%	70,15%
2	Rasio mobil damkar thd luas kab bandung (km2)	1 : 25,177	1 : 22,030	1 : 19,582	1 : 17,624	1 : 16,022
3	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wil. Manajemen Kebakaran	37%	45%	50%	60%	70%
	II.1.5. Penataan Ruang					
	II.1.5.1 Persentase Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan					
1.	Persentase bangunan ber-IMB	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15
	II.1.6. Perencanaan Pembangunan					
	II.1.6.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan					
1.	Keberadaan Dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	√	√	√	√	√
2.	Keberadaan Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	√	√	√	√	√
3.	Keberadaan Dokumen RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	√	√	√	√	√

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.1.7. Perhubungan					
	II.1.7.1 Rasio Ijin Trayek					
1.	Rasio Izin Trayek	1 : 1.374	1 : 1.411	1 : 1.448	1 : 1.487	1 : 1.526
	II.1.7.2 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum diKabupaten Bandung					
1	Persentase Mobil penumpang umum	33,69	38,88	43,33	47,19	56,72
2	Persentase Mobil bus terhadap penumpang	38,82	30,10	27,43	25,42	23,85
3	Persentase Mobil barang yang sudah KIR	93,41	93,55	93,67	93,78	93,87
4	Persentase Kereta tempelan yg sudah KIR	100	100	100	100	100
5	Prosentase Jumlah Kendaraan yang sudah memiliki KIR	76,87	78,29	79,49	80,51	82,93
	II.1.7.3 Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas					
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata daripada rambu-rambu, marka, dan guadrill)	1,19%	3,04%	4,24%	5,99%	7,70%
2.	Persentase PJU yang terbangun	2,6	6,9	22,61	32,5	35,33
	II.1.8. Lingkungan Hidup					
	II.1.8.1 Persentase Volume Sampah Yang Tertangani					
1.	Persentase Volume Sampah yang tertangani	11,36	13,26	15,16	19,06	22,0
	II.1.8.2 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk					
1.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	1 : 13.415	1 : 13.622	1 : 13.829	1 : 13.809	1 : 14.010
	II.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil					
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,65	1,65	1,52	1,48	1,45
	II.1.10.2 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah					
1	Cakupan Penertiban KK	63%	91%	94%	97%	100%
2	Cakupan penertiban KTP	70%	75%	93%	97%	100%
3	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	49%	60%	62%	65%	67%
4	Cakupan penerbitan akta kematian	0,95%	1,05%	1,22%	1,46%	1,71%
	II.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	II.1.11.1 Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah					
1.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1,844	1,851	1,857	1,863	1,787
	II.1.11.2 Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Swasta					
2.	Persentase pekerja perempuan di lembaga Swasta	1,844	1,851	1,857	1,863	1,869
	II.1.12. keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
	II.1.12.2 Rasio akseptor KB					
3	Rasio Akseptor KB	78,86	79,09	79,74	80,26	81,00
	II.1.13. Sosial					
1	Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian	4,07	4,22	4,53	4,9	5,5
2	Rasio Pemeluk Islam thd Masjid	1:335	1:245	1:245	1:245	1:245
3	Rasio Pemeluk Kriteria thd gereja	1:2195	1:3491	1:3491	1:3491	1:3491
4	Rasio Pemeluk Hindu thd pura	1:824	1:2384	1:2384	1:2384	1:2384
5	Rasio Pemeluk budha thd vihara	1:1390	1:2518	1:2518	1:2518	1:2518
	II.1.14. Ketenagakerjaan					
	II.1.14.1 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja					
1	Rasio daya serap tenaga Kerja	1 : 321	1 : 292	1 : 266	1 : 277	1 : 231
	II.1.14.2 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Laki-laki					
1	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	60,7	60,86	61,02	61,18	61,34
	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	11,15	9,11	7,07	5,03	2,99
	II.1.14.3. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Perempuan					
1	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	55,18	55,74	56,3	56,86	57,42
2	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	14,56	13,84	13,12	12,4	11,68

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1	Persentase koperasi aktif	50,18	49,61	50,19	50,45	50,75
	II.1.16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
1	PMDN	38	38	38	40	41
2	PMA	37	38	39	39	41
3	Total	75	76	77	79	82
	II.1.16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)					
1	Nilai Persetujuan Investasi (Rp. Trilyun)	3,692	6,302	6,500	6,600	6,700
2	Jumlah Realisasi Proyek (Rp. Milyar)	215,4	152,256	170	170	190
	II.1.17. Kebudayaan					
	II.1.17.1 Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya					
1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	37	37	37	37	37
	II.1.17.2 Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan					
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	15	20	25	30
	II.1.18. Kepemudaan dan Olahraga					
	II.1.19.1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk					
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1 : 25.385	1 : 23.852	1 : 22.431	1 : 21.373	1 : 20.360
	II.1.19.2 Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk					
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	1 : 598	1 : 409	1 : 419	1 : 431	1 : 442
	II.1.19.3 Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan					
1	Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan	1:15	1:30	1:30	1:30	1:30
	II.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.					
	II.1.20.1 Persentase Penduduk Miskin					
1	Angka Kemiskinan (%)	8,99	8,32	8,02	7,72	7,42
2	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)	91,01	91,68	91,98	92,28	92,58
	II.1.20.2 Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA					
1.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100	100	100	100	100
2.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	100	100	100	100	100
	II.1.20.3 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik					
	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Baik					
1	Total Jumlah Kantor Desa	267	268	268	270	270
	II.1.20.4 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat					
1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat :	√	√	√	x	x
	II.1.21. Ketahanan Pangan					
	II.1.21.1 Ketersediaan Pangan Utama					
1	Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (%)	73,9	73,90	79,10	84,30	89,60
	II.1.21.2 Regulasi Ketahanan Pangan					
1	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :	√	√	√	√	√
2.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada :	√	√	√	√	√
	II.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	II.1.22.1. Kelompok Binaan LPM					
1	Persentase kelompok Binaan LPM	100	100	100	100	100
	II.1.22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK					

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
2	Persentase kelompok Binaan PKK	0,05	0,08	0,06	0,07	0,07
II.1.23. Statistik						
Ketersediaan Dokumen Statistik						
1	PDRB					
	- Kabupaten	√	√	√	x	√
	- Kecamatan	x	x	x	x	√
2	IPM (add. SUSEDA)	√	√	√	x	√
3	Suseda	√	√	x	x	x
4	KBDA / Data Pokok Perencanaan	√	√	√	√	√
5	Indeks Gini Ratio	x	x	x	x	x
6	Input Output	x	x	x	x	x
7	IKM	√	√	√	x	x
8	IHK	x	x	x	x	x
II.1.24. Kearsipan						
II.1.24.1 Pengelolaan Arsip secara Baku						
1	Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	100	100	100	100	100
II.1.24.2 Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu						
2	Persentase SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	75,95	82,28	88,61	94,94	100
II.1.25. Komunikasi dan Informatika						
II.1.25.1. Jumlah Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informasi						
1	Jumlah sistem informasi yang ada	50	50	52	55	60
2	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	7	8	9	10	12
3	Jumlah radio komunikasi yang aktif	7	7	8	9	11
II.1.25.1 Jumlah surat kabar nasional/lokal						
4	Total Surat kabar (1+2)	5	5	5	5	5
II.1.25.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal						
5	Total penyiaran radio/TV lokal	27	24	21	18	15
II.1.26. Perpustakaan						
II.1.26.1 Jumlah perpustakaan						
1	Perpustakaan Umum	277	277	277	277	277
2	Perpustakaan Khusus	8	8	8	8	8
3	Perpustakaan Sekolah	102	102	102	102	102
4	Perpustakaan Ibadah	1	1	1	1	1
5	Perpustakaan Masyarakat	15	15	26	26	26
II.1.26.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	14.800	15.000	12.500	14.000	15.000
II.1.26.3 Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan						
1	Jumlah Judul Buku	14.100	20.285	20.785	21.535	21.535
II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan						
II.2.1. Pertanian						
II.2.1.1 Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan						
1	Produktivitas (kw/ha) Padi	61,20	63,66	63,75	64,14	64,56
2	Produktivitas (kw/ha) Palawija	107,54	108,18	108,22	108,67	108,88
3	Produktivitas (kw/ha) Sayuran	196,96	198,13	204,07	210,19	216,50
4	Produktivitas (kw/ha) Buah-buahan	50,70	98,00	100,00	102,00	104,00
5	Produktivitas (tangcai/M ²) Tanaman Hias	13,25	13,53	16,81	17,14	17,48
6	Produktivitas tanaman obat (Kg/M2)	2,89	3,07	3,13	3,19	3,25
7	Produktivitas tanaman Perkebunan Kopi (ton/ha)	1,175	1,190	1,190	1,190	1,195
8	Produktivitas tanaman Perkebunan Teh (ton/ha)	1,982	2,050	2,220	2,350	2,500
9	Produktivitas tanaman Perkebunan Cengkeh (ton/ha)	0,084	0,205	0,900	0,215	0,220
10	Produktivitas tanaman Perkebunan Tembakau (ton/ha)	0,882	0,892	0,892	0,950	1,000
II.2.1.3 Konsumsi daging, telur dan susu						
1	Konsumsi Daging (kg/kapita/th)	11.16	13.34	14.85	16.55	18.21
2	Konsumsi Telur(kg/kapita/th)	3.12	3.63	4.23	4.89	5.54
3	Konsumsi Susu(kg/kapita/th)	8.53	9.05	9.1	9.14	9.19
II.2.2. Kehutanan						
II.2.2.1 Persentase Hutan dan Lahan						

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kritis yang Direhabilitasi					
1	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Rusak	7.41	7.99	8.69	9.52	10.52
	II.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral					
	II.2.3.1 Persentase Pertambangan Tanpa Izin					
1	Persentase luasan pertambangan berijin (%)	88,74	89,77	90,65	91,56	92,48
	II.2.4. Pariwisata					
	II.2.4.1 Kunjungan wisata					
1	Jumlah obyek wisata	40	45	50	55	60
2	Jumlah kunjungan wisata (juta org kunj.)	5,12	5,64	6,23	6,90	7,62
3	Rata-rata kunjungan per obyek wisata	128.000	125.333	124.600	125.455	127.000
	II.2.5. Perikanan					
	II.2.5.1 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan					
1	Target Produksi Ikan (ton)	8.777	9.391	10.049	10.752	11.505
2	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	21.1	22.58	24.14	25.8	27.6
	II.2.5.2 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB					
	II.2.6. Perdagangan					
	II.2.6.1 Ekspor Perdagangan					
1	Nilai Ekspor (juta \$)	511,34	833,67	821,02	903,12	993,43
	II.2.6.2 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB					
1	Kontribusi Sektor Perdagangan :					
2	Kontribusi Sektor Perdagangan : ADH Berlaku	5.112.043,55	6.005.197,93	6.780.385,11	4.432.799,60	5.112.043,56
3	Kontribusi Sektor Perdagangan : ADH Konstan	2.819.715,78	2.994.763,37	3.211.263,100	2.625.092,41	2.819.715,79
4	Jumlah PDRB :					
5	Jumlah PDRB : ADH Berlaku (jutaan rupiah)	51.330.838,66*	57.750.624,07*	62.971.737,44-64.565.968,64*	69.445.932,42-72.090.917,10*	76.224.917,51-80.133.887,64*
6	Jumlah PDRB : ADH Konstan	18.683.930,05	19.673.732,62	20.529.643,25	17.640.170,11	18.683.930,06
8	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan thd PDRB ADH Berlaku	17.356	17.840	18.324	18.808	19.292
9	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan thd PDRB ADH Konstan	16.054	16.295	16.536	16.778	17.019
10.	Perda mengenai perlindungan konsumen barang dan jasa					
11.	Presentase jumlah pedagang yang dibina					
12.	Jumlah Sarana dan prasarana pasar					
	II.2.7. Perindustrian					
	II.2.7.1 Pertumbuhan Industri					
1	Jumlah Industri :	100	122	144	166	188
2	Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi	7,218	7,894	8,109	8,672	9,236
3	Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi	4,210	4,239	4,450	4,500	4,550
	C. ASEK DAYA SAING DAERAH					
	III.1 Kemampuan Ekonomi Daerah					
	III.1.1. Produktivitas total daerah (Jutaan Rupiah)					
1	PDRB	51.291.762,64	57.071.406,68	63.885.454,24	71.502.349,11	79.978.180,23
2	Pertanian	3.978.936,25	4.518.784,28	5.139.864,55	5.859.509,81	6.671.659,37
3	Pertambangan & Pengalihan	642.359,10	686.014,49	762.887,38	840.647,27	916.249,04
4	Industri Pengolahan	30.116.379,01	32.915.231,13	36.073.543,97	39.743.476,24	43.754.063,50
5	Listrik, Gas & Air bersih	824.630,98	954.918,90	1.040.494,07	1.143.032,60	1.267.973,75
6	Konstruksi	852.508,61	947.236,94	1.080.385,70	1.272.277,79	1.500.243,98
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	8.920.233,69	10.436.027,24	12.247.559,22	14.088.691,37	16.219.933,06
8	Pengangkutan & Komunikasi	2.159.485,64	2.374.097,92	2.672.585,98	2.986.489,67	3.319.839,92
9	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	990.504,14	1.123.606,62	1.275.492,46	1.448.042,21	1.616.093,52
10	Jasa-jasa	2.806.725,22	3.115.489,15	3.592.640,93	4.120.182,16	4.712.124,09
	III.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
	III.2.1 Aksesibilitas daerah					
	III.2.1.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
	III.2.1.2 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan					
1	Panjang Jalan (km)	1.155,35	1.155,35	1.155,35	1.155,35	1.155,35
2	Jumlah Kendaraan : Roda 4	28.496	28.525	28.553	28.582	28.610
3	Jumlah Kendaraan : Roda 2	281.760	315.145	348.530	381.915	415.300
4	Total Jumlah Kendaraan :	310.256	343.670	377.083	410.497	443.910
5	Rasio Jumlah Kendaraan	1 : 269	1 : 298	1 : 326	1 : 355	1 : 384
	III.2.4 Ketersediaan air bersih					
	Jumlah Rumah Tangga yang menggu-					

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	nakan air bersih	893.615	942.244	990.873	1.039.502	1.088.131
2	Jumlah Rumah Tangga	957.188	999.082	1.040.977	1.082.871	1.124.766
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	93,36	94,31	95,19	95,99	96,74
III.2.5 Fasilitas listrik dan telepon						
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik						
1	RT dengan daya 450 watt	215.294	215.656	216.017	216.379	216.740
2	RT dengan daya 900 watt	126.750	127.016	127.281	127.547	127.812
3	RT dengan daya 1.300 watt	88.994	89.180	89.367	90.553	99.739
4	RT dengan daya 2.200 watt	59.164	69.753	70.406	75.477	76.169
5	RT dengan daya > 2.200 watt	48.542	48,644	48,746	48,847	48,949
6	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	538.686	550.249	551.817	558,803	569.409
III.2.6 Ketersediaan restoran						
Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)						
1	Jenis Usaha Restoran	67,2	77,4	87,6	97,8	108
2	Jenis Usaha Rumah Makan	538,2	564,9	591,6	618,3	645
III.2.7. Ketersediaan penginapan						
1	Hotel Bintang 5					
2	Hotel Bintang 4	1	1	1	1	1
3	Hotel Bintang 3	3	3	3	3	3
6	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	27	27	27	27	27
7	Total Jumlah penginapan/Hotel	31	31	31	31	31
III.3 Iklim Berinvestasi						
III.3.1. Angka kriminalitas						
1	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	0	0
2	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	0	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	0	0	0
4	Jumlah kasus Penganiayaan	0	0	0	0	0
5	Jumlah kasus Pencurian	0	0	0	0	0
6	Jumlah kasus Penipuan	0	0	0	0	0
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	0	0	0	0	0
9	Jumlah Penduduk	3.299.988	3.351.048	3.401.984	3.452.333	3.502.392
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0	0	0	0	0
III.3.2. Jumlah Demonstrasi						
1	Bidang Politik	14,14285714	16,78571429	19,42857143	22,07142857	24,71428571
2	Ekonomi	18,7	21,9	25,1	28,3	31,5
3	Kasus pemogokan kerja	21,4	21,3	21,2	21,1	21
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	54,6	60,7	66,8	72,9	79
III.3.3. Kemudahan perijinan						
1	Lama mengurus (hari) SIUP	5	5	5	5	5
2	Jumlah persyaratan (dokumen) SIUP	6	6	6	6	6
3	Biaya resmi (rata-rata maks Rph) SIUP	30	30	30	30	30
4	Lama mengurus (hari) SITU	5	5	5	5	5
5	Jumlah persyaratan (dokumen) SITU	6	6	6	6	6
6	Biaya resmi (rata-rata maks Rph) SITU	400	400	400	400	400
7	Lama mengurus (hari) TDP	5	5	5	5	5
8	Jumlah persyaratan (dokumen) TDP	5	5	5	5	5
9	Biaya resmi (rata-rata maks Rph) TDP	20	20	20	20	20
10	Lama mengurus (hari) IUI	14	14	14	14	14
11	Jumlah persyaratan (dokumen) IUI	10	10	10	10	10
12	IUI	75	75	75	75	75
13	Lama mengurus (hari) TDI	14	14	14	14	14
14	Jumlah persyaratan (dokumen) TDI	5	5	5	5	5
15	TDI	30	30	30	30	30
16	Lama mengurus (hari) IMB	60	60	60	60	60
17	Jumlah persyaratan (dokumen) IMB	12	12	12	12	12
18	IMB	8	8	8	8	8
19	Lama mengurus (hari) HO	5	5	5	5	5
20	Jumlah persyaratan (dokumen) HO	11	11	11	11	11
21	HO	300	300	300	300	300
22	Lama mengurus (hari) IPT	30	30	30	30	30
23	Jumlah persyaratan (dokumen) IPT	4	4	4	4	4
24	IPT	150	150	150	150	150
25	Lama mengurus (hari) Reklame	14	14	14	14	14
26	Jumlah persyaratan (dokumen) Lama mengurus (hari) Reklame	6	6	6	6	6
27	Lama mengurus (hari) Reklame	-	-	-	-	-

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Lama mengurus (hari) IPLC	14	14	14	14	14
29	Jumlah persyaratan (dokumen) Lama mengurus (hari) IPLC	13	13	13	13	13
30	Lama mengurus (hari) IPLC	6	6	6	6	6
31	Lama mengurus (hari) Jasa Konstruksi	5	5	5	5	5
32	Jumlah persyaratan (dokumen) Jasa Konstruksi	11	11	11	11	11
33	Lama mengurus (hari) Jasa Konstruksi	100	100	100	100	100
III.3.4. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)						
1	Jumlah Pajak Daerah	54.391.453,80	51.654.333,70	47.951.110.528,01	57.334.770.199,53	54.391.453.802,22
2	Pajak Hotel	2.013.001.546	521.130.207	481.269.352,01	1.630.296.849,98	2.013.001.546,92
3	Pajak Restoran	2.807.585.410	2.022.405.964	2.486.992.882,01	2.935.352.381,32	2.807.585.410,92
4	Pajak Hiburan	1.454.863.194	1.822.568.665	2.146.174.144,01	1.321.309.950,02	1.454.863.194,92
5	Pajak Reklame	1.745.262.742	1.818.712.879	1.599.992.419,01	1.948.182.431,27	1.745.262.742,52
6	Pajak Penerangan Jalan	41.035.282,80	41.035.282,80	41.035.282.809,04	41.035.282.809,05	41.035.282.809,06
7	Pajak Pengam-bilan dan Pengolahan Bahan Galian C	64.681.980,02	64.681.980,03	64.681.980,04	64.681.980,05	64.681.980,06
8	Pajak Parkir	32.774.500,01	76.224.400,01	136.716.942,01	34.097.900,02	32.774.500,02
9	Retribusi	44.750.349,78	6.067.479.245	40.870.885.107,01	40.907.499.229,34	44.750.349.784,99
10	Jumlah Retribusi Jasa Umum	33.210.256,24	29.122.980,49	32.380.883.654,01	30.401.111.973,02	33.210.256.240,02
11	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	1.609.269.878	1.840.236.134	1.324.125.975,02	1.609.269.878,02	1.840.236.134,02
12	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	9.215.967.569	5.335.228.868	6.649.765.319,01	8.235.804.618,34	9.215.967.569,99
III.3.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha						
1	Jumlah Perda terkait perijinan	2	3	4	5	6
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	4	4	4	4	4
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	1	1	1	1	1
III.3.6. Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa)						
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	276	269	273	269	266
2	Jumlah Desa/Keluarahan Swakarya	0	7	7	10	12
3	Jumlah Desa/Keluarahan Swasembada	0	0	0	1	2
4	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	276	276	280	280	280
5	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	0	0	0	0,3	0,7
III.4 Sumber Daya Manusia						
III.4.2 Tingkat ketergantungan						
1	Tingkat ketergantungan Penduduk	52,97	52,19	48,96	52,04	52,97
III.5. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan formal dan non formal						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD	104,35	104,37	104,42	104,49	104,58
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP	91,57	91,58	91,59	91,60	91,61
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP	81,42	81,71	82,08	82,53	83,06
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/PAKET C/PPS setara SMA	54,15	54,36	54,69	55,13	55,68
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/SMLB/PAKET C/PPS setara SMA	41,60	41,75	41,94	42,25	42,65
7	Angka Melek Huruf (AMH)	98,48	98,69	98,73	98,77	98,81
8	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,62	8,67	8,72	8,77	8,82
9	Indeks Pendidikan	75,10	75,46	85,20	85,34	85,47
10	IPM	75,01	75,24	75,46	75,46	75,89
11	APK SMA/SMLB/SMK	50,13	50,33	50,63	51,04	51,55
12	Persentase SMA/SMLB Yang Memiliki Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi	5	10	15	20	25
13	Persentase SMA/SMLB Yang Memiliki Laboratorium Multimedia	73,6644	75,1088	76,5532	77,9976	79,442
14	Persentase SMA SBI/RSBI	12,2808	12,5216	12,7624	13,0032	13,244
15	Persentase KAB/KOTA Memiliki SMA Berbasis Keunggulan Lokal	1	1	1	1	1
16	Persentase SMA/SMLB Berwawasan PUP3B	1	2	3	4	5
17	Persentase SMA/SMLB Menerapkan KTSP Dengan Baik	1	2	3	4	5

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Persentase SMK Memiliki Perpustakaan Yang Berbasis Multimedia	15	17	20	25	35
20	Persentase SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK	70,7166	72,1032	73,4898	74,8764	76,263
21	Persentase SMK Memiliki Laboratorium Sains Yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK	2	2	5	5	10
22	Persentase SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana	25	25	30	35	40
23	Persentase SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK	15,33	17,33	19,33	21,33	23,33
24	Persentase Memiliki SMK RSBI/SBI	1	1	2	2	2
25	Persentase E KAB/KOTA Dengan SMK Berbasis Keunggulan Lokal	0	1	1	3	3
26	Persentase SMK Berwawasan PUP3B	0	1	1	2	2
27	Persentase SMK Menerapkan KTSP Dengan Baik	40	50	70	80	90
28	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/9001:2008	1	1	2	2	2
29	Persentase SMK Berkemitraan Dengan Industri Kreatif	25	30	35	40	50
30	APK PAUD Non Formal	13,46	13,56	13,66	13,76	13,86
31	Persentase Satuan PAUD Nonformal Berakreditasi	0	2,5	5	7,5	10
32	APK Paket A	0,56	0,57	0,58	0,58	0,57
33	APK Paket B	3,75	3,75	3,73	3,74	3,75
34	APK Paket C	1,99	2,05	2,11	2,17	2,22
35	Persentase Buta Aksara > 15 Tahun	1,1	1,1	1,05	1,05	1
36	Persentase Kecamatan Yang Telah Memiliki PKBM	52	54	58	60	65
37	Persentase Kecamatan Yang Telah TBM	15	15	20	20	25
38	Persentase Remaja 16-35 Tak Sekolah Mengikuti PKH	0	0	0	0	0
39	Persentase KAB/KOTA Yang Telah Menyediakan Layanan Fasilitasi Homeschooling	0%	0%	0%	2%	2%
III.6. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
1	Persentase GURU TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S1/D.4	14,45	17,34	20,81	24,97	29,96
2	Persentase Pendidik PAUD NON Formal Berkualifikasi Akademik S.1/D.4	8,50	10,20	12,23	14,68	17,62
3	Persentase Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik	6,83	8,20	9,84	11,80	14,17
4	Persentase Guru TK/TKLB Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
5	Persentase Tutor PAUD Nonformal Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
6	Persentase TK/TKLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	2	5	8	10	12
7	Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D.4	41,06	41,08	41,095	41,11	41,12
8	Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik	30,71	48,03	65,36	82,68	100
9	Persentase Guru SD/SDLB Mengikuti PPB	5	10	15	20	25
10	Persentase SD/SDLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	10	15	20	25	30
11	Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4	60,33	66,46	70,45	74,67	80,65
12	Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat Pendidik	79,104	84,328	89,552	94,776	100
13	Persentase Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB	10	15	20	25	30
14	Persentase Tutor Paket B Mengikuti PPB	10	15	20	25	30
15	Persentase SMP/SMPLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	25	35	50	75	85
16	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S.1/D-4	86,16	89,62	93,08	96,54	100
17	Persentase Guru SMA/SMLB Bersertifikat Pendidik	39,65	54,74	69,82	84,91	100
18	Persentase Guru SMA/SMLB Yang Mengikuti PPB	10	15	20	25	30

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		Realisasi		Proyeksi		
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Persentase Tutor Paket C Yang Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
20	Persentase SMA/SMLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	12,5	20	40	65	85
21	Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S.1/D4	77,824	83,368	88,912	94,456	100
22	Persentase Guru SMK Bersertifikat Pendidik	28,368	46,276	64,184	82,092	100
23	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	40	50	60	70	80
24	Persentase Guru SMK Yang Mengikuti PPB	5	10	15	20	25
25	Persentase Tutor Paket C Kejuruan Yang Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
26	Persentase SMK Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	10	10	15	25	35
27	Persentase Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
28	Persentase Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi	2	4	6	8	10
29	Persentase Pamong Belajar Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
30	Persentase Penilik Yang Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
31	Persentase Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal Yang Mengikuti Diklat Kompetensi	0	2	6	8	10
32	Persentase Pendidikan Yang Memperoleh Kesejahteraan	0	0	0	0	0
III.7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
1	Skor Lakip Disdikbud	76	77	77	78	79
2	Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Peggawainya Tidak Kurang Dari 99%	95	98	99	100	100
3	Persentase Bidang UPTD Dan Satuan Pendidikan Terkoneksi Secara Daring (Online)	25	35	50	50	75
4	Tingkat Penerapan E- Administrasi Di Lingkungan Disdik (Persen)	25	25	50	50	75
5	Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja Diterapkan Di Lingkungan Disdikbud	0	0	100	100	100
6	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disahkan Oleh Bupati Pada Bulan Pertama Setiap Tahunnya (Tanpa Blokir)	25	50	50	55	65
7	Persentase Evaluasi 8 Standar Pendidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan	20	25	30	35	40
III.8. Kebencanaan						
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30,06	48	50	60	65
2	Jumlah berkurangnya korban bencana di daerah rawan bencana, persentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi	5 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan
3	Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	20	27	30	40	50
4	Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi bencana	80	100	100	100	100



Bab X

Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penyempurnaan perencanaan pembangunan jangka menengah yang tengah dilaksanakan dalam periode rencana, namun mengalami koreksi/perbaikan terhadap beberapa substansi rencana kinerja pembangunan serta masih menggunakan visi, misi, dan program Kepala Daerah periode 2010 – 2015. Perubahan RPJMD, termasuk di dalamnya penambahan dan penyesuaian program yang sebelumnya belum direncanakan, baik berasal dari program baru yang diusung oleh SKPD/Pemerintah daerah maupun berasal dari Pusat dan Provinsi.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 282, bahwa substansi penyusunan perubahan RPJMD masih mengacu pada pasal 50 Permendagri nomor 54 tahun 2013, yang memuat:

- a. Visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. Arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Strategi pembangunan daerah;
- d. Kebijakan umum;
- e. Program SKPD;
- f. Program lintas SKPD;
- g. Program kewilayahan;
- h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karenanya, Penyusunan Perubahan RPJMD yang terurai dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar program dalam SKPD maupun antar program antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi,

dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015.

Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat hingga periode akhir tahun rencana. Optimalisasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan mutlak dilakukan, dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJM Daerah 2010-2015 dengan sebaik-baiknya;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Bupati Bandung, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Badan-Badan, Kantor- Kantor, dan Kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Bandung, masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJP Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025 dengan RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Bandung, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD berikut perubahan – perubahannya;
3. Bupati Bandung berkewajiban untuk menjabarkan serta memastikan bahwa visi, misi, dan arah kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025 ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015 termasuk perubahannya;
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD beserta perubahannya yang menjabarkan visi, misi, dan program-program Kepala Daerah.

RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Bandung dan setiap tahunnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung. Disamping itu, mengingat masa bakti Bupati/Wakil Bupati Bandung Periode 2010-2015 akan berakhir pada tahun 2015 maka untuk menyempurnakan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, maka RKPD tahun 2014 menjadi bagian dari target pelaksanaan tahun ke-empat periode Bupati/wk. Bupati. Terkait dengan itu semua perlu untuk menetapkan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Program Transisi

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Bandung untuk masa bakti 2010-2015, maka dapat dimuat rancangan program indikatif satu tahun kedepan bila diperlukan pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program pembangunan, baik berupa dana maupun tahun anggaran yang dibatasi hanya selama 1 (satu) tahun. Beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, mengurangi jumlah pengangguran dan pembangunan infrastruktur utama sudah barang tentu membutuhkan dukungan dana besar sehingga harus dilakukan secara bertahap, selain itu pendekatan pembangunan yang berubah dari top-down kependekatan partisipatif, berdampak pada proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Sehubungan dengan hal tersebut program-program yang termasuk dalam program transisi memerlukan kajian yang lebih mendalam menyangkut sinergi dan dampak yang ditimbulkan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program antar SKPD diperlukan koordinasi agar terciptanya efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan, maupun waktu pelaksanaan program-program tersebut. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program, selain itu kaidah pelaksanaan dapat diterapkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Bandung dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Bandung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung agar melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat, berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.
5. Penjabaran lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten.
7. RKPD Kabupaten Bandung harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Bandung merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
10. Agar RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 ini, disamping harus pula ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Instansi terkait maupun masyarakat luas.
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD.

- b. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010 – 2015 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bandung, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan ke DPRD Kabupaten Bandung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

- **Pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD**

Dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan renstra SKPD artinya bahwa aktualisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, perlu dijabarkan oleh SKPD dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Untuk menciptakan kinerja yang baik efektif dan efisien maka semua SKPD diharapkan kerjasama dengan satuan kerja lain dengan mengacu pada RPJMD secara berkelanjutan dengan tujuan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik seperti diharapkan.

- **Pedoman dalam Penyusunan RKP**

Seperti telah dijelaskan bahwa RPJMD juga sebagai pedoman dalam penyusunan program-program dan kegiatan tahunan, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang diusulkan di RKP harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD.

